



RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR **26** TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BP4D adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan perencanaan pembangunan untuk Tahun 2022 yang selanjutnya merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2022.

- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kaidah-kaidah Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;
- b. Kepala BP4D menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah;
- d. Kepala BP4D melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Juli 2021



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI E



Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
Nomor : 26 Tahun 2021
Tanggal : 5 Juli 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1- 1
1.2 Dasar Hukum	1 - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1 - 6
1.4 Maksud dan Tujuan	1 - 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	1 - 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah	2 - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	2 - 1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 7
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat	2 - 8
2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat	2 - 10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 - 10
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2 - 10
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	2 - 21
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya	2 - 34
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	2 - 34
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	2 - 42
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	2 - 86
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	2 - 102
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	2 - 102
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2 - 107



2.1.4.3 Iklim Berinvestasi	2 - 112
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia	2 - 113
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD	2 - 115
2.2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019	2 - 115
2.2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020	2 - 123
2.2.3 Realisasi RPJMD 2016-2021 sampai Tahun 2020	2 - 131
2.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal	2 - 140
2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	2 - 147
2.5 Pokok-pokok Pikiran DPRD	2 - 149
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah	2 - 166
2.6.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	2 - 166
2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ...	2 - 176
2.7 Inovasi Daerah	2 - 179

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3 - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020	3 - 2
3.1.2 Kebijakan Ekonomi Nasional	3 - 4
3.1.3 Tantangan dan Prospek Prekonomian Provinsi Tahun 2021 dan 2022	3 - 6
3.1.4 Tantangan dan Prospek Prekonomian Kabupaten Tahun 2021 dan 2022	3 - 7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3 - 10
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	3 - 11
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3 - 14
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	3 - 14
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	3 - 19
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3 - 21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	4 - 1
4.2 Tema Pembangunan Daerah	4 - 2



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional	4 - 64
4.4 Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 - 65
4.5 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	4 - 65
4.6 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4 - 70

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan	5 - 1
5.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 - 1
5.1.2 Program Urusan Wajib.....	5 - 2
5.1.3 Program Urusan Pilihan.....	5 - 7
5.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 - 8
5.1.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5 - 9
5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	5 - 10
5.1.7 Unsur Pemerintahan Umum	5 - 10
5.1.8 Unsur Kewilayahan	5 - 10
5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan	5 - 11

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 6 - 1

BAB VII PENUTUP 7 - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020	2 - 10
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)	2 - 12
Tabel 2.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (persentase)	2 - 15
Tabel 2.5	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 19
Tabel 2.6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2017 – 2020.....	2 - 20
Tabel 2.7	Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat	2 - 27
Tabel 2.8	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 28
Tabel 2.9	Persentase Prevalensi Status Gizi (PB/U) Balita menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2018 - 2019	2 - 33
Tabel 2.10	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 35
Tabel 2.11	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 35
Tabel 2.12	Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020.....	2 - 37
Tabel 2.13	Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2020.....	2 - 40
Tabel 2.14	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 41
Tabel 2.15	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 42
Tabel 2.16	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 43
Tabel 2.17	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 45
Tabel 2.18	Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 47
Tabel 2.19	Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 48
Tabel 2.20	Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2019	2 - 49



Tabel 2.21	Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat	2 - 51
Tabel 2.22	Persentasi Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 52
Tabel 2.23	Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat	2 - 52
Tabel 2.24	Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 53
Tabel 2.25	Jumlah Petugas Satpol PP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 56
Tabel 2.26	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020	2 - 58
Tabel 2.27	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020.....	2 - 59
Tabel 2.28	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 60
Tabel 2.29	Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 62
Tabel 2.30	Rekapitusi Bidang Tanah Bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat	2 - 65
Tabel 2.31	Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.....	2 - 67
Tabel 2.32	Persentase Kepemilikan Administrasi kependudukan	2 - 68
Tabel 2.33	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020	2 - 69
Tabel 2.34	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bangka Barat	2 - 71
Tabel 2.35	Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 72
Tabel 2.36	Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 73
Tabel 2.37	Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 73
Tabel 2.38	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 74
Tabel 2.39	Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2020	2 - 80
Tabel 2.40	Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017-2020	2 - 83
Tabel 2.41	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 86
Tabel 2.42	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton)	2 - 87
Tabel 2.43	Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015- 2020 (rupiah).....	2 - 87
Tabel 2.44	Jumlah Kapal Penangkapan Ikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 88
Tabel 2.45	Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat	2 - 88
Tabel 2.46	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 90
Tabel 2.47	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 90
Tabel 2.48	Usaha Jasa Makanan/Minuman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 91



Tabel 2.49	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 91
Tabel 2.50	Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 94
Tabel 2.51	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 96
Tabel 2.52	Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 96
Tabel 2.53	Jumlah Industri Sedang dan Besar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 101
Tabel 2.54	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (Persentase)	2 - 104
Tabel 2.55	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 107
Tabel 2.56	Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 109
Tabel 2.57	Jumlah Pembangkit dan Daya Terpasang pada PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020.....	2 - 111
Tabel 2.58	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2 - 113
Tabel 2.59	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 115
Tabel 2.60	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan antara Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan Perubahan APBD Tahun 2019	2 - 116
Tabel 2.61	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019	2 - 119
Tabel 2.62	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020	2 - 123
Tabel 2.63	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 127
Tabel 2.64	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020	2 - 133
Tabel 2.65	Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 135
Tabel 2.66	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020	2 - 141
Tabel 2.67	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target Nasional	2 - 141
Tabel 2.68	Hasil Reses DPRD dalam SIPD dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	2 - 149
Tabel 2.69	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019	2 - 167
Tabel 2.70	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020	2 - 169
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD	2 - 170



Tabel 2.72	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD (Kinerja) Kabupaten Bangka Barat Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021	2 - 182
Tabel 2.73	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD (Anggaran) Kabupaten Bangka Barat Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021	2 - 191
Tabel 2.74	Pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2020	2 - 201
Tabel 3.1	Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - Tahun 2022	3 - 9
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 s.d. Tahun 2022	3 - 12
Tabel 3.3	Target PAD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022	3 - 15
Tabel 3.4	Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022	3 - 18
Tabel 3.5	Rincian Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022	3 - 20
Tabel 3.6	Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 – 2022	3 - 22
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025	4 - 1
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disandingkan dengan Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional	4 - 2
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	4 - 4
Tabel 4.4	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi dan Nasional	4 - 13
Tabel 4.5	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	4 - 15
Tabel 4.6	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	4 - 26
Tabel 4.7	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan dan Sasaran Daerah	4 - 61
Tabel 4.8	Sasaran, Indikator serta Target Indikator Daerah Tahun 2022	4 - 62
Tabel 4.9	Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	4 - 63
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2022	4 - 64
Tabel 4.11	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	4 - 67
Tabel 4.12	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4 - 71
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022	4 - 73
Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 Mendukung Prioritas Nasional	4 - 83



Tabel 4.15	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 Mendukung Prioritas Provinsi	4 - 97
Tabel 5.1	Pagu Indikatif berdasarkan Urusan Tahun 2022	5 - 12
Tabel 5.2	Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	5 - 14
Tabel 5.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	5 - 15
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	6 - 1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	6 - 7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Dokumen RKPD	1 - 2
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 - 7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Gambar 2.2	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 5
Gambar 2.3	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 6
Gambar 2.4	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat	2 - 8
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	2 - 9
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 12
Gambar 2.7	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	2 - 14
Gambar 2.8	Jumlah dan Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 17
Gambar 2.9	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (juta rupiah)	2 - 18
Gambar 2.10	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 19
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 21
Gambar 2.12	Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 22
Gambar 2.13	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016- 2020	2 - 23
Gambar 2.14	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016- 2020	2 - 24
Gambar 2.15	Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 25
Gambar 2.16	Angka HLS Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	2 - 26
Gambar 2.17	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015–2020.....	2 - 26
Gambar 2.18	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	2 - 27
Gambar 2.19	Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 29



Gambar 2.20	Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 30
Gambar 2.21	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 31
Gambar 2.22	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	2 - 32
Gambar 2.23	Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020	2 - 32
Gambar 2.24	Jumlah Sanggar Kesenian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020.....	2 - 34
Gambar 2.25	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020	2 - 36
Gambar 2.26	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020	2 - 36
Gambar 2.27	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020	2 - 37
Gambar 2.28	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 37
Gambar 2.29	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 39
Gambar 2.30	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)	2 - 44
Gambar 2.31	Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 45
Gambar 2.32	Perkembangan Luasan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat	2 - 50
Gambar 2.33	Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	2 - 54
Gambar 2.34	Kondisi Pantai Tanjung Ular	2 - 55
Gambar 2.35	Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 56
Gambar 2.36	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 57
Gambar 2.37	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 58
Gambar 2.38	Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020.....	2 - 63
Gambar 2.39	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016- 2020	2 - 64
Gambar 2.40	Penyelesaian Kasus Tanah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2018	2 - 66
Gambar 2.41	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 67
Gambar 2.42	Jumlah Posyandu dan PKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 70



Gambar 2.43 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/ Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020	2 - 76
Gambar 2.44 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 76
Gambar 2.45 Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 77
Gambar 2.46 Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 78
Gambar 2.47 Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 78
Gambar 2.48 Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 79
Gambar 2.49 Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020	2 - 80
Gambar 2.50 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 84
Gambar 2.51 Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015– 2020	2 - 84
Gambar 2.52 Persentase Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang telah Mengelola Arsip secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 86
Gambar 2.53 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 89
Gambar 2.54 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	2 - 93
Gambar 2.55 Jumlah Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 93
Gambar 2.56 Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton)	2 - 95
Gambar 2.57 Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020	2 - 98
Gambar 2.58 Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per kecamatan Tahun 2018-2020	2 - 99
Gambar 2.59 Jumlah dan Pertumbuhan IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 100
Gambar 2.60 Jumlah Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 100
Gambar 2.61 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (persen)	2 - 102
Gambar 2.62 Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)	2 - 102



Gambar 2.63 Rata-rata Komsumsi Per Kapita Per Tahun (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Komsumsi Per Kapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019	2 - 104
Gambar 2.64 Produktifitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	2 - 105
Gambar 2.65 Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019	2 - 106
Gambar 2.66 Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019	2 - 106
Gambar 2.67 Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2018 (juta rupiah)	2 - 109
Gambar 2.68 Nilai Subsektor Makan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 110
Gambar 2.69 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	2 - 113
Gambar 2.70 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2019	2 - 117
Gambar 2.71 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 dan 2019	2 - 118
Gambar 2.72 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	2 - 125
Gambar 2.73 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2020	2 - 125
Gambar 2.74 Angka HLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	2 - 172
Gambar 2.75 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	2 - 173
Gambar 2.76 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	2 - 174
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017- 2020	3 - 4
Gambar 3.2 Data Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022	3 - 20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan suatu sistem pemerintahan dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil serta berkelanjutan. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RRKPD disusun untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun untuk penyusunan RKPD tahun 2022, penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sehingga acuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Transisi dan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 tahap IV. RKPD Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang , Pendekatan perencanaan pembangunan untuk menyusun dokumen RPKD Kabupaten Bangka Barat terbagi menjadi 2 yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan Pendekatan Pembangunan yang berorientasi pada substansi. Pendekatan Pembangunan yang berorientasi pada proses terdiri dari pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas – bawah dan bawah – atas. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendekatan atas – bawah dan bawah – atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

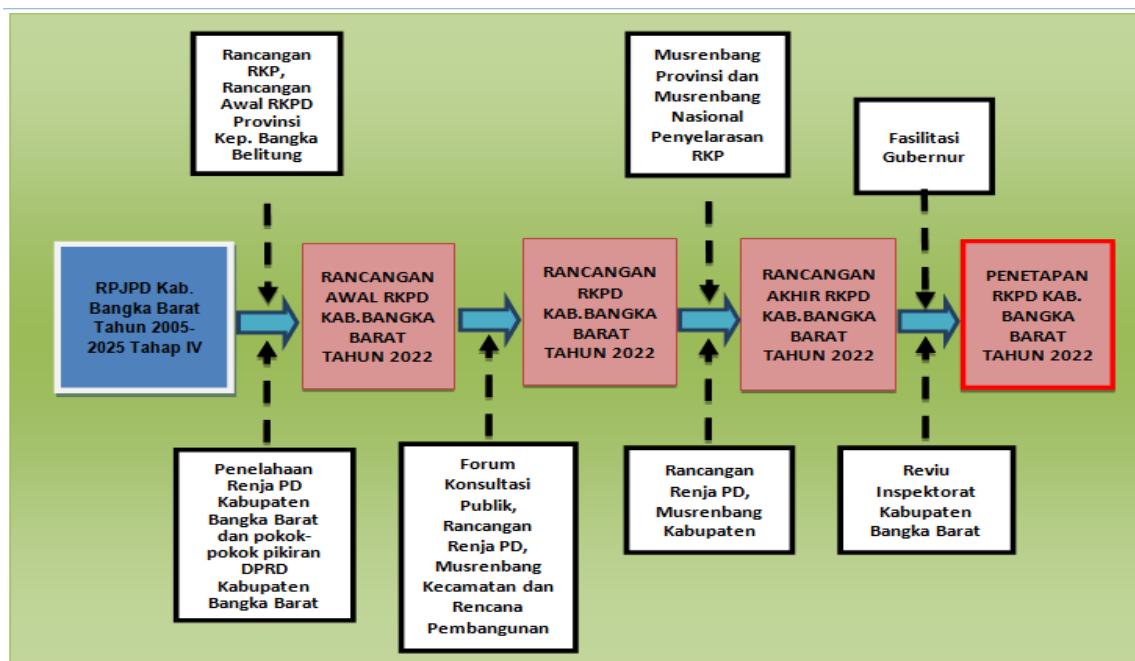
Pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi terdiri dari pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor



potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah serta pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 disusun berdasarkan tahapan dan proses dimulai dari :

1. Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 Tahap IV, Rancangan Awal RKP tahun 2022, Rancangan awal RKPD Provinsi tahun 2022, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2020, Forum Konsultasi Publik dan hasil telaahan Renja Perangkat Daerah serta pokok-pokok fikiran DPRD;
2. Rancangan RKPD merupakan tahapan Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2022 melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta penyempurnaan Rancangan Renja PD Tahun 2022 melalui Forum Perangkat Daerah dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD; dan
3. Rancangan Akhir RKPD merupakan tahapan proses penyempurnaan dokumen RKPD dan sekaligus bagian dari penyelarasan antara Daerah dan Pusat melalui kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, Musrenbang RKPD Tingkat Provinsi, serta Musrenbang Nasional. Kemudian Rancangan Akhir RKPD dibahas kembali ke bersama kepala perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris daerah, dan selanjutnya dilakukan review oleh Inspektorat daerah dan terakhir dilakukan fasilitasi oleh Provinsi sebelum ditetapkannya menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD



Secara detail, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Persiapan Penyusunan;
- B. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
- C. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- D. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan;
- E. Penyusunan Rancangan RKPD;
- F. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten;
- G. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; serta
- H. Penetapan RKPD.

Agar penyusunan RKPD Tahun 2022 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang dilakukan penelaahan berbagai sektor dan dokumen yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- B. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- C. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- D. Penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- E. Penelaahan capaian kinerja tahun sebelumnya;
- F. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- G. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- H. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- I. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- J. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan program strategis provinsi;
- K. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- L. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; serta
- M. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan

Penyesuaian dan penyeragaman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen RKPD Tahun 2022 telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.



1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



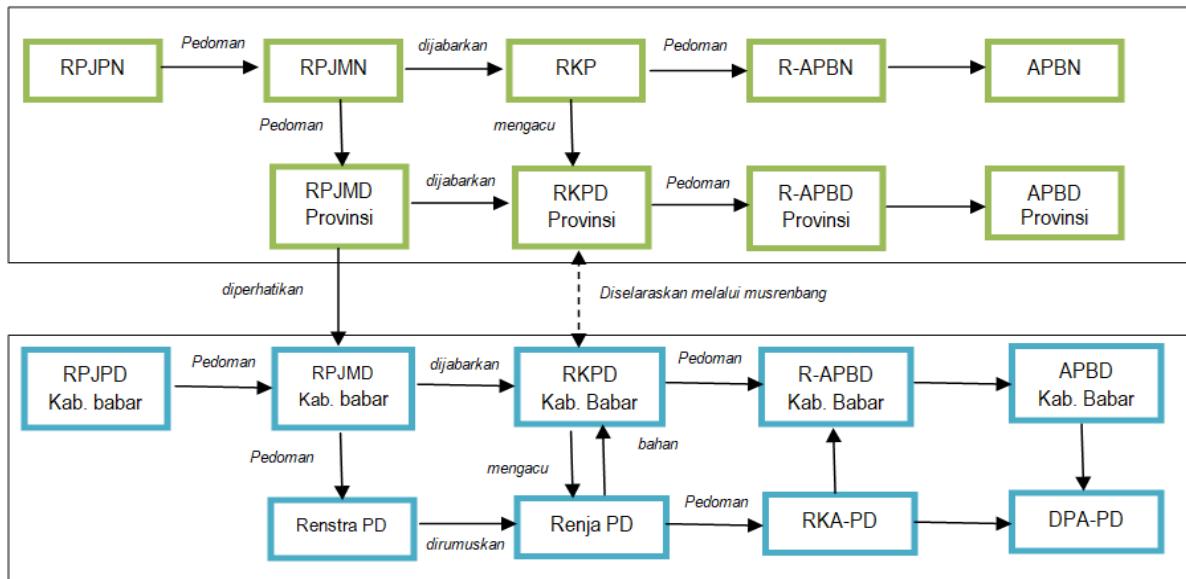
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Dokumen RKPD akan menjadi Acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dilakukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan dan penganggaran. RKPD juga sebagai jembatan perencanaan pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara hingga menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dimaksudkan dijadikan landasan awal dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyempurnaan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022, serta acuan untuk menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antardokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berisikan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis.



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berisikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berisi uraian singkat terkait capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

2.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berisi uraian singkat terkait capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

2.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berisi hasil telaah usulan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat.

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.6.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah



Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.7. Inovasi Daerah

Mengemukakan tentang inovasi daerah Kabupaten Bangka Barat dalam percepatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025



4.2. Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Menjelaskan tentang penyelarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional Tahun 2022

4.4. Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menjelaskan tentang program pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

Berisi uraian rencana program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan urusan pemerintahan.

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Berisi uraian pagu indikatif pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari RKPD Kabupaten Bangka Barat di tahun perencanaan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Rencana pembangunan suatu daerah disusun berdasarkan pertimbangan karakteristik serta kondisi wilayah supaya pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pada bagian ini dijabarkan secara menyeluruh gambaran umum kondisi Kabupaten Bangka Barat yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik meliputi urusan wajib maupun pilihan, serta dari aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat

A. Luas dan Batas

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 memiliki luas wilayah 284.886,05 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada $105^{\circ} 00' - 106^{\circ} 00'$ Bujur Timur dan $01^{\circ} 00' - 02^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Bangka.



Sumber: RTRW Kab. Bangka Barat, Tahun 2014-2034

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Bangka, yang merupakan kabupaten induknya pada era sebelum pemekaran. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 60 desa, dengan uraian per kecamatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.



Kecamatan Simpangteritip memiliki wilayah terluas yaitu 27,54 persen dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Parittiga memiliki wilayah terkecil yaitu sebesar 11,47 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara umum Kabupaten Bangka Barat tidak termasuk pada kategori daerah pedalaman, dan tidak ada wilayah di Kabupaten Bangka Barat yang letaknya terisolir atau terpencil yang sulit untuk diakses. Kabupaten Bangka Barat memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha meskipun sampai dengan saat ini belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

B. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi topografi Kabupaten Bangka Barat dilihat berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Kondisi ketinggian Kabupaten Bangka Barat mulai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai dengan 425 mdpl. Ketinggian 25 mdpl tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan ketinggian 425 mdpl hanya terletak di Kecamatan Muntok, tepatnya di Bukit Menumbung atau lebih dikenal dengan sebutan Gunung Menumbung.

Terkait struktur dan karakteristik geologi, tanah di wilayah Kabupaten Bangka Barat mempunyai pH rata-rata dibawah 5 yang mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti: pasir kuarsa, kaolin, batu gunung, dan sebagainya. Jenis tanah di Kabupaten Bangka Barat meliputi: podsolk cokelat, podsolk kuning, podsolk merah kuning, asosiasi podsolk-regosol, asosiasi podsolk litosol, regosol, gleisol, alluvial, asosiasi alluvial regosol. Di samping itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi kandungan mineral yang sangat beragam pula, seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih, bauksit di Teluk Limau, dan mineral timah yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan atau dikenal juga dengan istilah daerah sabuk timah.

Terkait hidrologi, Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 96.513 Ha, dimana DAS Mancung dengan luas 59.844 Ha merupakan DAS terluas. Kabupaten Bangka Barat memiliki 470 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, kerusakan lingkungan juga terjadi pada DAS di Kabupaten Bangka Barat seperti mulai berkurangnya debit dan menurunnya kualitas air karena aktifitas masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar khususnya DAS.



Iklim di Kabupaten Bangka Barat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu iklim tropis dan basah. Iklim tropis dan iklim basah merupakan daerah dengan bulan basah selama 7-9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Berdasarkan hasil digitasi peta curah hujan Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tingkat curah hujan tertinggi sebesar 3000-3200 mm/tahun dan terendah pada kisaran antara 2500-2700 mm/tahun. Intensitas curah hujan tertinggi terletak di daerah Bakit Kecamatan Parittiga, sedangkan tingkat curah hujan terendah terletak di Kecamatan Muntok, Tempilang, dan sebagian besar Kecamatan Simpangteritip. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm-406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari.

Kabupaten Bangka Barat juga memiliki intensitas peninjaman matahari rata-rata bervariasi, yakni antara 19,0-57,3% dengan tekanan udara antara 1.008,9-1.011,1 mbs. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari yang berasal dari arah utara, arah angin bulan April berasal dari arah barat, sedangkan pada bulan berikutnya bergeser ke arah selatan, tenggara, timur, dan pada bulan November kembali ke arah barat.

Suhu udara per bulannya antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan tingkat kelembaban rata-rata 80—87%. Intensitas curah hujan di Kabupaten Bangka Barat Hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun). Adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini berpotensi meningkatkan persediaan air, baik air tanah maupun air permukaan jika lingkungan tetap terjaga dengan baik.

C. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan berada pada kawasan budidaya yang secara detail penataan ruang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Kawasan budidaya secara detail diperuntukkan untuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta untuk kawasan peruntukan lainnya.

- a. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Barat tersebar disemua Kecamatan dengan total luasan mencapai ± 77.742 Ha yang terdiri dari hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, serta hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luasan ± 2.050 Ha juga tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki kawasan peruntukan hutan rakyat yang terluas yaitu Kecamatan Simpangteritip



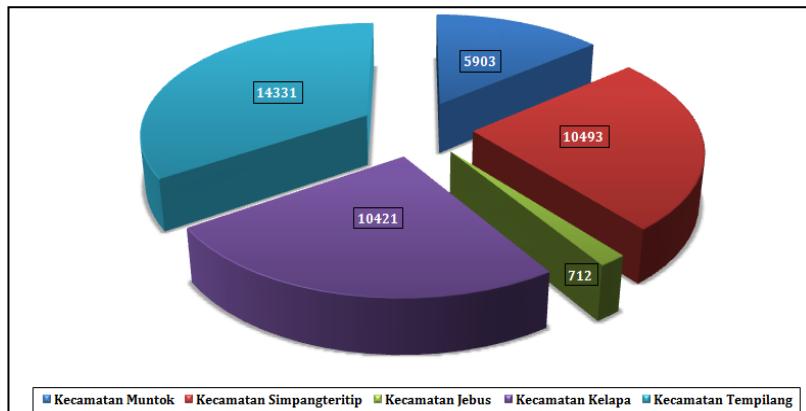
dengan luasan \pm 851 Ha, dan diikuti dengan Kecamatan Kelapa dengan luasan \pm 741 Ha.

- c. Terkait kawasan peruntukan pertanian diklasifikasi menjadi empat (4) yaitu untuk peruntukan pertanian tanaman pangan, peruntukan pertanian hortikultur, peruntukan peternakan serta peruntukan perkebunan.

Untuk Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mempunyai luasan \pm 15.812 Ha, akan tetapi sebagian besar kawasan tersebut (\pm 11.099) berada di kawasan hutan. Untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultur mempunyai luasan \pm 1.598 Ha. Untuk kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus dengan luasan \pm 72 Ha.

Terkait kawasan peruntukan perkebunan dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu kawasan peruntukan perkebunan besar serta kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Luasan kawasan peruntukan perkebunan \pm 121.645 ha dipilah menjadi \pm 41.860 Ha untuk peruntukan perkebunan besar dan \pm 79.785 Ha untuk peruntukan perkebunan rakyat.

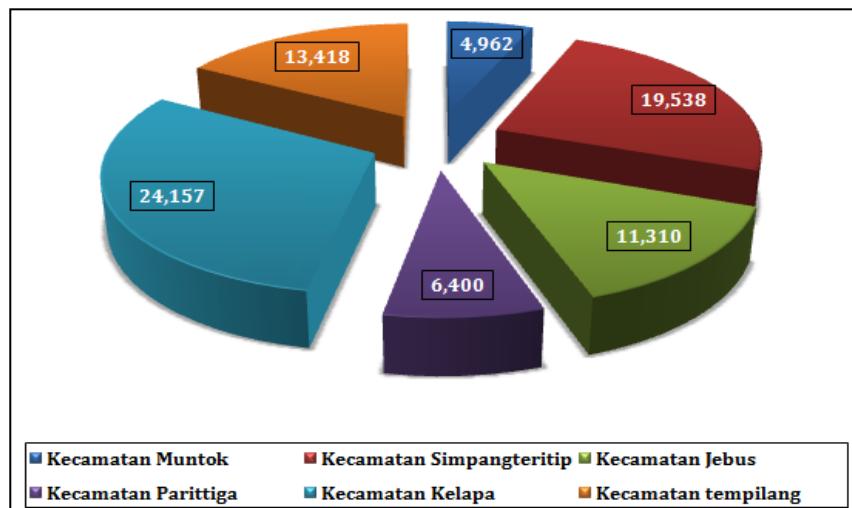
Kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Parittiga. Secara detail terkait luasan per kecamatan terkait kawasan peruntukan perkebunan besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

Gambar 2.2 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar
Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua kecamatan. Dari luasan perkebunan rakyat sebesar \pm 79.785 Ha, terdapat \pm 166 Ha berada di kawasan hutan produksi. Secara detail luasan per kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

Gambar 2.3 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat
Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)

- d. Kawasan Peruntukan Perikanan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan (air tawar dan air payau) serta peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan saat ini telah didukung dengan adanya pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Muntok, serta didukung oleh balai benih ikan lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyak kawasan peruntukan pertambangan yang belum dikelola dan terdapat juga ruang pasca tambang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan sebagai kegiatan pembudidayaan kawasan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Muntok yang dibagi menjadi dua kawasan industri yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Tanjung ular dengan luas \pm 1.275 Ha serta kawasan industri di sekitar tanjung kalian dengan luas \pm 139 Ha.
- g. Kawasan peruntukan pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) satuan kawasan wisata (SKW) yaitu SKW I yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip, SKW II yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, serta SKW III yang terdapat di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang.
- h. Kawasan Peruntukan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan. Luasan Kawasan Perkotaan yang ada yaitu \pm 9.331 Ha serta luasan Kawasan Permukiman Perdesaan yang ada yaitu \pm 11.987 Ha.



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi yang strategis sebagai pintu masuk regional sumatera yang menggunakan jalur laut. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hirarki perkotaan antara lain Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Pemerintah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat meliputi :

a. Kawasan Strategis Provinsi :

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kecamatan Muntok).
2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
3. Kepentingan Fungsi dan daya Dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.

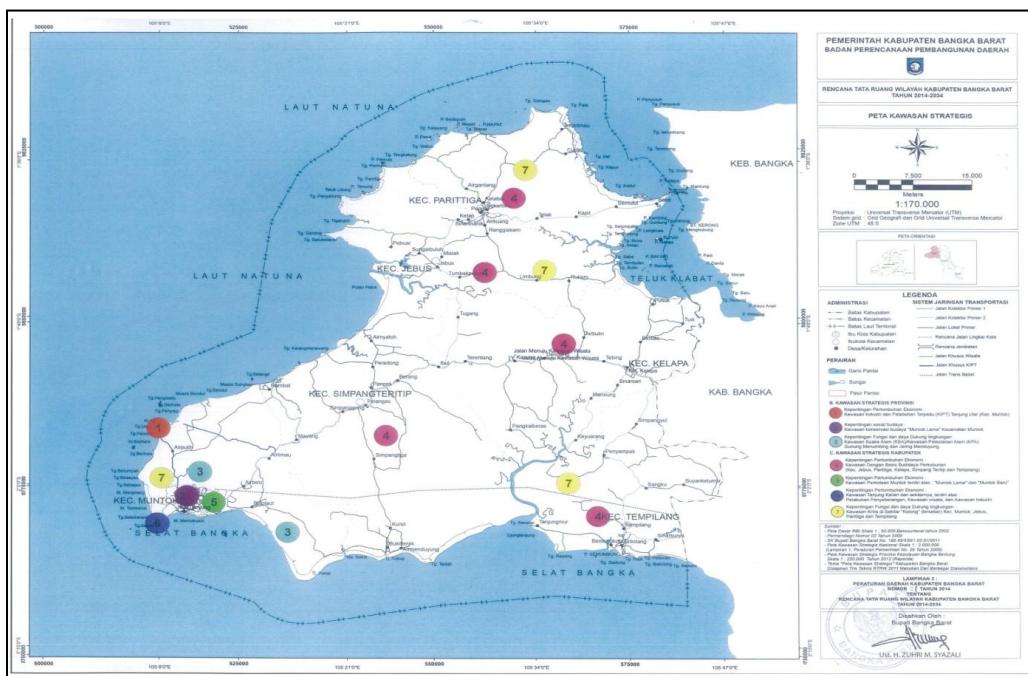
b. Kawasan strategis Kabupaten:

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
 - Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang.
 - Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas; "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok.
 - Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.

2. Kepentingan sosial dan budaya

Kawasan strategis yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata dan ilmu pengetahuan.

3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Kritis di sekitar "Kolong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

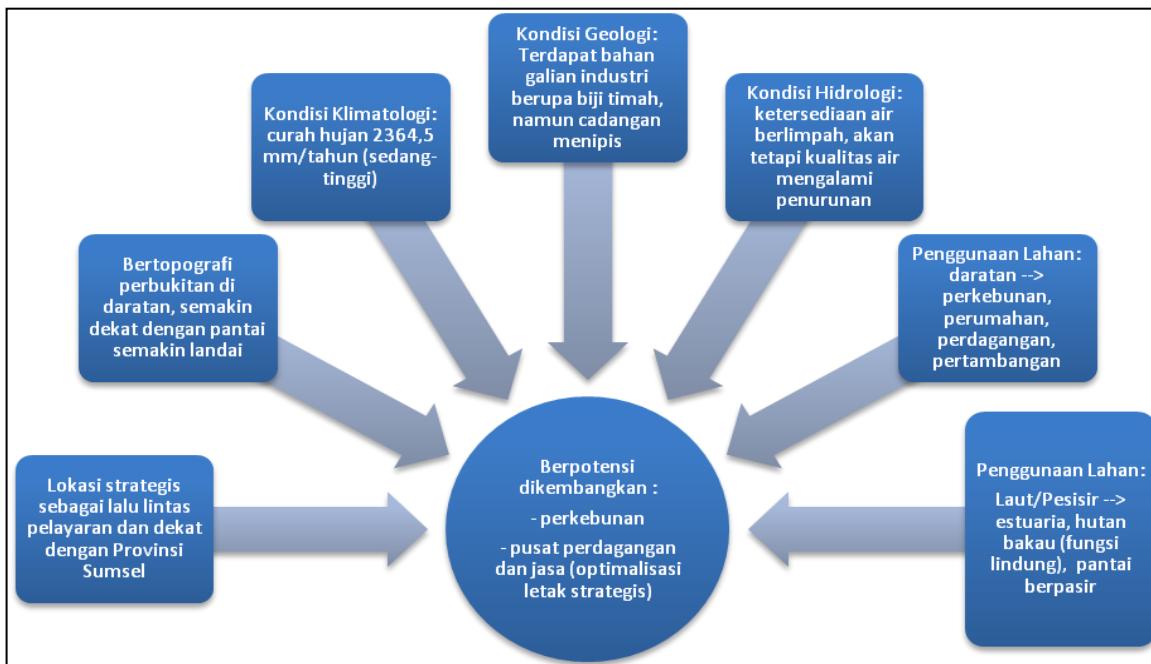
Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat adalah di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok meliputi Kampung Tanjung, Kampung Ulu, dan Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Sungai Daeng, Kampung Culong, Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput, dan Desa Belo Laut. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi antara lain adalah:

- Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
- Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga;
- Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
- Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang;
- Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang;
- Dusun Pala Kecamatan Parittiga;
- Desa Blembang Kecamatan Parittiga;
- Teluk Rubiah Kecamatan Muntok;



- Batu Rakit Kecamatan Muntok;
- Muntok Asin Kecamatan Muntok; dan
- Tungau Kecamatan Simpangteritip.

Dari gambaran kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan kondisi wilayah rawan bencana, dapat tergambar keterhubungan ketiga kondisi tersebut sebagai berikut:



Sumber : RPJPD Kab. Bangka Barat Tahun 2005-2025

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan kondisi geografis mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan) dan sektor perdagangan dan jasa. Perkebunan cenderung dapat dilakukan dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan tanah yang memiliki tingkat kesuburan "sedang". Sedangkan perdagangan dan jasa, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan letak Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut yang melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, keindahan ekosistem pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai turunan sektor perdagangan dan jasa.



2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 sebanyak 204.527 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 53.008 jiwa atau 25,92 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.531 jiwa atau 11,02 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdiri dari 105.382 jiwa laki-laki (51,52 persen) dan 99.145 jiwa perempuan (48,48 persen) meningkat dari Tahun 2019 yang terdiri dari 101.883 jiwa laki-laki (51,43 persen) dan 96.205 jiwa perempuan (48,57 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1.	Muntok	26.322	25.431	51.753	26.936	26.072	53.008
2.	Simpangteritip	14.978	14.342	29.320	15.692	14.966	30.658
3.	Jebus	11.250	10.540	21.790	11.638	10.893	22.531
4.	Kelapa	17.614	16.236	33.850	18.174	16.649	34.823
5.	Tempilang	14.115	13.138	27.253	14.715	13.531	28.246
6.	Parittiga	17.604	16.518	34.122	18.227	17.034	35.261
	TOTAL	101.883	96.205	198.088	105.382	99.145	204.527

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2021.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dapat ditinjau melalui empat aspek analisis, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) PDRB Per Kapita; (3) Angka Kemiskinan; dan (4) Angka Kriminalitas. Selanjutnya, melalui analisis empat aspek ini diharapkan mampu memproyeksikan rencana pembangunan jangka menengah dalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat

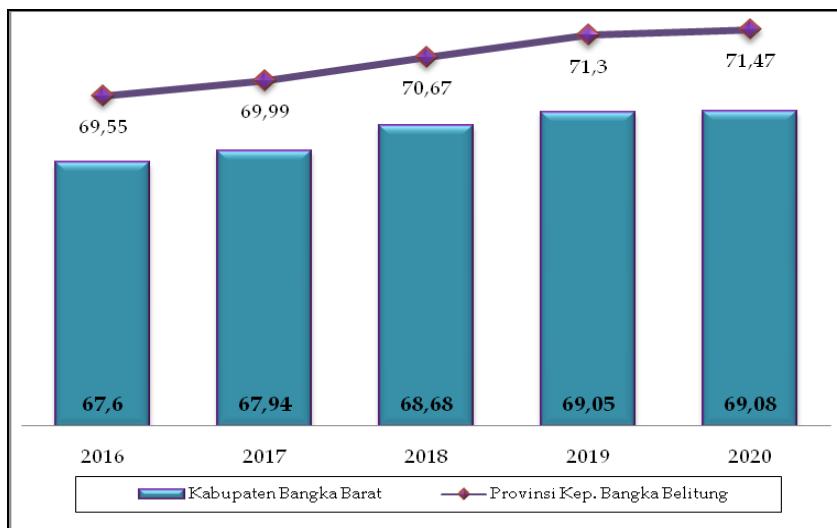


menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika dilihat dari perkembangan IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara nasional mengalami peningkatan. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 disinyalir berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan manusia tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020.

Meskipun terjadi peningkatan, namun jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka IPM Kabupaten Bangka Barat tergolong masih rendah bahkan selama lima tahun terakhir selalu menduduki peringkat ke 6 atau terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 71,47 dan IPM Nasional mencapai 71,94, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,39 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,86 poin dari IPM Nasional.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merumuskan strategi dan program yang dapat meningkatkan kinerja khususnya pada 3 (tiga) dimensi dasar IPM, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2021.

Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018†	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,18	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	-13,63
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	6,54	3,34	-13,37
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	2,80	3,70	-0,65



Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	10,51	12,55	24,49
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menurun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai Rp 10,30 triliun, turun dibandingkan tahun 2019 yang bernilai sebesar Rp 10,89 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -5,43 persen.

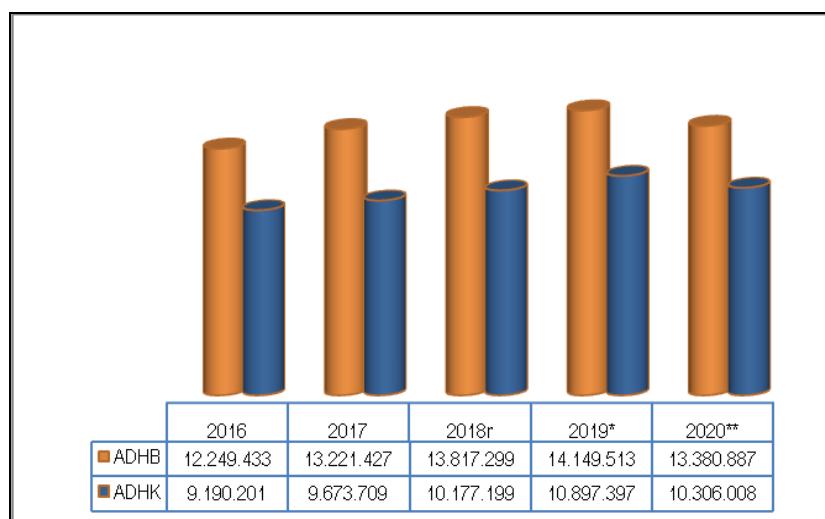
Menurut lapangan usaha, pertumbuhan terbesar pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 19,30 persen, selanjutnya Informasi dan Komunikasi sebesar 18,44 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,50 persen dan Real Estate sebesar 4,91 persen. Sektor yang mengalami penurunan signifikan di era pandemi Covid-19 yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan sebesar 13,63 persen. Selanjutnya, industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi mengalami penurunan sebesar 7,18 persen. Namun yang menarik bahwa sektor pertanian terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas masyarakat disektor pertanian selama masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki ketahanan yang cukup baik dalam melewati krisis kesehatan yang terjadi di dunia.



Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi menurun secara agregat. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai -5.43 persen. Adapun beberapa sektor yang mengalami penurunan diantaranya adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa lainnya.

c. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bangka Barat

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun mengalami penurunan di sebagian sektor pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh pada tahun 2020 atas dasar harga konstan (ADHK) Rp10.306.008 juta. Demikian juga dengan PDRB yang diperoleh pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) Rp13.380.887 juta. Perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mengalami pukulan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19 dengan tingkat penurunan PDRB sebesar 5,43 persen. Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan pada sebagian besar sektor ekonomi unggulannya, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar serta eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, maupun sektor lainnya.



Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.7 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)**



d. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.4 Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17	14,11	12,06	11,57	13,30
B	Pertambangan dan Penggalian	10,92	10,71	9,48	8,32	7,52
C	Industri Pengolahan	41,94	42,20	44,03	45,35	42,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,29	6,66	7,22	7,51	7,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	14,00	14,55	14,07	14,00
H	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,92	0,96	0,99	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	0,96	0,99	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	1,20	1,26	1,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,40	0,33	0,37	0,48
L	Real Estate	2,02	2,01	2,09	2,09	2,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	4,45	4,52	4,73	5,19
P	Jasa Pendidikan	1,75	1,79	1,82	1,91	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	0,80	0,85	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Pada tahun 2016-2020, kategori industri pengolahan menjadi kontributor terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat. Dalam kurun waktu 2016-2020



perlahan mengalami peningkatan pada rentang tahun 2017-2019. Pada tahun 2019, peranannya mencapai 44,95 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Barat. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori industri pengolahan pada tahun 2019 adalah sebesar 11,97 persen. Meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,86 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 menurun menjadi 42,87 persen.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu penyedia kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan industri. Permasalahan yang terjadi pada lapangan usaha ini seperti penurunan produksi dapat memicu terjadinya lonjakan harga. Apabila lonjakan harga tersebut terjadi pada komoditas pangan seperti beras, cabai, sayuran, dan daging akan merugikan masyarakat secara luas. Di sisi yang lain, lapangan usaha ini merupakan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Penurunan produksi juga berarti penurunan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015-2016, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB menjadi penyumbang terbesar ke-2 terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat. Meskipun demikian, selama tahun 2016-2019, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,17 persen, menjadi 14,11 persen pada tahun 2017. Selanjutnya menurun di tahun 2018 sebesar 14,11 persen, dan tahun 2019 perlahan turun menjadi sebesar 11,63 persen. Sebaliknya terjadi pada tahun 2020, tercatat meningkat menjadi 13,30 persen. Pengaruh pandemi Covid-19, memang memiliki pola yang berbeda terhadap sektor ini. Pada awalnya, terjadi penurunan pertumbuhan. Namun nyatanya malah berbalik dampaknya menjadi positif. Tentunya kedepan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan harus menjadi perhatian bagi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sebab, terbukti sektor ini tumbuh positif disaat terjadinya krisis.

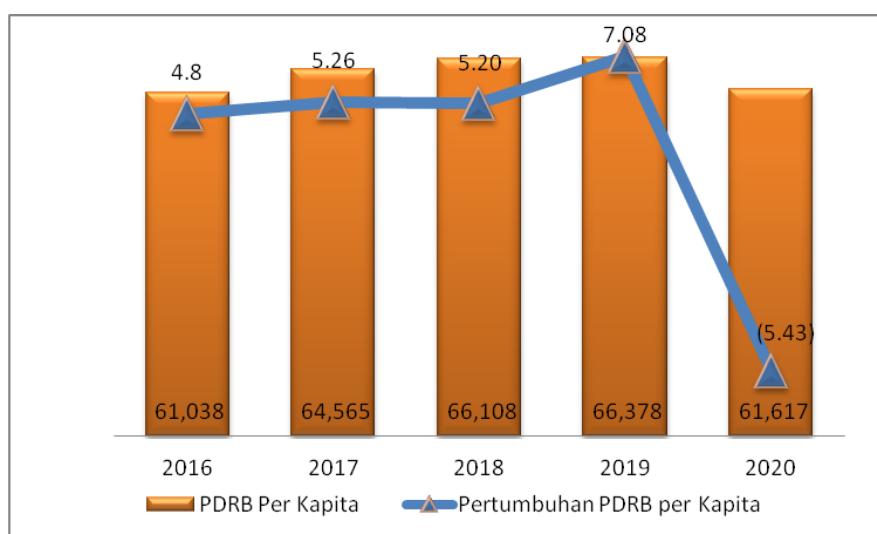
Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat. Selama tahun 2016-2020, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar ke-3. Pada tahun 2019, peranan pada kategori ini menempati peringkat kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat dengan peranan nilai tambah yang dihasilkan mencapai 14,07 persen. Namun, nilai pada tahun 2019 tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 kategori ini mencapai angka 14,55 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 14 persen. Sektor ini termasuk terdampak signifikan disebabkan penyebaran



pandemi Covid-19. Hal ini karena hadirnya kebijakan social distancing dan himbauan untuk stay at home. Pada bidang penjualan mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan yang signifikan akibat menurunnya pendapatan masyarakat yang terdampak.

e. PDRB per Kapita

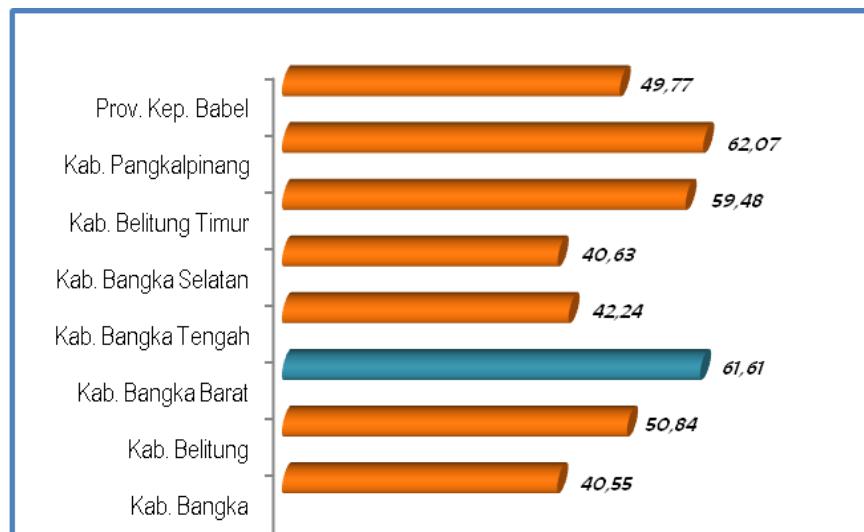
Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021.

Gambar 2.8 Jumlah dan Pertumbuhan PDRB per Kapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat (ADHB) selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita sebesar Rp61.038 juta dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020, yakni mencapai Rp61.617 juta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016- 2020), PDRB per kapita di Kabupaten Bangka Barat pertumbuhannya mengalami fluktuatif antara 4,8-7,08 persen sampai dengan tahun 2019, dan menurun di tahun 2020 menjadi -5,43 persen.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021.

Gambar 2.9 PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (juta rupiah)

Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya semakin menurun.

f. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 berjumlah 5.830 jiwa (2,70%). Jumlah tersebut mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2019 yang jumlahnya 5.650 jiwa (2,67%). Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 sebesar Rp589.894 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang besarnya Rp549.946 per kapita per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan per kapita per hari pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

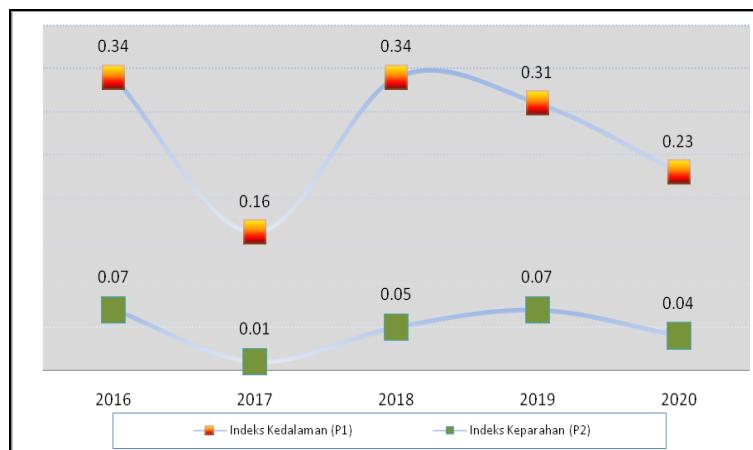


Tabel 2.5 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp)	440.850	497.567	520.642	549.496	589.894
Jumlah Penduduk Miskin	5.460	6.060	6.350	5.650	5.830
Persentase Penduduk Miskin	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	97,26	97,02	96,95	97,33	97,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Dilihat dari Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat, yaitu dari 0,31 pada tahun 2019 menjadi 0,23 pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori miskin memiliki rata-rata pengeluaran cenderung semakin mendekati dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Dengan melakukan intervensi program, maka kemiskinan tidak terlalu sulit untuk ditanggulangi. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan juga dari 0,07 pada 2019 menjadi 0,04 pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah/kecil selama setahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.10 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

g. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan



dari tahun ke tahun. TPT Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2017 – 2020

Kabupaten/kota	Percentase			
	2017	2018	2019	2020
Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42
Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82
Bangka Barat	4,23	3,11	2,85	4,12
Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59
Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42
Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93
Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,39	5,25

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

TPT Kabupaten Bangka Barat menunjukkan capaian yang bervariasi. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,23 persen, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen. Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Barat relatif lebih baik (rendah) jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran provinsi yang mencapai 5,25 persen, Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah provinsi.

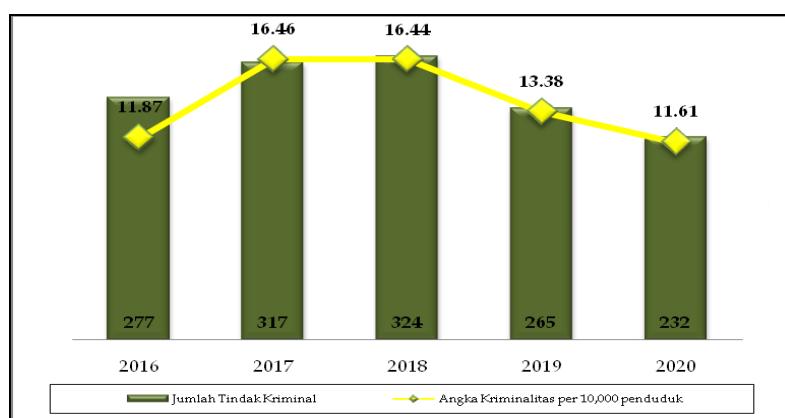
Angka pengangguran di Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 hanya mencapai angka 2,85 persen. Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kategori unggulan menurun dan berakibat terhentinya sementara bisnis, serta otomatis terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja.

Penduduk angkatan kerja Kabupaten Bangka Barat berdasarkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 103.518 jiwa dari 154.529 jiwa. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 67 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 2,85 persen. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yakni sebesar 3,11 persen. Berdasarkan data Kabupaten Bangka Barat dalam angka tahun 2020, diketahui bahwa pengangguran didominasi oleh lulusan SMA sederajat dengan kontribusi lebih dari 50 persen.



h. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun. Total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2020 di Bangka Barat memperlihatkan adanya penurunan 33 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rata-rata tindak kriminal tertinggi setiap tahun adalah pada kasus pencurian dengan pemberatan.



Sumber : Polres Kab. Bangka Barat, 2021.

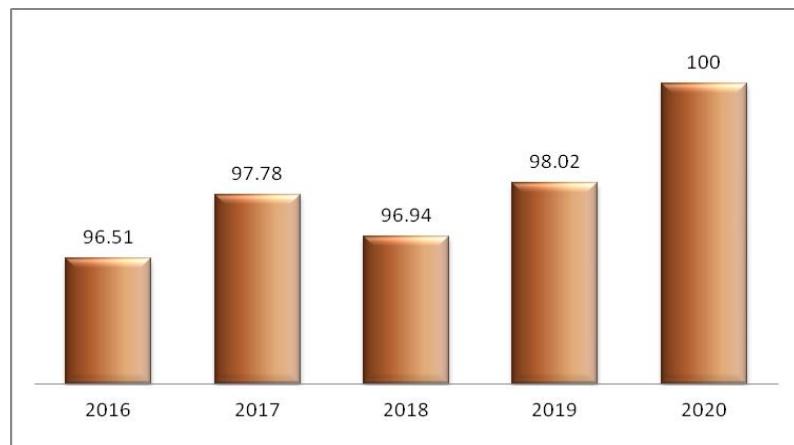
Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

I. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

Gambar 2.12 Angka Melek Huruf
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa AMH di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan, di tahun 2020 menjadi 100 persen.

b. Angka Partisipasi Pendidikan

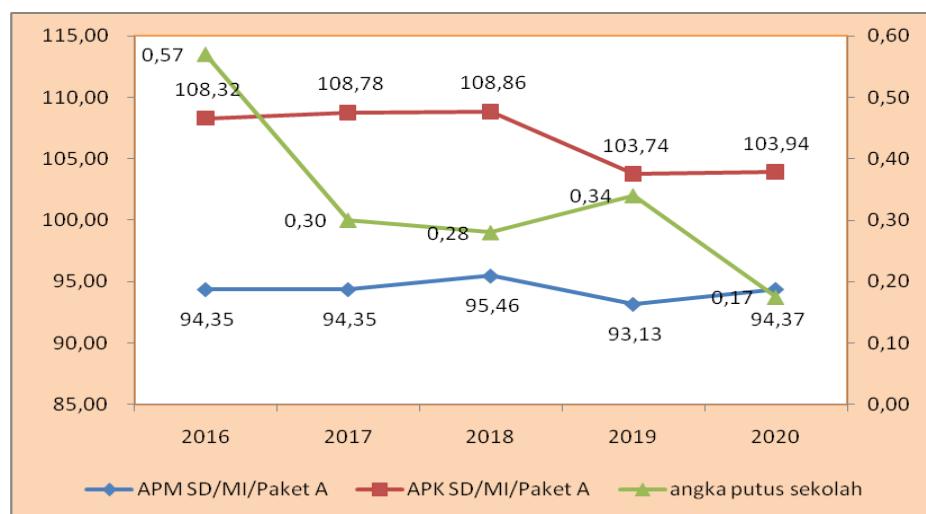
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan



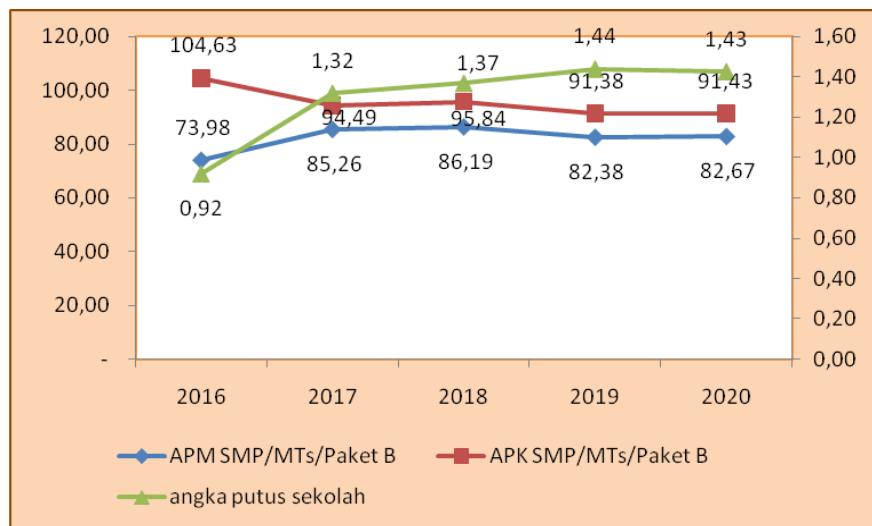
usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.13 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 melampaui angka 100% yang melewati capaian APM SD/MI/Paket A secara Nasional. Pada tahun 2020, capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat terjadi peningkatan sebesar 103,94% meskipun tidak signifikan. Terlihat adanya upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan APK SD/MI/Paket A sehingga angka putus sekolah dari 0,34% di tahun 2019 menurun menjadi 0,17%. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2020, APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat yakni 103,94% berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,43% (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2021).



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.14 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Capaian APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 bersifat fluktuasi. Pada tahun 2020, angka putus sekolah menunjukkan penurunan sehingga APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat meningkat sebesar 91,43%. Meskipun capaian di tahun 2020 tidak terlalu signifikan, angka tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,19%. Naik turunnya APK dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang tidak stabil. Angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

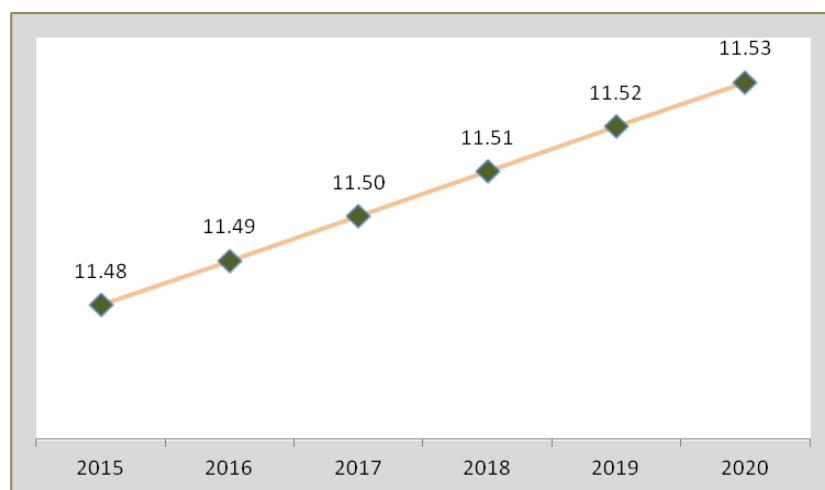
c. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

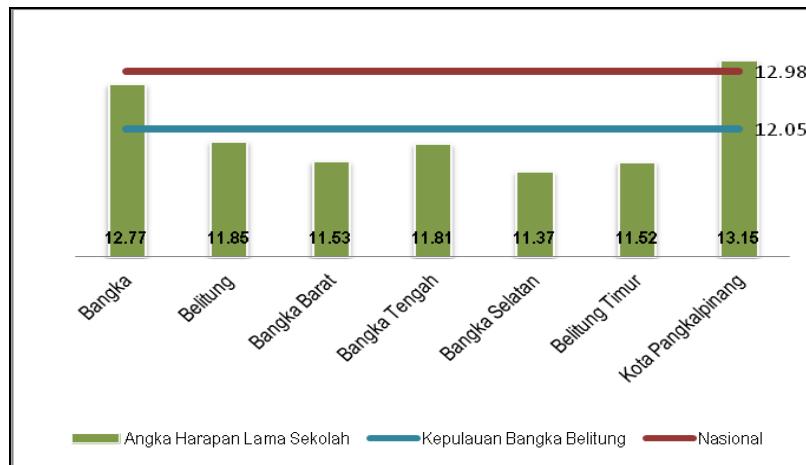
Indikator Angka HLS merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, seperti ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.15 Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,05 tahun dan dibawah capaian Nasional yang mencapai 12,98 tahun. Grafik lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



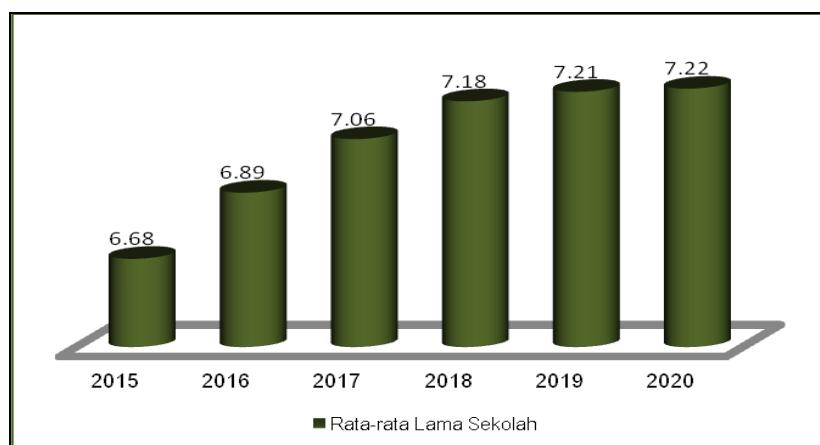
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.16 Angka HLS Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

d. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah 7,22 tahun. Angka ini berarti bahwa pada tahun tersebut rata-rata penduduk Bangka Barat yang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 7,22 tahun. Berdasarkan data 6 (enam) tahun terakhir sesuai metode penghitungan baru IPM, realisasi Angka RLS mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

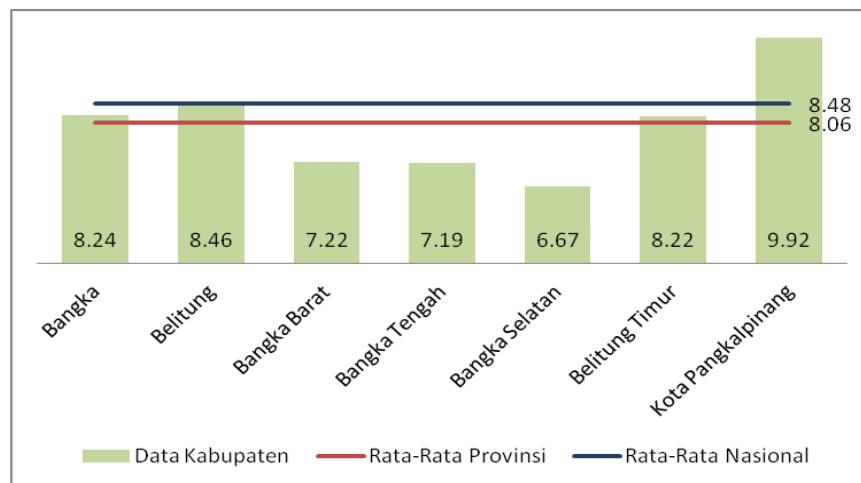


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.17 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015–2020



Sementara jika dibandingkan dengan Angka RLS dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung, pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

e. Kondisi Pendidikan Dasar

Kondisi Pendidikan Dasar menggambarkan keadaan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, kondisi ruang kelas, dan angka kelulusan. Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun Bangka Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah		Kondisi ruang kelas			Jumlah Siswa	Guru (orang)		
		N	S	B	RR	RB		Jumlah	S-1/D-IV	Tersertifikasi
1.	SD	127	7	636	310	161	24.862	1.481	1.388	535
2.	MI	2	3				900	49		
3.	SMP	27	8	298	88	27	7.965	501		184
4.	MTs	3	8				1.691	177		

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Keterangan:

- B : kondisi kelas baik
RR : kondisi kelas rusak ringan
RB : kondisi kelas rusak berat

Lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai, hanya saja kondisi ruang kelas baik di SD/MI maupun SMP/MTs masih terdapat kondisi rusak ringan dan rusak berat. Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tahun 2020 sebanyak 1.709 orang dari 2.208 orang, sedangkan guru yang bersertifikat pendidik adalah 535 orang atau 34,96% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD).



Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 184 orang atau 27,13% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah tersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat.

f. Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2020 tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi

di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

d

No.	i Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1. Sekolah Dasar/MI						
	Terakreditasi A	25	30	31	29	25
	Terakreditasi B	87	90	92	93	95
	Terakreditasi C	18	13	9	14	16
	Belum Terakreditasi	8	5	6	3	3
2. SMP/MTs						
	Terakreditasi A	19	20	20	19	19
	Terakreditasi B	16	17	18	20	20
	Terakreditasi C	2	3	4	4	4
	Belum Terakreditasi	8	6	4	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi hingga tahun 2020 sebanyak 82% dari 139 sekolah. Akreditasi terbesar di kategori Baik yaitu sebanyak 95 sekolah. Pada jenjang SMP/MTs, di tahun 2020 juga telah terakreditasi A sebanyak 19 sekolah, terakreditasi B sebanyak 20 sekolah, dan terakreditasi C sebanyak 4 sekolah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Capaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.



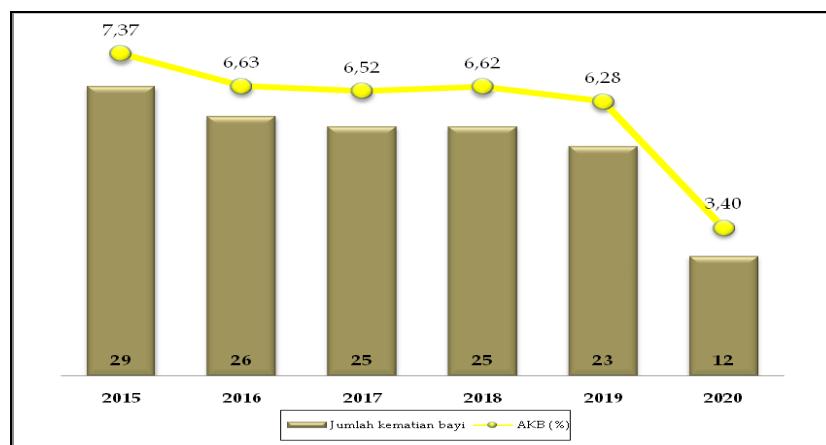
II. Kesehatan

Beberapa indikator bidang kesehatan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari sisi kesehatan belum sesuai dengan harapan. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada dapat diminimalisir dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat hubungannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.

Jumlah Kematian Penduduk usia 0-1 tahun (bayi) di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2015 jumlah bayi mati sebanyak 29 jiwa. Kondisi ini terus membaik dengan penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi sebanyak 12 jiwa dengan angka kematian bayi sebesar 3,40 persen. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

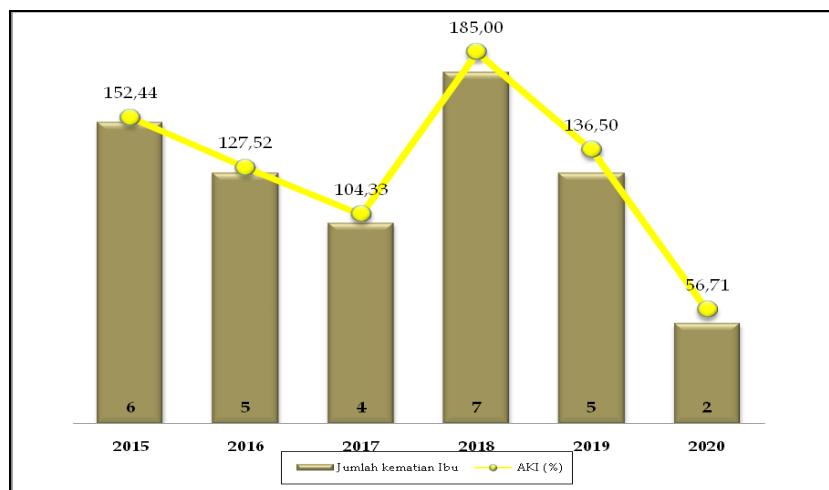
Gambar 2.19 Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020



Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan karena AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor lainnya yaitu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi sehingga berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap penyakit. Di lain sisi terdapat faktor negatif yang juga mempengaruhi AKB antara lain rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan, masa nifas, rendahnya kualitas sanitasi dasar, kondisi gizi serta penyakit-penyakit infeksi serta sarana prasarana kesehatan yang belum memadai khususnya alat kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI dihitung dari kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain. AKI merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu bangsa dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Gambar 2.20 Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Data AKI di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 yaitu 56,71 per 100.000 kelahiran hidup, dimana capaian tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan target nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup.



Sebaran kasus AKI di Kabupaten Bangka Barat yaitu 1 kasus di Kecamatan Muntok dan 1 kasus di Kecamatan Parittiga. Hal ini disebabkan pendarahan dan *Cardiac Arrest*. Upaya dalam menekan rendahnya AKI yaitu peningkatan mutu pelayanan dan penjaminan biaya persalinan melalui Jampersal.

c. **Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

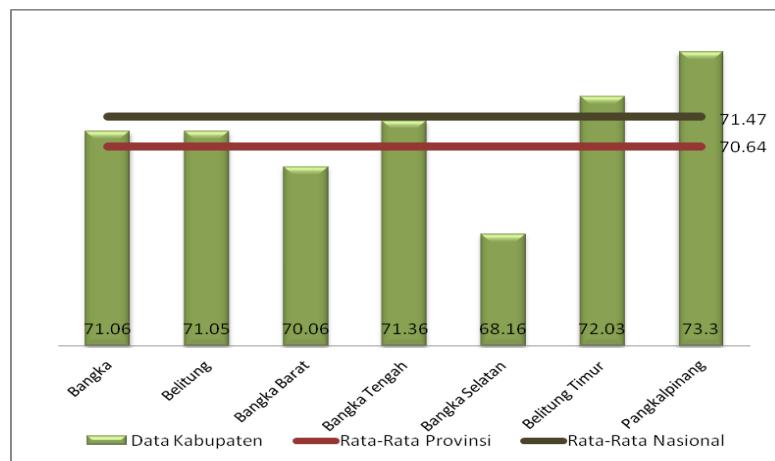


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.21 Angka Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020

Walaupun capaian AHH Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, namun jika dibandingkan dengan AHH Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 ternyata masih berada pada posisi yang cukup rendah, yaitu posisi ke 6 (enam). Capaian AHH Kabupaten Bangka Barat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (70,64 tahun) dan AHH Nasional (71,47 tahun).

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ditampilkan pada gambar berikut :

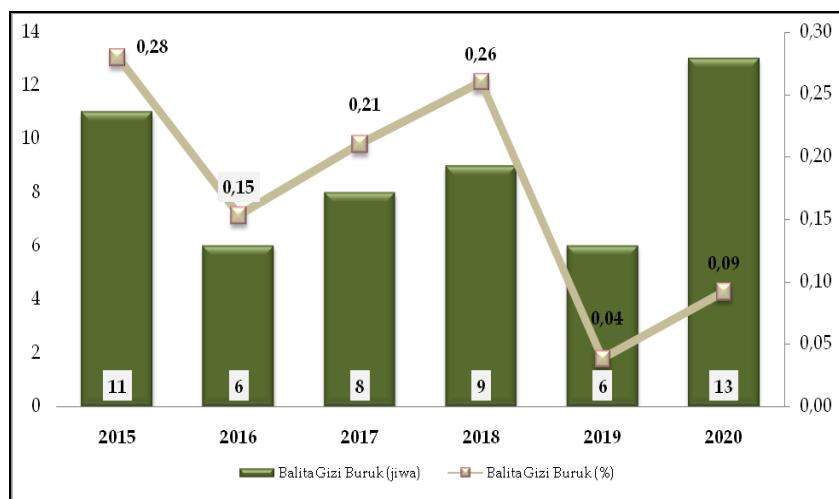


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.22 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

d. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ≤ 3 standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 13 (tiga belas) kasus, kasus tersebut meningkat bila dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun sebelumnya yaitu 6 (enam) kasus di tahun 2019. Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya mendapat perawatan dari tenaga kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Gambar 2.23 Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020



e. Stunting

Pada Tahun 2019, Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas intervensi *stunting* di Indonesia dengan angka *stunting* relatif tinggi yang kemudian ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018.

Terkait dengan gizi buruk, berdasarkan pendataan ulang yang dilakukan, kasus *stunting* (pendek dan sangat pendek) Tahun 2019 di desa dengan prevalensi *stunting* tertinggi terjadi di Kecamatan Simpangteritip sebanyak 12 desa dan Kecamatan Kelapa sebanyak 9 desa. Menurut standar WHO, batas maksimal prevalensi balita *stunting* adalah dua puluh persen dari jumlah total anak balita. Berdasarkan data Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi *stunting* Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sebesar 23,30 persen dan nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun 2013 sebesar 33,20 persen.

Tabel 2.9 Persentase Prevalensi Status Gizi (PB/U) Balita menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2018 - 2019

KABUPATEN/KOTA	2013	2018	2019
Bangka	26,2%	23,9%	20,86%
Belitung	21,7%	19,9%	16,43%
Bangka Barat	33,20%	33,27%	23,30%
Bangka Tengah	32,4%	26,09%	16,42%
Bangka Selatan	29,7%	26,92%	21,59%
Belitung Timur	27,2%	14,73%	22,13%
Pangkal Pinang	12,2%	13,33%	20,27%
Bangka Belitung	26,6%	23,37%	19,93%

Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung 2021.

Faktor penyebab terjadinya *stunting* di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:

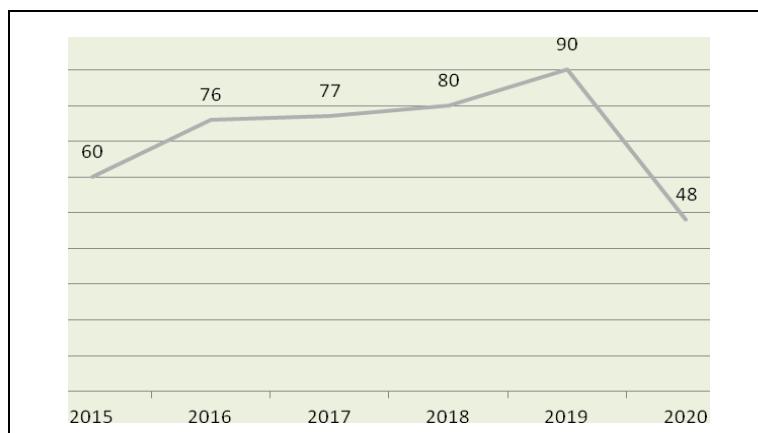
1. Pernikahan usia dini ibu, dimana risiko ibu menikah kurang dari 20 tahun terhadap kejadian *stunting* dua kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang menikah diatas 20 tahun;
2. Penyakit infeksi (diare), dimana bayi dengan penyakit ini memiliki faktor risiko 3 (tiga) kali lebih besar dibanding yang tidak diare;
3. Pendidikan orang tua, dimana pendidikan ibu rendah memiliki faktor risiko terhadap kejadian *stunting* sebanyak 1,705 kali dibandingkan dengan pendidikan ibu tinggi;



4. Pendapatan keluarga, dimana pendapatan keluarga yang rendah mempunyai faktor risiko terjadinya kejadian stunting sebanyak 2,427 kali dibandingkan dengan pendapatan tinggi;
5. Ketersediaan jamban sehat, dimana hal ini menjadi faktor risiko terjadinya stunting 2,4 kali lebih besar dibandingkan yang mempunyai jamban.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah tantangan perkembangan budaya global. Berdasarkan data tahun terakhir, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan karena banyaknya kepesertaan sanggar-sanggar kesenian yang sudah tidak aktif.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020

**Gambar 2.24 Jumlah Sanggar Kesenian
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020**

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan terhadap urusan pemerintahan daerah yang sebelumnya urusan wajib terdiri dari 26 urusan menjadi 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 urusan.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi



urusan wajib pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum diuraikan mengenai capaian kinerja fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan, berikut beberapa capaian kinerja terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut.

a. Kepegawaian Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebagai acuan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Tabel 2.10 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,65	77,84	50	51,55	64,17

Perhitungan IP ASN pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan perhitungan mandiri, sedangkan mulai tahun 2018 hingga saat ini, perhitungan IP ASN merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hasil penilaian IP ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

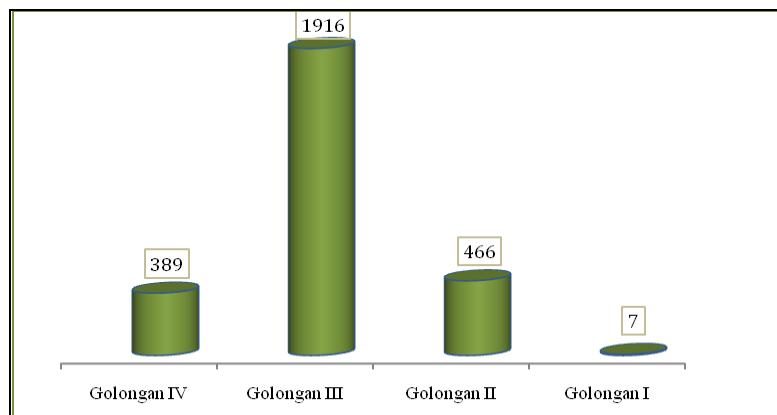
No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran (%)	Hasil Pengukuran (%)	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	12,86	51,44
2.	Kompetensi	40	21,20	53,00
3.	Kinerja	30	25,13	83,77
4.	Disiplin	5	4,98	99,60
Total		100	64,17% (rendah)	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021



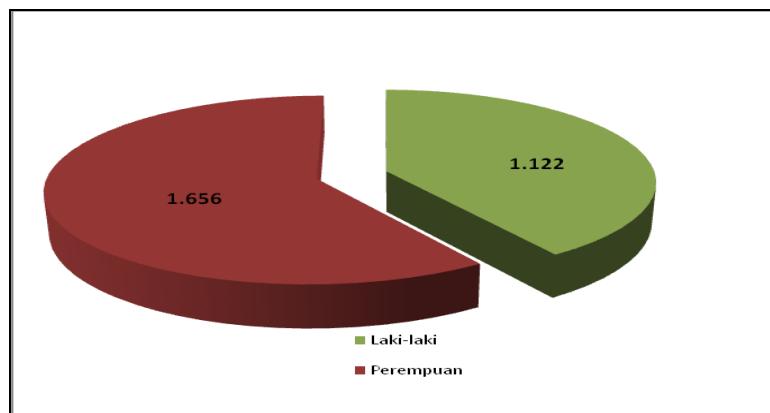
Tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian Indeks Profesional ASN Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan nilai yang masih rendah, yaitu dengan total poin 64,17 persen dari target yang telah ditetapkan tahun 2020 yaitu sebesar 80,73 persen. Berdasarkan empat dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN, dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi yang belum mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan dimensi kualifikasi, Kabupaten Bangka Barat saat ini memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2778 orang yang terdiri dari 1.122 orang laki-laki dan 1.656 orang perempuan.



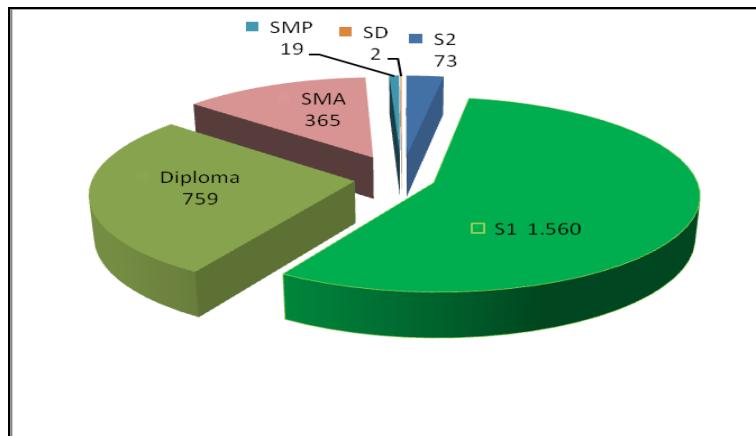
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 2.25 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 2.26 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020

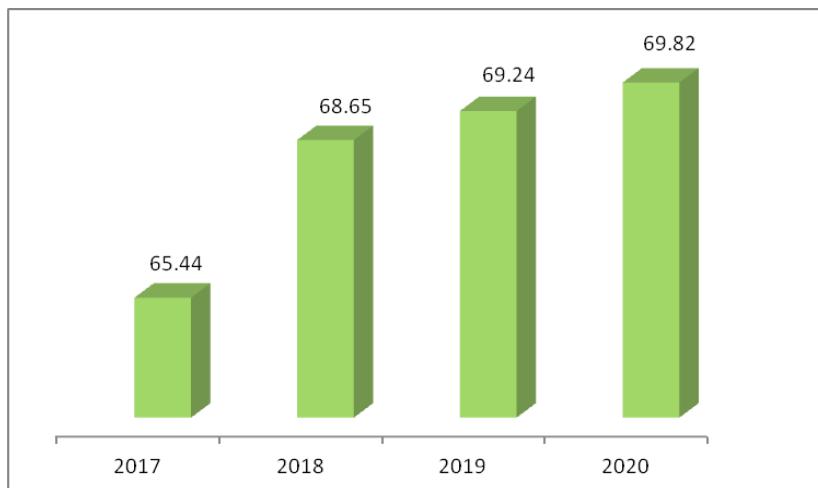


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 2.27 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sumber : BP4D Kabupaten Bangka Barat, 2021 (diolah)

Gambar 2.28 Hasil Evaluasi SAKIP
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2020

Tabel 2.12 Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2020

KOMPONEN	BOBOT	2018	2019	2020	KET
Perencanaan Kinerja	30	23,12	23,26	23,55	↑
Pengukuran Kinerja	25	15,74	15,80	16,07	↑



KOMPONEN	BOBOT	2018	2019	2020	KET
Pelaporan Kinerja	15	11,04	11,14	11,20	↑
Evaluasi Internal	10	6,88	7,00	7,12	↑
Capaian Kinerja	20	11,88	12,04	11,88	↓
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,65	69,24	69,24	↑

Sumber: Kementerian PAN RB, 2021

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dari kelima aspek tersebut, aspek dengan bobot penilaian terbesar adalah pada perencanaan kinerja yaitu 23,55 persen, yang selanjutnya pengukuran 16,07 persen, capaian kinerja masing-masing 11,88 persen, pelaporan kinerja dengan bobot 11,20 persen dan evaluasi internal sebesar 7,12 persen.

Pada tahun 2020 untuk penilaian SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 mendapat predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,82. Jika dilihat dari hasil tersebut, maka terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2019 dengan nilai 69,24. Perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 mendapat penilaian yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

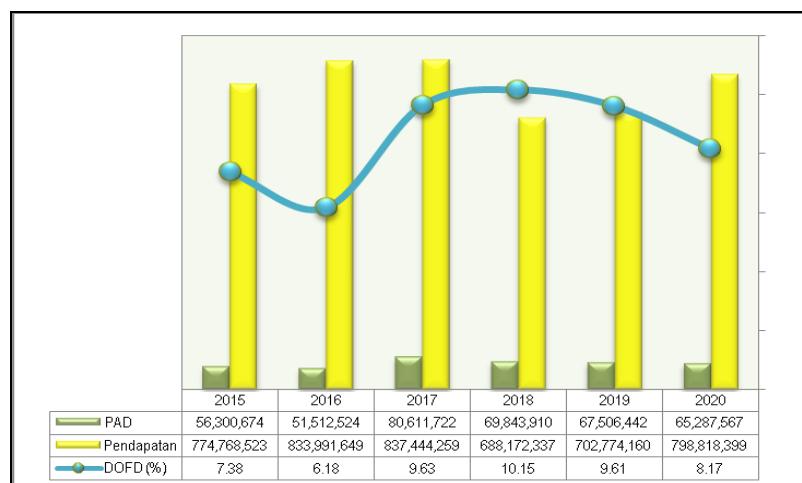
Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materil, posisi keuangan dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan akuitas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui komposisi pendapatan daerah dalam APBD. Seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia, komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah



Kabupaten Bangka Barat masih sangat terbatas untuk membiayai program-program pembangunan khususnya yang bersifat inisiatif daerah.

Sejalan dengan permasalahan di atas, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Bangka Barat dapat dikategorikan masih tergolong sangat kurang atau rendah dengan rata-rata 8,52 persen (2015-2020). DOFD merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. DOFD Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yaitu dari 8,17 persen di tahun 2020 menjadi 9,61 persen di tahun 2019. Penurunan PAD dikarenakan kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan *tax discipline* sebagian wajib pajak relatif masih kurang, Potensi PAD Kabupaten Bangka Barat belum optimal terkelola dengan baik, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak, belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak dan laju pertambahan dana perimbangan lebih besar dari laju pertambahan PAD serta adanya Pandemi COVID-19.



Sumber : BPPRD dan BPKAD, 2020 (diolah)

Gambar 2.29 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

d. Produk Hukum Daerah

Secara umum produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2011-2020 berfluktuasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.



**Tabel 2.13 Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2020**

No.	Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
1.	2011	17	66	575
2.	2012	26	39	681
3.	2013	17	56	946
4.	2014	14	46	1.059
5.	2015	14	64	968
6.	2016	12	93	834
7.	2017	12	104	825
8.	2018	15	110	860
9.	2019	13	89	863
10.	2020	13	80	791

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2021

Dalam rangka menyebarluaskan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 telah dibangun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan JDIH Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah ataupun pihak swasta secara cepat dan tepat.

e. Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Tugas utama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sesuai prosedur yang ditetapkan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat di unit-unit pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2020, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilakukan di unit-unit pelayanan yaitu sebanyak 20 unit pelayanan dengan rata-rata SKM sebesar sebesar 80,98 yaitu masuk dalam kategori B (Baik).

Dari kuisioner yang telah disampaikan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) unit pelayanan yang belum menggunakan pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Tabel 2.14 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Unit Pelayanan	SKM 2016	SKM 2017	SKM 2018	SKM 2019	SKM 2020	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	78,81	82,19	80,35	76,12	77,37	Meningkat
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	-	-	77,98	85,00	-	Menurun
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	82,06	81,30	81,41	Meningkat
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	73,87	78,07	79,38	-	-	-
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	79,44	81,84	82,10	Meningkat
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	-	78,85	81,07	81,03	86,62	Meningkat
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	80,76	-	88,29	87,41	Menurun
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	-	79,53	-	-	-	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	-	87,91	98,72	85,95	82,10	Menurun
11	RSUD Sejiran Setason	-	73,58	73,27	74,81	76,82	Meningkat
12	Kecamatan Muntok	81,7	81,71	81,81	81,86	81,90	Meningkat
13	Kecamatan Simpangteritip	81,65	87,75	83,77	84,78	85,48	Meningkat
14	Kecamatan Kelapa	79,96	80,42	80,67	80,72	80,75	Meningkat
15	Kecamatan Jebus	81,42	80,82	81,27	81,49	81,49	-
16	Kecamatan Parittiga	-	82	80,25	82,75	80,05	Menurun
17	Kecamatan Tempilang	81,73	83,56	86,7	88,70	-	Menurun
18	Puskesmas Muntok	79,51	79,89	74,27	78,75	78,42	Menurun
19	Puskesmas Simpangteritip	79,97	84,39	84,41	74,40	79,90	Meningkat
20	Puskesmas Kelapa	81,79	81,81	81,88	81,90	82,12	Meningkat
21	Puskesmas Sekarbiru	83,51	83,52	81,71	81,76	81,87	Meningkat
22	Puskesmas Puput	82,06	78,03	90,06	77,96	74,89	Menurun
23	Puskesmas Tempilang	81,73	82,26	78,46	80,16	80,49	Meningkat
24	Puskesmas Jebus	85	81,56	84,88	77,34	83,25	Meningkat
25	Puskesmas Kundu	72,74	72,74	70,22	67,36	75,07	Meningkat
PEMKAB. BANGKA BARAT		80,36	81,02	81,48	80,28	80,98	Meningkat

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2021.

f. Pengawasan Internal

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Baiknya kualitas pengawasan di daerah maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja daerah. Kualitas pengawasan internal daerah dapat dilihat dari tingkat maturasi SPIP dan level *Internal Audit Capability Model* (IACM). Berdasarkan hasil laporan Inspektorat Provinsi kepulauan Bangka Belitung, tingkat maturasi SPIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 adalah 2,6818 yaitu dengan kriteria berkembang. Sementara tingkat kapabilitas



pengawasan internal yang dilihat dari IACM, di Tahun 2018 berada pada level 2 plus (dengan catatan) atau masih dalam level *Infrastructure*. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengan nilai 3,28 pada level 3 (*integrated*) tingkat maturasi mengalami penurunan. Elemen yang digunakan dalam penentuan kapabilitas APIP antara lain peran dan layanan pengawasan internal, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen dan akuntabilitas kinerja, hubungan dan budaya organisasi, serta struktur tata kelola.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru/Murid dan Angka Melanjutkan Sekolah.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk mengakomodir seluruh penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
SEKOLAH DASAR / MI						
Usia 7 - 12 tahun	jiwa	22.740	21.653	22.850	26.129	26.338
Jumlah Sekolah	sekolah	138	138	138	139	139
Rasio		1 : 177	1 : 177	1 : 177	1 : 174	1 : 184
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts						
Usia 13 - 15 tahun	jiwa	9.374	7.011	9.329	9.215	9.215
Jumlah Sekolah	sekolah	45	46	46	46	46
Rasio		1 : 270	1 : 270	1 : 270	1 : 225	1 : 255

Sumber data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021, diolah

Untuk ketersediaan sekolah SD, pada tahun 2020 secara rata-rata satu sekolah dasar dapat menampung 184 murid, dimana nilai ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yaitu satu sekolah dasar dapat menampung 174 murid. Untuk ketersediaan sekolah menengah pertama pada



tahun 2020 satu sekolah dapat menampung 255 murid, dimana kondisi ini masih sama dengan tahun 2019.

Solusi dari permasalahan ketersediaan sekolah terhadap perkembangan jumlah penduduk usia sekolah adalah dengan melakukan strategi penambahan ruang kelas di setiap jenjang pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah negeri.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar yang juga menunjukkan kondisi ideal proporsi guru dan murid untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.16 Rasio Guru/ Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
SEKOLAH DASAR / MI						
Guru	orang	1.422	1.286	1.314	1.405	1.530
Jumlah Siswa	orang	24.606	24.934	25.798	26.129	25.762
Rasio		1 : 17	1 : 19	1 : 20	1 : 19	1 : 17
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts						
Guru	orang	591	565	592	620	678
Jumlah Siswa	orang	9.565	9.748	9.329	9.215	9.656
Rasio		1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 15	1 : 14

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021, diolah

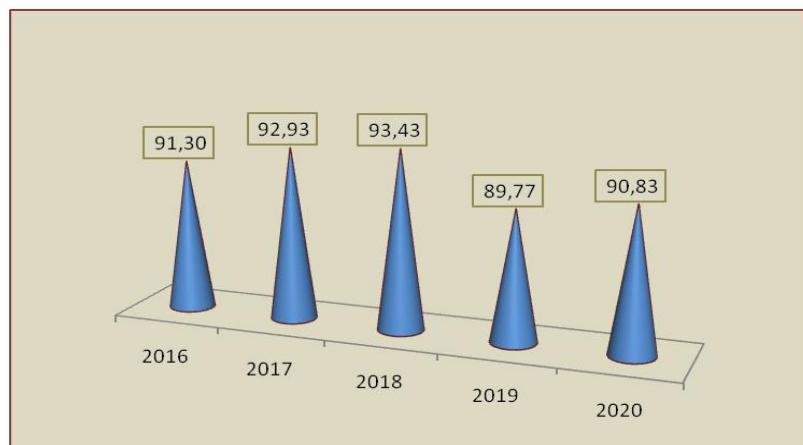
Data pada tabel diatas menunjukkan rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan dari SD dan SMP di tahun 2020 membaik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah guru SD/MI yang bersertifikasi pendidik adalah 535 orang atau 34,96 persen dari total guru SD/MI (PNS, Guru Tetap Yayasan dan GTT SD) dan Jumlah guru SMP/Mts yang bersertifikasi pendidik professional adalah 184 orang atau 27,13 persen dari total guru SMP/Mts (PNS, Guru Tetap Yayasan dan GTT SMP). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat.

c. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk melihat seberapa besar antusias dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu penentu dalam kualitas pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat partisipasi sekolah.



Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

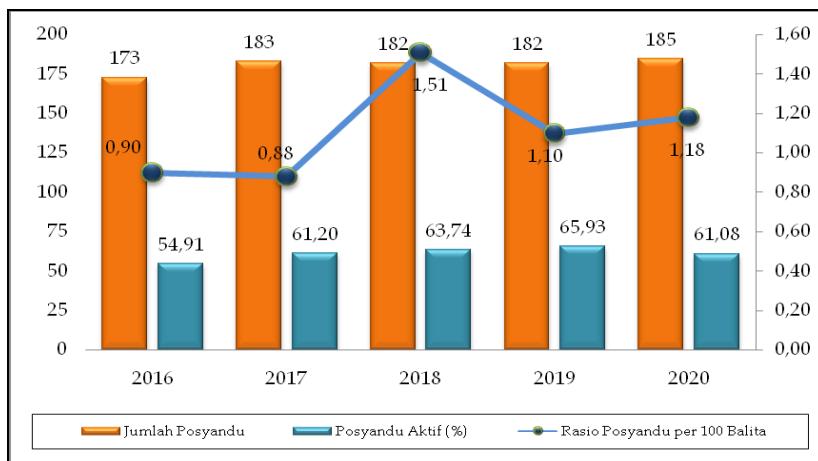
Gambar 2.30 Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTS
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (Persentase)

2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup memadai, dan telah tersebar sampai tingkat Dusun/Desa. Untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan posyandu merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bagi masyarakat. Semakin tinggi ketersediaan sarana kesehatan akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan catatan adanya dukungan akses pelayanan kesehatan yang baik.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2.31 Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir (2016-2020).

Untuk sarana kesehatan, di tahun 2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 unit yaitu RSUD Sejiran Setason, RSBT Muntok, dan RS Gunung Manik. Jumlah puskesmas sebanyak 8 unit dengan rincian 6 puskesmas perawatan dan 2 puskesmas non perawatan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Sementara jumlah puskesmas keliling sebanyak 97 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 19 unit.

Khusus puskesmas, berdasarkan jumlah ketersediaan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 1 : 24.978, sementara rasio ideal ketersediaan puskesmas adalah 1 : 16.000. Untuk puskesmas pembantu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 1 : 10.517 dengan rasio ideal adalah 1 : 1.500. Jika dilihat dari jumlah dan rasio tersebut, maka sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat masih belum memadai, mengingat puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.17 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA				
		PEMDA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rumah Sakit					
1.	Rumah Sakit Umum	1			2	3
2.	Rumah Sakit Khusus					-



No.	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA				
		PEMDA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
II.	Puskesmas dan Jaringannya					
1.	Puskesmas Rawat Inap	6				6
	- Jumlah Tempat Tidur	101				101
2.	Puskesmas Non Rawat Inap	2				2
3.	Puskesmas Keliling	7				7
4.	Puskesmas Pembantu	19				19
III.	Sarana Pelayanan Lain					
1.	Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan				23	23
2.	Klinik Pratama		1		5	6
3.	Klinik Utama				3	3
4.	Balai Pengobatan					-
5.	Praktik Dokter Bersama					-
6.	Praktik Dokter Umum Perorangan				26	26
7.	Praktik Dokter Gigi Perorangan				1	1
8.	Praktik Dokter Spesialis Perorangan				3	3
9.	Praktik Pengobatan Tradisional				2	2
10.	Bank Darah Rumah Sakit					-
11.	Unit Transfusi Darah	1				1
IV.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian					
1.	Industri Farmasi					-
2.	Industri Obat Tradisional					-
3.	Usaha Mikro Obat Tradisional					-
4.	Produksi Alat Kesehatan					-
5.	Pedagang Besar Farmasi					-
6.	Apotek				9	9
7.	Apotek PRB				1	1
8.	Toko Obat				2	2
9.	Toko Alkes					-

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

b. Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain sarana maupun fasilitas kesehatan, terdapat variabel kesehatan lainnya, seperti tenaga kesehatan. Dengan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang optimal, maka



pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Rasio tenaga kesehatan merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan di suatu daerah untuk mencapai target pembangunan tertentu. Menurut WHO, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Berikut data tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.18 Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 4.485	1 : 3.071	1 : 2.568	1 : 2.573	1 : 2.467
2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 3.684	1 : 2.627	1 : 2.293	1 : 2.226	1 : 2.195
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	98,30	112,33	76,54	86,71	72,51
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96,74	98,40	96,92	96,96	97,30
5.	Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya memadai. Pada tahun 2020, Rasio Dokter per Satuan Penduduk mencapai 1 : 2.467. WHO menyatakan bahwa kondisi ideal dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1 : 2.500 penduduk. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk mencapai 1 : 2.195, dalam arti terjadi peningkatan kecukupan tenaga medis bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1 : 3.684.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, beberapa capaian indikator kesehatan yang berkaitan antara lain cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai 72,51%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terbilang fluktuatif, namun cenderung membaik dimana pada tahun 2020 mencapai 97,30%. Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*) dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mencapai 100%.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Pekerjaan Umum

Indikator pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat dilihat dari beberapa kondisi terkait urusan pekerjaan umum, yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi, dan rasio tempat ibadah.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan dikategorikan baik, apabila permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 persen), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan.

Kondisi jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Kondisi jaringan jalan berkaitan dengan konektivitas suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya mengingat jalur perhubungan utama masih dipegang oleh perhubungan darat. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir panjang jalan Kabupaten Bangka Barat secara umum tidak mengalami perubahan. Sementara proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016-2020 kondisinya berfluktuasi. Pada Tahun 2020 jalan dengan kondisi baik sebesar 56,87 persen dan kondisi sedang sebesar 22,42 persen. Jalan dengan kondisi rusak berat pada tahun 2019-2020 tidak ada yang menandakan bahwa kondisi jalan yang rusak parah segera diperbaiki. Kondisi jalan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016-2020 terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.19 Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Kondisi Jalan	2016		2017		2018		2019		2020	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
a. Baik / Good	551,69	-	543,18	78,71	551,69	78,71	347,174	49,53	398,604	56,87
b. Sedang / Moderate	33,33	4,76	35,3	5,04	33,33	4,76	179,671	25,63	157,158	22,42
c. Rusak / Damage	60,19	8,59	59,67	8,51	60,19	8,59	174,076	24,84	145,159	20,71



Kondisi Jalan	2016		2017		2018		2019		2020	
	KM	%								
d. Rusak Berat	55,70	7,95	62,76	8,95	55,70	7,95	0,00	-	0,00	-
Jumlah	700,92	100,00								

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Walaupun cakupan jalan dengan kriteria baik di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, upaya yang kuat untuk penambahan jumlah jaringan jalan baru harus terus dilakukan karena terkait dengan sasaran strategis daerah yaitu “ Indeks Konektivitas Kabupaten”.

b. Jaringan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten diutamakan guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya dan merupakan faktor penting sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian. Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pembukaan lahan sawah terus dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan untuk mendukung perkembangan persawahan tersebut telah dibangun irigasi sekunder di beberapa lokasi persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 2.20 Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2019

No.	Kecamatan	Luas Areal Pertanian (Ha)	Luas Irigasi Sekunder (Ha)		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Muntok	64	-	-	-
2.	Simpangteritip	579	-	65,00	130
3.	Kelapa	1.228	220	454,00	562
4.	Jebus	366	104	130,00	296
5.	Parittiga	-	-	-	-
6.	Tempilang	305	265	305,00	305
Total		2.542	589	954	1.293
Persentase			23,39	37,89	51,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Irigasi teknis yang dimaksud adalah saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di konesikan dengan saluran tersier. Sampai dengan Tahun 2019, dari 2.542 ha areal



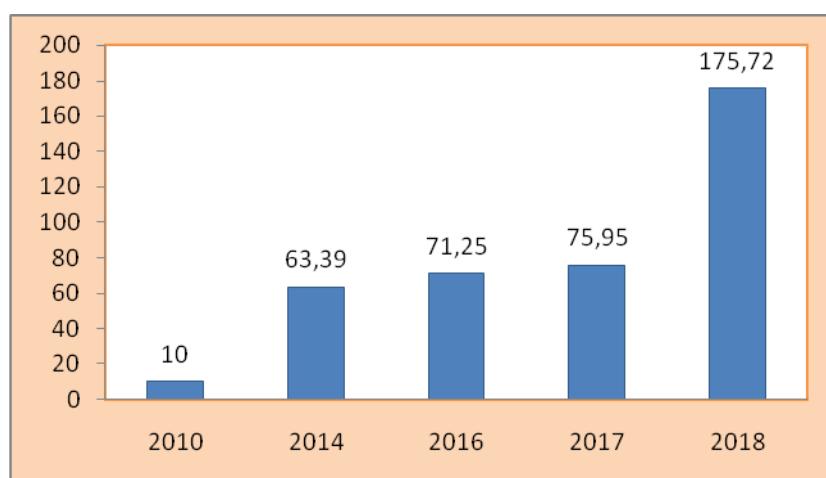
pertanian, yang telah beririgasi teknis adalah seluas 1.293 ha (51,35 persen). Pada Tahun 2020 tidak ada penambahan luasan irigasi dikarenakan tidak ada kegiatan pembangunan irigasi. Sampai saat ini irigasi yang ada belum dapat digunakan sesuai fungsinya dikarenakan belum memiliki sistem jaringan pengairan tersier dan kwater yang baik dan optimal.

3.2 Penataan Ruang

Kondisi Kabupaten Bangka Barat terkait urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain adalah sebagai berikut

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang pada umumnya diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Perkembangan RTH di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 2.32 Perkembangan Luasan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat

Perkembangan luasan RTH terlihat bahwa total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175,72 ha. Luasan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan kawasan areal perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha



atau hanya 1,88% dari total wilayah perkotaan Kabupaten Bangka Barat, sehingga kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH, tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga di kecamatan lainnya. Luasan RTH publik di Kabupaten Bangka Barat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Luasan RTH publik di Kabupaten Bangka Barat

Wilayah	Luasan Kawasan Perkotaan (ha)	Luasan RTH (ha)	%
Kec. Muntok	4.345	175,72	4,04
Kec. Simpangteritip	978	0	0
Kec. Tempilang	959	0	0
Kec. Kelapa	1.067	0	0
Kec. Jebus	1.067	0	0
Kec. Parittiga	915	0	0
Kab. Bangka Barat	9.331	175,72	1.88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat,2021;
RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034.

Sebagaimana tabel diatas terlihat bahwa penambahan luas RTH di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu delapan tahun berfluktuatif. Total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175 ha atau 9,38% dari total RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan yaitu 1.866,12 ha. Dengan demikian kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH di Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan RTH diharapkan tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga kecamatan lainnya.

b. Persentase Bangunan Ber-IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan agar bangunan memenuhi standar persyaratan teknis.

Salah satu komponen pengendalian ruang oleh pemerintah daerah adalah dengan mekanisme penerbitan IMB. Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang akan mendirikan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus



sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.22 Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB pada tahun n	146	263	230	257	269
2.	Jumlah Bangunan ber-IMB sampai dengan tahun n	1.730	1.993	2.223	2.480	2.749
3.	Jumlah Bangunan	46.524	44.752	44.752	46.862	46.862
4.	Persentase bangunan ber-IMB	3,72	4,45	4,97	5,29	5,87

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan terus mengalami peningkatan. Dalam meningkatkan persentase bangunan yang ber-IMB, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang yang didorong oleh rendahnya efektivitas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

c. Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Sebagai acuan dalam pembangunan terkait penataan ruang, maka keberadaan dokumen RTRW sangatlah penting, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014. Dalam penetapan pola ruang pada RTRW Kepulauan Bangka Belitung, baik pada naskah rencana maupun pada gambar peta pola ruang, dapat dikemukakan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kawasan Lindung	Lokasi Kecamatan
1.	Kawasan Hutan Lindung	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Kawasan Bergambut	Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jabus
3.	Kawasan Hutan Bakau	Kelapa, Jebus, Tempilang, Simpangteritip
4.	Sempadan Pantai	Kelapa, Parittiga, Simpangteritip.
5.	Sempadan Sungai	Tersebar
6.	Sempadan Kolong	Muntok, Jebus, Tempilang
7.	Suaka Alam/Cagar Alam	Muntok, Simpangteritip, Kelapa.
8.	Cagar Budaya	Muntok.
9.	Taman Hutan Raya	-



No.	Kawasan Lindung	Lokasi Kecamatan
10.	Rawan Banjir	Muntok, Parittiga, Jebus,
11.	Rawan Abrasi Pantai	Parittiga, Tempilang, dan Simpangteritip
	Kawasan Budidaya	Lokasi Kecamatan
1.	Produksi	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Perkebunan	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
3.	Permukiman	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
4.	Pertanian (Sawah)	Simpangteritip, Jebus, Kelapa, Muntok

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034 tersebut diperoleh skor 90,27 sehingga direkomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Bangka Barat tidak perlu dilakukan revisi meskipun belum seluruh pola ruang Kabupaten Bangka Barat terealisasi sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena sebagian besar realisasi perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Barat masih belum terbangun.

Kendala yang dihadapi pada urusan tata ruang diantaranya disebabkan oleh minimnya produk rencana rinci yang harus ditetapkan berdasarkan amanat dari Perda RTRW, sehingga alat untuk pengendalian ruang belum ada. Hal ini karena belum adanya peta yang tersedia di Badan Informasi Geografi (BIG) sesuai dengan persyaratan dalam penyusunan rinci akibat keterbatasan anggaran dan peralatan pendukung. Hingga tahun 2020 produk-produk terkait dengan perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

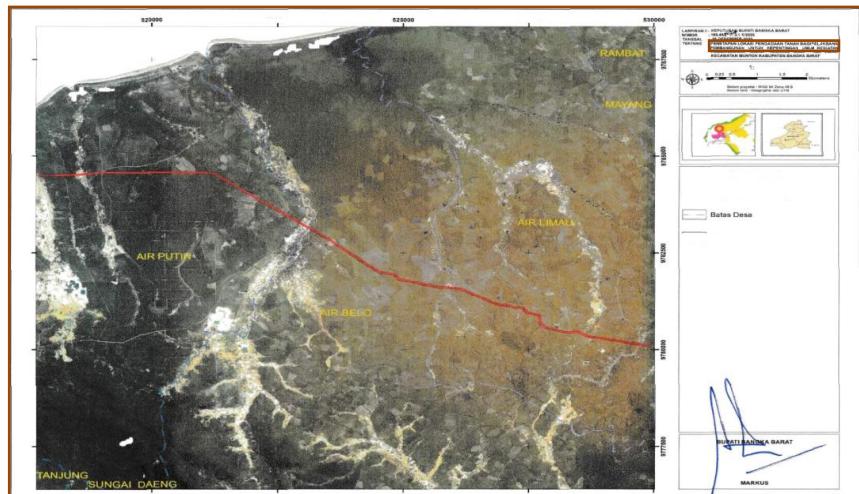
Tabel 2.24 Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kebijakan	Tahun
1.	Perbup RTBL Cluster Eropa	2016
2.	Perbup RTBL Cluster Melayu	2017
3.	Perbup RTBL Cluster Cina	2018
4.	Penetapan Lokasi Pelabuhan Sesuai dengan Tata Ruang	2019
5.	Usulan Perubahan Kawasan Hutan	2019
6.	Perbup Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Kesuaian Pemanfaatan Ruang	2020
7.	SOP surat Keterangan Ruang	2020
8.	Keputusan Bupati Terkait Peninjauan Kembali RTRW	2020
9.	Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021



Selama kurun waktu enam tahun produk perencanaan tata ruang di Kabupaten Bangka Barat sejumlah sembilan kebijakan. Adapun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat sebanyak tiga kebijakan yakni RTBL Klaster Eropa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok, RTBL Klaster Melayu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama, serta Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau pada Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/503.A/1.3.1.1/2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kegiatan pembangunan jalan Tanjung Ular-Air Limau Kecamatan Muntok.



Gambar 2.33 Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau

Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau menjadi hal yang penting mengingat Kawasan Tanjung Ular menjadi Kawasan Strategi Provinsi sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat menetapkan rencana struktur jaringan transportasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan pemerataan pelayanan transportasi dan perkembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat.



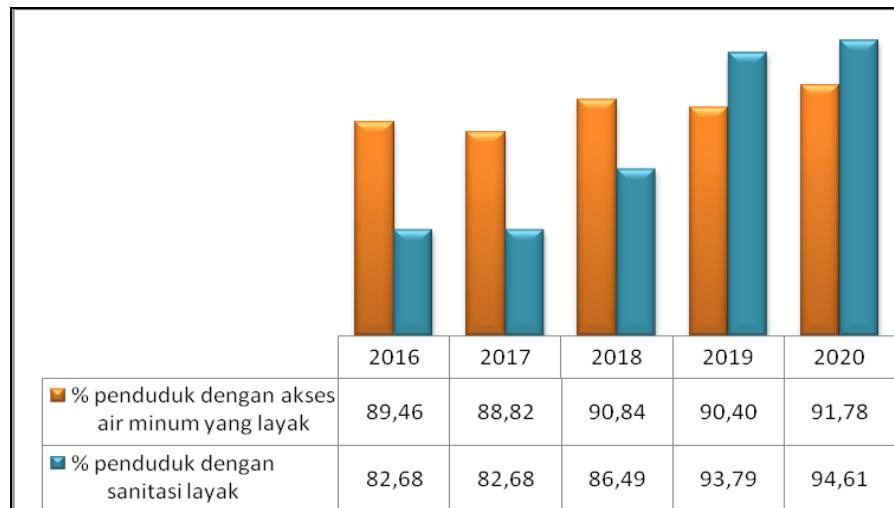
Gambar 2.34 Kondisi Pantai Tanjung Ular

Selain berperan sebagai jalan pembuka ke Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka Barat dipandang penting juga oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kabupaten yang strategis secara ekonomi sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didalam RTRW telah menetapkan sistem transportasi darat melalui jaringan jalan khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu, yaitu Ruas jalan Muntok-Air Putih Tanjung Ular-Air Limau sejauh 13,8 km untuk menunjang kawasan tersebut.

Kabupaten Bangka Barat akan menjadi daerah maju diberbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, perhubungan transportasi darat dan laut ke depan dengan adanya kawasan KIPT Tanjung Ular. Diharapkan adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular dapat menjadi hal positif untuk menarik investor berbagai bidang untuk segera membangun atau menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, perekonomian di Bangka Barat dapat bangkit dan *multiplier effect* dari keberadaan kawasan tersebut dapat dirasakan berbagai pihak.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain persentase penduduk dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Gambar 2.35 Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Cakupan penduduk dengan akses air minum berkualitas (layak) mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 89,46 persen menjadi 91,78 persen di tahun 2020. Sementara persentase penduduk bersanitasi layak dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Perkembangan jumlah penduduk yang memiliki akses layak terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2020 penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 94,61 persen.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Indikator terkait pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah dari ketersediaan polisi pamong praja, petugas linmas dan Pos Siskamling sebagaimana tergambar di bawah ini.

Tabel 2.25 Jumlah Petugas Satpol PP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Status	Satuan	Jumlah Petugas				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	PNS	Orang	10	10	10	10	10
2.	Non PNS	Orang	89	95	118	118	116
Total			99	105	128	128	126

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana, 2021

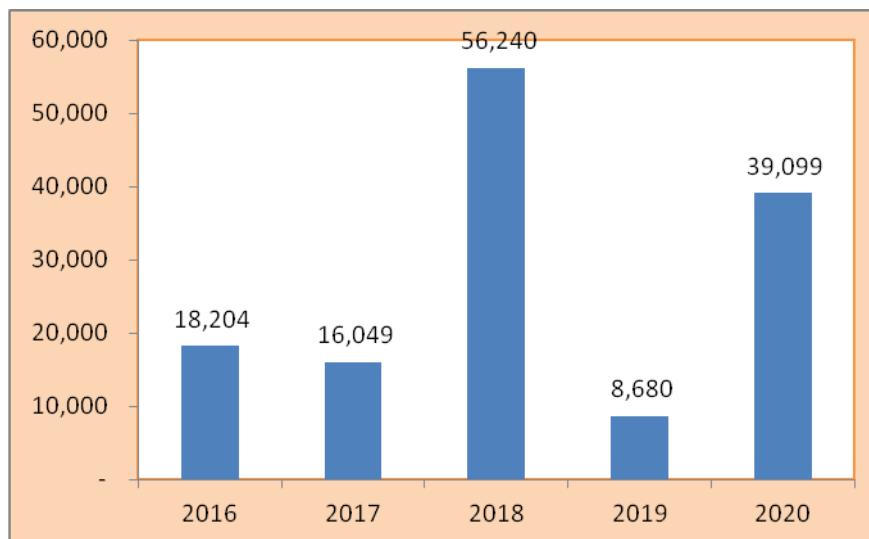
Untuk membangun kesatuan keamanan masyarakat yang baik, tentu jumlah ini perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal untuk jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan



oleh Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 251 sampai dengan 350 PNS dengan perhitungan berdasarkan kriteria umum yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.

6. Sosial

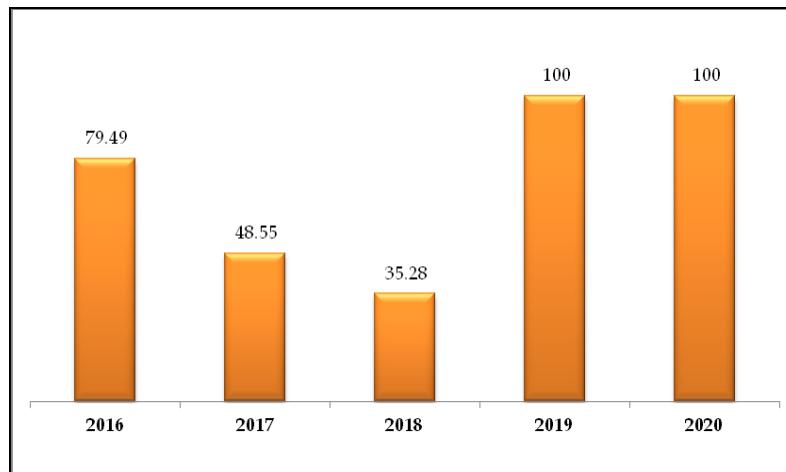
Terkait pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial berbagai program pelayanan sosial telah diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pada tahun 2019, istilah PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Dalam peraturan tersebut disebutkan terdapat 26 jenis PMKS.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Gambar 2.36 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Untuk program bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat merupakan komplementaritas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selama lima tahun terakhir, PMKS yang memperoleh bantuan sampai tahun 2020 sebesar 100 persen.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Gambar 2.37 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan DTKS tersebut, mulai dari pengelolaan DTKS (merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan) yang terdiri dari pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan.

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang masuk dalam kategori DTKS pada tahun 2019 sebesar 20,74 persen (40.556 jiwa), dimana Kecamatan Simpangteritip merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi dilanjutkan dengan Kecamatan Kelapa (versi DTKS). Sementara pada Tahun 2020, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori DTKS sebanyak 39.099 jiwa atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 2.26 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

KECAMATAN	2019		2020	
	JIWA	RUTA	JIWA	RUTA
Muntok	7.634	2.411	8.008	2.575
Simpangteritip	9.875	2.673	9.847	2.818
Jebus	4.367	1.261	4.256	1.317
Parittiga	4.436	1.322	4.214	1.352
Kelapa	8.892	2.574	7.547	2.360
Tempilang	5.352	1.643	5.227	1.676
TOTAL	40.556	11.884	39.099	12.098

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021



7. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintra sektoral sehingga perannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Tabel 2.27 Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	100.449	106.408	103.518	102.281
Bekerja	96.205	103.102	100.563	98.071
Pengangguran	4.244	3.306	2.955	4.210
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	68,17	70,47	66,99	65,76
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,23	3,11	2,85	4,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 65,76 persen artinya sebesar 66 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK selama periode tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi yaitu dari 68,17 persen pada tahun 2017 menjadi 65,76 persen di tahun 2020.

Sejalan dengan TPAK, TPT Kabupaten Bangka Barat menunjukkan capaian yang bervariasi. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,23 persen, pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen. Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua terendah dengan urutan TPT tertinggi di Pangkalpinang, yaitu sebesar 5,01 persen sedangkan TPT terendah di Belitung Timur sebesar 1,71 persen.



8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era sekarang ini, peran perempuan telah merambah berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, namun ikut pula mencari nafkah bagi keluarga. Kemandirian perempuan juga menempatkannya pada posisi tawar yang setara atau bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dari laki-laki. Untuk itu, terkait pembangunan daerah informasi mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja juga perlu ikut dipertimbangkan.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sebanyak 204.527 jiwa, 48,48 persen diantaranya adalah perempuan (99.145 jiwa) dan 51,52 persen laki-laki (105.382 jiwa). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin hampir berimbang. Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di DPR masih relatif kecil, di mana untuk jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif hingga sekarang berjumlah 4 orang dan 21 orang laki-laki. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah khususnya Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Desember 2020 mencapai 1.656 orang atau sebesar 59,61 persen. Hal ini menunjukkan tidak terlihat perbedaan yang berarti antara proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintah. Bahkan, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah di Kabupaten Bangka Barat.

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan. Pada masa sekarang masyarakat semakin terbuka dan peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya sosialisasi, edukasi, dan advokasi melalui kegiatan sosialisasi pencegahan/perlindungan anak dan remaja dari kekerasan dan kegiatan pengembangan P2TP2A. Pada Tahun 2016-2018 jumlah, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi penurunan, namun terjadi peningkatan jumlah kasus pada Tahun 2019 dan 2020 .

Tabel 2.28 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kecamatan Muntok	37	7	5	3	10
2.	Kecamatan Simpangteritip	10	4	-	-	1
3.	Kecamatan Jebus	2	1	2	5	2
4.	Kecamatan Parittiga	7	3	1	2	5
5.	Kecamatan Kelapa	1	4	1	-	3
6.	Kecamatan Tempilang	1	-	1	2	3
Bangka Barat		58	19	10	12	24

Sumber : P2TP2A Kabupaten Bangka Barat, 2021.



Dari kasus yang dilaporkan terjadi di tahun 2020 sebanyak 24 kasus di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya ditindaklanjut dan ditangani oleh masing-masing unit pelayanan terkait penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain oleh RSUD Sejiran Setason, Dinas Kesehatan, Polres, dan Kejari Kabupaten Bangka Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat.

9. Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk yaitu pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, dan gizi. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Indikator capaian kinerja dalam urusan pangan meliputi:

A. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan secara kuantitas, namun terpenting adalah kualitas dari pangan tersebut, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.29 Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)
1.	2016	2.016,47	116,37
2.	2017	2.662	69,7
3.	2018	2.728	120,9
4.	2019	2.487,30	69,38
5.	2020	2.779	76

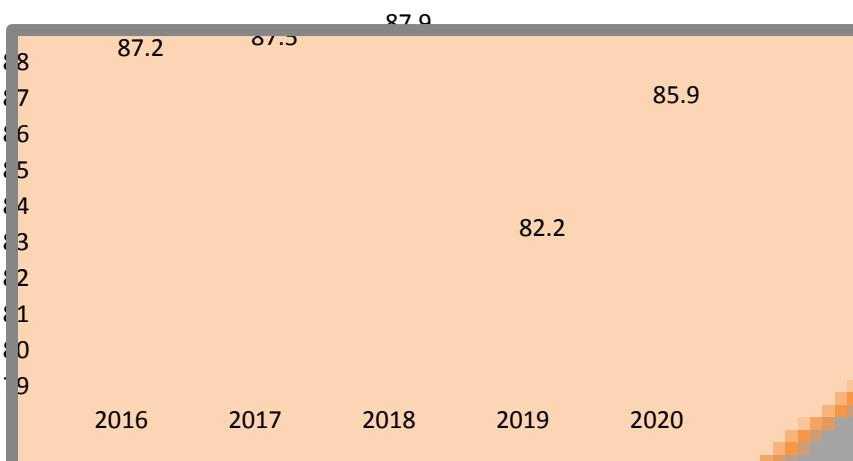
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016—2020 ketersediaan energi cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi masih di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 kondisi ketersediaan energi ketersediaan energi mencapai 2.779 kal/kap/hr, atau 15,79% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Adapun Ketersediaan protein pada tahun 2016—2020 berfluktuasi, namun demikian selama kurun waktu lima tahun kisaran ketersediaan protein masih di atas kecukupan protein penduduk Indonesia.

B. Skor Harapan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2019 terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator terkait ketahanan pangan, yaitu produksi padi yang menunjukkan ketersediaan pangan utama maupun dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat.

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam. Skor PPH merupakan indikator strategis dan penggunaannya menjadi tolak ukur dari gambaran kualitas konsumsi pangan. Skor PPH Kabupaten Bangka Barat disajikan pada gambar berikut.



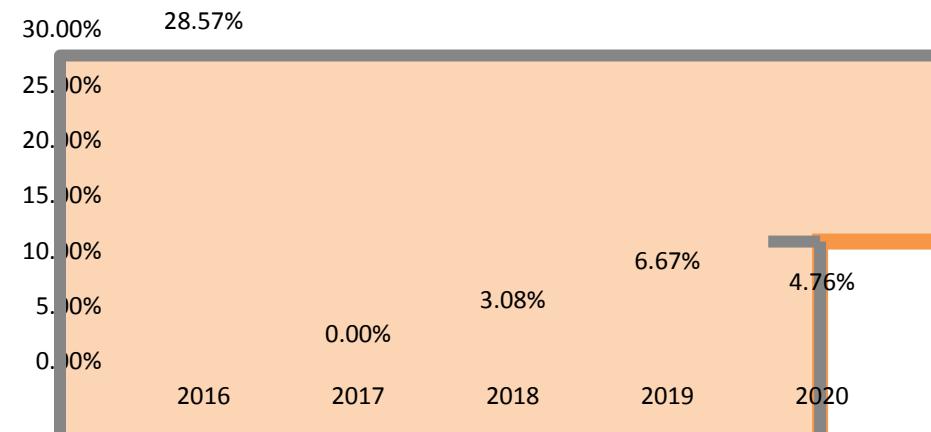
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.38 Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Pada tahun 2020 Skor PPH mulai meningkat mencapai 85,9. Peningkatan ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat semakin baik, semakin beragam, dan berimbang. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

C. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan persentase antara jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2020

Gambar 2.39 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun mengalami tren penurunan. Bahkan pada tahun 2017 mencapai 0%. Pada tahun 2020 pengawasan dan pembinaan pangan hanya 4,76%. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang dilakukan masih belum optimal dilaksanakan. Pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan perlu ditingkatkan agar keamanan pangan dapat terjamin untuk masyarakat.

10. Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah yang pada akhirnya berperan mengurangi kasus-kasus tanah negara. Salah satu faktor penghambat dalam pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanahan atau lahan.

Persentase luas lahan bersertifikat merupakan hasil bagi antara luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikali seratus persen. Hingga tahun 2020 Kabupaten



Bangka Barat memiliki total 47.663 bidang tanah dengan luas lahan bersertifikat 474.291.407 m². Sementara itu, luas lahan di Kabupaten Bangka Barat adalah 2.848.860.500 m². Secara rinci bidang dan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat

Jenis Sertifikat	Bidang	Luas (m ²)
Hak Milik	46.395	122.304.975
Hak Guna Usaha	57	347.257.780
Hak Guna Bangunan	781	1.349.855
Hak Pakai	386	3.263.971
Hak Wakaf	44	114.826
Jumlah	47.663	474.291.407

Sumber: BPN Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 adalah 16,65%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 16,6% dari tahun 2016 hanya sebesar 0,05%. Meskipun telah terjadi peningkatan persentase lahan bersertifikat dalam kurun waktu enam tahun, akan tetapi tingkat ketertiban administrasi terkait pertanahan di Kabupaten Bangka Barat masih tergolong minim. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan terkait dengan urusan tanah yakni tidak jelasnya status kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kasus tanah. Pada rentang waktu 2016 hingga 2018, telah terjadi 5 kasus tanah negara. Seperti pada tahun 2016 kasus tanah negara yang terjadi sebanyak 2 kasus dengan status tidak dapat diselesaikan. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, terdapat 3 tanah negara yang terjadi dan semuanya dapat diselesaikan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.40 Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2018

Pada tahun 2016 terdapat 4 permohonan izin lokasi dan hanya 3 izin yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 terdapat 3 permohonan izin. Pada tahun 2018 permohonan izin lokasi mengalami penurunan, yakni menjadi sebanyak 2 permohonan izin saja. Dari semua izin yang diajukan pada tahun 2017 dan 2018 tersebut, seluruhnya mendapatkan izin lokasi sesuai dengan jumlah yang diajukan.

11. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup saat ini sering menjadi sorotan, karena tingkat kesadaran dunia dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan semakin meningkat. Beberapa komponen yang sangat erat dengan lingkungan hidup adalah terkait udara, air dan tutupan lahan/hutan. Dari ketiga komponen tersebut dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH diukur dari 3 (tiga) parameter/indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) dengan bobot untuk masing-masing parameter sebesar 30 persen untuk IKA, 30 persen untuk IKU dan 40 persen untuk ITH.

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 63,29. Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2019 sebesar 66,29, maka terjadi penurunan sebesar 3,00 poin. Ketiga parameter IKLH Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

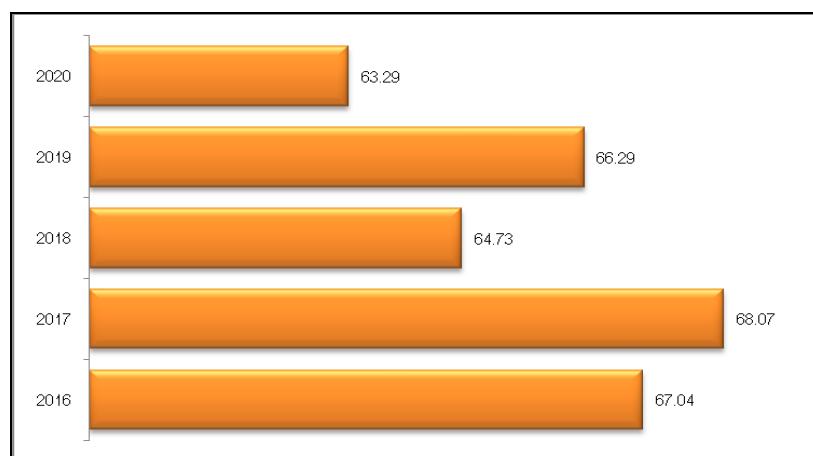


Tabel 2.31 Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Parameter	Rata-Rata	Bobot (%)	Nilai	IKLH
Indeks Pencemaran Air	70,00	30	21,00	63,29
Indeks Pencemaran Udara	91,52	30	27,46	
Indeks Tutupan Hutan	37,08	40	14,83	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Selama lima tahun terakhir, IKLH Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun yaitu dari 67,04 di Tahun 2016 menjadi 63,29 di Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 70,00 maka IKLH Kabupaten Bangka Barat telah mencapai 90,41 persen.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2.41 Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 - 2020

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya E-KTP serta pencatatan kependudukan dengan menggunakan sistem (SIAK) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah. Dua hal ini merupakan subbagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan baik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Barat terhadap identitas diri dan administrasi kependudukan pun memiliki peran penting. Kesadaran ini dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Akta



Kematian. Persentase penduduk Kabupaten Bangka Barat yang memiliki administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32 Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan

No.	Uraian	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Memiliki KTP	93,37	88,92	97,46	98,27	98,56
2.	Penduduk Berakte Kelahiran	89,27	96,22	98,26	99,18	99,81
3.	Pasangan Berakte Nikah	16,11	19,58	23,14	30,26	34,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Penduduk yang memiliki akte kelahiran belum mencapai 100% dikarenakan beberapa penduduk yang berusia lanjut tidak melakukan pengurusan terhadap administrasi kependudukan tersebut. Pada indikator administrasi pasangan yang berakte nikah tidak mencapai 50% dikarenakan akta nikah yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berasal dari penduduk yang non muslim, sedangkan penduduk muslim (beragama Islam) pembuatan akta nikah dilakukan di KUA, bukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data pasangan yang berakta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan mencapai besar dari 50% mengingat masyarakat non muslim juga tidak mencapai 50% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Bangka Barat.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat berhasil apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan peraturan pelaksana yang secara tidak langsung menjadikan desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Beberapa perubahan yang sangat mendasar terhadap status desa berdasarkan perundangan tersebut meliputi kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa.



Tabel 2.33 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)

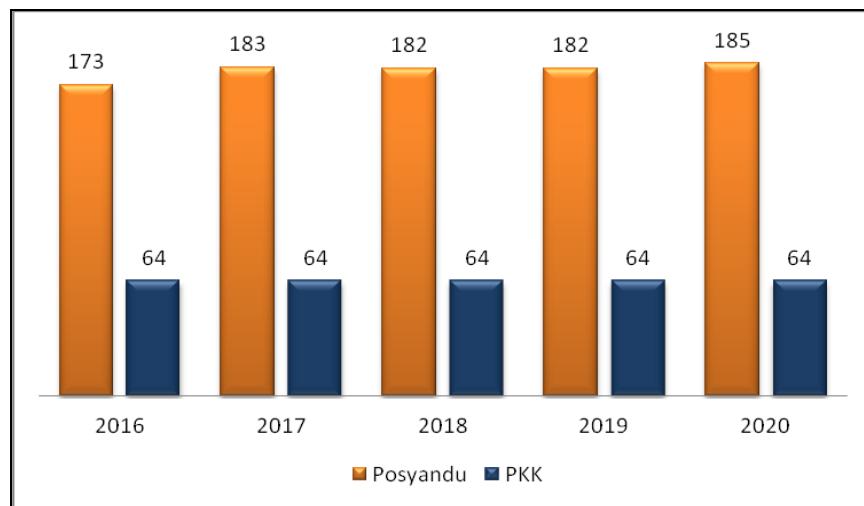
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020

Status Desa	Tahun	Kecamatan						Total Desa	%
		Muntok	Simpang Teritip	Jebus	Kelapa	Tempilang	Parittiga		
		4 Desa	13 Desa	11 Desa	13 Desa	9 Desa	10 Desa	60 Desa	
Mandiri	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	1	0	0	0	1	2	3,33
Maju	2018	0	4	1	0	2	2	9	15
	2019	0	4	1	1	3	5	14	23,33
	2020	1	4	1	1	3	4	14	23,33
Berkembang	2018	4	9	9	11	7	8	48	80
	2019	4	9	10	12	6	5	46	76,67
	2020	3	8	10	12	6	5	44	73,33
Tertinggal	2018	0	0	1	2	0	0	3	5
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tertinggal	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020, terlihat bahwa terjadi peningkatan status desa di Kabupaten Bangka Barat. Pada Tahun 2018 masih terdapat 5 persen atau sebanyak 3 desa Desa Tertinggal, namun sejak Tahun 2019 sudah tidak terdapat Desa Tertinggal di Kabupaten Bangka Barat. Sementara pada Tahun 2019 terjadi peningkatan persentase Desa Maju dari sebanyak 15 persen atau 9 desa di Tahun 2018 menjadi 23,33 persen atau 14 desa di Tahun 2019. Tahun 2020 terjadi peningkatan persentase desa maju menjadi mandiri sebanyak 3,33 persen.

Sementara jumlah kelembagaan masyarakat di desa berupa PKK dan Posyandu di Kabupaten Bangka Barat selama 5 tahun terakhir tidak terjadi. Jumlah PKK dari Tahun 2015-2020 tidak terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 64 PKK. Sementara untuk jumlah posyandu, pada Tahun 2015 sebanyak 164 dan pada Tahun 2020 menjadi 185 posyandu. Persentase PKK aktif sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2020, Posyandu juga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan balita. Posyandu yang ada di Kabupaten Bangka Barat kecenderungannya terus meningkat.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Gambar 2.42 Jumlah Posyandu dan PKK
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur kependudukan suatu daerah mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang ada disuatu wilayah. Secara visual, struktur kependudukan lebih mudah dilihat dengan menggunakan piramida penduduk. Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, terlihat bahwa penduduk usia muda sangat tinggi jika dibandingkan dengan penduduk usia tua. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. Kelompok usia produktif juga cukup tinggi sehingga memberikan bonus demografi yang selanjutnya harus dapat dikendalikan dan diarahkan melalui pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan capaian tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tentunya capaian tersebut juga didukung dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang ditujukan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.



Tabel 2.34 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bangka Barat

Tahun	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
2016	32.869	40.431	81,30
2017	30.134	38.818	77,63
2018	30.939	38.792	79,76
2019	31.680	39.286	80,64
2020	30.215	38.162	79,18

Sumber: DP2KBP3A& BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Cakupan peserta KB menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2016-2020 cakupan peserta KB di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif. Data peserta cakupan KB aktif pada tahun terbaru, yaitu tahun 2020 juga mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya dihasilkan bahwa cakupan peserta KB aktif 80,64 persen turun menjadi 79,18 persen.

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait Keluarga Berencana, untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif tentunya tidak terlepas dari peran para penyuluhan KB. Dari jumlah PLKB/PKB yang ditugaskan di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat ini belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan SPM yaitu satu petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan (66 desa/kelurahan).

15. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang mempunyai daya dorong dalam pembangunan kepariwisataan serta sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Kebijakan pembangunan sistem transportasi kedepan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi.

Berikut beberapa kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perhubungan antara lain :



a. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah penumpang/barang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang/barang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum. Arus penumpang yang secara langsung dari dan ke Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui transportasi darat melalui Bis/travel Antar Kota serta melalui transportasi laut berupa kapal angkut penumpang serta kapal angkut barang.

Tabel 2.35 Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	78	70	65	59	59
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	33.477	20.981	25.197	22.476	20.568
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang	34.022	23.151	30.341	26.914	19.842
4.	Pemasangan Rambu-rambu	jumlah	778	778	778	778	778

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang buruk. Selain itu untuk penurunan yang terjadi khususnya di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas cenderung konstan. Hal ini mengindikasikan kurangnya optimalisasi dalam penyediaan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan serta sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berlalu lintas, maka upaya pemeliharaan dan penambahan rambu-rambu perlu dilakukan

b. Jaringan Trayek

Jumlah trayek antar kota dalam provinsi pada tahun 2020 yaitu 9 (sembilan) trayek antara lain dengan trayek terminal Muntok-Pangkalpinang, Pelabuhan



Tanjungkalian–Pangkalpinang, Kelapa–Pangkalpinang, Kundi–Pangkalpinang, Parittiga–Pangkalpinang, Jebus–Pangkalpinang, dan Tempilang–Pangkalpinang. Sementara untuk jumlah trayek perkotaan terdiri dari 4 (empat) trayek yaitu terminal Muntok–Pelabuhan Tanjungkalian dan Angkutan Dalam Kota Muntok. Sedangkan untuk trayek pedesaan terdapat 5 (lima) trayek yaitu terminal Muntok-terminal Parittiga, terminal Muntok-terminal Kelapa, dan terminal Muntok-Kecamatan Tempilang, terminal Muntok- Mayang, dan terminal Muntok-Kundi.

Tabel 2.36 Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Trayek Antar Kota dalam Provinsi	8	8	8	9	9	9
2.	Jumlah Trayek Perkotaan dalam Kabupaten	4	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Trayek Perdesaan dalam Kabupaten	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Dari data diatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yaitu sebanyak 60 maka dengan jumlah trayek dalam pedesaan sebanyak 5 (lima) trayek maka masih sangat kecil. Namun hal ini juga bisa diartikan bahwa ada alternatif lain dalam keterhubungan transportasi antar desa yaitu berupa ketersediaan jasa ojek dan kurangnya minat masyarakat untuk mengguna jasa transportasi pedesaan.

c. Uji KIR Angkutan Umum

Pada tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat telah memiliki tempat yang representatif sesuai standar untuk pengujian kendaraan bermotor, namun masih terkendala dengan kurangnya SDM yang terlatih serta prasarana pendukung pengujian KIR.

Tabel 2.37 Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Tempat Uji KIR	1	1	1	1
2.	Petugas Uji KIR	2	2	2	2
3.	Lama Pengujian KIR (menit)	25	25	25	25
4.	Jumlah kendaraan	131.482	139.773	143.771	168.204
	- Kendaraan Roda Dua	120.526	128.184	131.740	155.565
	- Kendaraan Roda Empat/lebih	10.956	11.589	11.991	12.639
5.	Jumlah Kendaraan wajib KIR yang diuji KIR	1.679	1.609	1.745	1.604
	- Ulang	1.611	1.532	1.646	1.546



No.	Indikator	2017	2018	2019	2020
	- Baru	68	77	99	58
6.	Biaya Pengujian KIR				
	- Mobil penumpang	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Mobil Bus	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Mobil Barang	52.000	52.000	52.000	52.000
	- Kereta gandeng	42.000	42.000	42.000	42.000

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

d. Jumlah pelabuhan laut/ terminal bis

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan Laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi dan Pelabuhan Tanjung kalian. Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekat ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai. Sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT.Timah Tbk saja. Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal ferry.

Untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) buah terminal, yang terletak di kecamatan Muntok, kecamatan Kelapa dan kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi yang dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Namun, rute bis via terminal yang ada saat ini belum melengkapi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.38 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rambu - rambu Lalu Lintas (Unit)	778	778	778	778	778
2.	Jumlah Traffic Light (Lokasi/Unit)	4/24	4/24	5/29	5/29	5/29
3.	Panjang Pagar Pengaman Jalan (m)	2620	2620	2620	2620	2620
4.	Jumlah Deliniator (Unit)	542	542	542	542	542
5.	Panjang Marka Jalan (m)	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900



No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Jumlah Warning Light (m)	24	24	24	24	24
7.	Jumlah Traffic Cone (unit)	156	156	156	156	156
8.	Panjang Median Jalan	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

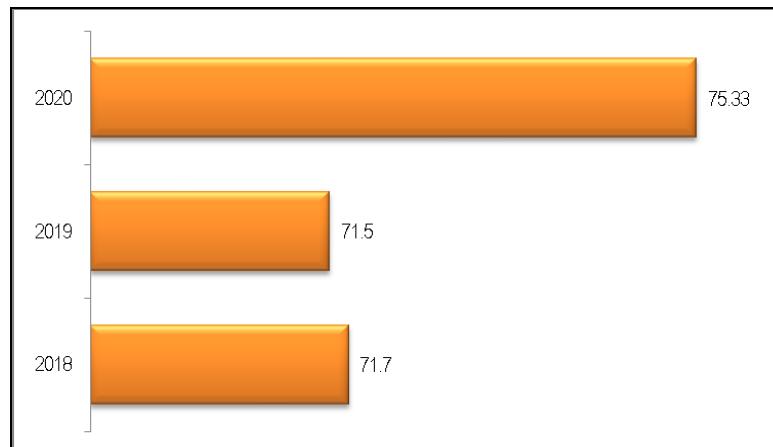
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Guna meningkatkan upaya keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, telah dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2017 kecuali untuk Jumlah *Traffic Light* (lokasi/unit) bertambah dari 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) unit bertambah menjadi 5 (lima) lokasi sebanyak 29 unit yang merupakan hibah dari provinsi.

16. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat suatu daerah agar dapat bersaing secara global. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung pertukaran informasi dan terjadinya komunikasi. Semakin baik akses masyarakat terhadap teknologi, maka semakin baik pula pemahaman terhadap informasi.

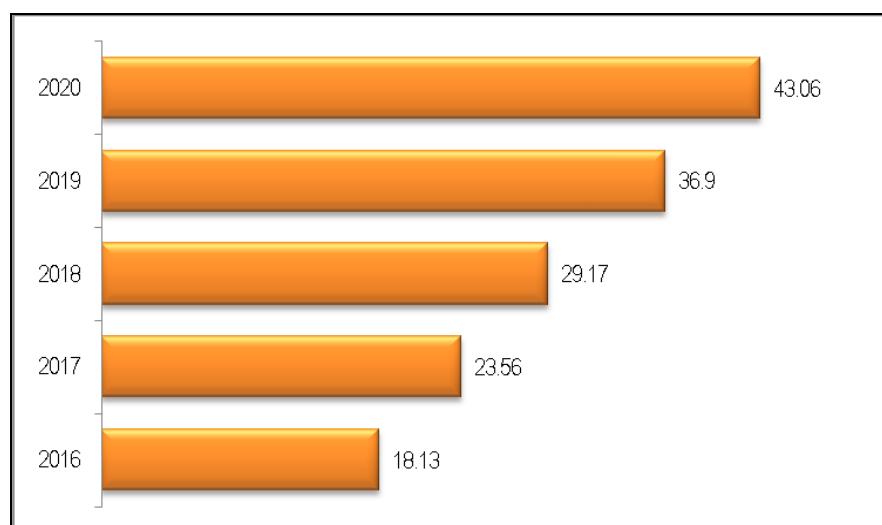
Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang perkembangannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan wilayah sekitarnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah diutarakan bahwa terdapat banyak potensi-potensi internal daerah Bangka Barat, yang bisa berkembang dengan adanya suntikan investasi ataupun kerjasama dengan investor dari luar daerah. Oleh karena itu, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan salah satu poin krusial dalam menunjang perkembangan dan pembangunan wilayah. Apalagi dengan kondisi fisik geografisnya yang berada pada wilayah kepulauan, perlu adanya infrastruktur penunjang yang bisa mengatasi kendala (*barrier*) fisik ini. Teknologi nirkabel (*wireless*) merupakan salah satu tumpuan dalam sistem informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Gambar 2.43 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel dalam 3 Bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020

Dampak dari berkembangnya teknologi dengan pesat adalah keterbukaan komunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat, dengan berkembangnya teknologi masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya dan mengetahui kepentingan publik lainnya.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Gambar 2.44 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

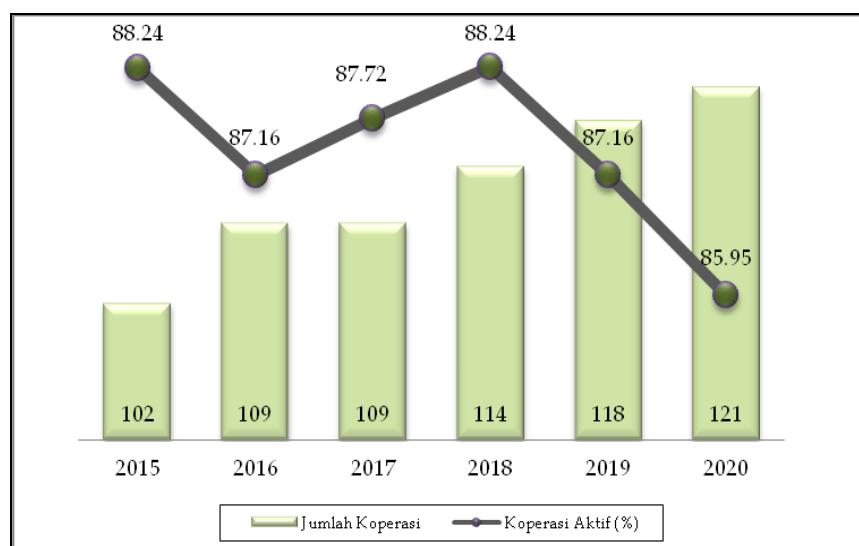
17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar



kekeluargaan. Dalam era desentralisasi daerah, koperasi berperan besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh guna menjangkau lapisan bawah dari ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah perdesaan. Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber keuangan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar.

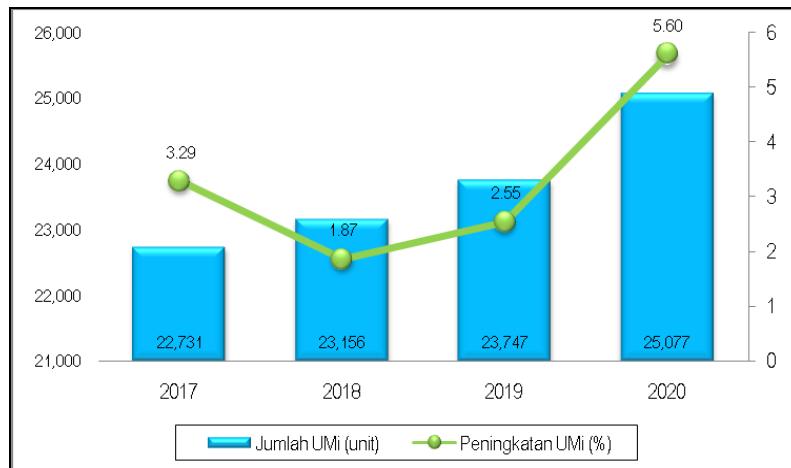
Dengan berkembangnya koperasi diharapkan turut membantu perputaran perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang bergelut pada usaha mikro dan kecil. Ketiadaan jaminan yang sering kali menjadi penghambat untuk melakukan pinjaman pada perbankan, menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2015 ke tahun 2020 mengalami peningkatan.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2020

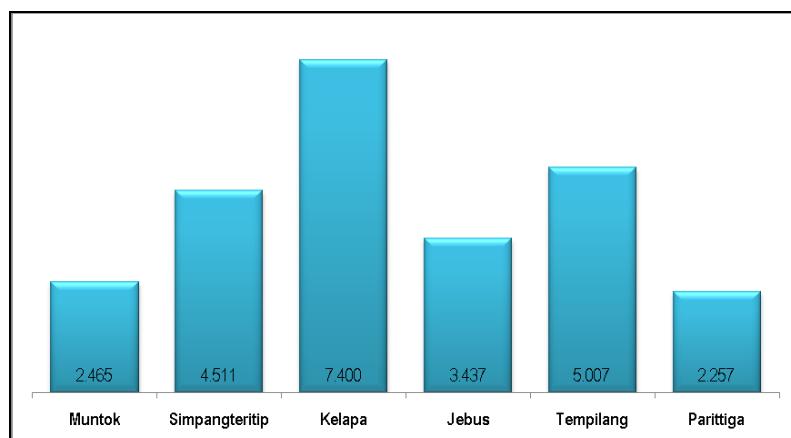
Gambar 2.45 Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Dilihat dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2017 sampai dengan 2020, menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat, begitu pula dengan persentase peningkatan/pertumbuhan usaha mikro menunjukkan kecenderungan meningkat khususnya di tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2017 jumlah usaha mikro sebanyak 22.731 unit menjadi 25.077 unit di tahun 2020.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 2.46 Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 2.47 Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

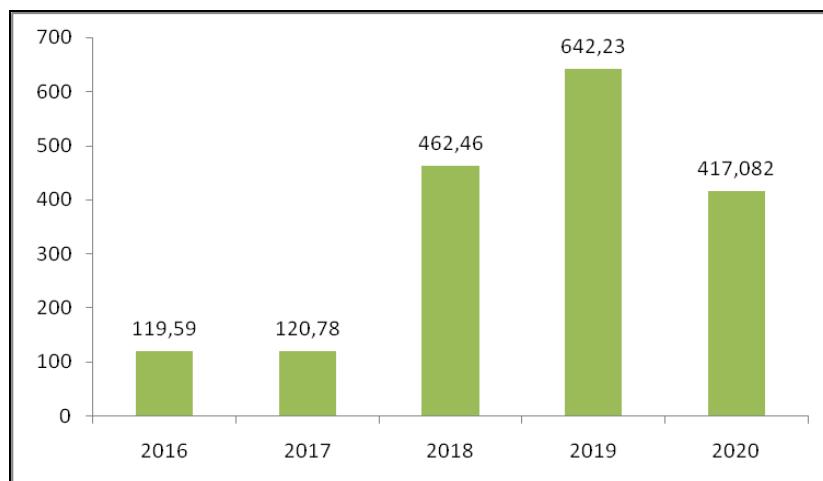
Berdasarkan sebaran UMi di Kabupaten Bangka Barat, jumlah UMi terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa sebanyak 7.400 unit UMi atau 29,51 persen dari total seluruh UMi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sektor terbanyak yang digeluti oleh masyarakat Kecamatan Kelapa ada pada sektor Pertanian yaitu sebanyak 6.176 unit UMi atau 83,46 persen. Jumlah UMi terbanyak kedua adalah di Kecamatan Tempilang yaitu 5.007 unit UMi atau 19,97 persen.

18. Penanaman Modal

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian membuka peluang untuk pengembangan investasi



kedepan. Investasi yang beskala nasional baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah terealisasi di Kabupaten Bangka Barat.



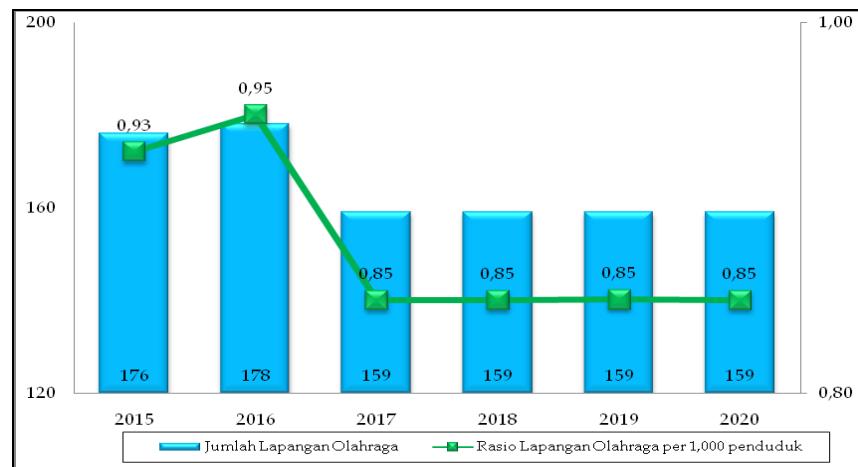
Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Gambar 2.48 Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

Dilihat dari gambar di atas terjadi penurunan pertambahan nilai investasi di tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2019. Meskipun jika dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Bangka Barat sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu dengan pertambahan sebesar 100 miliar per tahun, namun masih terdapat permasalahan yaitu masih sulitnya mendapatkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga data yang dihasilkan belum dapat menggambarkan kondisi riil investasi di Kabupaten Bangka Barat.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Fasilitas olahraga di Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana olahraga khususnya jika dilihat dari rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk pada tahun 2015-2020.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Gambar 2.49 Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020

Jika dilihat dari prestasi olahraga melalui Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuaraan Daerah, Kabupaten Bangka Barat selalu masuk dalam peringkat ke-6 atau ke-7 besar. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga pelajar maupun olahraga prestasi di Kabupaten Bangka Barat belum dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan prestasi pada kejuaraan POPDA dengan menduduki peringkat 3 dari 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.39 Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2020

Kabupaten/Kota	Peringkat							
	Porprov 2014	Kejurda 2015	Popda 2016	Kejurda 2017	Popda 2018	Porprov 2018	Kejurda 2019	Popda 2020
Bangka	4	5	4	5	3	1	4	2
Pangkalpinang	1	4	3	3	1	2	1	1
Bangka Tengah	7	2	2	4	6	3	5	5
Belitung	3	1	5	1	4	4	3	6
Belitung Timur	2	3	6	2	5	5	2	-
Bangka Selatan	5	7	1	7	2	6	7	4
Bangka Barat	6	6	7	6	7	7	6	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Rendahnya prestasi olahraga baik olahraga pendidikan maupun olahraga prestasi Kabupaten Bangka Barat secara umum disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik



pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan, serta pendanaan yang belum memadai. Namun di setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu memberikan Hibah untuk kemajuan dunia olahraga melalui lembaga KONI Kabupaten Bangka Barat.

20. Statistik

Ketersediaan data statistik sektoral bagi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka menyajikan potensi serta sebagai bahan analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pengelolaan data informasi pembangunan sebagai optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, untuk ketersediaan beberapa data statistik sektoral dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat disajikan secara maksimal dikarenakan belum tervalidasi dan terkelola dengan baik sehingga kedepan masih perlu dilakukan pemberhanan terhadap pengelolaan data statistik sektoral daerah.

21. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja Urusan Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah menerapkan persandian dalam pengelolaan data dan informasi antar Perangkat Daerah melalui aplikasi datakite.bangkabaratkab.go.id.

22. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditinjau dari tingkat pemanfaatan seni dan budaya dalam penyelenggaraan event, baik di daerah maupun luar daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejauh ini, seni dan budaya daerah umumnya ditampilkan pada upacara adat, seperti perang ketupat, tujuh likur, dan acara-acara resmi kedaerahan. Sementara sarana penunjang seperti gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat banyak memiliki benda, situs



bersejarah. Sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari hasil survey Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi terdapat 52 benda, situs dan kawasan bersejarah di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2015 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional bahwa Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan Muntok termasuk ke dalam 35 cagar budaya yang masuk dalam peringkat nasional. Kemudian berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/426/2.16.1.1/2018 bahwa bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yaitu Eks. Kantor Pusat PN. Timah Belanda, Menumbing Berghotel, Rumah Residen Mayor Cina, Hollandsche Chinesche School, Gereja Katolik Pelindung Para Pelaut, Gereja Bethesda (GPIB), Menara Suar Tanjung Kalian, Makam Pangeran Hario Pakuningprang, Kelenteng Kong Fuk Miau, dan Masjid Jamik. Sedangkan pada Tahun 2019 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat :

1. Nomor 188.45/269/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Rumah Temenggung Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
2. Nomor 188.45/270/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks European School Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
3. Nomor 188.45/272/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Meriam Lantaka Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
4. Nomor 188.45/276.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Makam Wan Abdul Jabar, Makam Wan Akub, Makam Wan Serin, Makam Abang Pahang, Makam Isteri Abang Pahang, Makam Abang Muhammad Toyib, Makam Abang Arifin, dan Makam Isteri Abang Arifin Sebagai Struktur Cagar Budaya;
5. Nomor 188.45/282.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Benteng Sungai Buluh Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bangka Barat; dan
6. Nomor 188.45/284.B/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks Kantor Sahbandar Muntok Sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Pada Tahun 2020 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat tentang Bangunan Cagar Budaya:

1. Nomor 188.45/396/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Bangunan Gudang Kuning sebagai Bangunan Cagar Budaya
2. Nomor 188.45/397/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benda Mobil Sedan BN 10 Menumbing sebagai Bangunan Cagar Budaya
3. Nomor 188.45/398/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Rumah Residen sebagai Bangunan Cagar Budaya
4. Nomor 188.45/399/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benteng Tempilang sebagai Bangunan Cagar Budaya



5. Nomor 188.45/400/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Benteng Kute Seribu sebagai Bangunan Cagar Budaya
6. Nomor 188.45/401/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Limbung sebagai Bangunan Cagar Budaya

Balai Purbakala Jambi sudah menginventaris beberapa bangunan diantara lain Benteng Kota Seribu, Makam Kanjeng Pangeran Hario Pakuningprang, Makam Bangsawan di Kecamatan Muntok, Benteng Sungai Buluh di Kecamatan Jebus serta Benteng Kota di Kecamatan Tempilang. Bangunan yang sudah diinventaris telah dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.40 Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2020

No.	Uraian	Hasil Inventarisasi 2017	Realisasi 2017	Hasil Inventarisasi 2018	Realisasi 2018	Hasil Inventarisasi 2019	Realisasi 2019	Hasil Inventarisasi 2020	Realisasi 2020
1.	Benda Warisan Budaya	5	0	5	0	5	0	1	1
2.	Warisan Tak Benda	3	0	3	0	5	0	4	0
3.	Bangunan Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya	65	2	65	6	65	13	24	17
4.	Even Budaya/Even Tradisi	33	31	26	34	26	35	35	20
5.	Kesenian Budaya yang diselenggarakan	4	4	4	5	4	3	4	3
6.	Pelestarian nilai sejarah	-	-	1	1	1	1	1	0
Total		110	37	104	46	104	52	69	41
Persentase		33,63		44,23			50		59,42

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

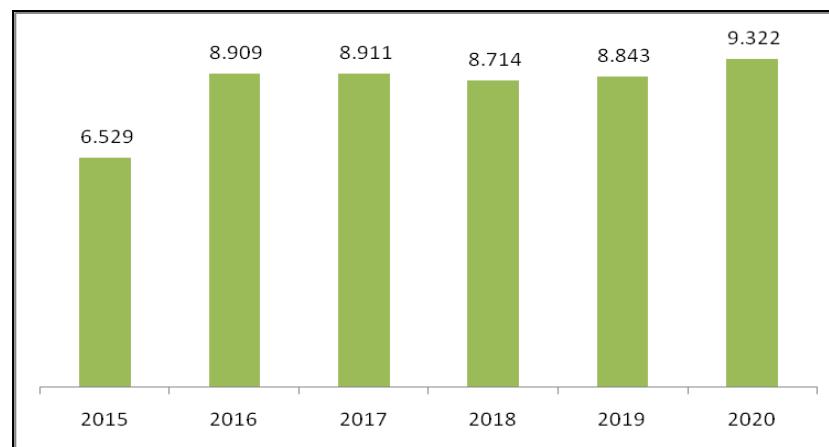
Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2020 target Bangunan Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya terealisasi sebanyak 17 bangunan, event budaya dapat terlaksana sebanyak 20 kali, kesenian/budaya diselenggarakan sebanyak 3 kali dan pelestarian nilai sejarah (Kegiatan napak tilas) tidak dapat terlaksana dikarenakan pandemi Covid-19.

23. Perpustakaan

Budaya membaca merupakan kebiasaan yang perlu terus diasah dan dipupuk sejak dini. Membaca membuka wawasan terhadap berbagai macam hal yang bermanfaat. Perpustakaan sebagai gudang buku sangat berperan penting dalam meningkatkan



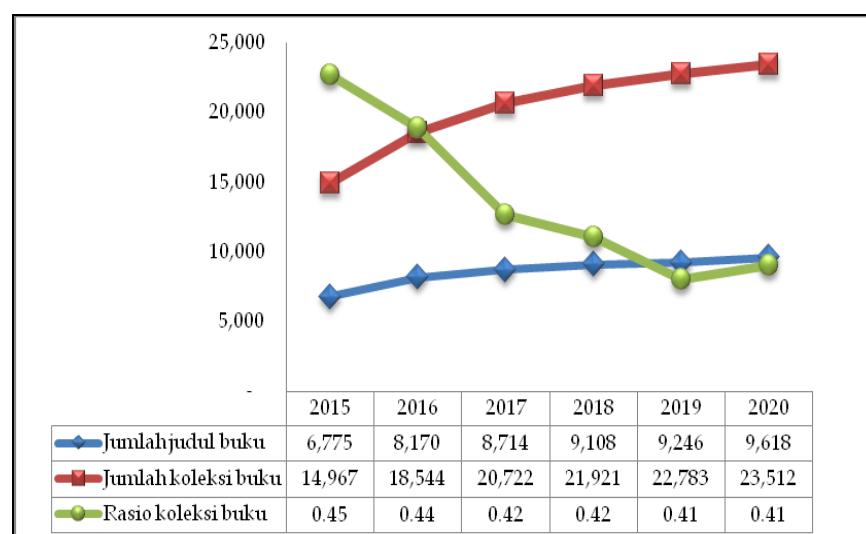
minat baca masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari .843 orang menjadi 9.322 orang.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Gambar 2.50 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, maka ketersediaan dan keragaman buku bacaan sangat menentukan. Sampai dengan tahun 2020 koleksi dan judul buku perpustakaan terus meningkat baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri maupun bantuan dari provinsi dan pusat.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Gambar 2.51 Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan
Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2020

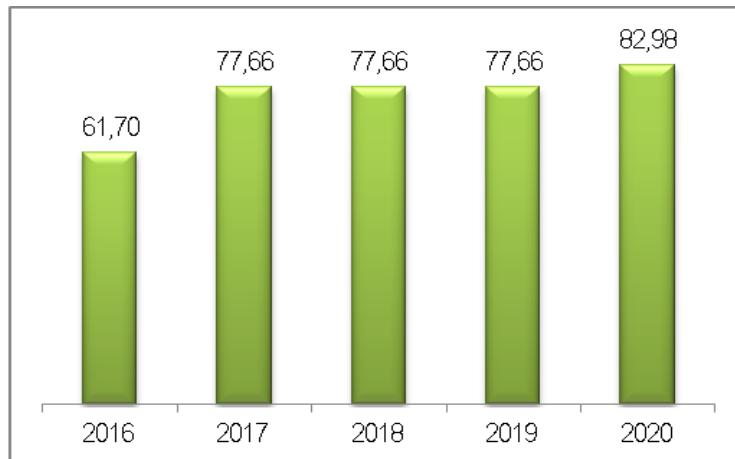


Selama lima tahun terakhir, jika dilihat dari koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Barat baik dari jumlah judul maupun jumlah buku terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Pada Tahun 2015, jumlah judul buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6.775 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 14.967 buku dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 9.618 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 23.512 buku. Dilihat dari ketersediaan buku tersebut, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan dan keberagaman jumlah dan koleksi buku bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan teknologi di masyarakat, maka kebutuhan akan bahan baca dalam bentuk digital menjadi suatu keharusan. Dilihat keterediaan koleksi bahan pustaka digital di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan Tahun 2020 hanya sebanyak 124 koleksi e-book. Minimnya koleksi bahan pustaka digital tersebut disebabkan masih sulitnya pengadaan bahan pustaka digital serta minimnya sarana dan prasarana untuk alih media. Melihat kondisi tersebut, maka masih perlu dilakukan peningkatan pada koleksi bahan pustaka digital serta sarana dan prasarana untuk alih media.

24. Kearsipan

Dalam rangka pengelolaan karsipan di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2012 telah dibangun gedung *record center*/depot arsip untuk menyimpan/menyelamatkan dokumen arsip Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk pencapaian pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Kelurahan dalam rangka peningkatan aparatur pengelola karsipan. Persentase Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku selama Tahun 2016 – 2020 meningkat. Pada Tahun 2016 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku sebesar 61,70 persen, pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 77,66 persen dan pada Tahun 2020 sebesar 82,98 persen..



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Gambar 2.52 Persentase Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang Telah Mengelola Arsip secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi subsektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dengan sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Diantara komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi antara lain adalah ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan di laut, potensi yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir, namun saat ini belum maksimal dikembangkan oleh masyarakat.

Peningkatan jumlah masyarakat nelayan dalam beberapa tahun terakhir cukup menjelaskan bahwa subsektor perikanan termasuk yang diminati masyarakat sebagai ladang usaha. Adanya sumber daya alam subsektor perikanan dan sumber daya manusia yang bergerak di subsektor tersebut selanjutnya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.41 Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

No.	Kecamatan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Muntok	917	1.185	1.219	1.264	1.321	1.321
2.	Simpangteritip	754	902	871	899	859	859
3.	Kelapa	226	271	380	380	335	335
4.	Tempilang	455	435	408	419	624	624
5.	Jebus	190	257	326	317	406	406



No.	Kecamatan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Parittiga	600	754	712	751	899	899
	Jumlah	3.142	3.804	3.916	4.030	4.444	4.444

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021.

Jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus meningkat, yaitu dari 3.142 orang di tahun 2015 menjadi 4.444 orang di tahun 2020 yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan paling banyak, dan diikuti oleh Kecamatan Simpangteritip serta Kecamatan Parittiga.

Tabel 2.42 Jumlah Produksi Perikanan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton)

No.	Jumlah Produksi Perikanan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Tangkap	14.114	12.974	12.757	14.979	16.916,32	19.341,90
2.	Budidaya Air Tawar	144,19	25,40	28,04	65,25	90,33	105,81
3.	Budidaya Air Laut	733,00	857,90	259,76	286,24	460,98	823,31

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Dilihat perkembangannya selama 5 (lima) tahun terakhir, produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat didominasi oleh perikanan tangkap. Selama tiga tahun terakhir jumlah produksi perikanan cenderung meningkat, baik perikanan tangkap, budidaya air tawar, dan budidaya air laut. Pada tahun 2020 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 19.341,90 ton, budidaya air tawar sebesar 105,81 ton dan budidaya air laut sebesar 823,31 ton.

Tabel 2.43 Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015-2020 (rupiah)

No	Nilai Produksi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	287.999.290.000	239.730.420.000	449.026.800.000	547.851.080.000	591.662.000.000	632.902.236.000
2.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	3.164.530.000	597.830.000	635.060.000	1.696.699.750	2.291.137.500	2.747.875.000
3.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	3.042.500.000	6.584.000.000	1.990.640.000	2.284.200.000	3.690.000.000	30.534.700.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021.

Sejalan dengan produksi perikanan, nilai produksi perikanan selama beberapa tahun terakhir juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai produksi



perikanan tangkap sebesar Rp632.902.236.000,00, budidaya air tawar sebesar Rp2.747.875.000, dan budidaya air laut sebesar Rp30.534.700.000.

Tabel 2.44 Jumlah Kapal Penangkapan Ikan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

No.	Jenis	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kapal Tanpa Motor	302	291	218	133	584	584
2.	Perahu Motor Tempel	1.572	1.601	1.684	1.650	1.960	1.960
3.	Kapal Motor	716	964	1.018	697	964	1.018

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021.

Sarana penangkapan ikan berupa kapal motor pada tahun 2020 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 54 unit yaitu dari 964 unit di tahun 2019 menjadi 1.018 unit di tahun 2020. Sementara untuk kapal tanpa motor dan perahu motor tempel di tahun 2020 tidak terjadi peningkatan.

Jika dilihat dari prasarana bidang perikanan sampai dengan tahun 2020 seperti dermaga tambat perahu penangkap ikan rakyat di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 11 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sementara jumlah dermaga tambat kapal penangkap ikan rakyat sebanyak 1 unit dan tempat pelelangan ikan pada tahun 2020 sebanyak 1 unit di Kecamatan Muntok.

2. Pariwisata

Berdasarkan data kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa potensi pariwisata dapat berkembang kedepannya jika dikelola dengan baik dan didukung penuh oleh sektor lainnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan pemasaran yang dilakukan secara luas dan terbuka dengan melibatkan para *stakeholder* pariwisata dapat memberikan peluang yang menjanjikan bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat cukup beragam seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan atau regulasi yang mendukung sektor pariwisata agar dapat mempertahankan jati diri /karakter lokal dengan melestarikan nilai-nilai sejarah dan tradisi khas Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.45 Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat

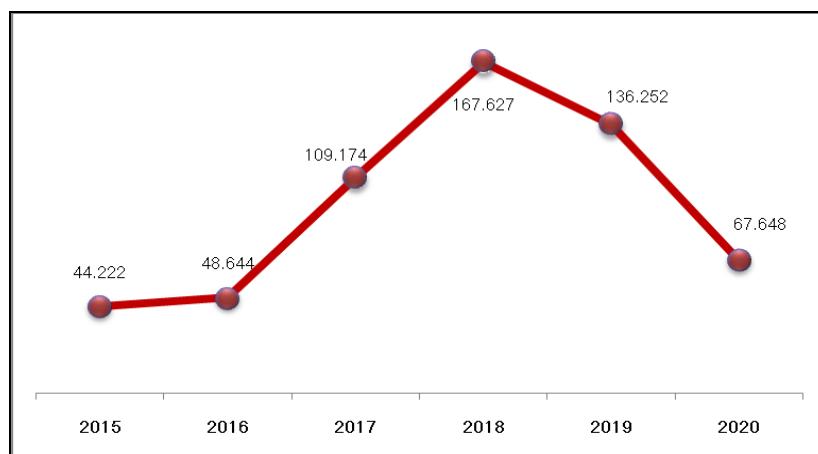
Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara



Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
	Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris		Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpang Teritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang lyu eluk Limau

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2021

Meskipun kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat untuk subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah, namun menunjukkan nilai yang positif yaitu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kontribusi subsektor ini sebesar 1,26 persen dan di tahun 2020 menjadi 1,40 persen dalam PDRB.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2021

Gambar 2.53 Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2020, jenis hotel yang ada hanya hotel melati dengan jumlah 10 unit, menurun jika



dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 12 unit. Sementara jumlah penginapan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebanyak 24 unit, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah 26 unit.

Tabel 2.46 Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017-2020

No	Jenis Hotel dan Penginapan	2017	2018	2019	2020
1.	*Hotel				
	Hotel Melati	12	12	12	10
2.	** Penginapan Lainnya				
	a. Motel	12	0	0	0
	b. Bungalow	4	4	4	4
	c. Mess	13	13	13	13
	d. Home Stay	27	7	7	6
	e. Guest House	14	2	2	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Meskipun daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam serta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini belum terkelola secara profesional dan belum memiliki infrastruktur yang memadai. Sebanyak 11 desa menjadi desa wisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang dimiliki oleh desa masing-masing serta telah terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna atau badan usaha milik desa (BUMDes). Desa wisata tersebut antara lain Desa Air Putih dengan potensi Pantai Tanjung Ular, Desa Air Belo dengan potensi Bukit Kukus, Desa Belo Laut dan Desa Bakit memiliki wisata andalan kuliner, Desa Tanjung Punai, Desa Kapit dan Desa Teluk Limau dengan potensi pantai dan mangrove, Desa Air Limau memiliki wisata edukasi berbasis lingkungan dan budaya, Desa Kelabat memiliki objek batu utama batu granit Belimbing, Desa Jebu Laut dan Desa Penganak dengan objek kawasan pantai. Kedepan perlu dilakukan pengembangan yang disinergikan dengan aspek pembangunan lainnya seperti aspek perekonomian dan sosial budaya serta aspek infrastruktur sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas umum guna menunjang kepariwisataan.

Tabel 2.47 Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Objek Wisata Budaya	n/a	34	35	41
2.	Objek Wisata Bahari	5	16	16	19



No.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
3.	Objek Wisata Cagar Alam	n/a	0	0	0
4.	Objek Wisata Pertanian	n/a	0	3	7
5.	Objek Wisata Buru	n/a	0	0	0
6.	Objek Wisata Alam	5	6	8	13
7.	Objek Wisata Sejarah	10	10	10	12
8.	Objek Wisata Religi	1	1	2	3
9.	Objek Wisata Pendidikan	n/a	0	0	0
10.	Objek Wisata Kuliner	n/a	0	0	0
11.	Objek Wisata Belanja	n/a	0	0	0
12.	Objek Wisata Buatan	n/a	0	2	5

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat, maka diperlukan pemasaran yang tepat serta promosi wisata yang luas. Pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Biro Wisata namun hanya memiliki agen perjalanan wisata sebanyak 7 agen. Untuk ketersediaan pemandu wisata, sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 orang pemandu wisata yang seluruhnya telah bersertifikat. Untuk mendukung kepariwisataan, pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat terdapat 2 toko cenderamata dan 7 pedagang cenderamata non toko.

Tabel 2.48 Usaha Jasa Makanan/Minuman
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No.	Jenis	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Restoran	7	2	4	4
2.	Jumlah Cafetaria/Cafe	12	13	12	12
3.	Jumlah Kantin	1	1	1	1
4.	Jumlah Coffee Shop	4	4	4	4
5.	Jumlah Pub/Bar	1	1	1	1
6.	Jumlah Warung/Kedai Makan	49	53	50	50

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Untuk usaha jasa makanan/minuman di Kabupaten Bangka Barat, selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung tidak ada perubahan.

Tabel 2.49 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020



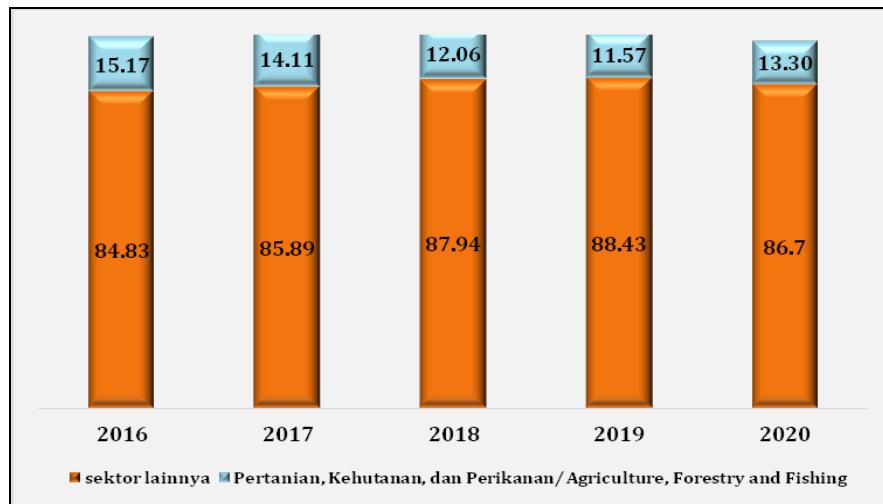
Tahun	Pajak Hotel (Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hotel)	Pajak Restoran (Rumah Makan)	Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga)	Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu)	Jumlah
2015	120.960.019,00	1.044.515.044,00	36.911.000,00	29.417.000,00	1.231.803.063,00
2016	107.003.033,00	1.225.012.102,00	12.879.750,00	37.804.000,00	1.382.698.885,00
2017	108.295.589,00	1.908.482.123,70	34.286.000,00	120.018.000,00	2.171.081.712,70
2018	94.254.117,00	2.422.680.765,00	38.846.000,00	158.042.000,00	2.713.822.882,00
2019	96.795.137,00	2.114.418.273,00	22.235.100,00	160.100.000,00	2.393.548.510,00
2020	63.051.026,00	2.351.093.848,00	6.434.000,00	187.038.000,00	2.607.616.874,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kembali peningkatan sebesar Rp214.068.364,00 yang semula Rp2.393.548.510,00 menjadi Rp2.607.616.874. Peningkatan PAD sektor pariwisata pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh pajak restoran (rumah makan) yang semula di Tahun 2019 Rp2.114.418.273,00 dan di tahun 2020 Rp2.351.093.848,00. Selain itu oleh pajak Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu) yang juga mengalami peningkatan semula pada tahun 2019 Rp160.100.000,00 menjadi Rp187.038.000,00 pada tahun 2020.

3. Pertanian

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat, selama 5 (lima) tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah bergeser menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kedepan jika dikelola dengan tepat dan optimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

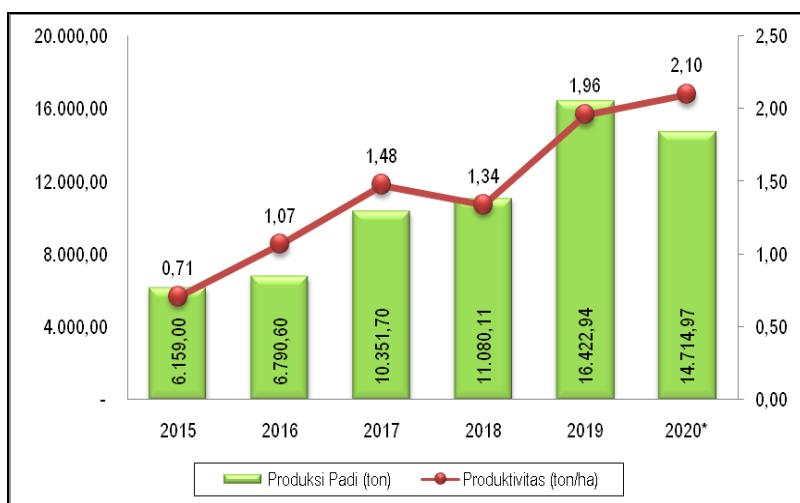


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.54 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari 15,17 persen di tahun 2016 menjadi 13,30 persen di tahun 2020.

Sementara jika dilihat dari sisi produksi dan produktivitas, perkembangan statistik tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat khususnya padi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bagi petani untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi serta meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya padi misalnya pengetahuan tentang aplikasi teknologi pertanian.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Gambar 2.55 Jumlah Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020



Produktivitas beberapa tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bangka Barat secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, produktivitas padi sebesar 2,10 ton/ha dengan jumlah produksi padi sebesar 14.714,97 ton.

Sementara jika dilihat dari infrastruktur pertanian, untuk irigasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat difungsikan secara maksimal karena belum terbangun sistem pengairan persawahan masyarakat. Irigasi teknis sebagai saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di koneksi dengan saluran tersier untuk pengairan sampai dengan Tahun 2019, dari total areal pertanian seluas 4.939 ha yang telah beririgasi teknis seluas 561 ha (11,36 persen).

Tabel 2.50 Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

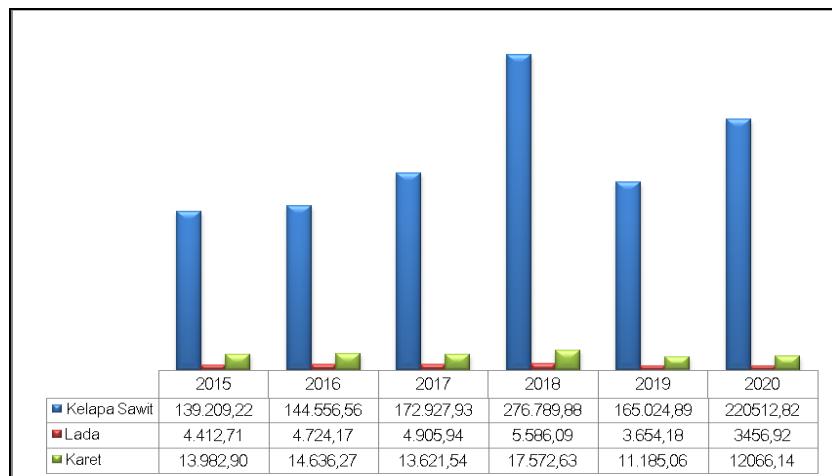
No.	Hortikultura	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Luas Areal Hortikultura (Ha)	833,29	1.176,87	953,11	966,17	1.285,67
1.	Luas Areal Buah-Buahan	683,62	922,37	735,01	759,35	1020,09
2.	Luas Areal Sayuran	146,60	253,80	215,33	202,98	254,54
3.	Luas Areal Bahan Obat Nabati	3,07	0,70	2,77	3,85	11,04
B.	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	1.456,77	3.961,29	8.686,24	8.021,72	3.662,25
1.	Jumlah Produksi Buah-Buahan	862,06	2.725,95	7.281,45	6.981,93	2.618,07
2.	Jumlah Produksi Sayuran	573,90	1.187,21	1.366,05	1.024,02	1.030,63
3.	Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati	20,81	48,13	38,74	15,77	13,65
C.	Nilai Produksi Hortikultura	15.523.922.500	44.387.119.500	86.405.845.250	86.650.183.350	38.256.728.500
1.	Nilai Produksi Buah-Buahan	8.517.465.000	29.863.660.000	69.790.472.500	74.266.117.500	25.818.660.000
2.	Nilai Produksi Sayuran	6.886.800.000	14.246.712.000	16.392.612.000	12.288.207.600	12.367.608.000
3.	Nilai Produksi Bahan Obat Nabati	119.657.500	276.747.500	222.760.750	95.858.250	70.460.500

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Untuk lahan perkebunan rakyat, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan rakyat dicadangkan seluas ±14.331 ha dan untuk perkebunan besar seluas ±41.860 ha. Jika dilihat dari eksisting perkebunan besar sampai saat ini seluas 37.111,66 ha yang telah digunakan oleh perusahaan besar sawit, maka sisa untuk perkebunan besar dari cadangan dalam RTRW adalah hanya seluas 4.748,34 ha sehingga tidak banyak lagi potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan besar kecuali ada peralihan rencana/fungsi lahan dari RT/RW.



Komoditas perkebunan rakyat yang menjadi unggulan di Kabupaten Bangka Barat serta memiliki potensi antara lain adalah sawit, karet dan lada. Untuk potensi lada, meskipun Kabupaten Bangka Barat memiliki brand yang cukup terkenal yaitu "Muntok White Pepper", namun sampai saat ini belum dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertanam lada sehingga produksi lada masyarakat masih terbilang rendah.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2021

Gambar 2.56 Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton)

Persoalan fluktuasi harga komoditas perkebunan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020. Rendahnya harga komoditi perkebunan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020. Kondisi harga komoditi lada, karet dan kelapa sawit yang terus menurun ini mengakibatkan menurunnya semangat para petani. Produksi komoditi yang rata-rata masih rendah disebabkan produktivitas akibat kualitas benih tidak baik, pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal baik karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani maupun karena terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke Tanaman Menghasilkan, umur tanaman sudah tua, dan pengaruh perubahan iklim yang terjadi dimana musim panas cukup panjang. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebutlah yang menjadi faktor penyebab nilai produksi pada komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 tidak dapat mencapai angka target yang telah ditetapkan.

Terkait perternakan, secara umum peternak di Kabupaten Bangka Barat adalah peternak sapi dan peternak kambing. Fokus dari perangkat daerah adalah pengembangan peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan lokal yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari wilayah sekitar. Secara umum peternak sapi di



Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peternak yang mulai dari pembibitan serta peternak yang fokus pada penggemukan daging.

Sebagian besar peternak yang ada di Kabupaten Bangka Barat merupakan peternak pemula, dimana terkadang pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan. Beberapa strategi telah dilakukan seperti dengan melakukan program bergulir anakan sapi, program inseminasi buatan (IB), serta program layanan kesehatan hewan agar populasi sapi meningkat dan diharapkan agar pemenuhan kebutuhan daging lokal juga terus meningkat.

Tabel 2.51 Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	2016		2017		2018		2019		2020	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)								
1	Sapi	1.572	145.860	1.670	182.437	1.630	251.104	1.757	303.389	1.375	246.167
2	Kambing	287	4.086	349	11.248	392	12.536	367	10.563	517	12.384
3	Kerbau	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
4	Domba	44	77	48	-	20	115	89	383	79	-
TOTAL		2.353	161.178	2.494	205.250	2.042	263.755	2.213	314.335	1.971	258.551

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Pada tahun 2020, produksi daging sapi mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 23,25% dibanding tahun 2019. Sebaliknya, produksi daging kambing mengalami peningkatan sebesar 17,24%. Secara umum, produksi daging ruminansia menurun sebesar 21,58% pada tahun 2020. Penurunan produksi daging ruminansia mungkin disebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi Covid 19 yang menghantam hampir semua sektor termasuk sektor ekonomi di sepanjang tahun 2020.

Tabel 2.52 Populasi dan Produksi Ternak Unggas
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	2016		2017		2018		2019		2020	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)								
1.	Ayam Petelur	6.181	13.036	14.751	20.540	8.502	26.826	11.361	32.757	4.300	34.276
2.	Ayam Pedaging	7.504	272.958	5.560	457.869	-	843.516	-	766.669	-	1.155.163
3.	Ayam Buras	142.409	37.914	148.771	34.638	166.105	39.077	145.974	55.771	120.029	71.220
4.	Itik	6.293	1.749	8.514	1.682	18.972	6.464	6.333	3.722	7.112	3.742
5.	Puyuh	829	100	502	99	-	-	125	82	1.495	59
TOTAL (Kg)		163.216	325.757	178.098	514.828	193.579	915.883	163.793	859.000	132.936	1.264.460

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021.



Produksi ternak unggas di Kabupaten Bangka Barat didukung oleh beberapa jenis ternak yaitu ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan puyuh dengan harga rata-rata per kilogramnya Rp37.500,00 sehingga nilai produksi ternak unggas pada tahun 2020 adalah Rp47.417.250.000,00. Ternak unggas (non ruminansia) di Kabupaten Bangka Barat lebih didominasi oleh ayam pedaging sebagaimana terlihat pada tabel di atas

4. Kehutanan

Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan kawasan hutan, namun dengan potensi kehutanan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan urusan kehutanan hanya difokuskan pada pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing seluas 3.333,19 ha.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB Kabupaten Bangka Barat merupakan sektor yang cukup dominan, yaitu menempati urutan kedua setelah industri pengolahan. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak dieksplorasi selama ini serta telah banyak diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta.

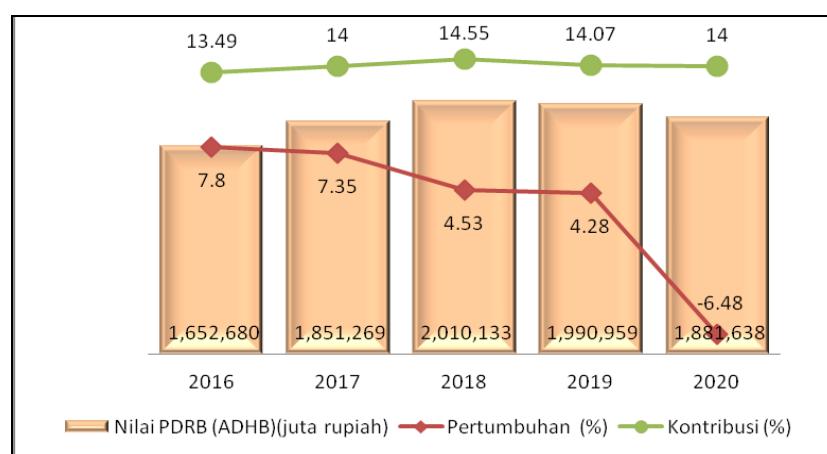
Sesuai dengan kewenangan daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota hanya sebatas energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sampai saat ini di Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki sumber energi dari panas bumi yang dikelola/dimanfaatkan.

6. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar.



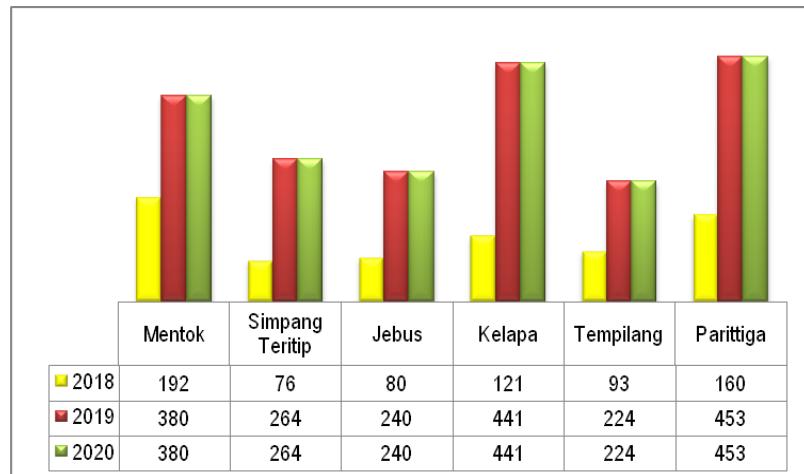
Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang sangat potensi terhadap hasil alam seperti komoditi timah, lada dan kaya dengan hasil laut dan hutannya. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan andil yang cukup besar terhadap peringkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan perdagangan memberikan kontribusi pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir, di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

Gambar 2.57 Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Pasar memiliki peranan utama sebagai tempat transaksi perdagangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah bangunan pasar tradisional sebanyak 19 bangunan, yang berada pada 9 (sembilan) lokasi pasar. Sebanyak 7 (tujuh) pasar berstatus aktif dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pasar Muntok, Pasar Simpang Teritip, Pasar Kelapa, Pasar Parittiga, Pasar Jebus, dan Pasar Tempilang. Sementara 1 (satu) pasar aktif dikelola oleh pemerintah desa yaitu Pasar Benteng Kota. Sedangkan pasar yang tidak aktif sebanyak 1 (satu) pasar yaitu Pasar Cupat. Sementara jumlah toko di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebanyak 2.002 toko.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 2.58 Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per kecamatan
Tahun 2018 – 2020

7. Perindustrian

Dari dulu, sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dengan adanya keberadaan Pusat Metalurgi milik PT. Timah. Adapun sektor perdagangan, juga termasuk penyumbang peringkat keempat pada pembentukan PDRB daerah setelah sektor pertambangan dan galian serta sektor pertanian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan motor penggerak ekonomi wilayah yang sangat vital di Kabupaten Bangka Barat. Saat ini industri dan perdagangan memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lain dengan pertumbuhan yang terlihat cukup stabil.

Sektor industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Industri yang dapat dikembangkan antara lain: *home industry* seperti pembuatan terasi, akar bahar, songket cual, industri pengolahan lanjutan CPO, pasir kuarsa (*glass ware industry*), keramik (kaolin), serta *tin chemical* (industri hilir timah).

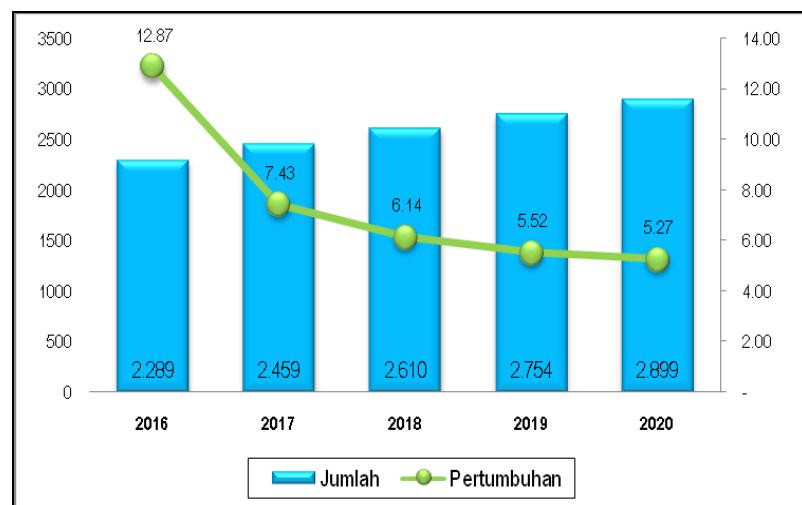
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga terus melakukan pembinaan dan pengembangan khususnya terhadap industri berskala kecil yang merupakan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selama lima (lima) tahun terakhir, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat. Pada tahun 2016 jumlah IKM di



Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.289 unit, dan pada tahun 2020 bertambah sehingga 2.899 unit IKM. Meskipun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan IKM selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pelambatan. Persentase pertumbuhan industri kecil di Tahun 2016 sebesar 12,87 persen menjadi 5,27 persen di Tahun 2020.

Dilihat dari sebaran IKM di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020, jumlah IKM terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa yaitu sebanyak 663 unit IKM dan yang terendah terdapat di Kecamatan Simpang Teritip dengan jumlah IKM sebanyak 392 unit.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 2.59 Jumlah dan Pertumbuhan IKM
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021.

Gambar 2.60 Jumlah Industri Kecil per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Untuk jumlah Industri sedang dan besar di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7 unit, yaitu 2 unit industri sedang dan 5 unit industri besar.



Jenis industri yang ada adalah industri pengolahan pangan berupa minyak kelapa sawit dan air mineral serta industri galian bukan logam berupa batu bata merah dan Industri Baja/Pengolahan Logam berupa balok timah.

Tabel 2.53 Jumlah Industri Sedang dan Besar
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
Industri Sedang		
1.	Industri Pengolahan Pangan	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	80
	- Jumlah Produksi (Ton)	1.169
2.	Industri Galian Bukan Logam	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	40
	- Jumlah Produksi (Ton)	3.000
Industri Besar		
1.	Industri Pengolahan Pangan	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	4
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	539
	- Jumlah Produksi (Ton)	182.449,80
2.	Industri Baja/Pengolahan Logam	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	710
	- Jumlah Produksi (Ton)	30.000

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

8. Transmigrasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketransmigrasian, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan beberapa wilayah sebagai daerah transmigrasi. Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, wilayah yang dijadikan sebagai daerah pembangunan dan pengembangan transmigrasi berada di Kecamatan Jebus, Simpangterip dan Kelapa.

Sampai dengan tahun 2020, wilayah yang dikembangkan untuk transmigrasi berlokasi di Kecamatan Jebus yaitu di Desa Jebus dengan luas wilayah transmigrasi ± 161 ha. Penempatan transmigran di Kecamatan Jebus tahun 2020 sebanyak 68 keluarga transmigran.

Dalam rangka pelaksanaan dan penempatan transmigran, Kabupaten Bangka Barat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, dimana pembangunan kawasan berasal dari program Pemerintah Pusat sedangkan pemerintah daerah melakukan fasilitasi penempatan transmigran dan pendukung lainnya.

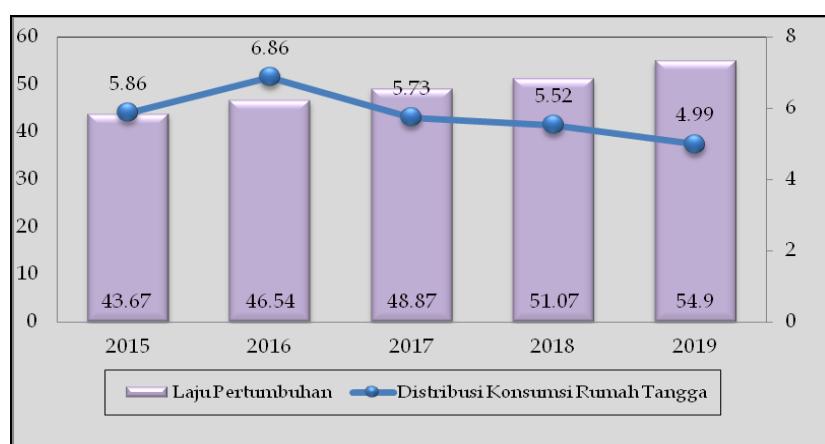


2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

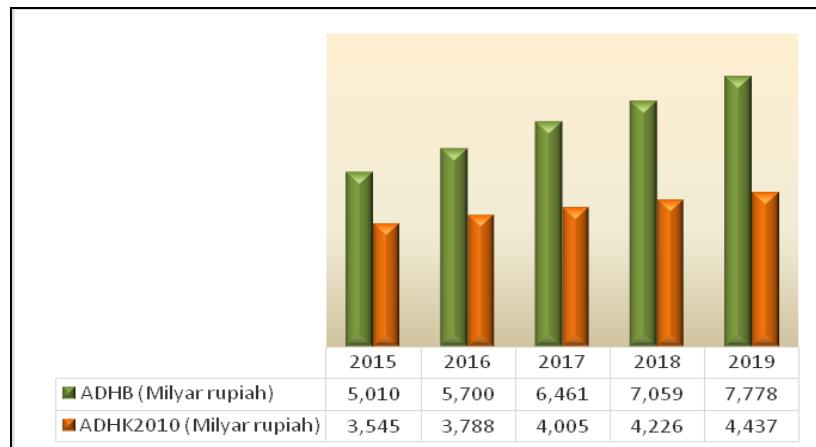
Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal maupun riil. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.61 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (persen)

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 5,52 persen menjadi 4,99 persen di tahun 2019. Selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,86 persen.

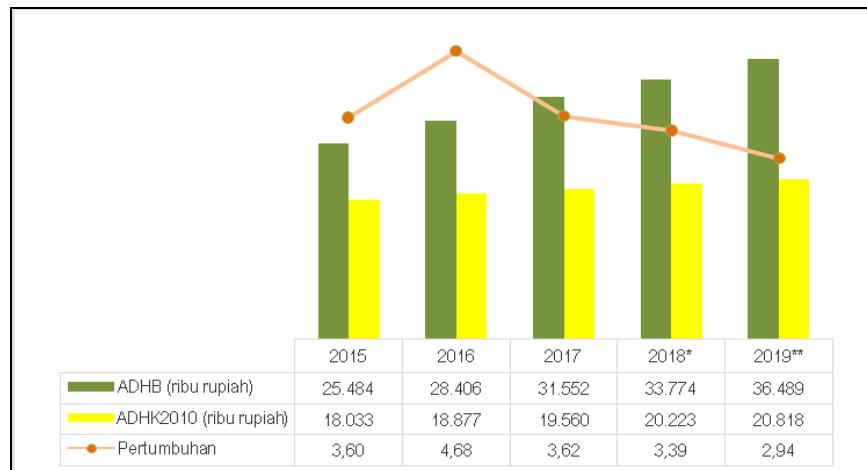


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.62 Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Pengeluaran konsumsi per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Secara nominal pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 7.778 miliar rupiah di tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 dengan nilai 7.059 miliar rupiah. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan nilai 4.437 miliar rupiah.

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bangka Barat meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita selama tahun 2015 - 2019 secara riil berkisar antara 2-4 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan konsumsi per kapita yang cenderung berfluktuasi dari 3,60 persen pada tahun 2015 menjadi 2,94 persen pada tahun 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Gambar 2.63 Rata-rata Konsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Konsumsi Per Kapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2015-2019 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok berada pada kisaran 47-49 persen dan cenderung mengalami peningkatan. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 49,40 persen sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 47,12 persen. Proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan yang memiliki kontribusi cukup besar seperti; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga cenderung meningkat, sedangkan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya cenderung menurun. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 2.54 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2019 (Persentase)

No.	KELOMPOK KONSUMSI	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	47,12	47,90	48,78	49,40	49,26
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,49	3,37	3,21	3,02	2,96
3	Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,20	17,08	17,37	17,38	17,65
4	Kesehatan dan Pendidikan	5,01	5,00	4,84	4,95	4,93
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,20	16,63	15,75	15,15	15,01
6	Hotel dan Restoran	8,05	8,10	8,23	8,34	8,54
7	Lainnya	1,92	1,91	1,84	1,76	1,64
Konsumsi Rumah Tangga		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

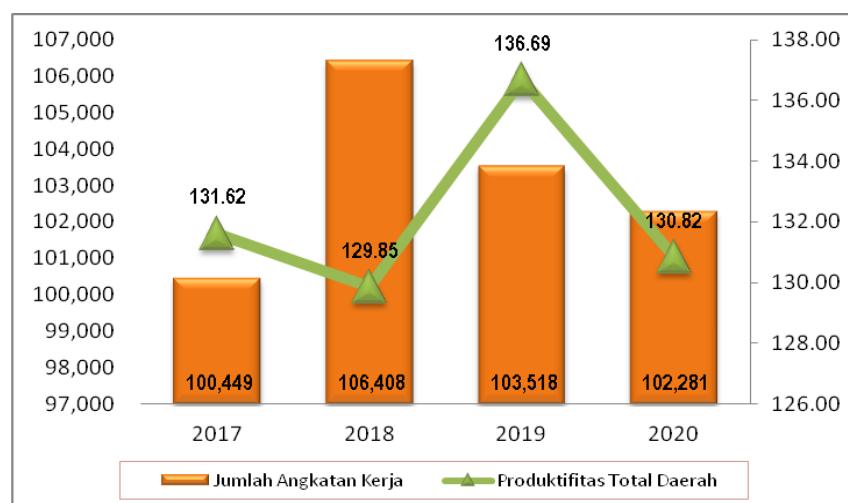


Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah.

Produktifitas total daerah Kabupaten Bangka Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan data yang berfluktuatif namun dengan kecenderungan atau trend yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya nilai PDRB di setiap tahunnya dan meningkatnya jumlah angkatan kerja hampir di setiap tahunnya.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

Gambar 2.64 Produktifitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

3. Ekspor dan Impor

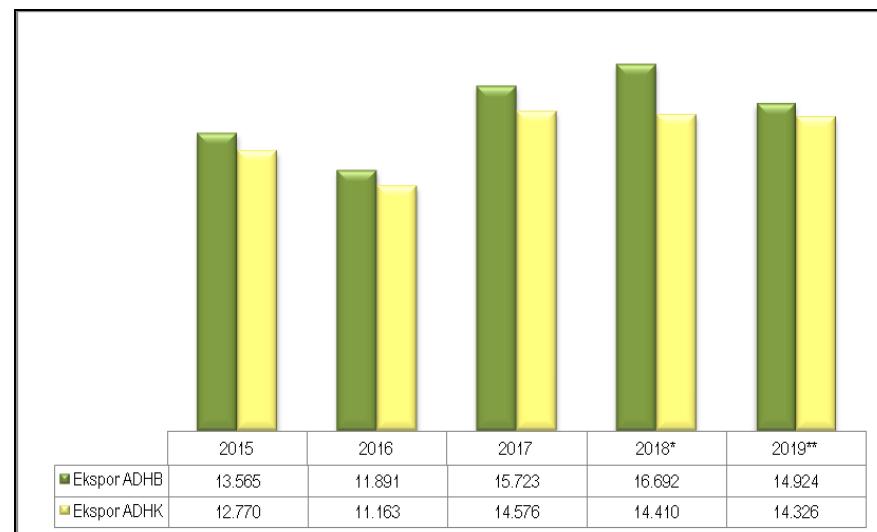
Aktifitas jual beli barang antar wilayah telah ada sejak dahulu. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi eksport impor.

Peranan eksport terhadap pembentukan PDRB juga relatif besar dengan kontribusi lebih dari 100 persen dari tahun 2015-2019, walaupun sedikit menurun pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih besar dari pada peningkatan nilai eksport. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan *volume* maupun harga.

Mengingat produk Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka untuk memenuhi didatangkan berbagai produk

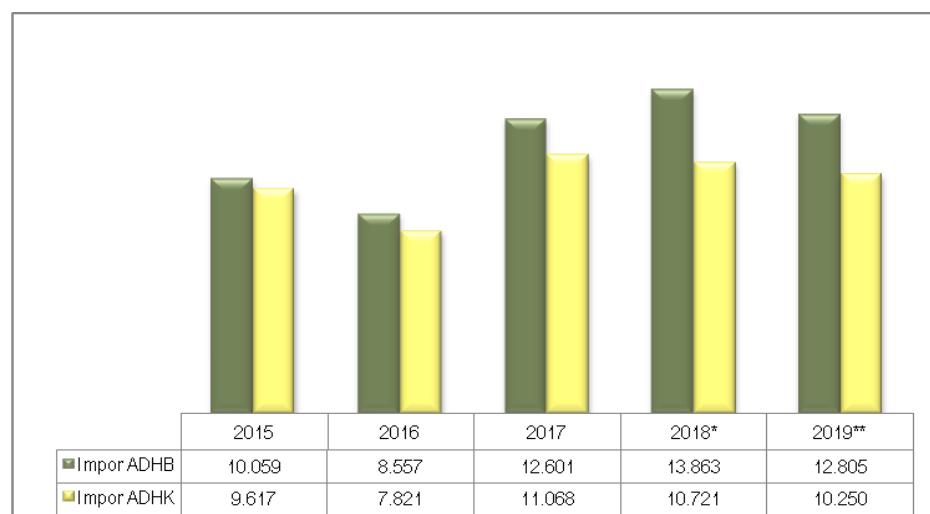


barang dan jasa yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain maupun kabupaten/kota lain yaitu sebesar 10.059 miliar rupiah pada tahun 2015, 8.557 miliar rupiah pada tahun 2016, 12.601 miliar rupiah pada tahun 2017, 13.863 miliar rupiah pada tahun 2018, dan 12.805 pada tahun 2019.



Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.65 Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2019



Ket : * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.66 Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2019



2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan faktor utama guna menunjang pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun non perekonomian. Jarak tempuh yang jauh terkadang tidak menjadi persoalan yang utama, jika infrastruktur terpenuhi dengan kualitas yang baik. Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dan wajib yang harus dimiliki pada setiap wilayah dengan tipe jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan, antara lain jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

**Tabel 2.55 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Total	898	898	898	898	898
2	Jumlah Motor*	21.271	120.526	128.184	131.740	155.565
3	Jumlah Mobil*	4.933	10.956	11.589	11.991	12.639
4	Jumlah Kendaraan*	26.204	131.482	139.773	143.731	168.204
	Rasio Keseluruhan	1:29	1:146	1:156	1:160	1:187

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

*) Data yang membayar pajak

Jika dilihat dari nilai rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan masih terlihat normal. Secara rata rata dari 5 (lima) tahun terakhir, setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan 40 kendaraan. Masih belum terlihat kemacetan, walau di daerah perkotaan baik pada jam sibuk. Apalagi dari data jumlah kendaraan yang ada, masih didominasi oleh kendaraan roda dua yaitu diatas 80 persen.

Pelengkap aksesibilitas daerah yang penting dimiliki oleh daerah lainnya yaitu adanya sarana dan prasarana untuk angkutan umum, menjadikan sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki satu pelabuhan penumpang, serta dua pelabuhan non penumpang, dan tiga buah terminal dengan sembilan jumlah trayek antar kota dalam provinsi.

Melalui sarana angkutan umum tersebut, mobilitas penumpang dan barang terjadi yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana pada sektor transportasi dilakukan untuk memperlancar mobilitas antar kecamatan, antar kota dalam provinsi maupun antar pulau seperti Bangka-Palembang.



Pergerakan penumpang lewat jalur bis mengalami peningkatan baik yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Peningkatan penumpang yang datang ke Kabupaten Bangka Barat terlihat lebih stabil dan signifikan. Akan tetapi berbeda dengan pergerakan penumpang lewat jalur laut, dimana terjadi penurunan pada penumpang yang datang, sedangkan untuk penumpang yang berangkat mengalami kenaikan.

2. Penataan Wilayah

Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, dari Rencana Peruntukan seluas 285.100,90 ha, telah ditetapkan kawasan budidaya seluas 248.660,05 ha sebagai potensi pengembangan wilayah.

Kawasan peruntukan terkait potensi pengembangan wilayah antara lain :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas \pm 77.742 ha;
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas \pm 2.050 ha;
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian, yang terdiri atas :
 - 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disetiap kecamatan dengan total luas \pm 15.812 ha, dari luas total tersebut \pm 11.099 ha berada di kawasan hutan;
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disetiap kecamatan dengan total luas \pm 1.598 ha;
 - Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas Kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas \pm 41.860 ha, dengan rincian:
 - a) Kecamatan Muntok seluas \pm 5.903 ha;
 - b) Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 10.493 ha;
 - c) Kecamatan Jebus seluas \pm 712 ha;
 - d) Kecamatan Kelapa seluas \pm 10.421 ha;
 - e) Kecamatan Tempilang seluas \pm 14.331 ha.
 - Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas \pm 14.331 ha, dan dari luas total tersebut \pm 166 ha berada di kawasan hutan produksi.
 - 3) Kawasan peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok dan Kecamatan Jebus seluas \pm 72 ha.



3. Sarana dan Prasarana Pendukung

a) Fasilitas Bank

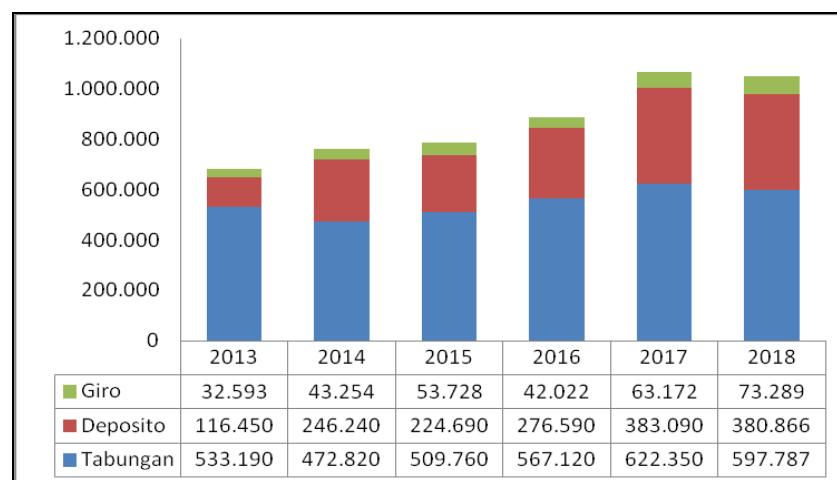
Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

Tabel 2.56 Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	BANK	ATM
1.	Muntok	10	22
2.	Simpang Teritip	2	3
3.	Jebus	2	2
4.	Kelapa	4	5
5.	Tempilang	2	2
6.	Parittiga	6	11
Jumlah		24	45

Sumber : BP4D, 2021

Banyaknya jumlah bank pada suatu daerah menunjukkan perputaran uang yang ada di daerah tersebut, sehingga dengan pengertian semakin banyak jumlah bank yang ada, maka semakin banyak perputaran uang yang ada di daerah tersebut. Dari 3 (tiga) jenis tabungan yang ada, jenis tabungan merupakan yang paling dominan yaitu selalu diatas 60 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019.

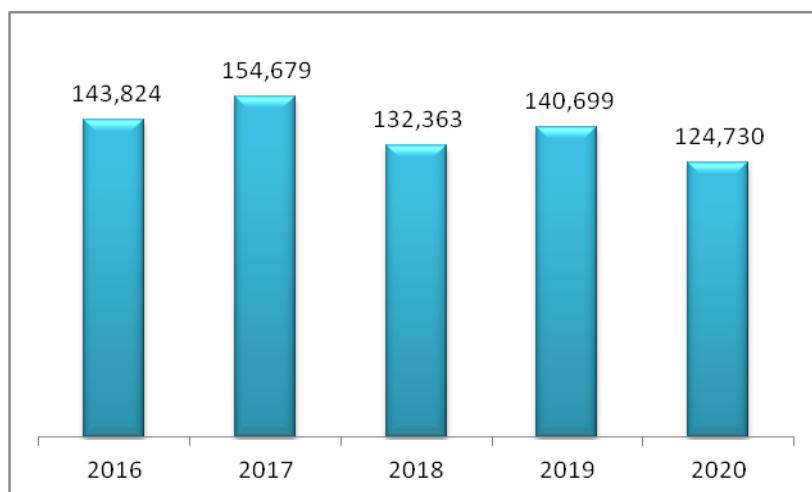
Gambar 2.67 Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2018 (juta rupiah)



b) Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Perkembangan usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka Barat dari sisi jumlah dapat dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah restoran dan rumah makan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan penyediaan makan minum dalam PDRB, rata-rata kenaikannya dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup signifikan. Berikut digambarkan perkembangan nilai subsektor makan minum.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

Gambar 2.68 Nilai Subsektor Makan Minum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

c) Ketersediaan Penginapan

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan, walau belum optimal. Dari sisi sebaran, usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota kabupaten.

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat tersedia hotel non bintang dengan jumlah 15 unit dan penginapan sebanyak 24 unit.



4. Komunikasi dan Informatika

a) Fasilitas Listrik

Listrik memegang peranan yang penting sekali dalam pembangunan, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga. Sebagai faktor produksi tersedianya tenaga listrik cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sektor-sektor ini sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengubah struktur ekonomi dan lain-lain. Disamping itu tersedianya listrik dikalangan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.57 Jumlah Pembangkit dan Daya Terpasang pada PLN
Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020**

Tahun	Jumlah Pembangkit (unit)	Daya Terpasang (Kw)
2015	12	17.463
2016	11	15.683
2017	11	16.303
2018	24	77.448.100
2019	1	82.827.300
2020	1	82.827.300

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka, 2020

Pada Tahun 2020 PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN sendiri terdiri dari beberapa kategori besar seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus. PT.PLN Persero menyajikan listrik kepada pelanggan dengan 1 generator saja. Untuk pelanggan rumah tangga, jumlah yang berlangganan layanan penyediaan listrik kepada 59.155 rumah tangga. Adapun kategori ini memiliki porsi pelanggan yang terbesar dibandingkan dengan kategori lain.

b) Fasilitas Komunikasi

Fasilitas komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat cukup baik, dimana hampir di keseluruhan wilayah memiliki jaringan teknologi. Walaupun tingkat kualitas jaringan komunikasi di setiap wilayah berbeda, akan tetapi sudah menjangkau sampai pada level perdesaan.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 persentase penduduk berumur 5 (lima) tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler di Kabupaten Bangka Barat sebesar 71,50 persen (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Barat, 2019).

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

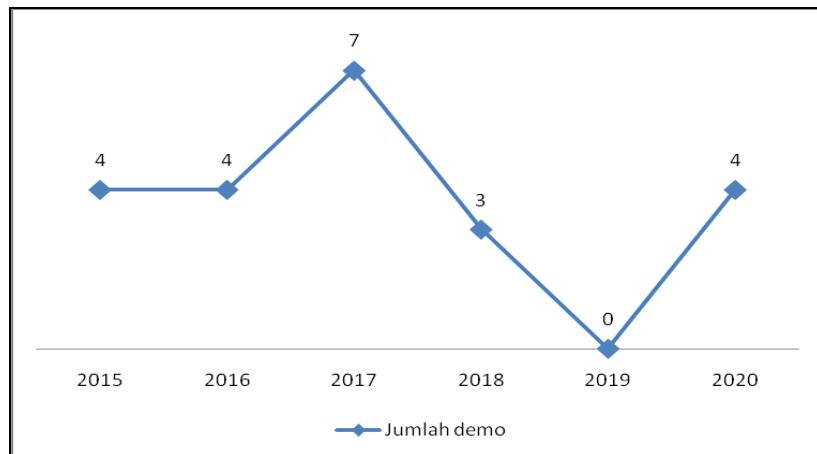
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah serta sekaligus dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Selain dari perhitungan secara bisnis, masuknya investor asing ke suatu wilayah juga sangat tergantung dari kondisi keamanan dan ketertiban serta politik dalam wilayah tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Insentif, dan Retribusi.

Kekurangan yang terjadi dalam iklim investasi di Kabupaten Bangka Barat adalah masih minimnya data yang berhubungan dengan potensi daerah serta belum disusunnya dokumen khusus terkait perencanaan terkait investasi sehingga daya tawar kepada para investor dirasa masih sangat minim.

1. Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Hal tersebut terkait investasi jangka panjang yang memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kepastian akan keamanan sangatlah penting.

Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka ketertarikan investor untuk menanam investasi di suatu daerah semakin tinggi, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi para investor, karena modal yang dikeluarkan untuk membangun aset dan menjalankan roda usaha sangat besar khususnya pada usaha yang berbasis padat modal. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bangka Barat di sajikan pada gambar di bawah ni.



Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Gambar 2.69 Jumlah Demonstrasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

2. Perizinan

Masalah perizinan juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan daya saing investasi daerah khususnya terkait kemudahan dalam proses administrasi perizinan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi pelayanan perizinan satu atap di Kabupaten Bangka Barat.

Lama pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan peraturan dan SOP masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Tabel 2.58 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Tidak/belum sekolah	45.265	49.627	49.476	50.882	54.028



Tingkat Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase Tidak/belum sekolah	24,21	25,76	25,11	25,68	26,42
Belum/tidak tamat SD	23.626	24.717	25.000	25.060	26.030
Persentase Belum/tidak tamat SD	12,64	12,83	12,69	12,69	12,73
Tamat SD	60.761	60.738	60.938	60.512	61.254
Persentase Tamat SD	32,50	31,53	30,92	30,54	29,95
Tamat SMP	22.429	22.969	24.366	24.565	25.030
Persentase Tamat SMP	12,00	11,92	12,36	12,40	12,24
Tamat SMA	28.529	28.380	30.496	30.223	30.957
Persentase Tamat SMA	15,26	14,73	15,48	15,25	15,14
Diploma I/II/III	2.807	2.747	2.824	2.808	2.814
Persentase Diploma I/II/III	1,50	1,43	1,43	1,41	1,38
S1/DIV	3.468	3.360	3.875	3.945	4.306
S2	84	85	88	90	103
S3	2	3	3	3	5
Persentase minimal S1	1,90	1,79	2,01	2,03	2,11
Total	186.971	192.626	197.066	198.088	204.527

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari data diatas, pada tahun 2020 rata-rata jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tiga terbesar adalah penduduk tamatan SD (29,95 persen), tidak/belum sekolah (26,42 persen) dan tamat SMA (15,14 persen). Terlihat sangat jelas bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim. Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat di sisi tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dibawah Diploma.

Dengan kondisi pendidikan penduduk tersebut, sering kali peluang kerja yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan pendidikan yang cukup tinggi, kesempatan tersebut banyak diambil oleh penduduk luar Kabupaten Bangka Barat. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah harus segera mengambil strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing penduduk, baik peningkatan keahlian dengan pelaksanaan pendidikan non formal yang saat ini sering dibutuhkan maupun membuka sekolah kejuruan yang berpotensi untuk mengelola kekayaan lokal yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

2. Tingkat Ketergantungan

Rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 48,79 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia



produktif (umur 15–64 tahun) menanggung ± 50 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk lebih detail terkait data rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2016 – 2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 14 Tahun	54.836	51.064	56.245	57.665	57.074
65 Tahun keatas	8.011	8.850	8.641	9.048	9.536
Penduduk Usia Tidak Produktif	62.847	59.914	64.886	66.713	66.610
Penduduk Usia produktif	124.124	132.712	132.180	131.375	137.917
Rasio Ketergantungan	50,63	45,15	49,09	50,78	48,30
< 15 Tahun	44,18	38,48	42,55	43,89	41,38
> 65 Tahun	6,45	6,67	6,54	6,89	6,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari data diatas, terlihat bahwa rasio ketergantungan di tiap tahunnya selalu mengalami perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Rata-rata rasio ketergantungan dalam lima tahun terakhir yaitu 50, yang secara umum disimpulkan bahwa 2 (dua) orang produktif menanggung 1 (satu) orang yang tidak produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan RKPD melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 71 Tahun 2018 tertanggal 28 Juni 2018. Selanjutnya dengan adanya perubahan dan dinamika pembangunan yang terjadi di tahun 2019 kemudian dilakukan Perubahan RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019.

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat yang memuat rencana keuangan tahunan daerah.

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018. Selanjutnya dalam rangka untuk mengakomodir perubahan serta pergeseran



anggaran, mengakomodir Dana Alokasi Khusus Tahun 2019, Dana Bantuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, serta perubahan program dan kegiatan, maka dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019.

Dalam rangka untuk mengetahui realisasi keluaran kegiatan serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, sesuai dengan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun 2019 yang terdiri dari 371 program dan 1.782 kegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.60 Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan antara Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan Perubahan APBD Tahun 2019

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD	Selisih
1.	Jumlah Anggaran Belanja Langsung	518.099.938.901,00	529.668.448.861,84	11.568.509.960,84
2.	Jumlah Program	371	371	0
3.	Jumlah Kegiatan	1.784	1.782	2

Laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2019 menggunakan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 32 urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu 24 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, hanya 23 urusan wajib dan 7 (tujuh) urusan pilihan yang dilaksanakan dan dijabarkan melalui kegiatan pembangunan daerah serta ditambah dengan fungsi penunjang. Pada penganggaran tahun 2019, urusan pilihan yang tidak dilaksanakan adalah Energi dan Sumber Daya Mineral yang memang kewenangannya tidak dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

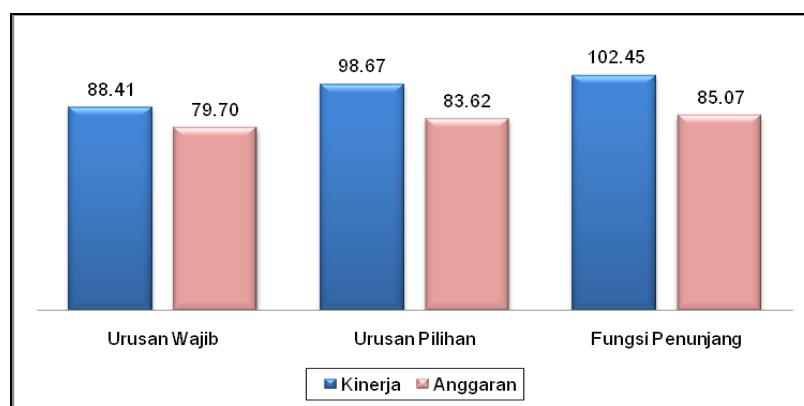
Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV adalah :

- a. Total anggaran belanja langsung Tahun 2019 adalah Rp. 529.668.448.861,84 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan IV sebesar Rp. 439.192.488.750,78 atau 82,92 persen dengan kriteria Tinggi;
- b. Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 96,51 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;



- c. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 82,80 persen dengan kriteria Tinggi;
- d. Total rata-rata capaian kinerja RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 70,74 persen dengan kriteria sangat tinggi;
- e. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 45,15 persen dengan kriteria sangat rendah;

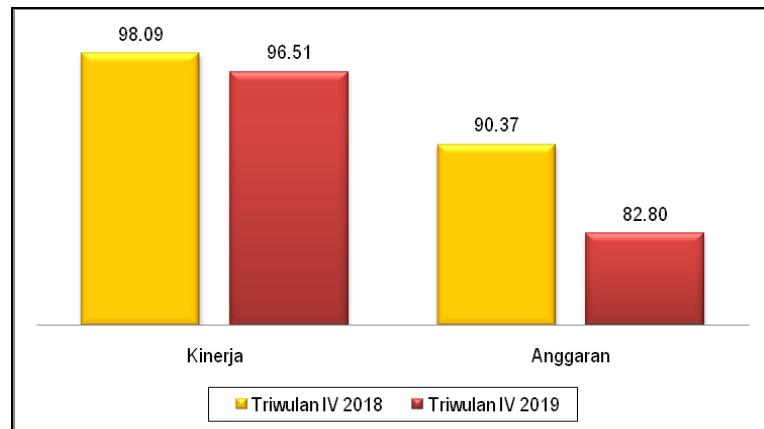
Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 88,41 persen dan keuangan sebesar 79,70 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 98,67 persen dan keuangan sebesar 83,62 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 102,45 persen dan keuangan sebesar 85,07 persen. Capaian pada fungsi penunjang merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan pencapaian pada urusan wajib dan urusan pilihan.



Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2019

Gambar 2.70 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2019

Sementara jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2018, maka rata-rata capaian di tahun 2019 lebih rendah baik untuk rata-rata realisasi kinerja maupun rata-rata realisasi anggaran. Capaian pada tahun 2018 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 98,09 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,37 persen.



Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKP Kab. Bangka Barat Tahun 2018 dan 2019

Gambar 2.71 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKP
Tahun 2018 dan 2019

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKP Tahun 2019 per urusan pemerintahan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.61 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2019	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Urusan Wajib</u>											
1.	Pendidikan	10	89	90,98	89,78	ST	T	656,91	184,93	ST	ST	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	27	128	92,31	82,36	ST	T	71,69	108,14	S	ST	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	62	89,00	80,20	T	T	69,57	35,65	S	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	47	95,76	90,21	ST	ST	45,69	39,73	SR	SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16	77	100,00	96,35	ST	ST	57,11	48,38	R	SR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Sosial	8	46	100,00	91,01	ST	ST	47,64	33,44	SR	SR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	3	9	54,86	55,62	R	R	72,45	17,93	S	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PeriACinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	24	84,72	77,88	T	T	98,93	32,30	ST	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	3	12	55,56	63,73	R	R	53,39	35,01	R	SR	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pertanahan	2	4	49,30	35,77	SR	SR	17,14	7,27	SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2019	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Lingkungan Hidup	12	48	80,74	70,60	T	S	35,05	26,73	SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	44	108,78	84,46	ST	T	43,07	67,58	SR	S	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	19	88,10	78,07	T	T	40,74	28,37	SR	SR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	64	94,20	84,80	ST	T	53,41	41,46	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	2	21	87,50	79,35	T	T	22,23	7,97	SR	SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	8	37	96,06	83,15	ST	T	46,35	33,31	SR	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	11	47	90,29	85,64	ST	T	30,49	30,46	SR	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
18.	Penanaman Modal	9	38	71,64	69,96	S	S	64,64	46,75	R	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	5	20	95,19	91,86	ST	ST	51,68	26,92	R	SR	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	2	5	100,00	95,12	ST	ST	45,90	10,69	SR	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	2	100,00	62,75	ST	R	59,13	4,67	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	4	14	98,17	75,63	ST	T	49,58	27,08	SR	SR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	5	30	98,78	98,38	ST	ST	48,72	50,94	SR	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2019	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Kearsipan	2	3	100,00	90,25	ST	ST	72,86	63,72	S	R	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	<u>Urusan Pilihan</u>											
1.	Kelautan dan Perikanan	9	40	84,30	80,63	T	T	38,86	32,47	SR	SR	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	7	41	99,15	89,45	ST	T	75,75	49,45	T	SR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	18	64	82,11	84,70	T	T	41,01	30,05	SR	SR	Dinas Petanian dan Pangan
4.	Kehutanan	1	1	100,00	75,32	ST	T	60,00	34,22	R	SR	Dinas Lingkungan Hidup
5.	ESDM											
6.	Perdagangan	4	9	95,00	74,06	ST	S	37,01	58,14	SR	R	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.	Perindustrian	5	10	100,13	96,89	ST	ST	47,00	23,52	SR	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	Transmigrasi	1	2	130,00	84,26	ST	T	52,34	39,56	R	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<u>Fungsi Penunjang</u>											
1.	Kesekretariatan	28	153	100,06	82,07	ST	T	74,81	60,26	S	R	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	6	45	94,79	87,92	ST	T	119,63	52,38	ST	R	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan Pembangunan	11	56	100,00	88,24	ST	T	44,60	35,44	SR	SR	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	7	85,71	71,76	T	S	93,33	30,70	ST	SR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.	Kepegawaian	7	50	95,15	84,68	ST	T	113,78	51,67	ST	R	



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2019	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Pengelolaan Keuangan	12	132	142,04	82,87	ST	T	72,65	54,29	S	R	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Kecamatan	70	282	99,36	97,94	ST	ST	74,00	101,62	S	ST	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2019

Keterangan :

ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

S : Sedang

R : Rendah

SR : Sangat Rendah



2.2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 49 Tahun 2019 tertanggal 28 Juni 2019. Sejalan dengan perubahan perkembangan pembangunan di tahun 2020, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 yang selanjutnya diubah melalui Perubahan APBD Tahun 2020 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2020 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 517.135.137.869,00,00 yang terdiri dari 309 program dan 1.458 kegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.62 Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD	Selisih
1.	Jumlah Anggaran Belanja Langsung	490.984.762.144,00	517.135.137.869,00	26.150.375.725,00
2.	Jumlah Program	309	309	-
3.	Jumlah Kegiatan	1.454	1.458	4

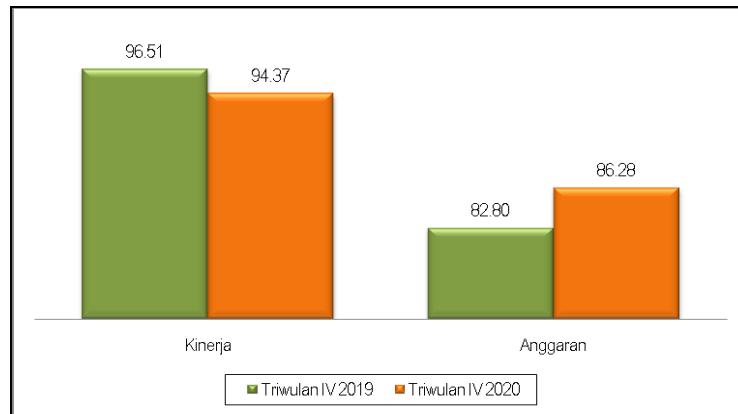
Jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun 2020, setelah ditetapkan menjadi APBD terjadi perubahan pada total anggaran belanja langsung dengan selisih sebesar Rp 26.150.375.725,00. Selisih pada total belanja langsung tersebut karena adanya pembahasan pada saat penyusunan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2020. Pada jumlah program tidak terdapat perbedaan antara Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020



(konsisten), sementara pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 4 kegiatan setelah dilakukan pembahasan pada saat penyusunan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2020.

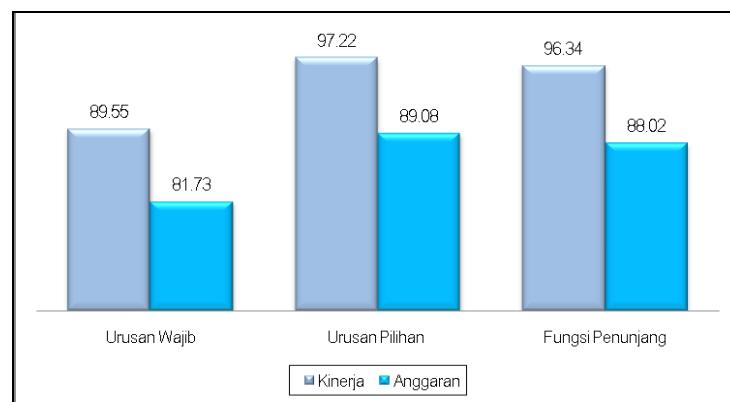
Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah :

- a. Total anggaran belanja langsung Tahun 2020 adalah Rp. 517.135.137.869,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 423.544.686.525,79 atau 81,90 persen dengan kriteria Tinggi;
- b. Total rata-rata capaian kinerja RKPD Tahun 2020 sebesar 94,37 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- c. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 sebesar 86,28 persen dengan kriteria Tinggi;
- d. Total rata-rata capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 96,40 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- e. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 64,75 persen dengan kriteria Rendah;
- f. Pada laporan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Bappelitbangda sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan program, kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat.
- g. Terdapat evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang target dan realisasi kinerja kegiatan yang belum terisi baik pada target renstra maupun realisasi sampai dengan tahun sebelumnya serta realisasi kinerja kegiatan pada tahun evaluasi, sehingga menyebabkan capaian kinerja Renja dan Renstra belum dapat dihitung dengan tepat.
- h. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2019, maka rata-rata capaian di tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih rendah dan untuk rata-rata realisasi anggaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2019 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,51 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 82,80 persen. Sementara di tahun 2020, sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 94,37 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 86,28 persen.



**Gambar 2.72 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran
Tahun 2019 dan 2020**

- i. Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 89,55 persen dan keuangan sebesar 81,73 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,22 persen dan keuangan sebesar 89,08 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,34 persen dan keuangan sebesar 88,02 persen. Capaian pada Urusan Pilihan merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan pencapaian pada Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang.



**Gambar 2.73 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2020**

- j. Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdapat kendala dan permasalahan antara lain.
 - Masih terbatasnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
 - Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;



- Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pergeseran dan pengurangan anggaran untuk pembiayaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- Kejadian Pandemi Covid-19 juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun yang melibatkan perkumpulan orang.

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 per urusan pemerintahan sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 2.63 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Urusan Wajib</u>											
1.	Pendidikan	9	74	97,92	89,50	ST	T	820,59	362,97	ST	ST	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	21	91	94,08	85,08	ST	T	81,44	134,23	T	ST	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	47	90,00	84,94	T	T	79,92	39,70	T	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	34	95,70	91,49	ST	ST	57,36	50,95	R	R	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15	72	88,05	81,66	T	T	69,62	58,83	S	R	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Sosial	7	42	100,00	90,70	ST	ST	58,75	66,76	R	S	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	3	6	100,00	97,01	ST	ST	80,24	21,76	T	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PeriACinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	90,67	87,80	ST	T	101,39	33,33	ST	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	2	8	100,00	87,69	ST	T	63,08	40,34	R	SR	Dinas Pertanian dan Pangan



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Pertanahan	1	3	56,10	47,17	R	SR	36,50	31,34	SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	9	38	87,26	83,78	T	T	42,91	43,87	SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	35	96,37	87,14	ST	T	61,30	67,66	R	S	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	9	89,29	77,44	T	S	52,91	44,78	R	SR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	53	93,81	91,82	ST	ST	59,86	45,20	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	2	9	100,00	90,99	ST	ST	114,53	45,79	ST	SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	6	32	95,02	81,61	ST	T	57,61	42,41	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	8	36	100,00	94,35	ST	ST	36,49	36,01	SR	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
18.	Penanaman Modal	6	28	100,00	95,21	ST	ST	71,21	60,38	S	R	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	5	7	70,00	65,78	S	S	61,52	29,02	R	SR	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	2	4	100,00	76,52	ST	T	56,76	12,60	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	1	100,00	82,79	ST	T	59,28	6,79	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Kebudayaan	3	7	100,00	89,00	ST	T	57,04	31,68	R	SR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	4	26	94,45	91,65	ST	ST	58,89	61,73	R	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2	2	100,00	86,86	ST	T	79,11	64,12	T	R	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
<u>Urusan Pilihan</u>												
1.	Kelautan dan Perikanan	6	31	100,00	97,32	ST	ST	40,12	38,24	SR	SR	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	6	34	100,00	87,21	ST	T	85,31	56,97	T	R	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	16	52	99,99	87,68	ST	T	49,31	33,66	SR	SR	Dinas Petanian dan Pangan
4.	Kehutanan	0	0	-	-			60,00	34,22	R	SR	Dinas Lingkungan Hidup
5.	ESDM											
6.	Perdagangan	3	5	100,00	90,54	ST	ST	47,71	63,33	SR	R	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.	Perindustrian	5	7	83,33	75,13	T	T	54,14	31,02	R	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	Transmigrasi	1	2	100,00	96,62	ST	ST	166,18	44,28	ST	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<u>Fungsi Penunjang</u>												
1.	Kesekretariatan	24	134	95,90	82,13	ST	T	91,95	72,23	ST	S	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	5	38	104,00	91,49	ST	ST	215,44	64,50	ST	R	Inspektorat Daerah



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Perencanaan Pembangunan	9	58	96,39	86,66	ST	T	54,11	376,32	R	ST	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	3	84,55	70,28	T	S	87,25	30,89	T	SR	
5.	Kepegawaian	6	46	95,13	82,92	ST	T	148,94	64,76	ST	R	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian Daerah
6.	Pengelolaan Keuangan	10	119	97,62	90,09	ST	ST	92,18	66,68	ST	S	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Kecamatan	63	260	96,94	92,74	ST	ST	102,71	112,83	ST	ST	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2020

Keterangan :

- ST : Sangat Tinggi
- T : Tinggi
- S : Sedang
- R : Rendah
- SR : Sangat Rendah



2.2.3 Realisasi RPJMD 2016-2021 sampai Tahun 2020

Berdasarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Evaluasi terhadap indikator pembangunan daerah tersebut adalah dengan membandingkan capaian/realisasi dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, terdapat 10 sasaran dengan 15 indikator sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran dengan kriteria “Baik Sekali” sebanyak 4 (empat) sasaran;
- b. Sasaran dengan kriteria “Baik” sebanyak 2 (dua) sasaran;
- c. Sasaran dengan kriteria “Cukup” sebanyak 1 (satu) sasaran;
- d. Sasaran dengan kriteria “Kurang” sebanyak 1 (satu) sasaran;
- e. Sasaran yang belum dapat dihitung capaiannya sebanyak 2 (dua) sasaran.

Sasaran dengan kriteria “Baik Sekali” sebanyak 4 (empat) sasaran antara lain adalah :

- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah”, terdiri dari 5 (lima) indikator yang keseluruhannya adalah indikator makro pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita.
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan”, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
- Sasaran “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik.
- Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah”, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan Jumlah Investasi dalam Satu Tahun.

Sasaran dengan kriteria “Baik” sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator yaitu Derajat Otonomi Fiskal Daerah dan Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan” dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Sasaran dengan kriteria “Cukup” sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif” yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran dengan kriteria “Kurang” sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat” yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat.

Sasaran yang belum dapat dihitung capaiannya sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu Sasaran “Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif” dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel” dengan indikator Nilai SAKIP Daerah. Kedua indikator tersebut belum dapat dihitung capaiannya karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP belum ada.

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2021, maka diperoleh capaian sebagai berikut :

- a. Sasaran dengan kategori “Tercapai” sebanyak 3 (tiga) sasaran;
- b. Sasaran dengan kategori “Optimis tercapai” 3 (tiga) sasaran; dan
- c. Sasaran dengan kategori “Perlu upaya lebih” 4 (empat) sasaran.

Sasaran dengan kategori “Tercapai” sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan”, Sasaran “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”, dan Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah”.

Sasaran dengan kategori “Optimis” sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah”, Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, dan Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan”.

Sasaran dengan kategori “Perlu Upaya Lebih” sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah”, Sasaran “Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif”, Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif” dan Sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat”.

Rincian capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.64 Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020			Kriteria Capaian	Target Akhir RPJMD	Percentase Capaian s.d. Tahun 2020	Kriteria Capaian
					Target	Realisasi	Percentase Capaian				
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,13	-7,01	-5,43	122,54	Baik Sekali	5,05	-107,52	Perlu Upaya Lebih
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,05	69,1	69,08	99,97	Baik	72,23	95,64	Optimis Tercapai
		Angka Kemiskinan	%	2,67	3,34	2,7	119,16	Baik Sekali	2,85	105,26	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,85	5,08	4,12	118,90	Baik Sekali	5,65	127,08	Tercapai
		PDRB Per Kapita	rupiah	66.183.000	64.173.193	61.617.200	96,02	Baik	70.428.000	87,49	Optimis Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							111,32	Baik Sekali		61,59	Perlu Upaya Lebih
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45,24	65	n/a	-	n/a	70	64,63	Perlu Upaya Lebih
Rata-rata Capaian Sasaran							-	n/a		64,63	Perlu Upaya Lebih
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	100,00	Baik Sekali	WTP	100,00	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							100,00	Baik Sekali		100,00	Tercapai
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,41	8,44	7,77	92,06	Baik	9	86,33	Optimis Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							92,06	Baik		86,33	Optimis Tercapai
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,24	67	n/a	-	n/a	70	98,91	Optimis Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							-	n/a		98,91	Optimis Tercapai
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,55	80,73	64,17	79,49	Cukup	82,73	77,57	Perlu Upaya Lebih
Rata-rata Capaian Sasaran							79,49	Cukup		77,57	Perlu Upaya Lebih



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020			Kriteria Capaian	Target Akhir RPJMD	Percentase Capaian s.d. Tahun 2020	Kriteria Capaian
					Target	Realisasi	Percentase Capaian				
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	77,93	79,76	92,59	116,09	Baik Sekali	80	115,74	Tercapai
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	78,62	83	80,98	97,57	Baik	85	95,27	Optimis Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran								106,83	Baik Sekali	100,40	Tercapai
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	miliar rupiah	642	100	417,08	417,08	Baik Sekali	600	300,62	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran								417,08	Baik Sekali	300,62	Tercapai
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditi unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	miliar rupiah	394,1	3.391	592,67	17,48	Kurang	4.069,20	14,56	Perlu Upaya Lebih
Rata-rata Capaian Sasaran								17,48	Kurang	14,56	Perlu Upaya Lebih
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,29	68	63,29	93,07	Baik	70	90,41	Optimis Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran								93,07	Baik	90,41	Optimis Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bangka Barat Tahun 2020, diolah.



Untuk capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.65 Capaian Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derasat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,30	9,40	8,05	7,41	7,77
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	60,24	65,44	68,65	69,24	n/a
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,65	77,84	50	51,55	64,17
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2018	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Per센	-	-	90,27	77,93	92,59
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Nilai	80,36	81,02	81,32	78,62	80,98
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	0,61	0,64	0,66	1,02	1,4
7.	Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	940,64	620,12	657,16	394,1	592,67
8.	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Juta Rupiah	239.730	449.026,80	547.851,08	591.662,00	632.902,24
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Juta Rupiah	597,835	635,06	1.696,70	2.290,14	2.747,88
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	Juta Rupiah	6.548	1.990,64	2.313,60	8.599,61	30.534,70
9.	Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	Juta Rupiah	12.894,24	18.227,20	31.651	37.720	32.265
		Nilai produksi ternak unggas	Juta Rupiah	9.772,71	21.731,82	33.659	32.213	47.417



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
10.	Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	20.000 unit usaha	6,39 (21.384 unit usaha)	8,62	1,44	5,94
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	%	13,72	11,61	15,85	11,55	n/a
11.	Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	miliar	117,115	120,782	462,456	642,238	417,08
12.	Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri	Persentase peningkatan unit usaha mikro	%	-	3,29	1,87	2,55	5,60
		Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	%	12,87	7,43	6,14	5,52	5,27
		Peningkatan Skala usaha UMi	%	-	-	86,74	7,07	0,04
		Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan						
		- Industri makanan olahan/kuliner	Ton/thn	3.121,08	3.133,75	3.161,96	3.244,49	2.133,29
		- Industri kerajinan	Unit/thn	191.940	192.852	198.029	203.721	99.556
13.	Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	Jumlah ragam usaha / produk UMi	unit	86	100	120	137	151
		Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	unit	46	46	48	50	51
		Jangkauan pasar produk UMi	%	DK=100	DK=99,62 AK=0,04 AP=0,34	DK=98,66 AK=1,19 AP=0,15	DK=86,46 AK=13,10 AP=0,44	DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55
		Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	%	DK=100	DK=95,41 AK=0,43 AP=4,16	DK=95,86 AK=1,07 AP=3,07	DK=95,9 AK=1,16 AP=2,94	DK=96,03 AK=1,21 AP=2,76



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	%	8,87	9,26	9,33	9,95	n/a
14.	Berkembangnya Destinasi Wisata	Kunjungan wisata	Orang	48.644	109.174	216.256	136.252	61.087
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	1,17	0,96	0,99	0,93
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	12,29	58,24	25,00	-12,00	8,94
15.	Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	%	28,16	33,64	44,23	50,00	35,58
16.	Meningkatnya Konektivitas Daerah	Indeks konektivitas kabupaten	Indeks	1,2	1,2	1,20	1,25	1,25
17.	Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	9,13	23,39	37,89	51,35	51,35
18.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi						
		- SD sederajat		7	7	-	-	n/a
		- SMP sederajat	Peringkat	6	6	6	6	n/a
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	11,50	11,52	11,53
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	Tahun	6,68	6,89	7,06	7,21	7,22
19.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,47	69,52	69,56	69,99	70,06
20.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	112,07	67,24	26,32	31,58	63,16



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
21.	Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga	Prestasi olahraga pendidikan di tingkat provinsi	Peringkat	7 (Popda)	6 (Kejurda)	7 (Popda)	6 (Kejurda)	3 (Popda)
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat	-	-	7 (Porprov)	-	-
22.	Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Berbudaya/ Berwawasan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan	%	-	9,38	10,94	12,5	15,2
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Unit	6	8	9	10	11
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik	%	19,18	19,18	38,36	28,04	23,42
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	%	7,8	7,8	7,81	7,81	10,61
24.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	%	82,68	82,66	86,94	93,79	94,61
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	%	-	62,86	68,57	80	91,67
26.	Terwujudnya Konservasi Sumber Air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	%	16,26	26,02	26,02	33,33	39,02



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
27.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	%	-	-	-	-	0,92
28.	Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	%	70,59	73,68	99,09	12,00	44,44
29.	Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	0,11	0,11	0,11	0,11	1,88

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bangka Barat Tahun 2020.

Melihat capaian sasaran baik sampai dengan Tahun 2020, maka diperlukan perbaikan kinerja yang harus dilakukan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat untuk menunjang pencapaian sasaran serta pengelolaan data dan informasi yang lebih baik serta akurat sehingga data kinerja yang diperoleh dapat diandalkan.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan program prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatif untuk masing-masing program sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut di setiap tahunnya direalisasikan melalui APBD Kabupaten Bangka Barat mulai dari tahun 2016-2021.

Jumlah program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sebanyak 281 program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dari 281 program tersebut, terdapat beberapa program yang hanya digunakan pada Tahun 2016 sebagai dampak perubahan kewenangan dan peralihan program dari masa transisi RPJMD sebelumnya.

Dari capaian 281 program pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Rata-rata Kinerja Program :

- a. Program dengan kriteria capaian “sangat tinggi” sebanyak 177 program;
- b. Program dengan kriteria capaian “tinggi” sebanyak 20 program;
- c. Program dengan kriteria capaian “sedang” 6 program;
- d. Program dengan kriteria capaian “rendah” 12 program; dan



- e. Program dengan kriteria capaian “sangat rendah” 66 program.
2. Capaian Rata-rata Anggaran Program :
 - a. Program dengan kriteria capaian “sangat tinggi” sebanyak 51 program;
 - b. Program dengan kriteria capaian “tinggi” sebanyak 20 program;
 - c. Program dengan kriteria capaian “sedang” 19 program;
 - d. Program dengan kriteria capaian “rendah” 32 program; dan
 - e. Program dengan kriteria capaian “sangat rendah” 159 program.

Dari 281 program pembangunan daerah tersebut, sampai dengan Tahun 2020 terdapat 26 program yang tidak ada data capaian kinerja dan 14 program yang tidak ada data capaian anggaran. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan yang diamanahkan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adalah urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa standar teknis terkait mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Aturan turunan yang menjelaskan tentang Standar Pelayanan Minimal antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut di atas, Kabupaten Bangka Barat telah menerapkan SPM sesuai dengan arahan peraturan perundang-undangan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 92,59 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan cukup tinggi yaitu dengan rata-rata capaian di Tahun 2019 sebesar 77,93%.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1.	Urusan Pendidikan	57,57%	62,25%
2.	Urusan Kesehatan	95,83%	91,52%
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,39%	93,20%
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%	50%
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	46,54%	62,76%
6.	Urusan Sosial	88,22%	159,97%
CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA BARAT		77,93%	92,59%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bangka Barat Tahun 2021, diolah.

Uraian capaian pada masing masing indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 tergambar pada tabel dibawah.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Target Nasional

No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
I URUSAN KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,25%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,61%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,38%	100%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,34%	100%	Tidak Tercapai



No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	97,81%	100%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	70,23%	100%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	78,32%	100%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84,99%	100%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	105,30%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	71,68%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN		91,52%	100%	Tidak Tercapai
II	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Usia Dini	95,09%	100%	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Dasar	86,64%	100%	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	5,01%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN		62,25%	100%	Tidak Tercapai
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	91,78%	100%	Tidak Tercapai
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	94,61%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM		93,20%	100%	Tidak Tercapai
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		100%	100%	Tercapai
V	URUSAN SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	325,49%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	174,35%	100%	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL		159,97%	100%	Tercapai
VI	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			



No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tercapai
SUB URUSAN BENCANA DAERAH				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	7,87%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5,93%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Tercapai
SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		62,76%	100%	Tidak Tercapai

1. SPM Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2020, SPM Urusan Kesehatan yang mencapai target nasional ada 3 (tiga) indikator yaitu indikator Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Ada 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu:

- Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Diabetes Melitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah suatu keadaan dimana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang sesuai kebutuhan tubuh, akibatnya mengganggu metabolisme gula sehingga gula yang semestinya berada dalam sel justru berada dalam darah. Penderita mengalami penurunan kualitas hidup, kinerja menurun karena cepat lelah. Pemeriksaan gula darah secara rutin dapat mengetahui gejala awal kencing manis sehingga terapi pengobatan dapat dilakukan pada fase awal penyakit dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Pada tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 105,30%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (98,35%) mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan sasaran yang menjadi target lebih kecil dari capaian yang ada. Perhitungan sasaran berdasarkan angka kesakitan DM yang didapat dari hasil Riskesdas tahun 2018 (2,63%) dikalikan dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Capaian diatas 100% mengartikan bahwa



saat ini angka kesakitan di kabupaten Bangka Barat lebih dari 2,63%, yang berarti ada peningkatan jumlah penderita DM.

- b. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, pada keadaan ini virus menyerang sistem kekebalan tubuh manusia akibatnya kemampuan tubuh untuk melawan infeksi penyakit mengalami penurunan, sampai saat ini obat untuk menyembuhkan HIV belum ditemukan, pengobatan yang diberikan adalah untuk mempertahankan jangan sampai HIV berkembang menjadi AIDS serta meningkatkan kualitas hidup penderita. AIDS adalah suatu keadaan dimana tubuh sudah sama sekali kehilangan sistem kekebalan tubuh sehingga kemungkinan penderita meninggal amat besar karena tubuh tidak mampu lagi melawan penyakit. Pada tahun 2020 pemeriksaan HIV pada kelompok yang rentan terinfeksi sebesar 105,38%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (86,29%) indikator ini mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% telah mencapai target. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sasaran (warga binaan pemasyarakatan (WBL) dan waria) yang tidak bisa diprediksi dan diketahui bertambah di akhir tahun sehingga data sasaran tidak lagi bisa dirubah karena sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober tahun 2020.

- c. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan memiliki gangguan kesehatan jiwa. Dalam kehidupannya kualitas hidup maupun produktifitas dengan gangguan jiwa sangat rendah, untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok ini dilakukan program pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Pada tahun 2019 orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (100%) dan target nasional (100%) indikator ini sudah mencapai target. Tercapainya ini indikator ini disebabkan kerjasama lintas sektor yang telah terlaksana dengan maksimal dengan adanya bantuan/peran serta aktif yang terlibat dalam penanganan ODGJ seperti Rumah Sakit Jiwa, Polisi, dinas sosial, Dinas Dukcapil, Pol PP, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Meskipun sudah mencapai target dan sudah terlaksana dengan baik masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hal pengobatan ODGJ tersebut diantaranya ada ODGJ yang belum memiliki jaminan kesehatan, kondisi ODGJ yang sulit ditangani, ODGJ yang tidak memiliki keluarga/terlantar sehingga tidak ada yang mengawasi dalam pemberian obat dan jika sudah kembali dari pengobatan di RSJ tidak ada keluarga yang mengurusnya. Selain itu ada



penambahan ODGJ setiap tahun, dengan data pada tahun 2017 sebanyak 318 ODGJ menjadi sebanyak 493 ODGJ pada tahun 2020. Ada penambahan 175 ODGJ dalam jangka waktu 3 tahun.

2. SPM Urusan Pendidikan

Untuk rata-rata capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 62,25 persen, dimana dari 3 (tiga) indikator tidak ada satupun indikator yang mendapatkan capaian 100 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 capaian SPM urusan pendidikan sebesar 57,57 persen. Dalam pelaksanaan penerapan SPM di bidang pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya aspirasi orang tua dalam bidang pendidikan untuk menyekolahkan anaknya yang dimulai dari pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Minimnya pendataan terhadap anak putus sekolah pada usia sekolah yang membuat Dinas teknis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan SPM untuk anak putus sekolah;
- c. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan rentang usia jenjang pendidikan tersebut ;
- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM di Kabupaten;
- e. Perubahan kebijakan penerapan SPM di tingkat pusat yang belum diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan SPM di tingkat daerah dikarenakan kebijakan SPM tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah pada ujung tahun.

3. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 93,20 persen. Capaian rata-rata tersebut merupakan capaian dari indikator "Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari" sebesar 91,78 persen serta capaian dari indikator "Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik" sebesar 94,61 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebesar 79,39 persen.

4. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

Rata-rata capaian SPM urusan perumahan dan permukiman Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 50 persen, dimana dari 2 (dua) indikator ada 1 (satu) yang mendapatkan capaian 100



persen sedangkan indikator lainnya 0 persen. Detail penjelasan setiap indikator pada SPM urusan perumahan dan permukiman yaitu :

- a. Capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 persen, dimana dari 2 (dua) kasus rumah warga yang terkena dampak bencana, semuanya dilakukan perbaikan. Penentuan sasaran indikator "Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana", ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/142.a/1.4.1.1/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Penerima bantuan Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebanyak 2 orang yang disebabkan oleh bencana berupa angin kencang di Desa Pangek, Kecamatan Simpangteritip.
- b. Capaian SPM untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten adalah 0 persen, dimana pada tahun 2020, tidak terdapat kasus rumah masyarakat yang terdampak akibat relokasi program Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

5. SPM Urusan Sosial

Rata-rata capaian SPM urusan sosial Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 159,97 persen, dimana dari 5 (lima) indikator semuanya mendapatkan capaian 100 persen atau lebih. Layanan standar rehabilitasi sosial dasar yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Terjadi peningkatan nilai SPM urusan sosial jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya sebesar 88,22 persen.

6. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 62,76 persen, dimana dari 5 (lima) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 capaian nilai SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 46,54 persen.



2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau secara internasional disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan secara global dapat dicapai pada tahun 2030.

TPB terdiri atas 17 Tujuan yang menjadi kesepakatan global untuk mencapainya pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;



17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuh belas TPB tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, pilar hukum dan tata kelola. Selanjutnya dari masing-masing TPB diukur melalui indikator yang akan dievaluasi capaiannya setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Adapun indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Indikator kewenangan Pusat berjumlah 308 indikator;
2. Indikator kewenangan Provinsi 235 indikator;
3. Indikator kewenangan Kabupaten 220 indikator;
4. Indikator kewenangan Kota 222 indikator.

Dari 220 indikator TPB, pilar sosial terdiri dari 96 indikator, pilar ekonomi terdiri dari 61 indikator, pilar lingkungan terdiri dari 42 indikator dan pilar hukum dan tata kelola terdiri dari 21 indikator. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda terhadap target capaian TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Capaian indikator TPB dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kriteria, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST).
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT).
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC).
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC).
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD).
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Rekapitulasi jumlah indikator pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan klasifikasi kriteria pencapaian TPB sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 58 indikator.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) sejumlah 40 indikator.
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) sejumlah 45 indikator.
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) sejumlah 34 indikator.
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 24 indikator.
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 19 indikator.

Realisasi Capaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.74.



2.5 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Untuk rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangka Barat diambil dari hasil penjaringan masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan Reses oleh DPRD adalah masa Reses III Tahun 2020 yang dilakukan oleh beberapa fraksi DPRD yang kemudian diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sesuai dengan alur usulan reses DPRD dalam SIPD, setelah usulan diinput maka dilakukan verifikasi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu verifikasi oleh Sekretariat DPRD, verifikasi oleh Bidang Pengampuan BP4D serta verifikasi oleh perangkat daerah terkait. Usulan kegiatan diverifikasi dengan memperhatikan kewenangan, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2022, lokasi pembangunan, serta urgensitas pelaksanaan pembangunan.

Setelah tahapan tersebut, hasil verifikasi reses kemudian dibahas sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD yaitu pada tahapan Musrenbang RKPD dan Pembahasan Rancangan Akhir RKPD bersama Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

Berikut hasil usulan reses DPRD yang masuk dalam SIPD yang kemudian masuk dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 :

Tabel 2.68 Hasil Reses DPRD dalam SIPD dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
1	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan Kursi Roda	Dinsos & PM	Desa Air belo	Tidak diakomodir	-
2	Dedi Egipry	BINTANG TERDEPAN	Penambahan Insentif Lansia desa dendang	Dinsos & PM	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
3	H.Syahbandar	PKS	Penambahan Insentif Lansia desa dendang	Dinsos & PM	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
4	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA	Pengadaan Wc Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khoir	Dikpora	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak diakomodir	-
5	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pengadaan Wc Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khoir	Dikpora	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak diakomodir	-
6	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Perbaikan Arena Olahraga lapang Voli dan lapang Sepak bola karena sudah rusak	Dikpora	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Tidak diakomodir	-
7	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan perbaikan ruang kelas yang rusak bocor	Dikpora	Desa Air Limau	Tidak diakomodir	-
8	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Bantuan perbaikan ruang kelas yang rusak bocor	Dikpora	Desa Air Limau	Tidak diakomodir	-
9	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Bantuan perbaikan ruang kelas yang rusak bocor	Dikpora	Desa Air Limau	Tidak diakomodir	-
10	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Pagar di SDN 11 Muntok Desa Air Limau	Dikpora	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
11	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Pembangunan Pagar di SDN 11 Muntok Desa Air Limau	Dikpora	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
12	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Pembangunan Pagar di SDN 11 Muntok Desa Air Limau	Dikpora	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
13	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Gedung untuk Belajar dan Asrama SD/SMP IT Al Ihsan Air Belo	Dikpora	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Akomodir	Diakomodir



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
14	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Plafon Sekolah 3 Lokal SD 8 Muntok	Dikpora	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Akomodir	Diakomodir
15	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Penambahan Lokal Kelas SDN 15 Muntok (Sinar Menumbung)	Dikpora	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak diakomodir	-
16	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Pagar SMK N 1 Muntok	Dikpora	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak diakomodir	-
17	Dedi Egipry	BINTANG TERDEPAN	Penambahan gedung TPA	Dikpora	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
18	H.Syahbandar	PKS	Penambahan gedung TPA	Dikpora	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
19	Dedi Egipry	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan gedung olahraga	Dikpora	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
20	H.Syahbandar	PKS	Pembangunan gedung olahraga	Dikpora	Desa Dendang	Tidak diakomodir	-
21	Somad	NASDEM	Pemagaran di SD 5 Kecamatan Jebus	Dikpora	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
22	Alha Agus	PKS	Pembuatan pagar dan podium lapangan Sepak Bola Persib Belo Laut	Dikpora	Belo Laut	Tidak diakomodir	-
23	Drs. Samsir	PKS	Matras dan Body Protect untuk pencaksilat (Ardianto)	Dikpora	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak diakomodir	-
24	Drs. Samsir	PKS	Seragam voli dan seragam bola untuk karang taruna Rt 17 (Bpk. Yatni)	Dikpora	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak diakomodir	-
25	Drs. Samsir	PKS	Kenaikan honor guru untuk sekolah swasta terkhusus guru TK (Bpk. Husni Purnomo)	Dikpora	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak diakomodir	-
26	Drs. Samsir	PKS	Biaya gratis untuk pendidikan tingkat SMA (Bpk. Harmonis)	Dikpora	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak diakomodir	-
27	H. Oktorazsari	GERINDRA, NASDEM	Pemekaran Kelurahan Kelapa Usulan Perwakilan Masyarakat Kelurahan Kelapa Ketua LPM Keluraha Kelapa (Apabila telah selesai Pemberkasan, Kajian dan Persyaratan lainnya Mohon diprioritas Prolegda Tahun 2021 untuk Pembahasan Raperda)	Setda	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
28	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Pemekaran Kelurahan Kelapa Usulan Perwakilan Masyarakat Kelurahan Kelapa Ketua LPM Keluraha Kelapa (Apabila telah selesai Pemberkasan, Kajian dan Persyaratan lainnya Mohon diprioritas Prolegda Tahun 2021 untuk Pembahasan Raperdanya)	Setda	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
29	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pengusulan perbaikan Masjid	Setda	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
30	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Perombakan mesjid di RT 05 Kp. Baru Desa Belo Laut	Setda	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
31	Dedi Egipry	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Mesjid Istiqomah	Setda	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
32	H.Syahbandar	PKS	Pembangunan Mesjid Istiqomah	Setda	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
33	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Pemekaran Kelurahan Kelapa	Setda	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
34	Somad	NASDEM	Bantuan Pemagaran Masjid di desa Sungai Buluh	Setda	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
35	Apandi, S.E	NASDEM	Rehab Masjid Baiturrahmah Dusun Jebus RT 02 RW 01, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	Setda	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
36	Apandi, S.E	NASDEM	Rehab Masjid Kp. Pasir Mungai RT.03 RW.01 Dusun Jebus Tegap Masjid Baiturrahmah Dusun Jebus RT.02 RW.01 Dusun Jebus	Setda	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
37	Apandi, S.E	NASDEM	penembokan lapangan masjid untuk menjaga struktur tanah agar tidak bergeser (longsor) dan tetap stabil	Setda	Masjid Kp. Mendaru RT 02 RW 03 Dusun Kampak, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	Akomodir	Diakomodir
38	Apandi, S.E	NASDEM	Pondasi awal Masjid Nurul Iman	Setda	Dusun Kerang RT 03 RW 02, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	Akomodir	Diakomodir
39	Drs. Samsir	PKS	Pagar Surau Nurul Hidayah 100 x 35 meter	Setda	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
40	Dedi Egipry	Bintang Terdepan	Penambahan gedung TPA	Setda	Desa dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Dendang		Diakomodir
41	H.Syahbandar	PKS	Penambahan gedung TPA	Setda	Desa dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Dendang		Diakomodir
42	Drs. Samsir	PKS	Perubahan perda untuk minuman keras, karena selama ini masih sering terjadi pembelinya mayoritas muslim terkadang anak-anak remaja yang masih duduk bangku sekolah (Bpk. HusniPurnomo)	Setda	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
43	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Rehab Posyandu di Rw 03 Rt 03	Dinkes	Kelurahan Sungai Baru	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
44	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	foging secara berkesinambungan	Dinkes	Kelurahan Sungai Baru	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
45	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Sumur di poskesdes	Dinkes	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
46	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Pemeliharan Poskesdes Desa Kacung RT.04 Desa Kacung	Dinkes	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
47	Alha Agus	PKS	Keringan Pembayaran BPJS	Dinkes	Belo Laut	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
48	Alha Agus	PKS	Bantuanbiaya BPJS masyarakat kurang Mampu	Dinkes	Kecamatan Simpang teritip	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
49	Drs. Samsir	PKS	Menerapkan pengobatan gratis atau BPJS gratis untuk masyarakat. Karena selama ini menggunakan BPJS kami sudah tertunggak hampir 1 tahun lebih. (Bpk. Djulmat)	Dinkes	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-
50	Drs. Samsir	PKS	Menerapkan Jamkesra lagi di bandingkan BPJS (Bpk. HusniPurnomo)	Dinkes	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	(Akomodir/Tidak Diakomodir)	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
51	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan Pengembangan pariwisata di Desa Air Limau baik pembangunan lokasi wisata dan pembimbingan atau pelatihan pariwisata	Disparbud	Desa Air Limau		-
52	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan Pengembangan pariwisata di Desa Air Limau baik pembangunan lokasi wisata dan pembimbingan atau pelatihan pariwisata	Disparbud	Desa Air Limau		-
53	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan Pengembangan pariwisata di Desa Air Limau baik pembangunan lokasi wisata dan pembimbingan atau pelatihan pariwisata	Disparbud	Desa Air Limau		-
54	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Lowongan pekerjaan bagi anak-anak tamatan sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK)	DPM NAKERTRANS	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
55	Apandi, S.E	NASDEM	Sumur Bor Kompleks Transmigrasi RT.04 RW.03 Dusun Kampak	DPM NAKERTRANS	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
56	Alha Agus	PKS	Bantuan peralatan potong rambut bagi Pemuda	DPM NAKERTRANS	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
57	Alha Agus	PKS	Bantuan peralatan bengkel bagi Pemuda	DPM NAKERTRANS	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
58	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Ketersediaan spanduk-spanduk larangan pembuangan sampah dan aktivitas penambangan	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
59	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Perbaikan aliran-aliran bandar dan ketersediaan tempat pembuangan sampah	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
60	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Penanaman pepohonan dekat Jl. Gereja	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
61	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Ketersediaan spanduk-spanduk larangan pembuangan sampah dan aktivitas penambangan	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
62	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Perbaikan aliran-aliran bandar dan ketersediaan tempat pembuangan sampah	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
63	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Penanaman pepohonan dekat Jl. Gereja	DLH	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
64	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Solusi Penanggulangan masalah limbah Tambak Udang yang mencemari air Laut	DLH	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Tidak Diakomodir	-
65	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Banyaknya Nyamuk yang disebabkan oleh tambak udang karena penampungan limbahnya belum terkoordinir dengan baik	DLH	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Tidak Diakomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
66	Alha Agus	PKS	Pelepasan status Kawasan hutan pemukiman Dususn IV Belo Laut	DLH	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
67	Suyenti	PDI	Rehabiliasi dan Penataan Pasar Parittiga	DKUKMP	Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
68	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Pasar Desa Kundi	DKUKMP	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
69	Suherdl	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Permodalan seperti bibit ternak misalnya bibit ayam, bebek, dan lain sebagainya bagi masyarakat daerah	DKUKMP	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
70	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Pasar Desa Kundi	DKUKMP	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
71	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Permodalan seperti bibit ternak misalnya bibit ayam, bebek, dan lain sebagainya bagi masyarakat daerah	DKUKMP	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
72	Drs. Samsir	PKS	Bantuan UMKM untuk masyarakat Desa Sinar Manik, karena selama ini belum ada untuk Desa Sinar Manik. (Bpk. Ilyar)	DKUKMP	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
73	Drs. Samsir	PKS	Jalan setapak dan bantuan modal usaha cetak batu nisan (Bpk. Harmonis)	DKUKMP	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
74	Marudur Saragih, SE	PDI	Bantuan pupuk subsidi kepada Petani di dusun Cupat.	Distangan	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
75	Suyenti	PDI	Mengusulkan Pengembangan Budidaya dan promosi Teh Tayu	Distangan	Dusun Tayu Desa Ketap, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
76	Suyenti	PDI	Bantuan Pupuk Subsidi di Dusun Tayu	Distangan	Dusun Tayu Desa Ketap, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
77	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan depo untuk standar harga sawit, karet dan lada	Distangan	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
78	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan depo untuk standar harga sawit, karet dan lada	Distangan	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
79	H. Oktorazsari	GERINDRA	Pembangunan dan Peningkattkan Jalan Usaha tani (jut) Sawah dan jalan usaha tani lainnya Usulan dari Ketua Gapoktan	Distangan	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
80	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Pembangunan dan Peningkattkan Jalan Usaha tani (jut) Sawah dan jalan usaha tani lainnya Usulan dari Ketua Gapoktan	Distangan	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
81	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan Bibit Sawit	Distangan	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
82	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Bantuan Traktor untuk pengelolaan tanah	Distangan	Desa Air Limau	Akomodir	-
83	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan Traktor untuk pengelolaan tanah	Distangan	Desa Air Limau	Akomodir	-
84	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Bantuan Traktor untuk pengelolaan tanah	Distangan	Desa Air Limau	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
85	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan Bibit Sawit	Distangan	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
86	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan Bibit Sawit	Distangan	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
87	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan JUT sawah Desa Kacung dan Dusun Kebayan sepanjang 600 meter	Distangan	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
88	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan dan Peningkatkan Jalan Usaha tani (jut) Sawah dan jalan usaha tani lainnya	Distangan	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
89	Alha Agus	PKS	Bantuan Bibit Karet 8000 Batang	Distangan	Kecamatan simpangteritip	Tidak Diakomodir	-
90	Dedi Egipy	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan jalan JUT ke masyarakat 3000 M	Distangan	Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
91	Dedi Egipy	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan jembatan sawah adin 45 Meter	Distangan	Desa Dendang Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
92	H. Oktorazsari	GERINDRA	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (JUT)sawah dan Jalan usaha tani pembuatan jalan baru dan jalan puru 1KM	Distangan	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
93	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Bantuan bibit benih ikan bagi usaha tambak masyarakat perorangan	DKP	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
94	H. Oktorazsari	GERINDRA, NASDEM	Pembenahan Balai Benih Ikan (BBI) Usulan Perangkat Kelurahan Kelapa	DKP	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
95	Dedi Egipy	BINTANG TERDEPAN, PKS	Permohonan bantuan untuk nelayan	DKP	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
96	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Bantuan bibit benih ikan bagi usaha tambak masyarakat perorangan	DKP	Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip	Tidak Diakomodir	-
97	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Pembenahan Balai Benih Ikan (BBI) Usulan Perangkat Kelurahan Kelapa	DKP	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
98	H.Syahbandar	BINTANG TERDEPAN, PKS	Permohonan bantuan untuk nelayan	DKP	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
99	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Pembenahan Balai Benih Ikan (BBI)	DKP	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
100	Apandi, S.E	NASDEM	Peningkatan Dermaga Dusun Kampak RT.3 RW.03	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
101	Apandi, S.E	NASDEM	Bantuan Jaring Ikan Milenium 5 Inc 30 Pics RT.03 RW.02 Dusun Kerang	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	-
102	Apandi, S.E	NASDEM	Pembuatan Tambak dan Bibit Ikan Kakap Kelompok Nelayan RT.02 RW.03 Dusun Kampak	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	-
103	Apandi, S.E	NASDEM	Bantuan Jaring Ikan Milenium 4 Inc RT03 RW.03 Dusun Kampak	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
104	Apandi, S.E	NASDEM	Bantuan budidaya ikan lele pemuda betuh kecamatan jebus	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	-
105	Apandi, S.E	NASDEM	Pembuatan Tambalan Perahu RT.02 RW.03 Dusun Kampak	DKP	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
106	Drs. Samsir	PKS	Bantuan peralatan tangkap untuk nelayan dan speed boat (IbuNurlela)	DKP	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
107	Suyenti	PDI	Pembangunan sumur bor di Dusun Tayu	Perkimhub	Dusun Tayu Desa Ketap, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
108	Suyenti	PDI	Pengaspalan dan Penataan Terminal Parittiga	Perkimhub	Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
109	Suyenti	PDI	Perbaikan/ Normalisasi alur drainase siring di Jalan Kantor Pos menuju jembatan Tepekong Parit empat	Perkimhub	Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
110	Suyenti	PDI	Perbaikan Drainase di Pasar Parittiga	Perkimhub	Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
111	H. Oktorazsari	GERINDRA	Perbaikan tempat Pemandian Air Sawah (RT 07) Usulan Anggota LPM Kelurahan Kelapa	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
112	H. Oktorazsari	GERINDRA	Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Sepanjang Kelurahan Kelapa (Usulan Ketua RT 17)	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
113	Meriyanti	NASDEM	Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Sepanjang Kelurahan Kelapa (Usulan Ketua RT 17)	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
114	H. Oktorazsari	GERINDRA	Revitalisasi Pam (Peninggalan Aset Kabupaten Bangka Barat ketika Belum Pemekaran Kabupaten Bangka Barat dan Peningkatan Tempat Sumber Air Bersih , Antisipasi Musim Kering (Revitalisasi Pam) Usulan Perwakilan Masyarakat	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
115	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembuatan sumur bor dan ketersediaan fasilitas umumnya seperti Tedmon, mesinnya dan lain sebagainya	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
116	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Penyediaan lampu-lampu/penerangan jalan	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
117	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Rumah layak huni terhadap masyarakat kurang mampu	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
118	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Perbaikan tempat Pemandian Air Sawah (RT 07) Usulan Anggota LPM Kelurahan Kelapa	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
119	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Revitalisasi Pam (Peninggalan Aset Kabupaten Bangka Barat ketika Belum Pemekaran Kabupaten Bangka Barat dan Peningkatan Tempat Sumber Air Bersih , Antisipasi Musim Kering (Revitalisasi Pam) Usulan Perwakilan Masyarakat	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
120	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembuatan sumur bor dan ketersediaan fasilitas umumnya seperti Tedmon, mesinnya dan lain sebagainya	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
121	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Penyedian lampu-lampu/penerangan jalan	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
122	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Rumah layak huni terhadap masyarakat kurang mampu	Perkimhub	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
123	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Mengajukan Penerangan Jalan di setiap tikungan Rt 03	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Akomodir	-
124	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	penerangan jalan di RT 03 tepatnya di daerah Kompi	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Akomodir	-
125	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pembenahan tempat pemandian di Rt 04	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
126	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	pembuatan drainase yang terputus di RT/RW 001/002 tepatnya di samping lapangan gelora Muntok	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
127	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pembangunan balai di RT 02 dan RW 01 di jalan skip	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
128	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	pembuatan aula pertemuan	Perkimhub	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
129	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan sumur bor dan air bersih untuk warga	Perkimhub	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
130	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan sumur bor dan air bersih untuk warga	Perkimhub	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
131	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan sumur bor dan air bersih untuk warga	Perkimhub	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
132	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Rumah layak huni	Perkimhub	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
133	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Sumur Bor di perkuburan Dusun Pal 3	Perkimhub	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
134	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pagar Pemakaman/kuburan	Perkimhub	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
135	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Lampu penerangan jalan di dusun I, II, III	Perkimhub	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Akomodir	-
136	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pembuatan WC Individual di Kampung Baru Dusun II Belo Laut	Perkimhub	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
137	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Program Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	Perkimhub	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
138	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Drainase Jalan Gelatik Rt 01 P ± 840 M	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
139	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Drainase jalan ababil RT 01 P ± 830 M	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
140	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pengecatan TPU muslim Rt 01 ± 280 M	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
141	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Mengajukan pemasangan lampu penerangan jalan	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
142	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan KCK di kelurahan menjelang	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
143	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pengusulan pagar TPU Muslim	Perkimhub	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
144	Rubiansyah, S.Kom	BINTANG TERDEPAN	Pembuatan Sumur Bor dan Ketersediaan Fasilitas Umumnya seperti Tedmon, Mesin dan lain sebagainya	Perkimhub	Dusun parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Tidak Diakomodir	-
145	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan Balai Pertemuan/WC sawah Deaa Kacung dengan ukuran 8 x 15 meter	Perkimhub	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
146	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan pagar kuburan desa dendang	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
147	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Memprioritaskan rumah tertinggal	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
148	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan sumur bor	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
149	H.Syahbandar	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan pagar kuburan desa dendang	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
150	H.Syahbandar	BINTANG TERDEPAN, PKS	Memprioritaskan rumah tertinggal	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
151	H.Syahbandar	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan sumur bor	Perkimhub	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
152	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Perbaikan tempat Pemandian Air Sawah (RT 07)	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
153	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Revitalisasi Pam dan Peningkatan Tempat Sumber Air Bersih, Antisipasi Musim Kering	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
154	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Sepanjang Kelurahan Kelapa	Perkimhub	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
155	Somad	NASDEM	Pemagaran Kubur Di Sebelah Kantor Desa Sungai Buluh ± 150 Meter	Perkimhub	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
156	Somad	NASDEM	Bantuan lampu jalan di desa sungai buluh dikarenakan lampu jalan banyak yang mati	Perkimhub	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	-
157	Somad	NASDEM	Pembangunan tempat pemandian di Rt 02 dan Rt 04 Desa Sungai Buluh	Perkimhub	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
158	Apandi, S.E	NASDEM	Pembangunan WC Warga Desa Jebus 50 Unit	Perkimhub	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
159	Apandi, S.E	NASDEM	Siring Jalan Air Pangkal 700 M RT.02 RW.01 Dusun Jebus	Perkimhub	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
160	Alha Agus	PKS	Pembuatan WC Masjid Baiturrahim Dusun IV Belo LAut	Perkimhub	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
161	Alha Agus	PKS	Penerangan Lampu Jalan Dusun IV Belo Laut	Perkimhub	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
162	Drs. Samsir	PKS	SumurBor di 3 Dusun masing-masing 1 Unit per Dusun	Perkimhub	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
163	Drs. Samsir	PKS	Lampu penerangan jalan di Desa Cupat 10 Unit	Perkimhub	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
164	Drs. Samsir	PKS	Lampu penerangan di depan Masjid (Bpk. Sutrisno)	Perkimhub	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
165	Drs. Samsir	PKS	Penerangan lampu jalan di Rt 04 (Bpk. Siregar)	Perkimhub	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
166	Drs. Samsir	PKS	Penerangan untuk lampu masjid di Desa Sinar Manik (Bpk. Siregar)	Perkimhub	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
167	Drs. Samsir	PKS	Pembangunan pagar dan lampu jalan di Mushola Al-Ikhlas (Bpk. Harmonis)	Perkimhub	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
168	Na'im	PDI	Perbaikan Jalan Gang Taqwa depan Masjid Asshogiri yang telah rusak	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	Akomodir	-
169	Na'im	PDI	Perbaikan siring dan jalan di kampung sidorejo sepanjang kurang lebih	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	Akomodir	Diakomodir
170	H. M. Kasim, A. Md	PDI	Perbaikan siring dan jalan di kampung sidorejo sepanjang kurang lebih	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	Akomodir	-
171	Na'im	PDI	Pengaspalan jalan Argotirto Gang Nila	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
172	Na'im	PDI	Pembangunan Jalan kerumah RT	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
173	Na'im	PDI	Pembuatan Siring dan Balai di jalan belakang Villa Batu sepanjang	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
174	Na'im	PDI	Perbaikan Jalan Gang Taqwa depan Masjid Asshogiri yang telah rusak	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	Akomodir	-
175	H. M. Kasim, A. Md	PDI	Pengaspalan jalan Argotirto Gang Nila	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
176	H. M. Kasim, A. Md	PDI	Pembangunan Jalan kerumah RT	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
177	H. M. Kasim, A. Md	PDI	Pembuatan Siring dan Balai di jalan belakang Villa Batu sepanjang	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	(Tidak Diakomodir)	-
178	Marudur Saragih, SE	PDI	Masyarakat Dusun Tambang 25 mengharapkan agar Program BantuanPembuatanJamban (WC) terus dijalankan oleh pemerintah, karena di Dusun Tambang 25 masih terdapat lebih kurang 73 Rumah yang belum ada Jambannya.	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	(Tidak Diakomodir)	-
179	Marudur Saragih, SE	PDI	Pemeliharaan jalan Puru dari Cupat ke Desa Kapit	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
180	Marudur Saragih, SE	PDI	Pembuatan siring jalan Raya Tambang 25 kurangLebih 200 M (PRIORITAS)	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	(Tidak Diakomodir)	Diakomodir
181	Marudur Saragih, SE	PDI	Pembangunan siring di depan Gereja sepanjang 700M + Gorong-gorong (PRIORITAS)	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Akomodir	-
182	Marudur Saragih, SE	PDI	Pengaspalan jalan Raya dusun Cupat RT 11	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	(Tidak Diakomodir)	-
183	Marudur Saragih, SE	PDI	Pengaspalan jalan Gang panjangnya kurang lebih 306 M	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Akomodir	Diakomodir
184	Marudur Saragih, SE	PDI	Pengaspalan jalan Gang RT 03 sepanjang 96 M Dusun Tambang 25 Desa Cupat	DPUPR	Dusun Tambang 25 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	(Tidak Diakomodir)	-
185	Suyenti	PDI	Normalisasi/ Pembangunan talud di Rt 10 Dusun Tayu	DPUPR	Dusun Tayu Desa Ketap, KecamatanJebus	Akomodir	Diakomodir
186	Suyenti	PDI	Perbaikan dan peningkatan jalan dari Dusun Tayu ke Obyek wisata pantai jerangkat Sepanjang 18 km	DPUPR	Dusun Tayu Desa Ketap, KecamatanJebus	Akomodir	-
187	Suyenti	PDI	Pembangunan Talud (tambahan) di RT 11 Dusun Tayu disamping kelenteng sampai PAUD Dusun Tayu	DPUPR	Dusun Tayu Desa Ketap, KecamatanJebus	(Tidak Diakomodir)	-
188	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan Puskesmas Desa kundi beserta siring (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	-
189	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan penghubung rebakibul (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	(Tidak Diakomodir)	-
190	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA	Peningkatan Jalan Kantor Desa Kundi (jalan AMD) 3 KM (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	Diakomodir
191	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan Kantor Desa Kundi (jalan AMD) 3 KM (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	Diakomodir
192	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA	PeningkatanJalan Raya Kundi Pelangas dan pemeliharaan siring	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	-
193	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	PeningkatanJalan Raya Kundi Pelangas dan pemeliharaan siring	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	-
194	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pemuruan Jalan Madrasah Ibtidaiyah Miftahu IKhoir ± 100 M	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak Diakomodir	-
195	Suhandi, S.Pd.I	GERINDRA	Peningkatan Jalan Air Riang	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak Diakomodir	-
196	H. Oktorazsari	GERINDRA, NASDEM	Peningkatkan Pembangunan Jalan Gang Sanyut, Gang Air Apek dan Gang Air Bulin (Usulan dari RT 05)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
197	Meriyanti	NASDEM	Peningkatkan Pembangunan Jalan Gang Sanyut, Gang Air Apek dan Gang Air Bulin (Usulan dari RT 05)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
198	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatkan Pembangunan Jalan Gang Sanyut, Gang Air Apek dan Gang Air Bulin (Usulan dari RT 05)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
199	H. Oktorazsari	GERINDRA	Peningkatan Jalan RT. 07 Rehab Berat Jalan Air Sawah (Padat Karya) Menuju Tk. Pembinaan Jalan Begadang I dan II (Usulan Anggota LPM KelurahanKelapa)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
200	Meriyanti	NASDEM	Peningkatan Jalan RT. 07 Rehab Berat Jalan Air Sawah (Padat Karya) Menuju Tk. Pembinaan Jalan Begadang I dan II (Usulan Anggota LPM KelurahanKelapa)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
201	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan RT. 07 Rehab Berat Jalan Air Sawah (Padat Karya) Menuju Tk. Pembinaan Jalan Begadang I dan II (Usulan Anggota LPM KelurahanKelapa)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
202	H. Oktorazsari	GERINDRA, NASDEM	Peningkat Shering Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten (Usulan Ketua RT 09)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	
203	H. Oktorazsari	GERINDRA	PeningkatanJalan Gang Perumahan Air Keladi Rt 11/ Rw 05	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
204	Meriyanti	NASDEM	PeningkatanJalan Gang Perumahan Air Keladi Rt 11/ Rw 05	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
205	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	PeningkatanJalan Gang Perumahan Air Keladi Rt 11/ Rw 05	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
206	H. Oktorazsari	GERINDRA	Perbaikan Jalan Sering jalan Rt 01 dan Lingkaran Hutan Larang Lestari Kelapa	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
207	Meriyanti	NASDEM	Perbaikan Jalan Sering jalan Rt 01 dan Lingkaran Hutan Larang Lestari Kelapa	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
208	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Perbaikan Jalan Sering jalan Rt 01 dan Lingkaran Hutan Larang Lestari Kelapa	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
209	H. Oktorazsari	GERINDRA	Perbaikan Sering Bandar di LokasiRt 15	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
210	Meriyanti	NASDEM	Perbaikan Sering Bandar di LokasiRt 15	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
211	Adi Suciyo Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan Puskesmas Desa kundi beserta siring (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	Akomodir	Diakomodir
212	Adi Suciyo Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan penghubung rebakbul (hotmik)	DPUPR	Desa Kundi, Kecamatan SimpangTeritip	(Tidak Diakomodir)	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
213	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pemuruan Jalan Madrasah Ibtidaiyah Miftahu IKhoir ± 100 M	DPUPR	Desa Kundu, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak Diakomodir	-
214	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan Air Riang	DPUPR	Desa Kundu, Kecamatan SimpangTeritip	Tidak Diakomodir	-
215	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Peningkatan Jalan RT. 07 Rehab Berat Jalan Air Sawah (Padat Karya) Menuju Tk. Pembinaan Jalan Begadang I dan II (Usulan Anggota LPM KelurahanKelapa)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
216	Meriyanti	GERINDRA, NASDEM	Peningkat Shering Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten (Usulan Ketua RT 09)	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
217	Herwanto	GERINDRA	Pelebaran jalan aspal dari dusun anyai s/d dusun belanak desa air menduyung	DPUPR	Desa Air Menduyung, KecamatanSimpangTeritip	Akomodir	Diakomodir
218	Herwanto	GERINDRA	Peningkatan jalan dari dusun lemu s/d dusun belanak desa air menduyung	DPUPR	Desa Air Menduyung, KecamatanSimpangTeritip	Tidak Diakomodir	-
219	Herwanto	GERINDRA	Pembangunan siring di dusun belanak dan dusun mandung desa air menduyung	DPUPR	Desa Air Menduyung, KecamatanSimpangTeritip	Akomodir	Diakomodir
220	Suherdi	GERINDRA	Pembangunan jalan di Gang Duren± 500 M	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
221	Rubiansyah, S.Kom	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan jalan di Gang Duren± 500 M	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
222	Suherdi	GERINDRA	Perbaikan gorong-gorong yang kurang maskimal	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
223	Suherdi	GERINDRA	perbaikan siring aliran bandar dan ketersediaan tempat pembuangan sampai karena kurang memadai	DPUPR	dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan parittiga, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	Akomodir	Diakomodir
224	Rubiansyah, S.Kom	BINTANG TERDEPAN	perbaikan siring aliran bandar dan ketersediaan tempat pembuangan sampai karena kurang memadai	DPUPR	dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan parittiga, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	Akomodir	Diakomodir
225	Suherdi	GERINDRA	Pembangunan jembatan desaP =6 X L=4	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
226	Rubiansyah, S.Kom	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan jembatan desaP =6 X L=4	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
227	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan aspal di daerah Jl. Masuk Gereja 80 M	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	Diakomodir
228	Suherdi	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan siring pada Jl. Provinsi sepanjang jalan rumah warga ± 1 KM	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
229	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan siring pada Jl. Provinsi sepanjang jalan rumah warga ± 1 KM	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
230	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Pembangunan jalan di Gang Duren± 500 M	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
231	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Perbaikan gorong-gorong yang kurang maskimal	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
232	Rubiansyah, S.Kom	GERINDRA, BINTANG TERDEPAN	Peningkatan aspal di daerah Jl. Masuk Gereja80 M	DPUPR	Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga	Akomodir	-
233	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pengaspalan jalan tembus gang cek mas sepanjang 300m Rt 04	DPUPR	Kelurahan Sungai Baru	Akomodir	Diakomodir
234	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pembuatan siring sepanjang 200 m	DPUPR	Kelurahan Sungai Baru	Akomodir	Diakomodir
235	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Perbaikan akses jalan Bukit Musirak tembusan ke Tanjung Niur (Bapak.Zul)	DPUPR	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Akomodir	-
236	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Perbaikan Jalan Limau Purut Lintasan dari Tegek KeJalan Tanjung niur kurang lebih 1 km (Bpk. Jumadi)	DPUPR	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Akomodir	Diakomodir
237	Eko Fendika Putra, ST	GERINDRA	Perbaikan Jalan Limau Purut Lintasan dari Tegek KeJalan Tanjung niur kurang lebih 1 km (Bpk. Jumadi)	DPUPR	Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	Akomodir	Diakomodir
238	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang binjai	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
239	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang binjai	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
240	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang binjai	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
241	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang cong sipen	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
242	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang cong sipen	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
243	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang cong sipen	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
244	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Perbaikan jalan di perkuburan desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
245	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Air Mas Desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
246	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	NASDEM	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Air Mas Desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
247	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	NASDEM	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Air Mas Desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
248	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Penyelesaian permasalahan tanah dan lahan warga baik yang berstatus kawasan hutan maupun lahan warga yang bersengketa antar warga desa	DPUPR	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
249	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang cong sipen dan jalan gang binjai	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	Diakomodir
250	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Perbaikan jalan di perkuburan desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
251	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Air Mas Desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
252	Miyuni Rohantap, S.H., M.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Penyelesaian permasalahan tanah dan lahan warga baik yang berstatus kawasan hutan maupun lahan warga yang bersengketa antar warga desa	DPUPR	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
253	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Bantuan pengaspalan hotmix jalan gang cong sipen dan jalan gang binjai	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
254	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Perbaikan jalan di perkuburan desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
255	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Air Mas Desa Air Limau	DPUPR	Desa Air Limau	Akomodir	-
256	Liana Tirta Andalusia, S.Ap., S.H	BINTANG TERDEPAN, NASDEM	Penyelesaian permasalahan tanah dan lahan warga baik yang berstatus kawasan hutan maupun lahan warga yang bersengketa antar warga desa	DPUPR	Desa Air Limau	Tidak Diakomodir	-
257	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pengaspalan Jalan Tembus ke Jl. Lintas/ Rintis	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Akomodir	Diakomodir
258	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Normalisasi Siring Jl. Paud kalau hujan banjir / normalisasi siring di Jl. Paud	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
259	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Pengaspalan Jalan Gg. Isti (dusun II daya baru)	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
260	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Jalan Sijin ± 300 meter untuk diperbaiki	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
261	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jln. Lingkar lapang bola	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
262	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Perbaikan jalan kuburan (Rehabilitasi / Peningkatan Jln. TPU Air Belo	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Akomodir	Diakomodir
263	Adi Sucipto Atmo, SE.MM	BINTANG TERDEPAN	Jembatan untuk jalan Bandar dalam	DPUPR	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
264	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Perbaikan Fasilitas Jembatan di dekat sungai semusu kurang lebih 12 cm	DPUPR	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
265	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan siring dan gorong-gorong di gang alfsiuaimi RT 05 Kp. Baru Belo	DPUPR	Dusun 2 Belo Laut	Akomodir	Diakomodir
266	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pembangunan siring di jalan air kemang tembus persimpangan 3 depan toko jalan kearah Desa Terabek	DPUPR	Dusun 2 Belo Laut	Akomodir	-
267	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pembuatan Polisi Tidur di dekat perkampungan	DPUPR	Dusun 2 Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
268	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pengaspalan jalan gg. Rukun RT.02, L ± 3 M, P ± 275 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
269	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan gg. Taqwa Rt.02, L ± 3 M, P ± 136 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Akomodir	-



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
270	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pengaspalan jalan Gelatik Rt. 01 Rw 01 – jalan kuburan dikarenakan sering banjir	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
271	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Pengaspalan jalan gg.Damai Rt.03, L ± 3 M, P ± 175 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	Diakomodir
272	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan aspal Hotmix gg. Makmur Rt.01 L ± 3 M, P ± 350 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
273	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan aspal Hotmix Gg. Kenari Rt 01 L ± 3 M, P ± 180 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
274	H. Syaiful Fakah, S.Pd	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan aspal Hotmix Jl. Ababil Rt 02 01 L ± 4 M, P ± 400 M	DPUPR	Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok	Tidak Diakomodir	-
275	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Pemeliharaan Siring Jalan RT. 05 dan RT 07 Desa Kacung sepanjang 600 meter	DPUPR	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
276	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan jalan RT.06 (Jl. Simpang 4) dan jalan Lingkar Desa Kacung lainnya	DPUPR	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Akomodir	Diakomodir
277	Izkar	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan dan Penambahan Aspal RT. 04 sampai dengan RT.01 Desa Kacung sepanjang 1200 meter	DPUPR	Desa Kacung Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
278	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pengaspalan jalan tingkat desa 2000 M	DPUPR	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
279	H.Syahbandar	PKS	Pengaspalan jalan tingkat desa 2000 M	DPUPR	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
280	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan petak sawah warga dan penambahan irigasi persawahan	DPUPR	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
281	Dedi Egipty	BINTANG TERDEPAN, PKS	Perbaikan sering/Bandar	DPUPR	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
282	H.Syahbandar	PKS	Perbaikan sering/Bandar	DPUPR	Desa Dendang	Akomodir	Diakomodir
283	H.Syahbandar	BINTANG TERDEPAN, PKS	Pembangunan petak sawah warga dan penambahan irigasi persawahan	DPUPR	Desa Dendang	Tidak Diakomodir	-
284	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan RT. 07 Rehab Berat Jalan Air Sawah (Padat Karya) Menuju Tk. Pembinaan Jalan Begadang I dan II	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
285	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Siring Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Tidak Diakomodir	-
286	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Peningkatan Jalan Gang Perumahan Air Keladi RT 11/RW 05	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
287	Sita Rosita	BINTANG TERDEPAN	Perbaikan Siring di Lokasi RT 15	DPUPR	Kecamatan Kelapa	Akomodir	-
288	Somad	NASDEM	Pengaspalan jalan/penembokan tanah puruh dari dusun unar kepastai bembang	DPUPR	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
289	Somad	NASDEM	Pemeliharaan jalan sepanjang ± 1 km dari rumah bapak Zulkifli ke simpang pebuar	DPUPR	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
290	Somad	NASDEM	pembuatan Shiring pembuangan air di jalan payak di rt 01 ±100 meter	DPUPR	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
291	Somad	NASDEM	pembuatan shiring ± 750 meter di dekat Rumah Bapak Man	DPUPR	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
292	Apandi, S.E	NASDEM	Perbaikan Siring Jalan 30 Meter dan Gorong-gorong RT.01 RW.02 Dusun Kerang	DPUPR	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
293	Apandi, S.E	NASDEM	Perbaikan siring jalan 250 M RT.02 RW.03 Dusun Kampak	DPUPR	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
294	Apandi, S.E	NASDEM	Talud dan Penembokan Lapangan Masjid Kp. Mendaru RT.02 RW.03 Dusun Kampak	DPUPR	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Tidak Diakomodir	-
295	Apandi, S.E	NASDEM	Jalan Air Pangkal RT 02 RW 01 Dusun Jebus, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	DPUPR	Desa Jebus, Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
296	Alha Agus	PKS	Peningkatan jalan lapen (lingkar dalam Balai Dusun tembus kerumah Jeri Dusun IV Belo Laut	DPUPR	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
297	Alha Agus	PKS	Peningkatan jalan adri puru kelapen(dari belakang SMPN 4 Muntok – Kuburan Dusun III – Dusun III belak)	DPUPR	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
298	Alha Agus	PKS	Pembangunan jalan baru dari masjid Baiturrahim tembus kerumah/took Bu De	DPUPR	Belo Laut	Tidak Diakomodir	-
299	Alha Agus	PKS	Perbaikan jalan Kadur dalam simpang RSUD/simpang kuburan Cina sampai simpang parit Belo Laut panjang ± 3,5 Km	DPUPR	Belo Laut	Akomodir	Diakomodir
300	Alha Agus	PKS	Peningkatan/Pelebaran Jalan Menuju Pantai Tungau Dusun Sadar Jaya	DPUPR	Kecamatan simpangteritip	Tidak Diakomodir	-
301	Alha Agus	PKS	Pembuatan jembatan Perkuburan Dusun Sadar Jaya	DPUPR	Kecamatan simpangteritip	Tidak Diakomodir	-
302	Alha Agus	PKS	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Simpang Gong panjang ± 400 m	DPUPR	Kecamatan simpangteritip	Tidak Diakomodir	-
303	Alha Agus	PKS	Peningkatan Jalan SDN 07 Simpang Teritip – Mushola Berang Lama panjang ± 1,1 km	DPUPR	Kecamatan simpangteritip	Tidak Diakomodir	-
304	Drs. Samsir	PKS	Pembangunan Siring Kampung Jawa 500 meter Kiri dan 500 meter kanan di Rt. 17	DPUPR	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Akomodir	Diakomodir



No.	NAMA	FRAKSI	USULAN	OPD	LOKASI	KETERANGAN	RKPD
305	Drs. Samsir	PKS	Pengaspalan jalan lingkar desa 1 KM di Rt. 17 ±300 meter, pengaspalan gang nangka ke gang melinjo 400 meter, dan jalan rambutan gang somad 300 meter (Bpk.Sugiyanto)	DPUPR	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Akomodir	Diakomodir
306	Drs. Samsir	PKS	Pembuatan gorong-gorong ukuran 40 di 3 titik untuk jalan mobil. Karena sudah termasuk peukiman meningkatnya mobilitas penduduk. (Bpk.Ruswani)	DPUPR	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
307	Drs. Samsir	PKS	Pembuatan Identitas tanah/Surat Tanah untuk warga Rt 17 karena baru sedikit yang mempunyai Surat Tanah (Bpk.Sugiyanto)	DPUPR	Dusun 17 Desa Cupat Kecamatan Paritiga	Tidak Diakomodir	-
308	Drs. Samsir	PKS	Pengaspalan jalan di gg. seroja ± 500 meter (Bpk. Siregar)	DPUPR	Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus	Akomodir	Diakomodir
309	M. Ali Purwanto, SH, SE	GERINDRA	Pembuatan Aula Pertemuan	Kec. Muntok	Kelurahan Sungai Baru	Tidak Diakomodir	-
310	H. M. Kasim, A. Md	PDI	Perbaikan Jalan Gang Taqwa depan Masjid Asshogiri yang telah rusak	DPUPR	Kelurahan Sungai Daeng	Akomodir	-

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat disimpulkan dengan melihat data dan hasil evaluasi pada setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dan permasalahan yang terkait gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan juga bisa dilihat dari perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah yang masih belum mencapai ideal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.6.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Secara nyata, pada Tahun 2020 telah terjadi permasalahan berskala besar yang menimpa seluruh dunia yaitu terjadinya pandemi akibat *Coronavirus Disease 2019* atau disingkat dengan Covid-19. Indonesia termasuk negara yang terdampak pandemi ini termasuk pula wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menyebabkan perubahan secara menyeluruh terhadap tatanan kehidupan baik masyarakat maupun pemerintahan.

Untuk menangani dampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian pendapatan dan fokus belanja akibat terbitnya peraturan tersebut juga mengubah struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020. Fokus belanja lebih diarahkan ke bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan pemulihan perekonomian. Hal ini mengakibatkan banyak program maupun kegiatan yang dilakukan



refocusing. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami perubahan bahkan penghapusan/penundaan dan anggaran dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19.

Sejalan dengan refocusing anggaran yang dilakukan tersebut, mengakibatkan sasaran pembangunan daerah yang didukung melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan turut mengalami dampak sehingga tidak dapat dicapai secara maksimal.

Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2020. Berdasarkan hasil pencapaian sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2020, permasalahan dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

a. Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 misi pertama pembangunan adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas” yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran pembangunan. Misi pertama ini adalah sebagai upaya untuk mencapai pengelolaan aspek kepemerintahan (*Good Governance*) secara optimal.

Salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangka Barat adalah masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sebesar 45,24 dengan kategori “C” atau predikat “Buruk”. Kategori ini diinterpretasikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.

Tabel 2.69 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

No.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	%
A.	Komponen Pengungkit	60	15,29	25,48
1.	Manajemen Perubahan	5	1,09	21,80
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	1,04	20,80
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	0,71	11,83
4.	Penataan Tatalaksana	5	2,15	43,00
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	4,25	28,33
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	2,83	47,17
7.	Penguatan Pengawasan	12	1,91	15,92
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	1,31	21,83



No.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	%
B.	Komponen Hasil	40	29,95	74,88
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,61	68,64
1.	Survei Internal Organisasi	6	4,24	70,67
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,85	83,57
3.	Opini BPK	3	2	66,67
4.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,25	82,50
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		45,24	

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020

Jika dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat tersebut, nilai terendah adalah pada komponen pengungkit dengan nilai 15,29 atau sebesar 25,48 persen dari total bobot 60 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan implementasi Program Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum didasarkan atas perencanaan melalui Road Map Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Reformasi Birokrasi serta belum melakukan penunjukan assessor Reformasi Birokrasi.
- b. Implementasi Reformasi Birokrasi masih terpusat di tim Reformasi Birokrasi saja, belum terlihat adanya implementasi Reformasi Birokrasi di masing-masing OPD. Selain itu, Implementasi Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai kegiatan administratif saja belum terlihat adanya upaya-upaya nyata yang dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.
- c. Penataan tatalaksana belum didukung dengan penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja organisasi dan perencanaan pengembangan e-gov yang akan mendukung percepatan birokrasi.
- d. Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti : belum dilakukannya assessment terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi.
- e. Sistem pengawasan belum berjalan optimal dilihat dari belum disusunnya kebijakan terkait benturan kepentingan dan whistleblowing system (WBS). Selain itu, belum terlihat adanya upaya pembangunan unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata di setiap OPD meskipun telah menggunakan aplikasi, belum terlihat adanya inovasi OPD sebagai inisiatif dalam



memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai salah satu area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penataan SDM aparatur menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut harus didukung oleh aparatur yang kuat baik dari sisi kompetensi maupun mental dalam melayani.

Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan sasaran yang berkaitan dengan manajemen sumber daya aparatur yang baik yang diukur melalui tingkat profesionalitas ASN. Melalui indikator ini akan diukur kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 hanya mencapai 64,17 poin.

Dari 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin., 2 (dua) dimensi masih belum baik hasilnya yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Tabel 2.70 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2019 - 2020

NO	DIMENSI	BOBOT	Tahun 2019		Tahun 2020	
			HASIL	% REALISASI	HASIL	% REALISASI
1.	Kualifikasi	25	11,89	47,56	12,86	51,44
2.	Kompetensi	40	9,67	24,18	21,20	53,00
3.	Kinerja	30	25,00	83,33	25,13	83,77
4.	Disiplin	5	4,99	99,80	4,98	99,60
TOTAL		100	51,55		64,17	

Sumber : BKPSDM, 2021

Permasalahan terkait pencapaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi antara lain :



- a. Masih banyaknya ASN di Kabupaten Bangka Barat yang jenjang pendidikannya dibawah Strata I, dan minimnya pengembangan sumber daya ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan, baik dalam jenis izin belajar maupun tugas belajar. Pada Tahun 2020 ASN dengan jenjang pendidikan di bawah Strata I sebesar 41,21%.
- b. Masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat fungsional serta keikutsertaan diklat teknis dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya guna peningkatan sumber daya ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi ASN (Jenjang Pendidikan) dan kompetensi ASN yang nilainya masih sangat jauh dari bobot yang ada.

b. Bidang Ekonomi

Misi kedua RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi”. Misi kedua ini merupakan upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Jika dilihat dari capaian kinerja sesuai sasaran RPJMD yang ditunjukkan melalui indikator-indikator terkait pembangunan ekonomi, masih terdapat permasalahan yang harus dapat ditangani dan ditingkatkan kinerjanya sehingga sasaran dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.

Berdasarkan capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020, sasaran yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan masih sangat rendah dan perlu upaya lebih agar dapat dicapai sesuai dengan target. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu Rata-rata Pendapatan Bersih Petani Per Bulan, Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat, dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Capaian dari keempat indikator tersebut seluruhnya masih dibawah 80 persen sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	1,4	2	70,00	Perlu Upaya Lebih
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	592,67	4.069,20	14,56	Perlu Upaya Lebih



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Juta Rupiah	2.747,88	7.520.050.000,00	36,54	Perlu Upaya Lebih

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bangka Barat Tahun 2020

Rendahnya capaian tersebut disebabkan antara lain masih rendahnya produksi hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan khususnya air tawar di Kabupaten Bangka Barat sehingga akhirnya berpengaruh dengan nilai produksi. Selain itu harga dari komoditas perkebunan yang tidak menentu pada beberapa tahun terakhir sangat berimbang terhadap nilai produksi.

Terkait dengan produksi hasil pertanian yang masih rendah khususnya padi sawah, juga berkaitan dengan prasarana pendukungnya yaitu irigasi yang belum memadai. Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis sampai dengan tahun 2020 juga masih rendah yaitu hanya mencapai 51,35 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 94,76 persen. Irigasi teknis yang dimaksud adalah saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap dikoneksikan dengan saluran tersier. Sampai dengan tahun 2020, dari 2.518 ha areal pertanian, yang telah beririgasi teknis adalah seluas 1.293 ha. Dalam hal ini, pembangunan saluran sekunder yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih bergantung pada dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus).

Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, maka sangat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro serta industri kecil. Peningkatan skala usaha mikro pada Tahun 2020 hanya sebesar 0,04 persen, sehingga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu peningkatan 2,5 persen maka hanya tercapai 1,75 persen. Skala usaha UMi menggambarkan omset/nilai yang dijual dalam satuan waktu tertentu. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, Peningkatan Skala usaha UMi dihitung dari UMi yang modal/omset usahanya meningkat lebih dari 25 persen dari tahun sebelumnya

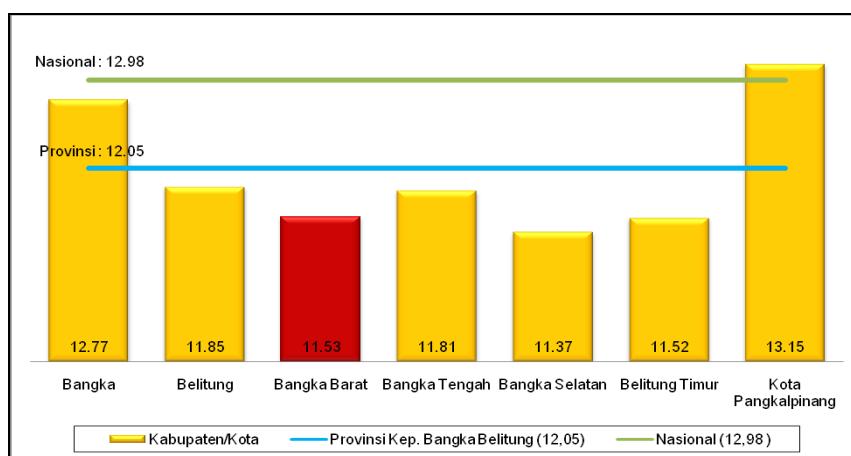
Begitu pula dengan capaian Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan dari jenis Industri makanan olahan/kuliner dan Industri kerajinan, pada Tahun 2020 sebesar 56,21 persen. Jika dilihat dari perkembangan capaian kedua indikator tersebut dari tahun 2016-2019 terjadi pertumbuhan yang positif atau terjadi peningkatan disetiap tahunnya kecuali pada Tahun 2020. Rendahnya capaian di Tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi masyarakat khususnya peningkatan skala usaha mikro dan kapasitas usaha industri kecil dan menengah yang juga turut mengalami penurunan.



c. Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia

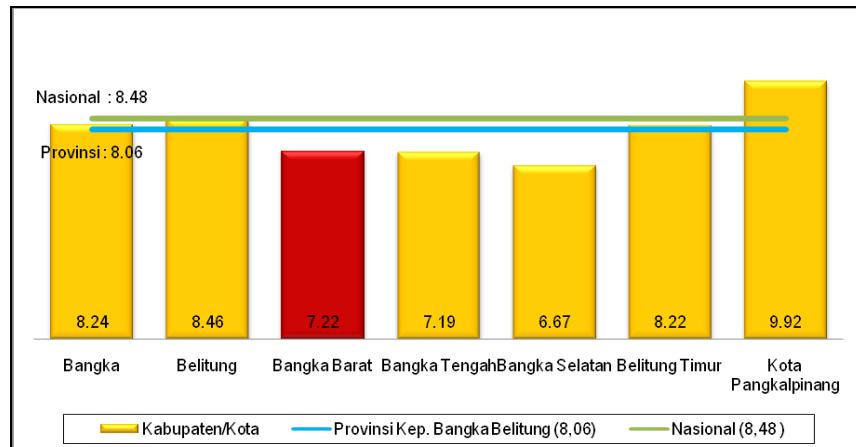
Misi yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial dan pembangunan manusia adalah misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas”. Kualitas sumber daya manusia secara umum diukur dari tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan diupayakan melalui membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pendidikan masyarakat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten,. Kedua indikator ini merupakan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan pendidikan. Meskipun capaian kedua indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 cukup baik dengan nilai yang meningkat setiap tahun, namun jika dibandingkan dengan angka HLS dan angka RLS di kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat berada pada peringkat 5 (lima) dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada. Melihat kondisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan angka HLS dan angka RLS di Kabupaten Bangka Barat seperti meningkatkan pendidikan non formal, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.74 Angka HLS Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

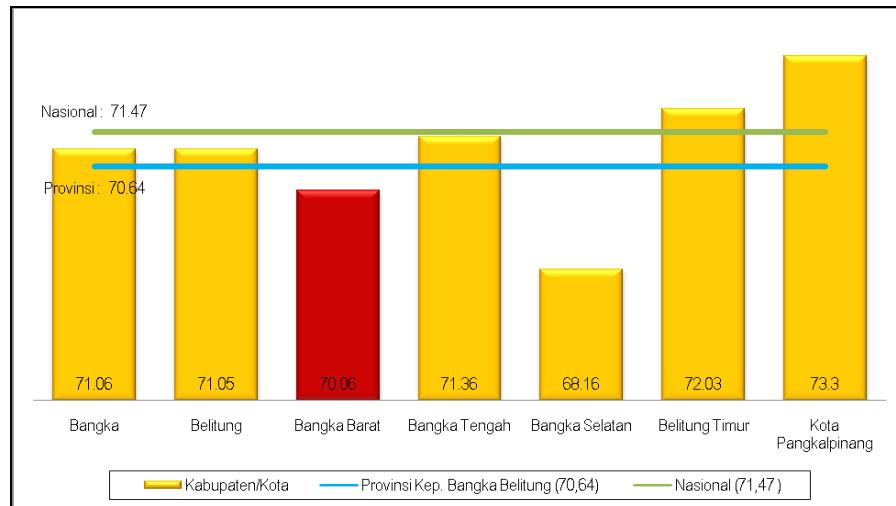


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.75 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Telah menjadi tugas pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan kewenangannya serta agar dapat bersaing dengan daerah lain. Perlu dilakukan kajian lebih agar dapat mengetahui permasalahan yang menyebabkan rendahnya angka Harapan Lama Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah tersebut baik melalui peningkatan kualitas pendidikan anak didik, guru, maupun sarana prasarana pendukungnya.

Terkait tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 diukur melalui indikator angka harapan hidup yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2020 sangat baik yaitu dengan angka harapan hidup sebesar 70,06 tahun. Meskipun capaian ini sangat baik, namun angka ini jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat 6 (enam) dan dibawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat yang juga merupakan indikator komponen IPM untuk bidang kesehatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.76 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Walaupun capaian kinerja sasaran RPJMD yang berkaitan dengan kesehatan pada Tahun 2020 telah tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu angka prevalensi stunting di Kabupaten Bangka Barat yaitu 12,38 persen berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM. Angka prevalensi stunting tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Teritip sebesar 27,38 persen, dimana menurut standar WHO, batas maksimal prevalensi stunting adalah 20 persen dari jumlah balita. Selain permasalahan stunting, permasalahan status Poskesdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yang tidak lagi menjadi bagian dari jaringan puskesmas yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdampak pada sulitnya koordinasi.

d. Lingkungan Hidup

Pada Misi keempat RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan” merupakan misi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dapat mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang.

Sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang masih menjadi permasalahan dalam pencapaian RPJMD antara lain adalah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan, Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu, Terwujudnya pemulihan lahan kritis, Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang dan Meningkatnya



Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Jika dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2020, indikator yang masih rendah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu pada indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik yang hanya tercapai 23,42 persen. Sementara pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, ditargetkan sebesar 70 persen, sehingga capaian sampai dengan Tahun 2020 hanya mencapai 33,46 persen. Melihat hal ini perlu upaya lebih melalui usaha atau strategi yang lebih baik agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun permasalahan dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dikarenakan dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha masih menganggap sebagai beban bukan kewajiban, Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan beserta SDM nya dan fasilitas pengolahan limbah B3 yang masih terbatas khususnya di Kabupaten Bangka Barat.

Salah satu urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan yang terpadu yang sampai saat ini masih fokus pada Kecamatan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat dan sekaligus satu-satunya kecamatan yang memiliki TPA . Untuk penanganan persampahan yang dikelola secara baik belum menyentuh kecamatan lain dikarenakan keterbatasan kemampuan daerah baik berupa sarana dan prasarana serta personil yang ada. Pada Tahun 2020 persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, terealisasi sebesar 10,61 persen dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 19 persen masih sangat jauh dari target akhir RPJMD.

Sementara untuk pemulihan lahan kritis sampai dengan tahun 2020 hanya dapat terealisasi sebesar 0,92 persen dari target akhir RPJMD sebesar 2 persen sehingga baru mencapai 46,10 persen. Sampai dengan tahun 2020, total kegiatan Reboisasi seluas 37 Ha berupa penanaman sebanyak 47.850 batang pohon, sementara luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat seluas 4.012,58 Ha (Data Spatial Lahan kritis BPDAS Baturusa Cerucuk 2018 SK 306).

Berdasarkan RPJMD, Sasaran “Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang” diukur melalui indikator Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang. Pada Tahun 2020, indikator ini hanya mencapai 44,00 persen, yaitu dari 36 pengajuan izin pemanfaatan ruang hanya 16 izin yang sesuai dengan tata ruang. Jika dibandingkan dengan



target akhir RPJMD sebesar 100 persen, maka indikator ini hanya mencapai 44,00 persen.

Untuk Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau, sampai dengan Tahun 2020 terealisasi sebesar 1,88 persen dari luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha, dengan RTH yang telah ditetapkan yaitu melalui Peraturan Bupati seluas 175,62 ha. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,90 persen luasan Ruang Terbuka Hijau, maka indikator ini baru mencapai 64,90 persen. Dilihat dari 4 (empat) sasaran yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan upaya lebih dalam pencapaian masing-masing indikator sasaran.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Wajib pemerintahan daerah terdiri dari 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 urusan. Kemudian untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan umum pembangunan daerah yang dilihat dari kondisi umum Kabupaten Bangka Barat, secara terperinci akan diuraikan permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berikut dijabarkan secara rinci permasalahan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan:

A. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Lebih Rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;
2. Angka Partisipasi Kasar dan Murni untuk Tingkat SMP/MTs belum mencapai 100% dan nilai APK dan APM Kabupaten Bangka Barat terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menurunnya Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI Ke SMP/MTs.

b. Kesehatan

1. Meningkatnya kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi status gizi di Kabupaten Bangka Barat (tertinggi di kepulauan bangka belitung);



2. Kurangnya tenaga kesehatan (dokter), tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 3. Belum memadainya sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Menurunnya persentase jalan berkondisi baik;
 2. Belum seluruh area pertanian yang beririgasi teknis;
 3. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat;
 4. Masih rendahnya bangunan ber-IMB;
 5. Belum ditetapkannya dokumen RDTR.
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Belum terpenuhinya SPM terkait pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
- Belum terpenuhinya jumlah kebutuhan ideal Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Ketenagakerjaan
- Meningkatnya angka pengangguran terbuka.
- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- h. Pangan
- Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target Nasional.
- i. Lingkungan Hidup
1. Belum seluruh kecamatan melakukan pengolahan sampah;
 2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu belum mencapai target;
 3. Masih rendahnya lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat.
- j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Masih rendahnya persentasi penduduk yang tercatat memiliki akte kelahiran.
- k. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Turunnya Persentase peserta KB Aktif.



I. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menurunnya persentase Koperasi Aktif.

m. Penanaman Modal

Menurunnya Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat.

n. Kepemudaan dan Olahraga

1. Rendahnya Prestasi Olahraga;

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga.

o. Statistik

Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.

p. Perpustakaan

Masih kurangnya Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media yaitu pada Tahun 2019 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Digital hanya sebanyak 124 Koleksi *E-Book*.

q. Kearsipan

Belum seluruh perangkat daerah melakukan pengolahan kearsipan secara baku.

r. Perindustrian

Masih rendahnya pertumbuhan industri.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Rendahnya nilai produksi perikanan budidaya air tawar jika dibandingkan dengan target RPJMD.

b. Pariwisata

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Barat.

c. Pertanian

1. Menurunnya Produksi Padi dan Hortikultura;
2. Menurunnya Produksi Lada;
3. Menurunnya Produksi Ternak Ruminansia.

d. Perindustrian

Masih rendahnya pertumbuhan industri.



C. Urusan Penunjang

- a. Masih rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Rendahnya Indeks Profesional ASN.

2.7 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi juga dapat menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berikut beberapa inovasi daerah yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat :

1. ATRAKTIF (Aksi *Microbachter Alfaafa* Mengubah Lahan Kritis menjadi Produktif dalam *Integrated Ecofarming*).

ATRAKTIF dalam *Integrated Ecofarming* merupakan inovasi dalam mengubah lahan kritis menjadi kawasan pertanian terintegrasi berbasis *Microbachter Alfaafa*. Inovasi ini mematahkan *mindset* masyarakat yang menilai bahwa lahan kritis tidak dapat dimanfaatkan. ATRAKTIF dalam *Integrated Ecofarming* bergerak dari hulu ke hilir, dari mengolah limbah pertanian berbasis *Microbachter Alfaafa* (MA11) yang diterapkan pada lahan kritis menjadi kawasan pertanian terintegrasi (*Integrated Ecofarming*).

Menerapkan *Integrated Ecofarming* dengan menggunakan hasil pengolahan limbah berbasis MA11 mampu menghidupkan kembali lahan kritis menjadi produktif. Dalam satu *Integrated Ecofarming*, bisa menghasilkan berbagai macam produk turunan yang mampu mendongkrak nilai ekonomi petani. Hal ini menunjukkan bahwa *Integrated Ecofarming* dengan menggunakan olahan limbah berbasis MA11, dapat menghasilkan produk pertanian dan peternakan lebih cepat sehingga dapat memperoleh pemasukan dari beberapa sumber sekaligus. *Integrated Ecofarming* mendampingkan pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus sehingga inovasi ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan Kelompok Pembudidaya Ikan.

Inovasi dilakukan Kelompok Tani MAKMUR Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok Tani ini sebagai *pilot project* yang sudah berkembang menjadi Pusat Pelatihan Pertanian dan



Pedesaan Swadaya “MAKMUR” dan mendapat sertifikat klasifikasi dari Kementerian Pertanian disahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 11 November 2019, dan mendapat predikat P4S Kelas Utama.

Inovasi ini dapat diterapkan di berbagai kondisi lahan, konservasi lahan kritis saja bisa, apalagi lahan subur. Inovasi ini sudah diadopsi oleh Polsek Jebus sebagai pilot project Taman Edukasi Ketahanan Pangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekolah, pondok pesantren, koperasi, Perusahaan Integrasi Sapi PO-Kelapa Sawit di Palembang, kelompok tani maupun kelompok wanita tani hingga ke lintas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi ini sangat menjanjikan untuk menghidupkan kembali lahan kritis, sebagai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. BIKCANTEK (Bina Keluarga Calon Pengantin OKe).

BIKCANTEK merupakan layanan kesehatan terpadu yang melibatkan bidan, analis, gizi, apoteker, serta dokter pada pasangan calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, bekerjasama dengan PLKB kecamatan, seluruh Kepala Desa dan P3N Desa di Kecamatan Simpang Teritip.

BIKCANTEK mulai dilaksanakan sejak 2017 dengan nama SUSCATEN akan tetapi belum mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder sehingga dimatangkan kembali dengan menjalin kerjasama yang lebih efektif dan pemeriksaan yang lebih kompleks kepada pasangan calon pengantin pada tahun 2019, kemudian berubah nama menjadi BIKCANTEK. Kegiatan BIKCANTEK berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan reproduksi, penyakit akibat hubungan seksual dan lain-lain, serta pemeriksaan status gizi, pengambilan sample darah dan urine untuk memastikan kesehatan pasangan calon pengantin. Calon pengantin yang telah mendapatkan layanan ini langsung diberikan sertifikat BIKCANTEK dan Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin. keduanya merupakan syarat wajib untuk pengurusan administrasi pranikah baik di Kantor Desa maupun di KUA, sehingga semua pasangan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Simpang Teritip telah mendapatkan jaminan kesehatan dan edukasi pranikah, khususnya calon pengantin perempuan yang akan menjadi seorang ibu.

BIKCANTEK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tingginya angka rujukan di Puskesmas Simpang Teritip terutama ibu hamil usia kurang dari 17 tahun dan usia kurang dari 20 tahun yang disebabkan oleh komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Selain itu hal ini berdampak pada tingginya kejadian komplikasi neonatus. Salah satu faktor



yang menyebabkan tingginya angka komplikasi dan rujukan adalah pernikahan diusia sekolah mulai dari 12 sampai dengan 17 tahun dan pernikahan usia 17 sampai dengan 20 tahun.

Hingga tahun 2020, BIKCANTEK berhasil menekan angka komplikasi dan rujukan usia kurang dari 20 tahun sebesar 16,58%. Angka ini merupakan angka kasus terkecil di Puskesmas Simpang Teritip sejak tahun 2015 dan berdampak pada menurunnya angka kejadian BBLR, STUNTING, AKI dan AKB. BIKCANTEK bisa diterapkan diseluruh Puskesmas.

3. Bukalapak Puskesmas Mini “SUKRO” (Sadari sejak dini, Ubah perilaku yang tidak sehat, Konsultasikan ke petugas kesehatan, Rangkul kepesertaan JKN, Obati sesuai standar)

Puskesmas Mini SUKRO merupakan pelayanan terintegrasi langsung ke sasaran yang dilakukan dengan konsep jemput bola dan berpindah-pindah secara blusukan menjangkau lokasi yang jauh dari faskes kesehatan dimana pelayanan ini seperti puskesmas mini yaitu mendapatkan penyuluhan kesehatan, konsultasi dokter, pemeriksaan PTM (Cek Gula, Kolesterol, dan Asam Urat), konsultasi gizi, pelayanan KB, Pelayanan IVA, Deteksi TB, dan Mendapatkan Obat selain itu juga kemudahan untuk kepesertaan JKN. Sasaran utama Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO adalah masyarakat yang belum sama sekali terjamah pelayanan kesehatan. Dalam Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO, dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pengobatan yang ditangani langsung oleh tenaga medis profesional.

Inovasi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, aparat desa, kader kesehatan, dan berintegrasi antara lintas sektor dan lintas program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di puskesmas. Sasaran Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sekar Biru, yaitu Desa Sekar Biru, Desa Telak, Desa Kapit, Desa Semulut, dan Desa Bakit. Dengan adanya Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO, ditargetkan pemahaman masyarakat akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat serta kualitas derajat kesehatan masyarakat menjadi meningkat. Kegiatan ini bersifat promotif (penyuluhan), preventif (pencegahan), dan pengobatan. Dengan menghadirkan Puskesmas Mini ke masyarakat, dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dalam control kesehatan untuk mencegah akibat potensi bahaya Penyakit Tidak Menular (PTM). Melalui kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Ditargetkan pada tahun 2021 seluruh puskesmas di Wilayah Kabupaten Bangka Barat juga sudah menerapkan inovasi Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO.

TABEL 2.72 EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD (KINERJA)
KABUPATEN BANGKA BARAT
PERIODE PELAKUAN : TAHUN 2016 - TAHUN 2021

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPOAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUANAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUANAN RKPD TAHUN KE (%)						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB			
					TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPOAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUANAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUANAN RKPD TAHUN KE (%)											
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6						
1	Terwujudnya Brokres Pemerintah Daerah yang Transparan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Menurunnya Temuan atas Audit BPK terhadap LKD Penda	20 temuan	6	16	12	10	10	8	6	0	11	12	4		-	106,33	80,00	160,00	-	4,00	133,33	BPKAD				
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset BM Dinda	7 temuan	3	7	6	5	4	3	3		2	2	2		-	166,67	160,00	150,00	-	2,00	133,33	BPKAD				
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	71%	90%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	89,79%	100%	100%	100%		112,24	125,00	117,65	117,65	-	1,00	111,11	INSPEKTORAT				
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Assesmen inspektorat	Level II	4	2	3	3	4	4	2	3	2	2			100,00	100,00	66,67	66,67	-	2,00	50,00	INSPEKTORAT				
		Program Peningkatan dan Pengawasan	Persentase desa yang menyusun APB Desa tepat waktu	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	DINSOSPEMDES			
		Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pelaporan keuangan desa terlengkap administrasi dan tepat waktu	n/a	100%	50%	50%	58%	67%	75%	100%		50%	58%	67%	75%		-	100,00	100,00	100,45	100,00	75%	75,00	DINSOSPEMDES			
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan akurasi/tidak salah	n/a	50%	20%	20%	25%	33%	42%	50%		20%	25%	33%	42%		-	100,00	100,00	99,01	100,96	42%	84,00	DINSOSPEMDES			
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kerjasama antara Desa dan Kecamatan	3 kerjasama																			-	-	DINSOSPEMDES / KECAMATAN			
		Keterlibatan unsur Masyarakat Dalam Membangun Desa	Keterlibatan unsur Masyarakat Dalam Membangun Desa	35%	85%	50%	70%	70%	75%	80%	85%	50%	70%	70%	75%	80%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80%	94,12				
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesa	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	-	100%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		142,86	133,33	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	KECAMATAN			
		Program Penataan Desa	Persentase Desa Swakarsa	-	5%		5%	5%	5%	5%	5%		5%	5%	5%	5%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5%	100,00	DINSOSPEMDES		
		Program Pendayagunaan TTG dan SDA	TTG yang dimanfaatkan - jenis	10		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6,00	60,00	DINSOSPEMDES		
		Desa yang memanfaatkan TTG	- desa	10		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00			
		Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa	Meningkatnya Pengembangan Lembaige Ekonomi Pedesaan	11 BUMDes	57		6	10	10	10	10		6	10	10	10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	47,00	82,48	DINSOSPEMDES		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	Lembaga Desa yang aktif	2 lembaga desa (PKK dan LPM) di setiap desa	50%		30%	35%	40%	45%	50%		30%	35%	40%	45%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45%	90,00	DINSOSPEMDES		
		Program Pendataan desa Kab Bangka Barat	Ketersediaan data profil dan potensi desa	- dokumen	2	100%		1		1	-	1		1		1		100,00		100,00	100,00		2,00	100,00	DINSOSPEMDES			
		Program Perencanaan pembangunan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban peremtahan desa tepat waktu	-	80%	80%						80%						100,00					80%	100,00	DINSOSPEMDES			
		Program Wayah dan Kelembagaan	Fasilitasi Penetapan kelembagaan desa/kelurahan	-	55%	55%							55%						100,00					55%	100,00	DINSOSPEMDES		
		Program Desa Mandiri	Desa mandiri yang memenuhi kriteria	-	10 desa	10 desa							10 desa						100,00					10,00	100,00	DINSOSPEMDES		
		Program Nasional Pembangunan Masyarakat	Persentase program pembangunan desa yang memiliki manfaat bagi masyarakat	-	75%	75%							75%						100,00					75%	100,00	DINSOSPEMDES		
		Program Fasilitas pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya	-	20%	20%							20%						100,00					20%	100,00	DINSOSPEMDES		
		Program Peningkatan Keherdyanan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaige dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Yang Dibina/Oberdayakan Pemerintah Daerah	2 Posyantek	2 Posyantek	2 Posyantek							2						100,00					2	100,00	DINSOSPEMDES		
		Pengembangan Lembaige Ekonomi Pedesaan	Cukupan Desa yang Didapat Pelatihan Keterampilan Managemen BUMDes	0	14 desa	14 desa							-	14						100,00					14	100,00	DINSOSPEMDES	
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur desa memenuhi standar kompetensi jabatan	-	17%	17%							-	17%						100,00					17%	100,00	DINSOSPEMDES	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persentase Pengguna Layanan Informasi Melalui Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi terlengkap dan terindringi kualitasnya	N/A	90%		90%	90%	90%	90%	90%			90%	90%	90%			-	100,00	100,00	100,00		90%	100,00	DISKOMINFO		
		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	n/a	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		100%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara elektronik	Pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan	n/a	100%	100%								100%						100,00					100%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		Program Pembinaan BUMD	Terbinanya BUMD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	-	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status capaian kinerja keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat dalam kondisi baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Sumber Daya Aparatur dalam bekerja	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalnya disiplin aparat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SELURUH PD		
		Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumentasi pembangunan daerah sebagai sarana informasi	49%	59%	49%	51%	53%	55%	57%	59%	100%	100%	100%	100%	100%		204,08	196,08	188,68	181,82	175,44	100%	169,49	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cukupan fasilitas pembinaan kemasayarakatan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH		
			Rata-rata capaian kinerja (%)														87,38	101,28	100,52	107,32	87,06		94,37					
			Predikat Kinerja	SR	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST		2	3	2	3			66,67	100,00	100,00	150,00		3	(100,00)	BP4D		
																		512,70	358,22	356,22	(77,21)	23,79	23,60	3,29%	59,58	BP2RD		
																		-	89,82	265,86	113,50	103,33		6,51%	100,15	BP2RD		
			Rata-rata capaian kinerja (%)	(256,35)	224,02	94,33	68,65	63,47															79,87					
			Predikat Kinerja	SR	ST	ST	ST	S	R	T																		
3	Terwujudnya Brokres Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penghargaan Penginta Tingkat Propinsi	-	1	-	3	3	2	2	1		2	3	2	3												
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Kebahasan Indikator Sarasan Daerah Bidang Ekonomi	44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		37,50%	170,99%	100%	100%												
		Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Kebahasan Indikator Sarasan Daerah Bidang Sosial & Budaya	56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		83,33%	83,33%	82,43%	100%												

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE (%)						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPAIAN AKHIR (%)	PD PENGGUNA JAWAB				
					TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)				1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)		1 2 3 4 5 6																
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(27)		
		Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kebahasan Indikator Saran Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Persentase Kebahasan Indikator Saran Daerah Bidang Fisk & Prasarana	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	85,71	85,71	86,78	100%	100%	100%	100%	BP4D	
		Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase ketelitian dan validitas data/informasi untuk perencanaan	49%	65%	52%	55%	58%	60%	65%	55%	58%	60%	55%	58%	60%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31	DISKOMINFO	
		Program Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BP4D
					Rata-rata capaian kinerja (%)						16,67 53,32 105,72 95,69 107,14 70,33						Predikat Kinerja						S						
4	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%	33,33%	-	300,00	100,00	16,67	33,33	33,33%	33,33	BKPDSM			
			Jumlah rekruitmen JPT yang menggunakan sistem seleksi terbuka	- jabatan	20	7	2	1	6	3	1	6	1	1	1	-	300,00	100,00	16,67	33,33	9	45,00							
		Program Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sesuai kebutuhan	n/a	0,30%	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%	0,30%	0,30%	0,10%	0,10%	0,20%	2,18%	2,81%	100,00	100,00	100,00	1,090,00	936,67	2,81%	936,67	BKPDSM					
			Persentase Tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Daerah yang berpendidikan minimal Strata-1	49,67%	52%	50%	50%	52%	52%	49,67%	48,08%	49,47%	55,25%	57,78%	99,74	96,16	95,13	106,25	111,12	57,78%	111,12								
			Persentase menurunnya kasus pelanggaran peraturan kepegawaian	4 kasus	0 kasus	0%	0%	50%	0%	0%	100%	0,00%	0,00%	38,00%	-25,00%	13,00%	-	-	76,00	-	-	13,00%	3,25						
		Program pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan	Persentase Kelengkapan Jaminan Kesejahteraan ASN	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPDSM		
			Cakupan Pemberian Remunerasi/Kompenasial TPP sesuai beban kerja	N/A	80%	-	-	70%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	-	-	142,86	125,00	100%	125,00								
		Program pembinaan dan pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	n/a	100%	100%												100,00								100%	BKPDSM		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%												100,00								100%	BKPDSM		
		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas	Kualitas Aparatur yang pensus	100%	100%	100%												100,00								100%	BKPDSM		
		Program Penaltas dan Penguatan Keterlembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	n/a	78%	-	16%	31%	47%	63%	78%				83,30%	83,30%	90%	-	-	266,56	177,71	144,00	90,00%	115,20	SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Penaltas dan Penguatan Keterlembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang ketat/ketekadannya dengan kriteria "BAIK"	10,3%	65,6%	25%	37,5%	47%	53%	59,4%	65,6%				64,72%	45,03%	49,71%	-	-	138,07	84,76	83,72	49,71%	75,75	SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Keuangan	Persentase perangkat daerahnya yang melakukan Pengelolaan arsip secara buku	44,34%	78,30%	54,72%	59,43%	64,15%	68,87%	73,58%	78,30%	93,35%	100%	100%	100%	10,66%	170,61	168,25	155,88	145,21	14,49	10,66%	13,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan pelatihan SDM aparatur Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informasi	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2		100,00	-	50,00	100,00	-	2	100,00	DISKOMINFO						
		Program Penyelarasan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Dokumentasi arsip daerah yang disimpan di Record Center	10%	80%	15%	20%	35%	50%	65%	80%	15%	20%	35%	90%	90%	100,00	100,00	100,00	180,00	138,46	90,00%	112,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
		Program penataan wilayah dan kelembagaan	Terciptanya tittel batas antar desa/kelurahan di Kab. Bangka Barat	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00	100,00	92,17	-	92,17%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfaisalasnya perintahan lembaga desa/kelurahan	n/a	100%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100,00	-	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Peningkatan Sanegeri Kehangatan	Terfaksalisasi pengingat hari besar nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN			
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,23%	75%	93,27%	83,19%	100,00	90,23	75,00	93,27	83,19	83%	83,19	SEKRETARIAT DAERAH						
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKOMINFO			
		Program pengembangan kebijakan perekonomian pembangunan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BP4D			
					Rata-rata capaian kinerja (%)						66,83 97,61 97,83 155,03 121,23 123,77						Predikat Kinerja						S	ST	ST	ST			
5	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas yang berkunjung ke puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	85%	-	65%	70%	75%	80%	85%		69,18%	78,04%	84,97%	78,32%	-	106,43	111,48	113,29	97,91	78,32%	92,15	DINKES					
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang berkunjung ke puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	99,06%	97,79%	-	100,00	100,00	99,06	97,79	97,79%								
			Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun yang berkunjung ke puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	95%	-	75%	80%	85%	90%	95%	59,28%	69,92%	73,06%	70,23%	-	79,04	87,39	85,96	78,03	70,23%	73,93							
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,97%	19,65%	121,94%	67,20%	-	100,00	53,97	19,65	121,94	67,20	67,20%	67,20	DINKES				
			Persentase orang dengan tensi tekanan HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	n/a	70%	50%	50%	60%	70%	100%	100%	85,06%	86,29%	99,08%	105,38%	-	200,00	170,12	172,59	165,13	150,54	105,38%	150,54						
			Persentase orang dengan penyakit hidung yang mendapatkan pelayanan hidung sesuai standar	n/a	45%	-	5,49%	15%	25%	35%	45%	-				-	-	-	-	-	0,00%	-							
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,59%	83,04%	85,29%	84,99%	-	100,00	43,59	83,04	85,29	84,99%	84,99%	84,99%	DINKES					
			Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	126,72%	90,82%	98,46%	105,30%	-	100,00	126,72	90,82	98,46	105,30	105,30%	105,30						
			Persentase orang dengan gangguan jawa (OGU) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	20%	10%	10%	10%	20%	20%	100%	87,12%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00	87,12	1,000,00	500,00	100,00	100,00	100,00%	500,00	100,00	BP4D			
			Persentase balita yang berkunjung ke puskesmas dan jaringan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	75%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	87,47%	97,66%	95,01%	94,75%	-	174,94	177,56	158,36	145,77	135,04	94,52%	126,03	DINKES					

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPOAAN TARGET RPJMD MELALUI PELEAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMD HASIL PELEAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPOAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB								
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6											
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(27)							
					94,17%	100%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	92,15%	97,02%	94,47%	95,74%	95,25%	97,00	101,06	97,39	97,70	96,21	95,25%	95,25										
					Persentase bu hami yang berkunjung ke puskesmas dan jinjangnya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,31%	98,36%	91,69%	95,54%	96,61%	95,31	98,36	91,69	95,54	96,61	96,61%	96,61										
					Persentase bu bersalin yang berkunjung ke puskesmas dan jinjangnya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,75%	99,89%	98,02%	98,27%	99,38%	98,75	99,89	98,02	98,27	99,38	99,38%	99,38										
					Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	32%	65%	34%	58%	60%	62%	64%	65%	61,69%	62,75%	62,17%	79,16%	79,97%	181,44	108,19	103,62	127,68	124,95	79,97%	123,03	DIKPORA							
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia dasar/nasional pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan																				DIKPORA								
					-SD	99,88%	99,95%	99,88%	99,88%	99,88%	99,94%	99,95%	88,25%	88,78%	90,34%	92,76%	94,08%	88,36	88,89	90,45	92,87	94,14	94,08%	94,13										
					SMK	82,21%	89%	84%	84%	84%	85%	89%	78,53%	80,15%	81,76%	84,44%	84,96%	93,49	95,42	87,33	100,40	96,55	84,96%	95,46				DPU/PK/ DISPERKIMHUB						
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih sesuai standar	n/a	100%	84,15%	85%	85%	87%	90%	100%	88,82%	90,84%	90,40%	91,78%	-	104,49	105,67	103,91	107,96	91,78%	91,78				DPU/PK/ DISPERKIMHUB					
						Persentase rumah tangga mendapat pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar	n/a	100%	75%	75%	75%	80%	90%	100%	78,75%	82,68%	86,94%	93,79%	94,61%	105,00	110,24	115,92	117,24	105,12	94,61%	94,61								
					Program Perbaikan Penyebarluasan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Persentase rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sesuai standar rumah layak huni	n/a	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	SATPOLPP	DINSPERIMES						
					Program Pengalungan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00%	90,00	SATPOLPP DAN PB								
						Persentase warga negara yang menjadi korban yang bantuan kebutuhan dasar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	SATPOLPP DAN PB									
					Program pemeliharaan kantritibus dan pengecekan tindak kriminal	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	SATPOLPP DAN PB									
						Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktifitas	30 kali/ kecamatan/tahun	48	30	30	36	36	48	48	30	72	79	78	102	100,00	240,00	219,44	216,67	212,50	102,00	212,50								
					Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang berhasil mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	DINSOSPEMDES							
						Persentase orang layak usia dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	0,00%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00								
						Persentase orang tua sosial dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	0,00%	100%	0%	0%	0%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00								
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase anak penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	DINSOSPEMDES							
						Persentase penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00								
					Program Pembentukan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82,33	80%	80%					80%						100,00					80%	100,00	DINSOSPEMDES							
						Cukupnya penyandang masalah sosial yang mengalami kemajuan peningkatan perubahan sikap mental	-	80%	80%					80%					100,00					80%	100,00	DINSOSPEMDES								
					Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PKS yang mendapat bantuan dalam usaha menyelenggarakan kesejahteraan sosial	50%	50%						50%					100,00					50%	100,00	DINSOSPEMDES								
						Program kerjasama informasi dengan massmedia	Tersedianya informasi publik secara efektif	23,08%	90%	40,00%	50%	60%	70%	80%	90%	60%	60%	95%	80%	-	120,00	100,00	135,71	100,00	80%	88,89	DISKOMINFO							
						Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	1,863	2,497	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2378	95,24	DISKOMINFO							
						Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Sistem Pelayanan Publik	79	85	80	81	82	83	84	85	66,55	62,11	83,86	-	-	81,16	74,83	99,83	83,86	96,66	SEKRETARIAT DAERAH								
						Program peningkatan pelayanan kredibilitas kepada daerah/wali kepala daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditandai/dilanjutkan	n/a	75%	50%	50%	50%	60%	65%	75%	51,00%	49,00%	67,00%	40,00%	59,00%	102,00	98,00	134,00	66,67	90,77	59%	78,67	SEKRETARIAT DAERAH						
						Terserasinya layanan kemasarakatan oleh KDH/WKDH	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditandai/dilanjutkan	n/a	100%	100%						100%					100,00					100%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH						
						Program peningkatan keterkaitan hubungan dan layanan kemasarakatan oleh KDH/WKDH	Cukupnya tugas urum pemerkasaan yang dilengkapi dengan kesadaran oleh Kecamatan	n/a	100%	62%	69%	77%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	130,00	118,18	108,33	100%	100,00	KECAMATAN			
						Program Penyelenggaraan Tugas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah	Cukupnya tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SATPOLPP DAN PB			
						Program Peningkatan Keanamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat laporan keanamanan dan kenyamanan lingkungan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KESBANGPOL				
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan intias golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KESBANGPOL			
						Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya seminar, talk show, diskusi, pentas festival dan Lomba peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KESBANGPOL			
						Program Peningkatan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemilu/kada (%)	-	74		74		74		74		62,50		81,84	74,40						84,46	110,59			74,40	100,54	KESBANGPOL		
						Program pendidikan dan pemantauan aktivitas orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing	persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	100,00	KESBANGPOL				
						Program Pemberdayaan Sosial	Cukupnya lembaga sosial yang aktif	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	DINSOSPEMDES				
							Cukupnya keberhasilan pemberdayaan keluarga/ kelompok miskin	-	50%	-	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100,00	100,00				

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE-%						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB	
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(27)				
4	Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tanah (irrigation tier)	Luas areal yang sudah teringat jaringan tersier	-	1839	-	350	309	444	736	0	360	360	530	530				102,86	116,50	119,37	72,01	1780	96,79	DISTANGAN			
		Program Peningkatan Kelahanan Pangan (pertanian)	Ketercapaian sasembahan pangan daerah	18,36%	32%	18,36%	22%	25%	27%	30%	32%	18,36%						40,76%	100,00	-	-	-	135,87	40,76%	127,38	DISTANGAN	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Persentase penyuluhan pertanian yang dibina/berdayakan	92,59	100,00	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								-	-	-	-	-			DISTANGAN	
		Program Peningkatan Kelahanan Pangan (pertanian/pertebuhan)	Tingkat penguatan cadangan pangan kabupaten	-	50%	50%	50%											27,17%					54,34		27,17%	54,34	DISTANGAN
		Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	100	88,67	90,93	93,2	95,47	97,73	100	87,2	87,5	87,9	82,2	85,9	98,34	96,23	94,31	86,10	87,90	85,9	85,90			DISTANGAN	
		Program Penyediaan Informasi Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketetapanan pangan daerah	-	90%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	85%	88%	90%	90%	90%	106,25	103,53	100,00	100,00	100,00	90%	100,00			DISTANGAN	
		Program Pengembangan Kelembagaan Petani	Persentase poktan dengan klasifikasi lanjut	-	65%	25%	35%	45%	55%	60%	65%	25%	45%	55%	60%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60%	92,31		DISTANGAN	
		Program Pengembangan Penyaluhan	Peningkatan dan Pengelolaan Laporan Penyaluhan	-	100%		70%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			DISTANGAN	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/pertebuhan	Persentase penyuluhan pertanian yang dibina/berdayakan	-	100%	85%	88%	90%	92%	95%	100%	85%	88%	90%	92%	95%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95%	95,00		DISTANGAN	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani yang memiliki akses permodalan dan kemitraan	n/a	70%	50%	50%	55%	60%	65%	70%						-	-	-	-	-	-				DISTANGAN	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Jumlah kemirian dalam pemasaran hasil produksi pertanian	-	5	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3,00	60,00		DISTANGAN	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian secara efektif	-	450	-	150	200	250	350	450	200	250				-	100,00	100,00	-	450,00	100,00			DISTANGAN		
		Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perfinian	Luas irigasi dalam kondisi baik	- Ha	1000	500	1.000					500					-	50,00			500	50,00			DISTANGAN		
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK transmigran yang mandiri	-	37%	-	7%	15%	22%	29%	37%	0%	17%	18%	82%	231,20	122,40	371,73	278,80	82%	221,62	DPMPTSP NAKERTRANS					

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE-%						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB	
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(27)			
10	Berkembangnya sistem agribisnis/agroindustri	Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Agropolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi agropolitan	-	7	-	2	7	7	7															DISTANGAN	
		Program Studi pengembangan Kawasan Minapolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi minapolitan	0	7	-	1	7	7	7				1										1,00	14,29	DKP
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial agropolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri agropolitan	-	40%	-	-	-	10%	20%	40%														DISTANGAN	
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial minapolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri minapolitan	0	40%	-	-	-	10%	20%	40%														DKP	
		Program optimisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah Umi dan IKM pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	200	-	-	-	-	100	100														DKUKMP	
		Program optimisasi pengolahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2.405,76 ton	-	-	-	2.405,76 ton	2.405,76 ton															DKUKMP	
		Program Pengurutan Data Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Konsumsi Umur Kerapka dan Nilai Tukar Pengolahan	43,60 Kg/Tahun	48 Kg/Tahun	43,60 Kg/Tahun	44 Kg/Tahun	45 Kg/Tahun	46 Kg/Tahun	47 Kg/Tahun	48 Kg/Tahun	41,64 Kg/Tahun	48,20 Kg/Tahun	46,67 Kg/Tahun	52,65 Kg/Tahun	59,47 Kg/Tahun	95,50	109,55	103,71	114,46	126,53	59,47 Kg/Tahun	123,90	DKP		
		Jumlah Cold Storage	-	1	-	1	-	-	-	-	-														69,09	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									S	
11	Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah kebijakan tata ruang yang ditetapkan	N/A	10	-	4	6	7	8	10	1	1	2	4		25,00	16,67	28,57	50,00	4	40,00	DPUPR			
		Program Pemanfaatan Ruang	Percentase jumlah badan usaha yang menggunakan lahan usaha nya sesuai RTRW	N/A	80%	-	-	50%	60%	70%	80%		99%	12%	100%			198,00	20,00	142,86	100%	125,00	DPUPR			
		Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha terentu atau jenis jn terentu	rata-rata 14 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 14 hari	rata-rata 14 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 14 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari	rata-rata 7 hari		100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	rata-rata 7 hari	100,00	DPMPPTS NAKERTRANS	
		Program Peningkatan Promosi dan Kejasaan Investasi	Jumlah kerjasama dengan investor	N/A	7 kerjasama	3 kerjasama	3 kerjasama	4 kerjasama	5 kerjasama	6 kerjasama	7 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama				33,33	33,33	25,00	20,00	16,67	1 kerjasama	14,29	DPMPPTS NAKERTRANS	
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	Jumlah Klaster bisnis yang dikembangkan	1	7	2	3	4	5	6	7			4	6	8		-	100,00	120,00	133,33	8	114,29	DKUKMP		
		Program Peningkatan Ilmu Investasi dan Realisas	Jumlah investasi terkait perizinan	724 Miliar	50	50	30	35	40	50	50	109	137	462	642	417		456,67	1.320,00	1.605,00	834,00	417	834,00	DPMPPTS NAKERTRANS		
		Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan	Tersedianya data sumberdaya listrik	1 Jenis		1 Jenis						1						100,00				1	100,00	DESDM		
		Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terminstansanya hasil produksi pertambangan	100%		100%																			189,65	
		Rata-rata capaian kinerja (%)	46,67		123,00		301,61		315,60		212,81															
Rata-rata capaian kinerja (%)																									ST	
12	Berkembangnya jaminan umi dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro	Percentase Usaha Mikro yang mendapat pelayanan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan	0,68	4,77	1,36	2,04	2,73	3,41	4,09	4,77			0,11			-	-	3,09	-	0,11	2,21	DKUKMP			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki akses terhadap pendampingan dan inkubator bisnis, bagi industri kecil dan menengah	0,59%	1,08%	0,59%	0,69%	0,79%	0,89%	0,99%	1,08%			1,10%	1,12%		-	-	139,43	126,19	-	1,12%	103,24	DKUKMP		
		Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	Jumlah KM yang mendapat penyaluran, pelayanan, bantuan teknis dan pendampingan	1,48%	10,36%	2,96%	4,44%	5,92%	7,40%	8,88%	10,36%			96,60%	96,89%	96,89%	-	-	1.632,54	1.309,95	1.091,63	96,89%	935,68	DKUKMP		
		Program Pengembangan permodalan Usaha Bagi Koperasi dan usaha mikro	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang memperoleh fasilitas kredit	0,68	45,44	2,73	4,54	18,18	27,27	36,35	45,44			14,40	14,40		-	-	79,22	52,81	-	14,40	31,69	DKUKMP		
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	n/a	75%	60%	65%	65%	70%	75%	80%	85%	100%			-	100,00	123,08	142,86	142,86	100%	133,33	DPMPPTS NAKERTRANS			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Lembaga Koperasi yang menyediakan permodalan	n/a	1 lembar	1 lembar												100,00					1 lembar	100,00	DKUKMP	
		Program Peningkatan Kesiapan Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	n/a	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	50%	50%	31%	-	-	100,00	100,00	62,00	31%	62,00	DPMPPTS NAKERTRANS			
		Program Pencairan KM yang produktif	Jumlah UKM yang kondusif	60	200	100	200	200	200	200	200	200	200	425	117		-	100,00	212,50	58,50	-	117	58,50	DKUKMP		
		Program Peningkatan Kualitas Kebijabagan Koperasi	Percentase koperasi aktif	88,46%	91,43%	89,09%	89,66%	90,16%	90,63%	91,04%	91,43%	107%	88,7%	84,74%	85,95%	-	119,35	98,38	93,51	94,40	85,95%	94,01	DKUKMP			
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki akses terhadap pendampingan dan inkubator bisnis bagi usaha mikro	9%	20%	11%	13%	15%	16%	18%	20%			3,42%			-	-	23,52	-	-	3,42%	17,10	DKUKMP		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jenis industri kecil yang dibina	- jenis	6	3	3							6			-	200,00				6	100,00	DKUKMP		
		Program Pengembangan Senta-Senta Industri Potensial	Senta Industri potensial yang berkembang	-		-	-	-																	148,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									ST	
13	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Percentase pelatihan kewirausahaan Umi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	3,31	7,27	3,97	5	5,29	5,95	6,61	7,27			2,14	2,14		-	-	35,97	32,38	2,14	29,44	DKUKMP			
		Program Penataan Struktur Industri	Jumlah KM yang memiliki kerjasama dalam arjungan pemasaran produk usaha	14 IKM	31	2	3	3	3	3				4	86		-	-	133,33	2.866,67	86	277,42	DKUKMP			
		Program Pengembangan sarana dan prasarana UM	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh sarana/prasarana usaha	17	101	17	17	15	15	15	15			161			-	-	1.073,33	-	-	161	159,41	DKUKMP		
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penerapan teknologi terhadap peningkatan produksi usaha IKM	15 jenis (untuk kerajinan rotan & resin)	39	4	4	4	4	4	8	64	4	2		-	200,00	1.600,00	100,00	50,00	78	200,00	DKUKMP			
		program pembinaan perdagangan kaklima dan asongan yang terlalu dan terbat	Kawasan perdagangan kaklima dan asongan yang terlalu dan terbat	16,67%	50%	16,67%	16,67%	25%	33%	42%	50%	19,46%	26%		-	116,74	104,00	-	-	26%	52,00	DKUKMP				
		Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil	Jumlah prasarana pemasaran dan promosi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil	6	18	8	10	12	14	16	18			24			-	-	200,00	-	-	24	133,33	DKUKMP		
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah nilai perdagangan/barang/jasa (dalam juta rupiah)	1.087,845	1.400,000	1.100,000	1.135,184	1.200,000	1.250,000	1.300,000	1.400,000	1.652,680	1.851,269	2.032,307	2.043,324		150,24	163,08	169,36	163,47	-	2.043,324	145,95	DKUKMP		
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Menengah	Jumlah wirasusaha baru	n/a	100	50	50							150			-	300,00				150	150,00	DKUKMP		
		Program Penitikan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan produk UKM yang dipromosikan	4 UKM	31	6	5	5	5	5	15	7				-	300,00	300,00	140,00	-	37	119,35	DKUKMP			
		Rata-rata capaian kinerja (%)	16,69		119,98		430,84		71,60		386,63													140,77		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									ST	
14	Berkembangnya destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dikelola dan dikemas dengan baik	0	2	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	2		200,00		2	100,00	DISPARBUD				

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELEAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMD HASIL PELEAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPOAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB		
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6	(25)	(26)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah paket wisata yang dipasarkan	-	30	-	10	15	20	25	30	0	2	2	2	0		20,00	13,33	10,00	-	2	6,67	DISPARBUD	(27)			
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan Pemerintah daerah terkait pengembangan dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	-	20	1	2	4	10	15	20	0	0	1	2	3		-	25,00	20,00	20,00	3	15,00	DISPARBUD				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	-	10,00	19,17	15,00	73,33	40,56				
																		Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR	S	SR				
15	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wacana	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	21	37	21	24	29	33	35	37	0	34	41	52	37		-	141,67	141,38	157,58	105,71	37	100,00	DISPARBUD			
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	7	4	4	5	6	6	7	0	4	5	3	0		-	100,00	100,00	50,00	-	3	42,86	DISPARBUD			
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengembangan kekayaan budaya	2	8	2	4	5	6	7	8	0	2	2	2	2		-	50,00	40,00	33,33	28,57	2	25,00	DISPARBUD			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kebijakan tentang budaya lokal daerah yang ditetapkan	2	7	2	2	4	5	6	7				17	6	6		-	425,00	120,00	100,00	6	85,71	DISPARBUD			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	-	72,92	176,59	99,23	58,57	63,39				
																		Predikat Kinerja	SR	S	ST	ST	R	R				
16	Meningkatnya koneksiitas daerah	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya prasarana perhubungan	20,75	39,62	20,75	20,75	26,42	30,19	33,96	39,62	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	99,98	99,98	78,55	68,73	61,10	20,75	52,37	DISPERKIMHUB			
		Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	898,01 KM dan 1036 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	902,01 KM dan 1068 M	1102 m dan 704,921 Km	1102 m dan 704,921 Km	1102 m dan 704,921 Km	1140 dan 711,853 Km	1150 dan 711,853 Km	90,67	90,67	90,96	92,83	93,30	1150 dan 711,853 Km	93,30	DPUPR				
			Peningkatan struktur dan kondisi jalan dan jembatan	655,54 KM dan 833,5 M	655,54 KM dan 1010,5 M	670,54 KM dan 935,5 M	693,54 KM dan 935,5 M	718,54 KM dan 935,5 M	745,54 KM dan 935,5 M	794,54 KM dan 935,5 M	805,54 KM dan 1010,5 M	924 m dan 543,18 Km	892 m dan 551,69 Km	990 m dan 551,69 Km	1071 m dan 321,441 Km	1081 m dan 347,174 Km	88,89	86,70	89,66	76,17	76,71	1081 m dan 347,174 Km	75,04	DPUPR				
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dengan kondisi baik	72,26	76,71	72,98	73,71	74,45	75,19	75,95	76,71	81,73	83,00	89,00	79,00	79,00	111,99	112,60	119,54	99,75	104,02	79,00	102,99	DPUPR				
		Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase temuan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan yang dilaksanakan	N/A	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	DPUPR		
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase desain dengan infrastruktur dasar yang memadai	N/A	90%	-	-	50%	65%	75%	85%						4,69%	4,69%	4,69%	9,38	7,21	6,25	4,69%	5,21	DISPERKIMHUB			
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kasus kecelakaan	48 kasus	36	46	44	42	40	38	36	46	39	64	39	38		72,22	91,67	22,22	91,67	94,44	38,00	105,56	DISPERKIMHUB			
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah kabupaten yang telah tersedia jaringan jalan	33,33	57,14	33,33	33,33	57,14	57,14	57,14	57,14	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	160,00	160,00	93,33	93,33	93,33	53,33	93,33	DISPERKIMHUB				
		Program Pembangunan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berkembangnya Kawasan Strategis Kabupaten	-	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%		50,00	50,00	100,00	-	100%	100,00	DPUPR				
		Program Pemeliharaan jalan dalam kabupaten	Cakupan jalan dalam kabupaten yang terpelihara	N/A	100%	100%												100,00						100%	100,00	DPUPR		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebanmargaan	Terfasilitasinya kegiatan kebanmargaan	-	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	100,00	-	100%	100,00	DPUPR				
		Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%							100%	100%			100,00	100,00					100%	100,00	DISPERKIMHUB		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-	103,09	99,07	75,36	82,97	62,91	85,65				
																	Predikat Kinerja	ST	ST	T	T	R	T					
17	Tersedianya air baku untuk usaha budaya komoditas pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah daerah jaringan irigasi yang dibangun	-	94,76	18,43	27,56	57,27	77,12	94,76	94,76	13,04	26,09	34,78	69,57	69,57	70,76	94,66	60,73	90,20	73,42	69,57	73,42	DPUPR				
			Jumlah daerah jaringan irigasi yang okelole	-	59,98	-	-	-	19,30	28,87	59,98	13,04	26,09	34,78	69,57	69,57		360,44	240,99	69,57	115,98							
		Program Pembangunan jalan desa/irrigasi	Panjang jalan desa/jaringan irigasi yang dibangun - Km	28	-	4	12	18,50	28	28	1,239	6,372	14,281	23,221	23,221		182,06	124,18	125,52	82,93	23,221	82,93	DPUPR					
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	DPUPR				
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	86%	89%				85,75	88,89	-	-	88,89%	88,89	DPUPR					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-	70,76	115,62	93,45	135,23	99,47	92,24				
																	Predikat Kinerja	S	ST	ST	ST	ST	ST					
18	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rata-rata Nilai UKG	60,18	90	65	70	75	80	85	90	59,96					92,25	-	-	-	-	-	59,96	66,62	DIKPORA			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	Sekolah SD dan SMP yang memenuhi SNP bidang Sarana dan Prasarana	0	SD 16, SMP 6	0	SD 6, SMP 1	SD 8, SMP 2	SD 12, SMP 4	SD 14, SMP 5	SD 16, SMP 6		SD 8, SMP 4	SD 10, SMP 2	SD 14, SMP 6	SD 18, SMP 6		266,665	112,5	133,335	124,285	SD 18, SMP 6	106,25	DIKPORA				
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akkreditasi sekolah SD dan SMP minimal B	SD 65,22%, SMP 37,21%	SD 85%, SMP 90%	SD 69,22%, SMP 43,21%	SD 72,22%, SMP 50,21%	SD 75,72%, SMP 65,21%	SD 79,22%, SMP 74,71%	SD 82,42%, SMP 82,21%	SD 85%, SMP 90%	SD 81,88%, SMP 55,50%	SD 90,20%, SMP 85,26%	SD 80,13%, SMP 85,19%	SD 87,76%, SMP 82,38%	SD 88,48%, SMP 82,67%		123,365	147,355	118,995	110,525	103,955	SD 88,48%, SMP 82,67%	97,975	DIKPORA			
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi	0	6	1	2	3	4	5	6	1					-	50,00	-	-	-	1	16,67	DIKPORA				
		Program Pendidikan Menengah	APK	67,96%	68%	68%							108,59%					159,22						108,59%	159,22	DIKPORA		
		Pendidikan Luar Biasa	Akkreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SDLB - Tuna Runggu - Tunas Granita	n/a	B	B							B					100,00						B	100,00	DIKPORA		
		Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block Grant	Persentase serapan Dana Alokasi Khusus (DAK)	94,31%	100%	100%							97,85%					97,85						97,85%	97,85	DIKPORA		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Jumlah pengunjung perpusstakaan umum dan kantor	28.000 pengunjung	150.000	33.600	40.000	45.000	50.000	100.000	150.000	69,347	93,862	20,053	43,714	9,322	206,39	234,66	44,56	87,43	9,32	9,322	6,21	DINAS PERPUST DAN ARSIP				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-	113,30	138,74	55,21	66,26	47,51	81,35				
																	Predikat Kinerja	ST	ST	R	S	SR	T					
19	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Pendukul Miskin	Persentase Pendukul miskin yang terjamin pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	79,16%	85,79%	100%	100,00	125,00	93,13	95,32	105,26	100%	100,00	DINKES				
		Program pengembangan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang sesuai standar	0%	23,96%	5%	3,13%	8,33%	13,54%	18,75%	23,96%	89%	89%	88%	88%	88%	1,780,00	2,848,00	1,068,00	656,42	474,08	89%	371,02	DINKES				
		Program pengembangan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit	55%	79%	58%	60%	62%	65%	67%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	172,41	166,67	161,29	153,85	149,25	100%	126,58	DINKES				
		Program Peninggalian dan Pemberantasan Penyakit																										

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE- (%)						CAPOAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB			
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(25)	(26)					
(1)		Program Obat dan Perkembangan Kesehatan	Persentase tetesdaian obat dan vaksin	63,89%	90%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	54,17%	85,00%	85,00%	100%	83,34	121,43	113,33	106,25	117,65	100%	111,11	DINKES	(27)					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan BOK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	DINKES				
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	81,57%	86%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	84%		64,45%	39,20%	44,13%		103,70	-	77,65	46,67	51,92	44%	51,31	DINKES				
		Program pengawasan dan pengendalian Obat dan kesehatan makanan	Persentase penduduk terhadap akses air minum	n/a	87%		85%	85,50%	86%	86,50%	87%		88,82%	91,28%	90,40%	91,78%			104,49	106,76	105,12	106,10	91,78%	105,49	DINKES				
			Persentase TPM dan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	n/a	93%		90%	91%	91%	92%	93%		72,13%	61,67%	47,16%	52,15%			80,15	67,77	51,82	56,68	52,15%	56,07					
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah saktmuh sakit jiwai/tumit sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	DINKES				
		Program kemiriaan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah kemitraan peringkatkan pelayanan kesehatan	12 Dokter Spesialis, 7 dokter umum dan 39 Tenaga kesehatan	13 Dokter Spesialis, 6 dokter umum dan 47 Tenaga kesehatan									11 dotor spesialis					84,62					11 dotor spesialis	84,62	DINKES			
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Poyandu lansia aktif	100%	100%	100%								100%					100,00						100%	100,00	DINKES		
		Program Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang memperlukan dan melakukun tabiatkan penyakit tidak menular	100%	100%	100%								100%					100,00						100%	100,00	DINKES		
		Program Penyakit Menular	Persentase puskesmas yang melakupan dan melakukun tabiatkan penyakit menular	100%		100%													-							DINKES			
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan kinerja program Perangkat Daerah kesehatan	n/a	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	69,57%	73,68%	64,10%	61,54%	61,54%		86,96	86,68	71,22	64,78	61,54	62%	61,54	DINKES				
		Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan prima dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%			-	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	DINKES			
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatut kesehatan sesuai kompetensi	80%	95%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	51,71%	92,28%	92,28%	73,70%	81,73%		64,64	106,56	108,56	81,89	90,81	82%	86,03	DINKES				
		Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	100,00	111,11	105,26	100%	100,00	DINKES				
		Program Kesehatan komunitas dan kesehatan kerja	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sertifikat	n/a	100%		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	DINKES				
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Usia	n/a	90%		75%	80%	80%	85%	80%		73,43%	78,04%	84,97%	78,32%			97,90	97,54	106,21	92,15	78%	87,03						
		Meningkatnya perlaku masyarakat untuk beraktifitas fisik	n/a	65%		50%	55%	55%	60%	65%		94,23%	88,46%	96,15%	96,15%			188,46	160,84	174,83	160,26	96%	147,93						
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya akreditasi Rumah sakit	-	-	-	Terkreditedi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Terkreditedi	100,00	DINKES													
			Predikat statis Akreditasi Puskesmas	-	-	-	Dasar 2 puskesmas), Madya (2 puskesmas)	Dasar (4 puskesmas)	Dasar (6 puskesmas)	Dasar (4 puskesmas), madya (2 puskesmas)	Dasar (4 puskesmas), madya (2 puskesmas)	Dasar 2, Madya 6	0 Dasar	2 Dasar, 2 Madya	2 Dasar, 6 Madya	1 Utama	7 Madya, 1 Utama	-	125,00	133,33	350,00	175,00	7 Madya, 1 Utama	175,00					
		Program pelayanan kegawatdaruratan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%								-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES			
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)	0	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	100,00	111,11	105,26	100%	100,00	DINKES					
		Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat (BLUD)	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan pendukung pelayanan medis yang diantri dan BLUD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	DINKES				
			Rata-rata capaian kinerja (%)				147,97	209,96	136,22	126,28	110,86							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			Predikat Kinerja	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST				
20		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program keseruan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejatihera (P2WKS)	24 desa	24	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	150,00	150,00	-	-	-	12	50,00	DPPKBPPA				
		Program Pengembangan Keguruan dan Manajemen Olah Raga	Persentase pemenuhan hak anak	n/a	80%	60%	65%	70%	75%	80%	80%							-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPPKBPPA				
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,24%	65,86%	31,57%			67,24	65,86	31,57	-	31,57%	31,57	DPPKBPPA					
		Program Peningkatan peran serta dan keselarasan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan PUG	3,13%	62,50%	6,25%	15,63%	25,00%	37,50%	56,25%	62,50%				100%	100%		-	-	266,67	177,78	100%	160,00	DPPKBPPA					
		Program Peningkatan Kualitas dan Tumbuh Kembang Anak	Kegiatan Pemerintah Daerah yang memiliki dukungan dalam peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	-	3 kegiatan	3 kegiatan						3 kegiatan					100,00					3 kegiatan	100,00	DPPKBPPA					
		Program Peningkatan kualitas hidup Perempuan	Jumlah desa sayang ibu	9 desa/4 kec.	9 desa/4 kec.							6					66,67					6	66,67	DPPKBPPA					
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	51 kasus		55 kasus						19 kasus					165,45					19 kasus	165,45	DPPKBPPA					
		Program Pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	-	80%	-	70%	75%	75%	80%	80%						-	-	-	-	-	-	-	DPPKBPPA					
			Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	56,17	52,64	66,37	46,39									84,21												
			Predikat Kinerja	SR	R	S	SR	R	S	SR							T												
21		Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sport center yang dibangun	0	100%	-	-	35%	35%	20%	10%					20%					-	100,00	20,00	DIKPORA				
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga yang bermajemen baik	n/a	25	-	-	10	15	20	25			12	16	25			120,00	106,67	125,00	25	100,00	DIKPORA					
		Program Penyelenggaraan olahraga daerah	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	-	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	sepak bola 7, volly 7, bulu tangkis 7, basket 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	38,78	36,73	-	36,73	DIKPORA					
		Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	n/a	15	2	10	15	15	15	15	5	12	15	16	16	16	250,00	120,00	100,00	106,67	106,67	16	106,67	DIKPORA				
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah klub olah raga yang aktif	n/a	300	50	100	150	200	250	300	52	58	105	118	118	104,00	58,00	70,00	59,00	47,20	118	39,33	DIKPORA					
			Rata-rata capaian kinerja (%)	177,00	59,33	65,76	61,81	75,77										60,55					R						
			Predikat Kinerja	ST	R	S	R	T																					

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE-%						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (%)	RASIO CAPIAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB					
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6	(25)	(26)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	(27)					
22	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapat edukasi dan promosi lingkungan hidup secara efektif dan drespon positif oleh masyarakat	N/A	11%	0	2%	3%	5%	8%	11%	9,38%	9,38%	12,50%	15,20%			469,00	300,16	250,00	190,00		15,20%	138,18	DLH						
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan di perkantoran	N/A	100%	0	20%	40%	60%	80%	100%	-	20%	40%	60%	80%			100,00	100,00	100,00	100,00		80,00%	80,00						
			Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan kepada anak didik di lingkungan sekolah/fasilitas sekolah	N/A	50%	5%	10%	20%	30%	40%	50%	-	10%	20%	30%	40%			100,00	100,00	100,00	100,00		40,00%	80,00						
			Jumlah komunitas (CSO) LSM yang ada atau terbentuk dan berperan aktif	7	12	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11	91,67							
		Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	12 kebijakan	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00		6,00					-	-	100,00	-	-	-	6	50,00	DLH					
			Persentase SDM aparat yang memahami aturan terkait pengelolaan lingkungan	N/A	100%	40%	50%	75%	90%	100%	100%		75%	90%	100%		-	-	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%	100,00						
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen UKU/UPL, Amdal/RRI/RPL	N/A	70%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	N/A	100%	26,17%	23,42%			-	250,00	52,34	39,03	23,42%	33,46	DLH							
			Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang taat dalam mengelola lingkungan	N/A	70%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	59,26%	38%	26,17%	23,42%	-	169,31	95,00	52,34	39,03	23,42%	33,46									
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	117,29	143,15	94,34	83,51	75,85
																									Predikat Kinerja	SR	ST	ST	ST	T	
23	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan	2	5	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0			100,00	-			3	60,00	DLH						
			Jumlah model pendaayagunaan sampah yang ekonomis secara berkelanjutan	1	6	1	2	3	4	5	6	1							100,00	-	-	-	1	16,67							
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	-	50,00	-	-	38,33
																									Predikat Kinerja	ST	SR	R	SR	SR	SR
24	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan pemukiman	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	75,38%	90%	77%	78%	80%	82%	84%	86%	76,30%	78,76%	80,20%	85,94%	86,60%	99,09	100,97	100,25	104,80	103,10	86,60%	96,22	DINKES							
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang mendapatkan sanitasi yang memadai dan akses aman air	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		85,75%	88,89%	92,10%	93,20%	-	85,75	88,89	92,10	93,20	93,20%	93,20	DISPERKUMHUB							
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolaanya areal pemakaman	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		-	-	100,00	100,00	100,00	100,00		100%	100,00	DISPERKUMHUB					
		Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh	persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	100%		20%	20%	20%	20%	20%	20%	N/A	N/A	3,84%	13,62%	0,00%			19,20	68,10	-		13,62%	13,62	DISPERKUMHUB						
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	33,03	62,24	77,00	91,25	74,07	75,76
																									Predikat Kinerja	SR	R	T	ST	S	T
25	Terkendali ny bencana banir	Program pengendalian banir	data identifikasi, monitoring dan evaluasi rawan banir/genangan, panjang sungai yang menyebabkan rawan banir yang dinormalisasi	-	ada	-	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ada	100,00	DPUPR					
			Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/pengajuan suragn rawan banir	-	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%		62,86%	68,57%	77,78%	77,78%	-	209,53	171,43	155,56	129,63	129,63	129,63	77,78%	111,11						
		Program pembangunan saluran drainase/grong-grong	Persentase titik lokasi/ kawasan rawan banir yang memiliki sistem drainase yang baik	N/A	100%	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100%		2,86%	2,86%	11,43%	11,43%			14,29	7,14	19,05	14,29	11,43%	11,43	DPUPR						
		Pembangunan turap/talud/brojung	Terkendali ny dampak kerusakan pantai	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPR					
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	80,95	94,64	93,65	85,98	80,64
																									Predikat Kinerja	R	T	ST	ST	T	T
26	Terwujudnya pemulih lahan kritis	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kelengkapan yang terbentuk untuk melakukn pemulih lahan kritis (Di luar Kawasan hutan dan di luar ciri usaha perusahaan)	0	Ada		1	3	5	7	0	0	1	0	0			100,00	-	-	-	1	14,29	DLH							
			Persentase luas lahan kritis (Di luar kawasan hutan dan di luar ciri usaha perusahaan) yang dilakukan pemulih	N/A	2%	-	0,5%	1%	1,5%	2%	0%	1%	1%	1%				200,00	100,00	66,67		1,00%	50,00								
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	150,00	50,00	33,33	32,14
																									Predikat Kinerja	SR	SR	ST	R	SR	SR
27	Terwujudnya konsevsi sumber air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Air	Jumlah kelembagaan konservasi sumber air	0	28%	26%	26%	27%	27%	28%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0	0,00	DLH								
			Persentase sumber air yang terjamin kelestariannya	N/A	25%	0	5%	10%	15%	20%	25%						26,02%	26,02%	-	-	173,47	130,10	26,02%	104,08							
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlindungnya kawasan hutan	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-												100%	100,00	DLH					
		Program Perencanaan dan Pengembangan Tahrura	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan	-	3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha		3.333,19 ha	3.333,19 ha	3.333,19 ha				100,00	100,00	100,00	3.333,19 ha	100,00	100,00	DLH						
		Program Perencanaan dan Pengembangan hutan	Terpenuhinya syarat pembentukan tahrura	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-						100,00	-			100%	100,00	DLH							
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	-	33,33	91,16	76,70	80,82
																									Predikat Kinerja	R	SR	SR	ST	T	T
28	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang bermasalah	N/A	4%	15%	12%	10%	8%	6%	4%		1,00%	88,00%	0,00%		-	-	190,00	(900,00)	200,00	0%	200,00	DPUPR							
																									Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	190,00	(900,00)	200,00	200
29	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola/ dikembangkan	0,50%	3,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	0,50%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	50,00	7,33	5,50	4,40	3,67	0,11%	3,14	DLH						
																									Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sosaran (%)	45,55	76,45	120,47	62,80	99,87	89,58
																									Predikat Kinerja	SR	T	ST	R	ST	T

**TABEL 2.73 EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD (ANGGARAN)
KABUPATEN BANGKA BARAT
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2016 - TAHUN 2021**

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPAIAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB	
					(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021	(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(25)	(26)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)	
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Menurunnya Temuan atas Audit BPK terhadap LKD Penda	20 temuan	12.440,35	1.926,40	1.913,95	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	1.591,75	2.170,60	1.906,81	2.734,79	3.257,94	82,63	113,41	95,34	130,23	148,09	11.661,89	93,74	BPKAD		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Penda	7 temuan	7.290,98	960,00	1.130,98	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	896,72	924,53	726,17	872,06	1.058,22	93,41	81,75	60,51	72,67	81,40	4.477,71	61,41	BPKAD		
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tetap waktu	71%	15.895,21	2.389,00	2.606,21	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	1.932,13	2.660,14	2.590,98	3.715,16	607,41	80,88	102,07	97,77	137,60	22,09	11.505,81	72,39	INSPEKTORAT		
		Program peningkatan profesionalisme timaga generiksa dan apparatur pengawasan	Assessment inspektorat	Level II	1.613,89	192,69	271,20	300,00	300,00	250,00	160,68	205,30	11,50	12,27	8,84	83,39	75,70	3,83	4,09	2,95	398,58	24,70	INSPEKTORAT			
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Persentase desa yang menyusun APB Desa tetap waktu	n/a	6.164,90	-	1.164,90	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.067,35	656,25	289,14	237,15	91,63	54,69	24,10	18,24	2.249,90	36,50	DINSOSPEMDES				
		Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase selaporan keuangan desa terlengkap dan tetap waktu	n/a	2.903,58	-	553,58	575,00	575,00	600,00	600,00	327,40	103,52	114,80	73,42	59,14	18,00	19,97	12,24	619,13	21,32	DINSOSPEMDES				
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan desa dengan akuntabilitas baik	n/a	733,91	-	133,91	150,00	150,00	150,00	150,00	193,75	234,32	148,86	188,20	144,69	156,21	99,24	125,46	765,13	104,25	DINSOSPEMDES				
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kerjasama antara Desa dan Kecamatan	3 kerjasama	8.006,00	6.049,00	357,00	400,00	400,00	400,00	5.828,88	4.887,61	377,75	256,44	548,06	96,36	1.369,08	94,44	64,11	137,01	11.898,73	148,62	DINSOSPEMDES/ KECAMATAN			
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perpedesaan	Ketersedian wadah pengembangan perempuan di pedesaan	-	1.025,00	150,00	275,00	150,00	150,00	150,00	142,47	200,41	300,68	210,41	173,91	94,98	72,88	200,45	140,28	115,94	1.027,88	100,28	KECAMATAN			
		Program Penataan Desa	Persentase Desa Swakarya	-	400,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	21,61	-	-	-	21,61	-	-	-	21,61	5,40	DINSOSPEMDES			
		Program Pendayagunaan TTG dan SDA	TTG yang dimanfaatkan	- jenis	1.237,76	-	237,76	250,00	250,00	250,00	250,00	42,82	-	5,50	29,19	18,01	-	2,36	11,68	77,91	6,29	DINSOSPEMDES				
		Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa	Desa yang memanfaatkan TTG	- desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	Lembaga Desa yang aktif	2 lembaga desa (PKK dan LPM) di seluruh desa	2.974,59	-	574,59	600,00	600,00	600,00	600,00	421,10	106,95	133,84	88,88	-	73,29	17,82	22,31	14,81	750,77	25,24	DINSOSPEMDES			
		Program Pendataan desa Kab Bangka Barat	Ketersediaan data profil dan potensi desa	- dokumen	136,70	116,70	-	10,00	10,00	10,00	115,29	-	7,20	-	17,88	98,79	-	72,00	-	178,81	140,37	102,68	DINSOSPEMDES			
		Program Perencanaan pembangunan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tetap waktu	-	-	85,00	85,00	-	-	-	-	84,92	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	84,92	99,90	DINSOSPEMDES		
		Program Wilayah dan Kelembagaan	Fasilitasi Penetapan kelembagaan desa/kelurahan	-	-	510,65	510,65	-	-	-	-	731,33	-	-	-	-	143,22	-	-	-	-	731,33	143,22	DINSOSPEMDES		
		Program Desa Mandiri	Desa mandiri yang memenuhi kriteria	-	-	80,00	80,00	-	-	-	-	72,82	-	-	-	-	91,03	-	-	-	-	72,82	91,03	DINSOSPEMDES		
		Program Nasional Pembangunan Masyarakat	Persentase program pembangunan desa yang memiliki manfaat bagi masyarakat	-	-	105,00	105,00	-	-	-	-	93,34	-	-	-	-	88,89	-	-	-	-	93,34	88,89	DINSOSPEMDES		
		Program Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya	-	-	134,50	134,50	-	-	-	-	131,31	-	-	-	-	97,63	-	-	-	-	131,31	97,63	DINSOSPEMDES		
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lemaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Yang Dibina/Diberdayakan Pemerintah Daerah	2 Posyantek	45,00	45,00	-	-	-	-	-	43,56	-	-	-	-	96,81	-	-	-	-	43,56	96,81	DINSOSPEMDES		
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Desa yang Diadakan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes	0	58,08	58,08	-	-	-	-	-	53,76	-	-	-	-	92,56	-	-	-	-	53,76	92,56	DINSOSPEMDES		
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur desa memenuhi standar kompetensi jabatan	-	-	105,00	105,00	-	-	-	-	104,80	520,36	-	-	-	99,81	-	-	-	-	625,16	595,39	DINSOSPEMDES		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persaudaraan Daerah	Persentase Pengguna Layanan Informasi Melalui Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi terlengkap dan terlindungi keamanannya	N/A	710,00	-	100,00	120,00	150,00	160,00	180,00	-	-	10,80	19,49	12,70	-	9,00	12,99	7,94	42,99	6,05	DISKOMINFO			
		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	n/a	9.000,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	1.536,66	864,15	1.125,08	1.233,02	-	85,37	48,01	62,50	68,50	4.758,91	52,88	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara elektronik	Pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan	n/a	2.079,65	2.079,65	-	-	-	-	-	1924,35	-	-	-	-	92,53	-	-	-	-	1.924,35	92,53	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Pembinaan BUMD	Terbinanya BUMD	100%	1.184,00	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	131,04	62,10	33,96	172,45	71,22	-	31,05	16,98	86,23	399,54	33,75	SEKRETARIAT DAERAH				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	311.369,00	47.803,00	48.000,00	50.000,00	52.389,45	55.273,93	57.902,62	43.636,80	51.444,07	78.792,49	84.535,54	81.291,91	91,28	107,18	157,58	161,38	147,07	339.700,82	109,10	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Status capaikan kinerja keuangan	100%	4.584,00	600,00	784,00	800,00	800,00	800,00	539,98	1.450,34	437,63	493,23	471,96	90,00	184,99	54,70	61,65	59,00	3.393,14	74,02	SELURUH PD			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparat dalam kondisi baik	100%	202.969,40	29.484,82	30.047,00	32.437,58	34.500,00	36.500,00	40.000,00	18.672,99	23.179,03	16.373,39	18.701,03	53.288,58	63,33	77,14	50,48	54,21	146,00	130.215,03	64,16	SELURUH PD		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Sumber Daya Aparatur dalam bekerja	100%	34.676,22	4.500,00	4.976,22	5.500,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	1.783,22	2.986,63	250,10	157,33	186,77	39,63	60,02	4,55	2,87	5.364,04	15,47	SELURUH PD			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalnya disiplin aparat	100%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.351,75	2.601,64	760,07	465,98	55,58	117,59	130,08	38,00	23,30	2,78	6.235,03	51,96	SELURUH PD			
		Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah	Terciptanya dokumentasi pembangunan daerah sebagai saranai informasi	49%	1.179,56	173,60	205,96	200,00	200,00	200,00	153,40	149,62	88,05	12,90	-	88,37	72,64	44,02	6,45	-	403,96	34,25	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan fasilitasi pembinaan kemasayarakatan	n/a	8.655,00	1.595,00	1.456,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	970,07	1.021,75	786,35	766,40	332,59	60,67	70,18	56,17	54,74	23,76	3.877,16	44,80	SEKRETARIAT DAERAH			
		Rata-rata capaikan kinerja (%)																								82,11
		Predikat Kinerja																								T
		T S R																								R
		Rata-rata capaikan kinerja (%)																								24,50
		Predikat Kinerja																								T
		S R																								R
		Rata-rata capaikan kinerja (%)																								24,50
		Predikat Kinerja																								T
		T S R																								R
		Rata-rata capaikan kinerja (%)																								24,50

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMID PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMID MELALUI PELAKUAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMID HASIL PELAKUAN RKPD TAHUN KE-%)						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)		
4	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Sosial & Budaya	56%	7.203,68	1.153,00	1.250,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.082,72	967,52	477,56	679,89	1.002,43	93,90	77,36	39,80	56,66	83,54	4,210,13	58,44	BP4D			
		Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	57%	2.743,86	78,86	265,00	400,00	500,00	700,00	800,00	77,69	122,96	224,78	467,65	238,76	98,51	46,40	56,20	93,53	34,11	1.131,84	41,25	BP4D		
		Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Kk & Prasrama	65%	6.188,64	897,00	1.291,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	850,13	848,25	412,00	650,23	1.008,39	94,77	65,67	41,20	65,02	100,84	3.769,00	60,90	BP4D			
		Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase keterpaduan dan validitas data/informasi untuk perencanaan	49%	3.600,00	-	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	-	60,15	57,96	90,42	-	-	-	7,52	7,24	9,04	209,53	5,79	DISKOMINFO			
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan	100%	2.150,00	-	350,00	350,00	400,00	400,00	650,00	-	192,15	207,34	218,31	-	-	54,90	51,83	54,58	617,79	28,73	BP4D			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								40,64
5	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	n/a	9.847,00	-	1.687,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	-	1.029,45	499,95	417,96	519,91	-	61,02	24,51	20,49	25,49	2.467,27	25,06	BKPSDM		
		Predikat Kinerja																								SR
		Program Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sesuai ketebuhan	n/a	24.900,00	-	5.400,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	-	-	2.180,87	2.927,34	757,88	-	-	40,39	48,79	11,66	5.866,09	23,56	BKPSDM			
		Predikat Kinerja																								ST
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								SR
		Program pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan	Persentase Kesiapan Janinan Kesejahteraan ASN	N/A	2.300,00	-	700,00	350,00	350,00	550,00	350,00	-	899,98	497,40	552,11	222,76	-	128,57	142,11	157,75	40,50	2.172,24	94,45	BKPSDM		
		Program pembinaan dan pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	n/a	168,00	168,00	-	-	-	-	-	137,42	-	-	-	-	81,79	-	-	-	-	137,42	81,79	BKPSDM		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	4.130,00	4.130,00	-	-	-	-	-	3.255,79	-	-	-	-	78,83	-	-	-	-	3.255,79	78,83	BKPSDM		
		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	Kualitas Aparatur yang pensiun	100%	54,00	54,00	-	-	-	-	-	54,24	-	-	-	-	100,44	-	-	-	-	54,24	100,44	BKPSDM		
		Program Penataan dan Pengutamaan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang merupakan	n/a	1.925,00	-	-	-	-	-	-	80,55	71,90	92,39	-	-	-	20,14	16,92	18,48	-	-	244,84	12,72	SEKRETARIAT DAERAH	
		Program Penataan dan Pengutamaan Ketatausahaan	Persentase Perangkat Daerah yang ketatausahaan dengan kriteria "BAIK"	10,3%	750,00	-	-	-	-	-	-	90,00	94,03	87,53	-	-	-	60,00	62,68	43,76	-	-	271,55	36,21	SEKRETARIAT DAERAH	
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang memiliki pengelolaan arsip secara baku	44,34%	2.340,87	389,64	351,23	400,00	400,00	400,00	360,13	301,62	35,03	60,22	46,62	92,43	85,88	8,76	15,06	11,65	803,62	34,33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Amenitasi kegiatan pelatihan SDM aparatur Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informasi	1	537,98	37,98	100,00	100,00	100,00	100,00	35,75	-	29,62	32,78	-	94,12	-	29,62	32,78	-	-	98,14	18,24	DISKOMINFO		
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dokumen/arsip daerah yang disimpan di Record Center	10%	737,00	279,00	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	237,05	53,62	39,15	61,10	56,91	84,97	92,46	39,15	61,10	56,91	447,83	60,76	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
		Program penetapan dan penegakan batas wilayah	Terciptanya tertib batas antar desa/kelurahan di Kab. Bangka Barat	n/a	2.952,57	472,57	480,00	500,00	500,00	500,00	446,78	433,97	321,96	328,58	42,40	94,54	90,41	64,39	65,72	8,48	1.573,69	53,30	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program penataan wilayah dan kelembagaan	Tersafarisinya penataan lembaga desa/kelurahan	n/a	1.324,50	834,50	90,00	100,00	100,00	100,00	31,03	27,45	-	17,18	-	3,72	30,50	-	17,18	-	-	75,65	5,71	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Rapider menjadi Perda	73%	115.700,00	17.500,00	19.800,00	19.300,00	19.800,00	19.500,00	19.800,00	15.968,28	19.103,87	20.423,15	22.557,24	18.191,65	91,25	96,48	105,82	113,93	93,29	96.244,18	83,18	SEKRETARIAT DPRD		
		Program Peningkatan Semangat Kebangsaan	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	100%	2.348,00	623,00	325,00	350,00	350,00	350,00	575,87	324,97	421,25	416,44	93,45	92,43	99,99	120,36	118,98	26,70	1.831,97	78,02	KECAMATAN			
		Program Penataan Perundungan-undungan	Cakupan ranigan regulasi daerah menjadi regulasi pemerintah	73%	12.152,00	1.902,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.598,89	1.738,74	1.381,59	1.285,87	1.649,98	84,06	77,28	69,08	64,29	82,50	7.655,07	62,99	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi	100%	3.298,41	358,00	540,41	600,00	600,00	600,00	314,10	388,10	203,94	116,54	90,91	87,74	71,82	33,99	19,42	15,15	1.113,58	33,76	DISKOMINFO			
		Program pengembangan kebijakan perekonomian pembangunan	Pengembangan kebijakan pembangunan sesuai dengan Perencanaan	n/a	2.788,00	538,00	650,00	400,00	400,00	400,00	455,27	493,51	112,99	398,84	240,87	84,62	75,92	28,25	99,71	60,22	1.701,47	61,03	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100%	4.897,30	312,30	585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272,29	436,30	427,25	616,00	192,43	87,19	74,58	42,72	61,60	19,24	1.944,26	39,70	BP4D			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								51,79
		Predikat Kinerja																								R
5	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas yang berkunjung ke Puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	2.527,00	-	450,00	450,00	481,00	496,00	650,00	-	-	5.564,08	6.869,32	16.343,45	-	1.236,46	1.428,13	3.295,05	28.776,85	1.138,78	DINKES			
		Predikat Kinerja																								ST
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								SR
		Predikat Kinerja																								T
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								T
		Predikat Kinerja																								R

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMID PADA RKPD TAHUN KE-						CAPOAAN TARGET RPJMID MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPOAAN TARGET RPJMID HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPOAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB			
						1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)						1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)						1 2 3 4 5 6											
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)					
			Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a																									
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase balita yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	8.306,93	1.136,93	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	457,50	701,96	915,16	1.137,37	1.267,15	40,24	51,24	65,37	81,24	84,48	4.479,16	53,92	DINKES					
			Persentase ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	94,17%																									
			Persentase ibu bersalin yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	n/a																									
			Persentase bayi lahir yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a																									
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	32%	50.680,00	8.480,00	7.200,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	5.513,88	2.701,37	3.464,08	5.708,51	5.490,78	65,02	37,52	46,19	67,16	61,01	22.878,61	45,14	DIKPORA					
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan		159.089,00	8.898,00	30.191,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.458,63	45.677,01	33.385,52	41.685,80	13.416,06	95,06	151,29	111,29	138,95	44,72	142.623,01	89,65	DIKPORA					
			- SD	99,88%	0,00																								
			- SMP	82,21%	0,00																								
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih sesuai standar	n/a	12.700,00	-	2.000,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU/P DISPERKIMHUB	
			Persentase rumah tangga mendapat pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar	n/a																									
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sesuai standar rumah layak huni	n/a	15.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	27,50	1.624,01	306,15	2.422,93	-	0,92	54,13	10,21	80,76	4.380,59	29,20	DISPERKIM					
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	n/a	4.353,42	281,46	471,96	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	273,96	377,63	85,64	227,46	3.732,66	97,34	80,01	10,71	28,43	373,27	4.697,35	107,90	SATPOLPP DAN PB					
			Persentase warga negara yang menjadi korban bencana yang bartahan kebutuhan dasar	n/a																									
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran yang menerima layanan sesuai standar	100,00%	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.975,35	29,11	173,60	103,80	330,26	98,77	2,91	17,36	10,38	33,03	2.612,11	37,32	SATPOLPP DAN PB					
		Program pemeliharaan kantritbmias dan pencegahan tindak kriminal	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan akibat gangguan trambut	n/a	12.995,63	1.640,63	1.755,00	1.800,00	2.300,00	2.000,00	3.500,00	1.337,14	1.265,53	624,36	859,05	1.164,68	81,50	72,11	34,69	37,35	58,23	5.250,77	40,40	SATPOLPP DAN PB					
			Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trambut dalam skema akititas	30 kali/ kecamatan/tahun																									
		Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang berhasil mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	n/a	26.078,00	-	4.078,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	-	3.415,41	1.122,41	966,04	1.895,55	-	83,75	22,45	19,32	31,59	7.399,41	28,37	DINSOSPEMDES					
			Persentase korban bencana yang berhasil mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	0,00%																									
			Persentase orang lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	0,00%																									
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase anak penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a	6.155,60	2.316,00	639,60	800,00	800,00	800,00	2.095,11	483,87	291,90	491,99	657,17	90,46	75,65	36,49	61,50	82,15	4.020,05	65,31	DINSOSPEMDES						
			Persentase penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a																									
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82,33	2.107,11	2.107,11							1.943,86	-	-	-	-	92,25					1.943,86	92,25	DINSOSPEMDES				
			Pembinaan eks Penyandang Penyiksi Sosial (eks narapidana, psk, naroba dan penyiksi sosial lainnya)	-	25,00	25,00							23,38	-	-	-	-	93,52					23,38	93,52	DINSOSPEMDES				
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dalam usaha menyelenggarakan kesejahteraan sosial		60,00	60,00							-	-	-	-	-												
		Program kerjasama informasi dengan massmedia	Terserabnya informasi publik secara efektif	23,08%	10.386,00	536,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.029,01	978,18	452,99	657,03	926,94	191,98	52,87	22,65	32,85	46,45	4.046,15	38,96	DISKOMINFO					
		Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa	Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	1.863	11.051,00	1.051,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	889,79	1.156,46	1.960,18	1.417,43	919,85	84,66	57,82	98,01	70,87	45,99	6.343,71	57,40	DISKOMINFO					
		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Sistem Pelayanan Publik	79	1.450,00	-	-	300,00	350,00	400,00	400,00	-	-	104,79	85,35	126,48			34,93	24,39	31,62	316,62	21,84	SEKRETARIAT DAERAH					
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepada daerahwakil kepada daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diintendanku	n/a	23.774,29	2.974,29	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	2.340,06	3.360,84	1.418,40	1.399,46	1.315,15	78,68	90,83	35,46	34,13	29,23	9.833,91	41,36	SEKRETARIAT DAERAH					
		Program peningkatan/pertukaran hubungan dan layanan kemasayarakatan oleh KDHWKDH	Tersafilitasiinya layanan kemasayarakatan oleh KDHWKDH	n/a	1.107,75	1.107,75							821,76						74,18					821,76	74,18	SEKRETARIAT DAERAH			
		Program Penyelegaraan Tugas Umum Pemerintah	Cakupan tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan	n/a	6.800,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	-	-	257,05	229,11	317,28			17,14	15,27	17,63	803,43	11,82	KECAMATAN					
		Program Penyelegaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	Cakupan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	100%	1.170,00	-	-	220,00	250,00	300,00	400,00	-	-	207,44	74,50	150,19			94,29	29,80	50,06	432,13	36,93	KECAMATAN					
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat laporan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilusun		1.981,32	591,32	190,00	300,00	300,00	300,00	572,43	539,71	35,90	72,17	36,31	96,80	284,06	11,97	24,06	12,10	1.256,51	63,42	SATPOLPP DAN PB						
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan		4.758,75	753,75	805,00	800,00	800,00	800,00	751,02	645,94	736,50	694,89	123,22	99,64	80,24	92,06	86,66	15,40	2.951,57	62,02	KESBANGPOL						

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB
						1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)						1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 6 (2021)						1 2 3 4 5 6								
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya seminar, talk show, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan	2.097,33	349,00	348,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	347,98	337,59	258,54	391,06	135,37	99,70	96,92	73,87	111,73	38,68	1.470,52	70,11	KESBANGPOL		
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Penitikada (%)	-	1.157,51	167,76	189,75	100,00	200,00	250,00	250,00	161,51	147,66	36,91	67,89	155,74	96,28	77,82	36,91	33,95	62,30	569,71	49,22	KESBANGPOL		
		Program pendidikan dan pemantauan aktilitas orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing	persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	386,00	-	71,00	75,00	80,00	80,00	80,00	-	50,00	36,20	17,63	37,18	-	70,42	48,27	22,03	46,47	141,00	36,53	KESBANGPOL		
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan lembaga sosial yang aktif	-	1.988,00	-	388,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	280,22	172,12	534,45	38,61	-	72,22	43,03	133,61	9,65	1.025,40	51,58	DINSOPMEMDES		
		Program Sosial penanganan bencana	Cakupan penanganan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa		2.470,00		470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	217,88	112,86	109,68	11.830,92	-	46,36	22,57	21,94	2.366,18	12.271,34	496,82	DINSOPMEMDES		
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	n/a	2.186,61	191,61	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	38,32	49,92	103,13	51,86	40,80	20,00	12,64	25,78	12,97	10,20	284,02	12,99	DPMPPTPSP NAKERTRANS		
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luasan kelerahan lahan yang disiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah	33%	4.849,45	471,00	378,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	170,60	250,93	157,18	270,76	1.766,63	36,22	66,31	15,72	27,08	176,66	2.616,09	53,95	DPUPR			
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan	Persentase konflik lahan yang diselesaikan	-	200,00	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	B	2.833,50	494,00	339,50	500,00	500,00	500,00	500,00	487,90	955,89	1.077,04	1.062,73	870,40	98,77	281,56	215,41	212,55	174,08	4.453,97	157,19	DISDUKCAPIL		
		Program Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan bayi benakte kelahiran	59,20%	980,10	-	180,10	200,00	200,00	200,00	200,00	-	79,21	84,09	93,62	36,41	-	43,98	42,05	46,81	18,21	293,33	29,93	DISDUKCAPIL		
		Program Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan dan pelayanannya dengan sistem informasi kependudukan	38%	460,00	-	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	49,44	27,29	34,53	4,00	-	82,40	27,29	34,53	4,00	115,26	25,06	DISDUKCAPIL		
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pasar Tertib Utuk	-	6.101,55	1.047,00	1.054,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	877,72	1.067,84	2.042,69	974,75	3.671,32	83,83	101,26	204,27	97,47	367,13	8.634,30	141,51	DKUKMP		
		Program Keluarga Berencana	Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbuang	7800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Angka Kelahiran Total (TR) per WUS 15-49 tahun	2,74	2.559,14	508,43	335,92	369,40	406,46	447,11	491,82	471,20	245,75	64,20	188,53	63,19	92,68	73,16	17,38	46,38	14,13	1.032,86	40,36	DPPKBPPP			
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (jumlah need)	17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	66 per 1000 kelahiran	658,96	39,90	101,42	111,44	122,72	134,99	148,49	38,02	81,66	42,46	48,55	6,82	95,30	80,52	38,10	39,56	5,05	217,52	33,01	DPPKBPPP		
		Program pelayanan kontrasepsi	Angka Persentase pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods) mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon)	58,76%	2.322,79	129,70	360,25	390,00	435,90	479,49	527,44	118,95	152,84	176,27	112,61	-	91,71	42,43	45,20	25,83	-	560,66	24,14	DPPKBPPP		
		Persentase Kehamilan yang tidak dinginkan dan WUS 15-49 tahun	11,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat	Cakupan peserta KB baru	-	257,04	-	257,04	-	-	-	-	-	225,21	-	-	-	-	87,61	-	-	-	225,21	87,61	DPPKBPPP		
		Program Penyerasan Kebijakan Pembangunan Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,26%	1.857,60	1.112,60	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	13,72	138,64	-	-	-	9,15	92,42	-	152,35	8,20	DPPKBPPP		
		Program Kelahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan keluarga sejahtera ≥ tingkat III	51,41 (Pendataan Keluarga tahun 2014)	1.916,64	-	60,24	400,00	440,00	484,00	532,40	-	47,33	324,39	182,21	84,06	-	78,56	81,10	41,41	17,37	637,98	33,29	DPPKBPPP		
		Program Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat	Cakupan keluarga sejahtera ≥ tingkat III	51,41%	610,53	-	100,00	110,00	121,00	133,12	146,41	-	-	79,11	211,79	33,61	-	71,92	175,03	25,25	-	324,51	53,15	DPPKBPPP		
		Program Pembinaan Peran Sama-sayarakat dalam pelaksanaan KB/KR yang mandiri	Jumlah fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	-	140,80	140,80	-	-	-	-	-	140,82	-	-	-	-	100,01	-	-	-	-	140,82	100,01	DPPKBPPP		
		Program Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Cakupan Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang ber KB	-	27,57	27,57	-	-	-	-	-	25,34	-	-	-	-	91,90	-	-	-	-	25,34	91,90	DPPKBPPP		
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KIR	Jumlah sekolah yang melaksanakan PK Remaja di kabupaten	-	33,00	33,00	-	-	-	-	-	31,82	-	-	-	-	96,42	-	-	-	-	31,82	96,42	DPPKBPPP		
		Program pengembangan model operasional BKB-PADNU	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BK) ber KB	-	29,80	29,80	-	-	-	-	-	29,73	-	-	-	-	99,77	-	-	-	-	29,73	99,77	DPPKBPPP		
		Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan	Persentase Tenaga Lini Lapangan (PLKB) yang mendapat sarana dan prasarana	-	194,00	194,00	-	-	-	-	-	156,91	-	-	-	-	80,88	-	-	-	-	156,91	80,88	DPPKBPPP		
		Program Peningkatan Sarana Kerja bagi PLKB/PKB/PLKB	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT	-	276,00	276,00	-	-	-	-	-	267,70	-	-	-	-	96,99	-	-	-	-	267,70	96,99	DPPKBPPP		
		Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	n/a	102,10	102,10	-	-	-	-	-	74,75	-	-	-	-	73,21	-	-	-	-	74,75	73,21	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program pengangguran dan penyalenggaraan pemerintahan daerah	Peringkat LPPD tingkat nasional	n/a	286,48	286,48	-	-	-	-	-	252,53	-	-	-	-	88,15	-	-	-	-	252,53	88,15	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan informasi yang makin meningkat	n/a	181,29	181,29	-	-	-	-	-	166,65	-	-	-	-	91,92	-	-	-	-	166,65	91,92	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Pengabdian Pendiduk	Pertumbuhan Penduduk	-	223,60	78,60	145,00	-	-	-	-	73,67	111,93	-	-	-	93,72	77,19	-	-	-	185,60	83,00	DPPKBPPP		
		Program Penguruan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Integritas Pelayanan Publik	n/a	2.100,00	-	420,00	420,00	420,00	420,00	-	329,72	220,55	186,61	149,89	-	78,51	52,51	44,43	35,69	-	886,77	42,23	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program penataan dan penguruan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat kaputuhan perda dalam pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (zona hijau)	n/a	650,00	-	650,00	-	-	-	-	350,14	-	-	-	-	53,87	-	-	-	-	350,14	53,87	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standar keselamatan transportasi	n/a	2.127,49	39,25	2.088,24	-	-	-	-	25,05	1.987,39	-	-	-	63,82	95,17	-	-	-	2.012,44	94,59	DISPERKIMHUB		
		Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi pemerintah dan masyarakat	47%	1.828,00	115,00	113,00	400,00	400,00	400,00	400,00	107,91	102,22	31,50	28,80	25,65	93,84	90,46	7,88	7,20	6,41	296,09	16,20	SEKRETARIAT DAERAH		
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya media dan sarana informasi	n/a	1.350,00	-	550,00	200,00	200,00	200,00	-	-	41,19	-	4,95	-	-	20,60	-	2,48	-	46,14	3,42	DISKOMINFO		
		Program pembinaan & peningkatan kesadaran masyarakat	Cakupan Masyarakat berSIG	70%	418,80	48,80	50,00	80,00	80,00	80,00	48,72	46,45	13,10	9,70	-	99,83	96,91	16,38	12,13	-	119,97	28,65	DPMPPTPSP NAKERTRANS			
		Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan	100%	14.547,00	1.947,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.873,17	2.095,38	2.524,14	7.091,13	6.948,56	96,21	83,82	100,97	283,65	277,94	1	20.532,39	141,15	KECAMATAN		

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-%)						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPOAAN AKHIR %	PD PENANGGUNG JAWAB						
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6									
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Program Pembinaan Kehidupan Beragama	Meningkatnya pembinaan kehidupan beragama	100%	19.298,00	6.748,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.600,00	2.800,00	7.039,77	2.137,62	2.296,56	2.413,52	2.212,27	104,32	92,94	95,69	98,51	85,09	16.099,75	83,43	SEKRETARIAT DAERAH				
						Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah	n/a (MoU)	1.100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	77,94	123,09	38,20	37,61	44,90	77,94	61,55	19,10	18,81	22,45	321,75	29,25	SEKRETARIAT DAERAH				
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program peningkatan produksi pertanian	Produktivitas padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	2,28 ton per Ha	1.200,00	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	978,94	500,91	175,92	-	-	326,31	166,97	58,64	1.655,76	137,98	DISTANGAN							
						6.159 ton	14,43 ton per Ha	7.242 ton	4.061 kwintal																							
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (jaringan terisir)	Luas areal yang sudah tenagasi jaringan terisir	-	18.416,00	-	3.500,00	3.090,00	4.440,00	7.386,00	0,00	-	-	791,67	-	-	-	-	25,62	-	-	791,67	4,30	DISTANGAN								
						18,36%	2.000,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	200,58	294,68	182,12	-	40,12	58,54	36,42	677,38	33,87	DISTANGAN								
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program Peningkatan Kelahanan Pangan (pertanian)	Ketercapaian swasembada pangan daerah	92,59	2.800,00	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTANGAN					
						Tingkat penguruan cadangan pangan kabupaten	-	3.966,00	716,00	3.250,00					405,14	790,37	-	-	56,58	24,32				1.195,50	30,14	DISTANGAN						
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	1.978,45	469,00	309,45	300,00	300,00	300,00	300,00	427,08	159,99	123,01	88,06	-	91,06	51,70	41,00	29,35	-	798,14	40,34	DISTANGAN								
						Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	-	604,00	64,00	140,00	100,00	100,00	100,00	55,06	106,77	51,31	33,48	46,73	86,03	76,26	51,31	33,48	46,73	293,33	48,57	DISTANGAN						
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program Pengembangan Kelengkungan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase penerlukyan pertanian yang dibina/berdayakan	-	1.180,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	184,77	15,73	24,12	58,09	97,25	-	7,87	12,06	29,05	-	282,71	23,96	DISTANGAN								
						Program Pengembangan Penyaluhan	Peningkatan dan Pengelolaan Laporan Penyaluhan	-	490,00	45,00	45,00	100,00	100,00	100,00	44,88	32,05	4,80	4,00	15,58	99,74	71,22	4,80	4,00	15,58	101,30	20,67	DISTANGAN					
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program peningkatan pertanian yang dibina/berdayakan	Persentase penerlukyan pertanian yang dibina/berdayakan	-	20.283,71	1.673,00	5.910,71	3.100,00	3.200,00	3.300,00	1.827,47	1.245,10	768,29	1.876,18	838,13	109,23	21,07	24,78	60,52	26,19	6.555,17	32,32	DISTANGAN									
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pangan yang memiliki akses pemerlukan dan kemitraan	n/a	1.767,06	287,08	280,00	300,00	300,00	300,00	261,32	74,02	8,65	41,60	9,76	91,03	26,43	2,88	13,87	3,25	395,34	22,37	DISTANGAN					
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah kemitraan dalam pemasaran hasil produksi pertanian	-	400,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	112,89	27,30	24,35	-	112,89	27,30	24,35	-	164,53	41,13	DISTANGAN									
						Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian secara efektif	-	490,00	-	100,00	130,00	130,00	-	-	79,47	152,81	-	-	79,47	117,55	-	-	232,28	47,40	DISTANGAN							
6	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program Pengembangan Jaringan Irrigasi Pertanian	Luas irigasi dalam kondisi baik	-	7.060,50	2.740,50	4.320,00	-	-	-	-	-	2.255,54	486,54	-	-	-	82,30	11,26	-	2.742,08	38,84	DISTANGAN									
						Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK transmigran yang mandiri	-	2.891,27	431,27	460,00	500,00	500,00	500,00	386,25	376,42	175,07	250,47	138,50	89,56	81,83	35,01	50,09	27,70	1.326,71	45,89	DPMPPTS NAKERTRANS					
7	Meningkatnya nilai produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat	Program peningkatan produksi perkebunan	Produktivitas lada (ton/ha/thn)	1,39 ton per ha	70.719,79	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.719,79	-	-	2.654,07	1.363,42	549,22	-	-	53,08	27,27	10,98	4.566,70	6,46	DISTANGAN								
						4.412,71 ton	1.20 ton per ha																									
7	Meningkatnya nilai produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Jumlah produksi lada dengan mutu baik	212,15 ton	490,00	-	-	100,00	130,00	130,00	130,00	-	-	47,99	74,37	-	-	47,99	57,20	-	-	122,35	24,97	DISTANGAN								
						11.584 ton																										
7	Meningkatnya nilai produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan secara efektif	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
						Jumlah kemitraan dalam pemasaran hasil produksi perkebunan	0	20.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	219,98	183,73	13,72	-	-	4,40	3,67	0,27	417,42	2,09	DISTANGAN						
7	Meningkatnya nilai produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat	Program pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	Persentase penyaluran perkebunan yang memenuhi standar	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
						0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	758,46	330,76	-	-	-	96,99	3,89	-	-	1.088,22	11,73	DISTANGAN						
8	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)</td																													

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMWD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMWD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMWD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-%)						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR %	PD PENANGGUNG JAWAB	
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
10	Berkembangnya sistem agribisnis/agroindustri	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan hasil produksi tembak ruminansia	-27,22	2.699,16	462,97	236,19	500,00	500,00	500,00	500,00	411,01	502,48	140,12	781,20	180,11	88,78	212,74	28,02	156,24	36,02		2.014,91	74,65	DISTANGAN		
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna	-41																							
		Program pencahayaan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kuras penyakit ternak yang ditangani	57,14	1.605,24	396,00	609,24	150,00	150,00	150,00	150,00	330,00	177,01	132,94	659,15	74,33	83,33	29,05	88,62	439,43	49,55		1.373,42	85,56	DISTANGAN		
		Program pemberdayaan penyuluhan peternakan	Persentase penyuluhan peternakan yang dibina/diberdayakan	100	2.848,49	207,50	1.440,99	300,00	300,00	300,00	300,00	198,68	351,17	162,88	196,96	173,80	95,75	24,37	54,29	65,65	57,93		1.083,48	38,04	DISTANGAN		
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Tersedia RPH dan Pasar Temek	-	1.400,00	-	150,00	300,00	400,00	400,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTANGAN	
		Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah kermita produksi dan pemasaran hasil peternakan dengan investor	-	400,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	210,27	39,89	-	-	210,27	39,89	-	250,16	62,54	DISTANGAN		
																										40,33	
																										SR	
11	Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah	Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Agropolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi agropolitan	-	2.100,00	-	600,00	1.500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTANGAN	
		Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Minapolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi minapolitan	0	2.100,00	-	600,00	1.500,00	0,00	-	-	132,07	-	-	-	-	-	-	8,80	-	-	-	132,07	6,29	DKP		
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial agropolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri agropolitan	-	20.000,00	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTANGAN	
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial minapolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri minapolitan	0	20.000,00	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP	
		Program optimalisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah Unit dan KM pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	400,00	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	8,55	-	-	-	-	4,28	-	8,55	2,14	DKUKMP		
		Program optimalisasi pengolahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1.000,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKUKMP	
		Program Pengeluaran Daya Saring dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Penghasil	43,60 Kg/Tahun	10.930,24	-	2.130,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	96,42	38,82	42,52	-	-	4,53	1,76	1,93	-	-	177,76	1,63	DKP		
																										1,44	
12	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah kebijakan tata ruang yang ditetapkan	N/A	10.802,00	602,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	511,86	807,90	360,95	262,88	251,97	85,03	36,72	16,04	13,14	12,66	2.195,46	20,32	DPUPR			
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah badan usaha yang menggunakan lahan usaha nya sesuai RTRW/K	N/A	2.000,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	171,63	156,76	112,15	-	-	34,33	31,35	22,43	-	-	440,54	22,03	DPUPR		
		Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima izin usaha terdiri dari jenjang izin terdiri	rata-rata 14 hari	2.372,00	197,00	375,00	450,00	450,00	450,00	450,00	195,07	333,45	157,30	145,86	106,75	99,02	88,92	34,96	32,41	23,72	938,42	39,56	DPMPPTSP NAKERTRANS			
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama dengan investor	N/A	4.221,03	681,26	729,77	700,00	700,00	700,00	673,76	682,95	713,95	692,66	10,21	97,47	93,58	101,99	98,95	1,46	2.773,52	65,71	DPMPPTSP NAKERTRANS				
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	Jumlah klaster bisnis yang dikembangkan	1	550,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	3,08	4,63	8,51	-	-	3,08	4,63	8,51	-	-	16,21	2,95	OKUKMP		
		Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investasi terkait perizinan	724 Miliar	1.020,00	100,00	120,00	200,00	200,00	200,00	97,85	81,49	113,78	26,23	8,30	97,85	67,91	56,89	13,11	4,15	327,64	32,12	DPMPPTSP NAKERTRANS				
		Program Pembinaan dan pengembangan bidang keteragamaan	Tersedianya data sumberdaya listrik	1 Jenis	30,00	30,00	-	-	-	-	-	15,25	-	-	-	-	50,82	-	-	-	-	15,25	50,82	DESDM			
		Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terinventarisasinya hasil produk pertambangan	100%	29,54	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DESDM		
13	Peningkatan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri	Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang mendapat perlunyan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan	0,68	1.466,00	206,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	11,98	-	-	-	-	3,99	-	-	11,98	0,82	OKUKMP		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki akses terhadap pendamping dan inkubator bisnis, bagi industri kecil dan menengah	0,59%	1.050,00	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	-	-	153,47	141,19	217,35	-	-	76,74	70,60	108,68	-	-	512,01	48,76	OKUKMP		
		Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapat perlunyan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan	1,48%	1.260,00	-	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	299,14	485,65	44,35	-	-	99,71	161,88	14,76	82,13	65,80	OKUKMP				
		Program Pengembangan permodalan Usaha Bagi koperasi dan usaha mikro	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang memperoleh fasilitas kredit	0,68	1.050,00	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	-	0,40	17,47	-	-	-	0,20	8,73	-	-	17,87	1,70	OKUKMP				
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	n/a	5.596,00	591,00	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	402,72	685,52	508,69	431,41	182,74	68,14	68,21	50,87	43,14	18,27	2.211,08	39,51	DPMPPTSP NAKERTRANS				
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Lembaga Keuangan yang menyediakan pembiayaan UMK dan Koperasi	n/a	26,79	26,79	-	-	-	-	25,90	-	-	-	-	96,69	-	-	-	-	25,90	96,69	OKUKMP				
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	n/a	1.088,63	144,30	144,33	200,00	200,00	200,00	111,43	102,36	24,30	33,62	10,52	77,22	70,92	12,15	16,81	5,26	282,23	25,93	DPMPPTSP NAKERTRANS				
		Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMK yang produktif	60	2.766,05	273,30	492,75	500,00	500,00	500,00	219,97	365,05	2,90	210,55	193,26	80,49	74,08	0,58	42,11	38,65	991,72	35,85	OKUKMP				
14	Peningkatan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	88,46%	5.232,75	457,75	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	424,80	682,85	492,85	611,59	673,41	92,80	88,11	49,29	61,16	67,34	2.885,50	55,14	OKUKMP				
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki akses terhadap pendamping, dan Inkubator bisnis bagi usaha mikro	9%	1.050,00	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00	-	-	54,18	14,09	247,98	-	-	27,09	7,05	123,99	316,26	30,12	OKUKMP				
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jenis industri kecil yang dibina	- jenis	1.298,00	493,00	805,00	-	-	-	394,60	455,31	-	-	-	80,04	56,56	-	-	-	849,91	65,48	OKUKMP				
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Sentra industri potensial yang berkembang	-	-	71,70	71,70	-	-	-	56,00	-	-	-	-	78,10	-	-	-	-	56,00	78,10	DKUKMP				
																										45,33	
																										SR	

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMWD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMWD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMWD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-%						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR %	PD PENANGGUNG JAWAB
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)		
13	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri Kecil dan menengah yang berdaya saing	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pelatihan kewirausahaan Umi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	3.31	1.066,00	206,00	60,00	200,00	200,00	200,00	-	-	53,84	50,24	61,76	-	-	26,92	25,12	30,88	-	165,84	15,56	OKUKMP		
		Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang memiliki kerjasama dalam jaringan pemasaran produk usaha	14 IKM	284,95	34,95	50,00	50,00	50,00	50,00	34,31	-	9,25	73,12	41,99	98,18	-	18,49	146,25	83,98	-	158,67	55,68	OKUKMP		
		Program Pengembangan sarana dan prasarana UMI	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh sarana/prasarana usaha	17	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	110,30	-	-	-	-	-	110,30	-	-	-	110,30	18,38	OKUKMP	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penerapan teknologi terhadap peningkatan produksi usaha IKM	15 jenis (untuk kerajinan rotan & resin)	889,99	39,99	50,00	200,00	200,00	200,00	39,30	26,04	29,60	55,85	43,48	98,28	52,08	14,80	27,92	21,74	-	194,27	21,83	OKUKMP		
		program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan	Kawasan perdagangan kaki lima dan asongan yang terbatas dan terbatas	16,67%	887,38	142,38	145,00	150,00	150,00	150,00	120,78	133,73	133,05	-	-	84,83	92,23	88,70	-	-	-	387,56	43,67	OKUKMP		
		Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil	Jumlah prasarana pemasaran dan promosi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil	6	4.500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	71,48	-	-	-	-	-	14,30	-	-	-	71,48	1,59	OKUKMP	
		Peningkatan nilai perdagangan dalam negeri	Jumlah nilai perdagangan barang/jasa (dalam juta rupiah)	1.087,845	11.642,43	1.759,00	1.883,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.621,97	1.492,03	3.158,08	275,14	23,62	92,21	79,22	157,90	13,76	1,18	6.570,84	56,44	OKUKMP			
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Merenengah	Jumlah wirausaha baru	n/a	412,00	206,00	206,00	-	-	-	-	-	191,86	-	-	-	-	-	93,13	-	-	-	191,86	46,57	OKUKMP	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan produk UKM yang dipromosikan	4 UKM	1.177,26	188,56	188,70	200,00	200,00	200,00	178,45	309,98	65,55	65,08	-	94,64	164,27	32,78	32,54	-	619,05	52,58	OKUKMP			
																				62,36	43,09	58,02	30,70	17,22	34,70	
14	Berkembangnya destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dikelola dan dikemas dengan baik	0	23.001,28	1.135,00	1.866,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.087,49	1.426,49	8.630,48	3.534,14	1.509,20	95,81	76,44	172,61	70,88	30,18	16.187,80	70,38	DISPARBUD		
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah paket wisata yang dipasarkan	-	5.692,00	497,00	3.195,00	500,00	500,00	500,00	484,03	1.848,66	666,83	783,32	647,41	97,39	57,86	133,37	156,66	129,48	4.430,25	77,83	DISPARBUD			
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan Pemerintah daerah terkait pengembangan dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	-	2.479,68	49,00	430,68	500,00	500,00	500,00	42,69	150,40	69,64	173,23	8,70	87,13	34,92	13,93	34,65	1,74	444,67	17,93	DISPARBUD			
15	Terjaga kelestarian warisan budaya sebagai aset wilayah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	21	10.063,39	1.160,00	1.703,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	801,29	1.152,24	1.256,27	998,37	340,41	69,08	67,64	69,79	55,47	18,91	4.548,58	45,20	DISPARBUD			
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	8.044,36	1.052,59	1.391,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	863,51	1.020,45	851,49	350,88	-	82,04	73,32	60,82	25,06	-	3.086,33	38,37	DISPARBUD			
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	2	3.753,22	282,69	670,53	700,00	700,00	700,00	217,03	160,88	392,45	257,24	101,90	76,77	23,99	56,06	36,75	14,56	1.129,50	30,09	DISPARBUD			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kebijakan tentang budaya lokal daerah yang ditetapkan	2	1.600,00	-	-	400,00	400,00	400,00	-	-	194,33	186,50	184,42	-	-	48,58	46,63	46,10	-	565,24	35,33	DISPARBUD		
																				85,95	54,99	58,81	40,88	19,89	37,25	
16	Meningkatnya kesiabilitas daerah	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya prasarana perhubungan	20,75	14.005,97	2.339,00	2.270,00	3.595,00	2.286,97	1.280,00	2.235,00	2.050,83	740,79	941,40	4.290,07	2.385,50	87,68	32,63	26,19	187,59	186,40	10.408,99	74,32	DISPERKIMHUB		
		Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	989,01 KM dan 1036 M	359.270,77	105.180,77	43.640,00	47.250,00	50.850,00	54.450,00	57.900,00	65.708,11	50.348,97	39.161,53	68.508,01	23.244,77	62,47	115,37	82,88	134,73	42,68	246.971,40	68,74	DPUPR		
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan struktur dan kondisi jalan dan jembatan	65,04 KM dan 83,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dengan kondisi baik	72,26	488.852,98	53.467,00	85.385,98	65.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	50.754,02	1.235,26	35.270,11	3.171,21	26.010,12	94,93	1,45	54,26	3,73	26,01	116.440,73	23,82	DPUPR		
		Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase temuan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan yang dilindungi/hujung	N/A	1.600,00	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	39,20	50,00	135,27	-	-	9,80	12,50	33,82	224,47	14,03	DPUPR		
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	N/A	106.631,50	29.739,00	16.892,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.590,07	9.888,85	2.530,36	3.452,12	791,78	75,96	58,55	16,87	23,01	5,28	39.254,17	36,81	DISPERKIMHUB			
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kasus kecelakaan	48 kasus	11.523,67	800,00	1.731,90	2.965,00	1.600,00	2.470,00	1.956,77	780,31	9,94	493,58	1.472,65	1.307,50	97,54	0,57	16,65	92,04	52,94	4.063,99	94,44	DISPERKIMHUB		
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah kabupaten yang telah tersedia jaringan jalan	33,33	4.651,00	511,00	2.970,00	570,00	300,00	200,00	100,00	448,30	451,78	140,35	-	-	87,73	15,21	24,62	-	-	1.040,43	22,37	DISPERKIMHUB		
		Program Pembatasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berkembangnya Kawasan Strategis Kabupaten	-	5.890,00	890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	264,42	19,67	273,12	-	-	26,44	1,97	27,31	-	-	557,21	9,46	DPUPR	
		Program Pemeliharaan jalan dalam kabupaten yang terpelihara	Cakupan jalan dalam kabupaten yang terpelihara	N/A	2.000,00	2.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,36	-	-	-	-	99,12	-	-	-	-	1.982,36	99,12	DPUPR		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebanaran	Terfasilitasinya kegiatan kebinamargaan	-	7.350,00	-	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	336,21	297,57	1.017,40	154,05	-	24,90	19,84	67,83	10,27	-	1.805,22	24,56	DPUPR		
		Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	100%	284,00	149,00	135,00	-	-	-	-	137,37	55,98	-	-	-	92,19	41,46	-	-	-	193,34	68,08	DISPERKIMHUB		
																				77,51	35,18	25,31	54,87	35,74	48,70	
17	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah daerah jaringan irigasi yang dibangun	-	215.220,00	23.076,00	27.600,00	53.856,00	44.460,00	44.598,00	21.630,00	22.010,49	31.702,35	20.180,91	21.230,79	1.601,70	95,38	114,86	37,47	47,75	3,59	96.726,25	44,94	DPUPR		
		Jumlah daerah jaringan irigasi yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Program Pembangunan jalan inspeksi irigasi	Panjang jalan inspeksi irigasi yang dibangun - Km	15.660,00	-	2.030,00	4.640,00	4.060,00	4.930,00	0,00	-	-	449,51	469,77	-	-	-	9,69	11,57	-	-	919,28	5,87	DPUPR		
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah sesuai dengan kewenangannya	-	4.600,00	-	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	581,98	184,65	200,56	154,91	-	97,00	18,46	20,06	15,49	1.122,10	24,39	DPUPR		
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	-	1.460,00	-	260,00	300,00	300,00	300,00	-	228,95	202,89	-	-	-	88,06	67,63	-	-	-	431,83	29,58	DPUPR		
18	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rata-rata Nilai UKG	60,18	20.210,00	11.010,00	1.690,00	1.750,00	1.835,00	1.925,00	2.000,00	6.763,16	1.													

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPOAAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMID PADA RKPD TAHUN KE-						CAPIAAN TARGET RPJMID MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPIAAN TARGET RPJMID HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPIAAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	RASIO CAPIAAN AKHIR (%)	PD PENANGGUNG JAWAB	
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(27)
		Program Peningkatan Kualitas dan Tumbuh Kembang Anak	Kegiatan Pemerintah Daerah yang memiliki dukungan dalam peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	-	218,50	218,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	-	-	-	-	-	99,68					-	217,80	99,68	DPPKBPPP	
		Program Peningkatan kualitas hidup Perempuan	Jumlah desa saying bu	1.062,61	272,00	790,61	-	-	-	-	-	830,00	-	-	-	-	-	-	104,98				-	830,00	78,11	DPPKBPPP	
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	51 kasus	1.230,00	-	230,00	250,00	250,00	250,00	-	194,84	77,95	55,28	-	-	-	84,71	31,18	22,11	-	-	328,06	26,67	DPPKBPPP		
		Penanganan kasus terhadap perlindungan perempuan dan anak	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	-	1.470,00	-	270,00	300,00	300,00	300,00	-	255,13	163,92	172,24	17,85	-	-	-	94,49	54,64	57,41	5,95	609,13	41,44	DPPKBPPP		
																		52,49	40,60	33,80	29,92	3,75	-	-	-	39,41	
																										SR	
21	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sport center yang dibangun	0	64.804,00	468,00	2.836,00	16.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	444,20	185,84	328,70	192,60	200,73	-	94,91	6,55	1,99	0,96	1,34	-	1.352,07	2,09	DIKPORA	
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga yang bermanajemen baik	n/a	600,00	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	34,00	38,78	36,03	-	-	22,67	25,85	24,02	-	108,80	18,13	DIKPORA		
		Program Penyelegaraan olahraga daerah	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	8.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	-	-	487,73	390,94	-	-	-	32,52	26,06	-	-	878,67	10,98	DIKPORA		
		Program Penyelenggaraan Peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	n/a	7.802,35	881,35	1.321,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	832,10	1.263,48	702,93	766,34	42,53	94,41	95,65	50,21	54,74	3,04	-	3.607,39	46,23	DIKPORA			
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah klub olah raga yang aktif	n/a	6.224,13	828,63	1.395,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	706,19	1.749,19	840,62	904,48	601,42	85,22	125,35	84,06	90,45	60,14	4.801,91	77,15	DIKPORA				
																		91,52	58,89	38,29	39,61	17,71	-	-	-	30,92	
																									SR		
22	Tereujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berdaya/bertambah berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapat edukasi dan promosi lingkungan hidup secara efektif dan direspon positif oleh masyarakat	N/A	3.404,30	231,30	423,00	600,00	650,00	700,00	800,00	158,49	226,89	163,33	117,25	117,13	-	68,52	53,59	27,22	18,64	16,73	-	782,89	23,00	DLH	
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan di perkantoran	N/A																							
			Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan kepada anak didik di lingkungan sekolah/harau sekolah	N/A																							
			Jumlah komunitas (CSO) LSM yang ada atau terbentuk dan bergerak aktif	7																							
		Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	352,16	20,00	57,16	60,00	65,00	70,00	80,00	12,86	75,16	2,53	-	143,93	64,28	131,49	4,21	-	205,61	-	234,47	66,58	DLH		
			Persentase SDM aparat yang memahami aturan terkait pengelolaan lingkungan	N/A																							
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL/UPL, Andal (Andal.RKL/RPL)	N/A	11.974,44	1.183,00	1.891,44	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	1.079,05	376,25	115,49	346,72	73,39	91,21	19,89	5,37	15,76	3,26	-	1.990,90	16,63	DLH		
			Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang taat dalam mengelola lingkungan	N/A																							
																		74,67	68,32	12,27	11,27	75,20	-	35,40			
																		S	S	SR	SR	T	-	SR			
23	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan	2	47.092,93	6.063,00	7.529,93	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00	5.895,97	4.408,32	4.694,89	5.402,82	6.007,08	97,25	58,54	58,69	65,49	70,67	-	26.409,08	56,08	DLH		
			Jumlah model pendayagunaan sampah yang ekonomis secara berkelanjutan	1	0,00																						
																		97,25	58,54	58,69	65,49	70,67	-	56,08			
																		S	S	SR	SR	T	-	R			
24	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	75,38%	2.092,18	161,40	360,78	370,00	375,00	400,00	425,00	155,55	326,44	142,31	97,98	4,83	96,37	90,48	38,46	26,13	1,21	-	727,11	34,75	DINKES		
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang mendapatkan sanitasi yang memadai dan akses aman air	-	18.566,00	4.566,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.404,67	695,85	2.407,42	2.990,75	5,19,27	96,47	34,79	60,25	99,69	173,24	-	15.695,95	84,54	DISPERKIMHUB		
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelola ny area pemakaman	-	10.699,74	2.669,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.194,97	-	391,12	207,27	30,17	82,22	-	24,44	12,95	1,89	-	2.823,52	26,46	DISPERKIMHUB			
		Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh	persentase kebutuhan lahan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	1.800,00	-	200,00	400,00	400,00	400,00	-	127,02	565,40	165,47	-	63,51	141,35	41,37	-	-	-	-	-	857,88	47,66	DISPERKIMHUB		
																		91,89	47,20	71,13	45,84	44,08	-	48,35			
																		ST	SR	ST	ST	SR	-	SR			
25	Terkendali bencana banjir	Program pengendalian banjir	data identifikasi, monitoring dan evaluasi rawan banjir/genangan, parang sungai yang menyebabkan rawan banjir yang dinormalisasi	-	101.494,00	7.499,00	18.245,00	18.500,00	18.750,00	19.000,00	19.500,00	6.442,19	7.839,37	2.766,73	13.692,78	815,14	85,91	42,97	14,96	73,03	4,29	-	31.556,21	31,09	DPUPR		
			Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/panjang sungai yang rawan banjir	-																							
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	N/A	3.150,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-	147,67	-	2.393,49	4.280,71	-	98,44	-	398,91	713,45	-	-	6.821,86	216,57	DPUPR			
		Pembangunan turap/talus/ brojong	Terkendali dampak kerusakan pantai	N/A	7.755,00	200,00	1.555,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	182,18	-	188,50	901,65	139,05	91,09	-	12,57	60,11	9,27	-	1.411,38	18,20	DPUPR			
																		91,81	14,32	142,15	282,20	4,52	-	88,62			
																		ST	SR	ST	ST	SR	-	T			
26	Terwujudnya pemulih lahan kritis	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah lembaga yang terbentuk untuk melakukan pemulih lahan kritis (Di luar kawasan hutan dan di luar izin usaha perusahaan)	0	6.250,00	-	-	1.000,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	-	-	114,88	142,63	-	-	-	11,49	9,51	-	-	257,51	4,12	DLH		
			Persentase luas lahan kritis (Di luar kawasan hutan dan di luar izin usaha perusahaan) yang dilakukan pemulih	N/A																							
																		11,49	9,51	-	-	4,12					
27	Terwujudnya konserves sumber air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah ketelaianan konserves sumber air	0	6.393,40	537,68	1.105,80	1.200,00	1.000,00	1.250,00	1.300,00	444,33	136,61	78,18	195,29	10,11	82,65	12,35	6,52	19,53	0,81	-	864,53	13,52	DLH		
			Persentase sumber air yang terjalin kelestariannya	N/A																							
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlindungnya kawasan hutan	100%	49,39	49,39	-	-	-	-	-	47,75	-	-	-	-	96,68					-	47,75	96,68	DLH		
		Program Perencanaan dan Pengembangan Tahuha	Terlaksanya perencanaan dan pengembangan hutan	-	1.500,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	51,41	202,69	259,18	-	-	17,14	67,56	85,39	-	-	513,29	34,22	DLH			
		Program Perencanaan dan Pengembangan																									

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)						CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN AKHIR (%)	RASIO CAPAIAN (%)	PD PENANGGUNG JAWAB			
					TARGET RPJMD PADA RKPD TAHUN KE-						CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-						TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KE-(%)											
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1	2	3	4	5	6						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	S	SR	SR	R	SR	R	R	(27)				
28	Menjaga dan meningkatkan perzinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Percentase pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang bermasalah	N/A	3.850,00	-	-	2.500,00	400,00	450,00	500,00	-	9,40	20,51	131,60	-	-	0,38	5,13	29,24		161,51	4,19	DPUPR				
																									4,19			
29	Meningkatnya lusan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Percentase ruang terbuka hijau yang dikelola/dikembangkan	0,50%	7.938,00	1.076,00	1.062,00	1.250,00	1.300,00	1.500,00	1.750,00	886,12	554,96	325,60	8,40	7,68	82,35	52,26	26,04	0,65	0,51		1.782,65	22,46	DLH			
																									22,46			
																									43,25			
																									SR			

Tabel 2.74 Pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,98%	3,05%	2,67%	2,70%	SST	BPS
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100%	100%	100%	100%	TTC	DINSOSPEMDES & DINKES
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	73,97%	72,97%	73,90%	76,55%	TTC	DPMPPTSPNAKERTRANS
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	19,16%	23,48%	39,85%	42,89%	SST	DINSOSPEMDES
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3240	3147	3152	3239	SBT	DINSOSPEMDES
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	87,93%	91,71%	95,48%	96,47%	SST	DINKES
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	-	67,90%	88,03%	50,09%	SBT	DINKES
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	77,63%	79,76%	80,64%	79,18%	SST	DP2KBP3A
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	88,82%	90,84%	90,40%	91,78%	SBT	DISPERKIMHUB
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	82,68%	86,94%	93,79%	94,61%	SBT	DISPERKIMHUB
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	43,47%	67,88%	74,17%	79,14%	SBT	DIKPORA
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	85,26%	86,19%	82,38%	82,67%	SST	DIKPORA
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	83,57%	86,90%	91,86%	93,50%	SST	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	97%	95%	96%	97%	SBT	DP2KBP3A
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3831	1524	128	176	SBT	SATPOLPPPB
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0	0	0	TBC	SATPOLPPPB
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	0	0	0	0	TAD	DINSOSPEMDES

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	25 jiwa	17 jiwa	23 jiwa	13 jiwa	SBT	DINSOSPEMDES
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	0	0	TBC	SATPOLPPPB
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	0	0	0	0	TTC	SATPOLPPPB
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 48.965.880.000	Rp 5.600.000.000	0	0	TTC	SATPOLPPPB
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	TBC	SATPOLPPPB
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	5,95%	5,23%	3,31%	8,61%	SST	BP4D
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 19,57%, Pendidikan : 20,49%, Sosial : 0,88%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 14,97%, Pendidikan : 23,49%, Sosial : 0,62%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 13,20%, Pendidikan : 25,30% Sosial : 0,64%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 18,48%, Pendidikan : 25,61% Sosial : 0,05%	SST	BP4D
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10,48	10,47	8,47	NA	SST	DISTANGAN
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	15.3	22.94	15.12	12.26	SST	DINKES
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	NA	NA	NA	NA	TAD	DISTANGAN
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	6,6% angka provinsi, angka utk tk. Angka kabupaten tidak tersedia	8,23% angka provinsi, angka utk tk. Angka kabupaten tidak tersedia	6,22% angka provinsi, angka tk. Kabupaten tidak tersedia	NA	TTC	BPS
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	25	33.3	16.96	12.38	TTC	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	22	25.54	13.34	9.7	TTC	DINKES

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	11.2	9.44	5.69	3.56	SST	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	7.3	6.2	9.54	6.21	SST	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	51.00%	46.80%	45.53%	49.64%	TBC	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH : 87,5 Tingkat Konsumsi Ikan : 79,28 kg/kap/hr	Skor PPH : 87,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 91,76 kg/kap/hr	Skor PPH : 82,2 Tingkat Konsumsi Ikan : 32,01 kg/kap/hr	Skor PPH : 85,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 39,06 kg/kap/hr	SBT	DISTANGAN
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	59.894.430,19 RUPIAH	60.444.035,43 RUPIAH	63192367,98 RUPIAH	NA	SST	BPS
		angka provinsi, angka utk tk. Kabupaten tidak tersedia	angka provinsi, angka utk tk. Kabupaten tidak tersedia	angka provinsi, angka utk tk. kabupaten tidak tersedia			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	104.33%	185.23%	136.95%	56.71%	TTC	DINKES
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	87.93%	91.87%	95.54%	96.61%	SST	DINKES
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	87,93	91,87	95,54	96,61	SST	DINKES
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	8.35	6.62	6.57	8.54	TBC	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4.96	3.7	5.48	3.97	TTC	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6.52	4.76	6.3	7.37	TTC	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.61	0.497	0.55	0.478	SST	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	81.65	85.65	101.97	74.07	SST	DINKES
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,8	0,75	0,7	0,65	SBT	DINKES
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	TKD	DINKES
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	29 DAN 3	29 DAN 3	22 DAN 3	22 DAN 5	SBT	DINKES
3.3.5.(a)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	6	6	6	6	SST	DINKES
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	6	6	6	6	SST	DINKES
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5,91%	6,06%	6,23%	6,15%	TBC	DINKES
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	15.38%	29.30%	27.23%	27.33%	SBT	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	9.90%	13.30%	14.97%	16%	SBT	DINKES
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	2 KASUS	2 KASUS	3 KASUS	1 KASUS	TTC	POLRES
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	6	6	6	6	SST	DINKES
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	SST	POLRES
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA	NA	NA	NA	TAD	SATPOLPPPB
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	14,89%	16,58%	17,80%	18,27	SBT	DP2KBP3A
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	77,63%	79,76%	80,64%	79,18%	SST	DP2KBP3A
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	14,89	16,58	17,8	18,27	TBC	DP2KBP3A
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	NA	69	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	NA	2,45	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0%	0	0	0	SST	DINKES
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	434.69	678.77	741.67	794.15	TTC	DINKES
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	43,47%	67,88%	74,17%	79,42%	TBC	DINSOSPEMDES & DINKES
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	TTC	DINKES
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	50,20%	37,20%	41,43%	45,11%	TBC	DINKES

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	100%	100%	100%	SST	DINKES
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	440,80	473,98	463,43	472,42	SST	DINKES
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	100%	100%	100%	TTC	DIKPORA
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	90,20%	80,13%	87,76%	88,48%	SST	DIKPORA
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	80,43%	82,60%	84,78%	84,78%	SST	DIKPORA
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	108,78%	108,86%	103,74%	103,94%	SBT	DIKPORA
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	94,49%	95,84%	91,38%	91,43%	SBT	DIKPORA
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,06	7,18	7,21	7,22	SBT	DIKPORA
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	61,69%	62,17%	79,16%	79,97%	SST	DIKPORA
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	29,50%	34,18%	35,81%	47,07%	SST	DISKOMINFO
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD:86,73% SMP:90,33%	SD:87,69% SMP:89,93%	SD:89,77% SMP:90,15%	SD:90,79% SMP:90,42%	SST	DIKPORA
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	97,77%	98,02%	99,81%	NA	TTC	DIKPORA
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	97,78%	96,94%	97,79%	NA	TTC	DIKPORA
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	64,86%	67,03%	69,19%	70,27%	TTC	DIKPORA
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	37,78%	35,23%	37,51%	39,71%	TTC	DIKPORA
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1	1	1	2	TBC	DP2KBP3A

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,003	0,003	0,006	0,015	SBT	DP2KBP3A
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,05%	0,03%	0,09%	0,11%	SBT	DP2KBP3A
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,012	0 kasus	0,007	0,016	SBT	DP2KBP3A
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100% 11 Kasus	100% 9 kasus	100% 10 kasus	100% 20 kasus	SST	DP2KBP3A
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	NA	NA	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	21	21	21	TTC	DP2KBP3A
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	NA	69	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	8%	8%	16%	16%	TBC	SETWAN
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	6,90%	6,90%	6,90%	6,67%	TBC	BKPSDM
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	NA	NA	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	11,59%	10,34%	10,04%	8,65%	SST	DP2KBP3A
5.6.1.*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	NA	NA	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	59,93%	64,03%	64,81%	65,12%	TTC	DISKOMINFO
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	88,82%	90,84%	90,40%	91,78%	SBT	DISPERKIMHUB
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	67,5 Liter/det	67,5 Liter/det	67,5 Liter/det	67,5 Liter/det	TKD	DISPERKIMHUB

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	11,71%	12,85%	15,35%	NA	SBT	DISPERKIMHUB
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	NA	NA	NA	86.99	TAD	DINKES
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	88.82%	91.12%	93.71%	95.10%	SBT	DINKES
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	64	64	64	64	SST	DINKES
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	13	15	19	21	SST	DINKES
6.2.1.(e)	Jumlah wilayah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1,31%	1,78%	2,05%	2,04%	SBT	DISPERKIMHUB
6.3.1.(a)	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	0	0	0	0	TBC	DISPERKIMHUB
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	NA	NA	NA	TAD	DISPERKIMHUB
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	NA	NA	NA	NA	TKD	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	40,00%	20,00%	20,00%	100%	SST	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	TTC	DISPERKIMHUB
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DPUPR
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DPUPR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	17	17	17	17	TTC	DPUPR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	0	0	1 kegiatan	SST	DPUPR
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	ESDM

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	ESDM
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	3,16	3,06	50,5	NA	SST	BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	65.565 RIBU RUPIAH	66.134 RIBU RUPIAH	66.466 RIBU RUPIAH	NA	SST	BPS
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-5,43%	6,68%	0,17%	NA	TBC	BPS
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	59,20%	63,40%	68,40%	65,50%	TBC	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	56,06%	48,70%	43,20%	50,70%	SBT	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	40,80%	36,60%	31,60%	34,50%	TTC	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	12.69%	13.82%	15.34%	50.10%	SST	DKUKMP
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	15.000,00	16.000,00	16.500	17.000,00	TTC	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,90%	4,20%	3,10%	2,85%	TTC	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	NA	NA	NA	NA	TAD	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	NA	NA	18,70%	TAD	DPMPPPTSPNAKERTRANS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	1,17%	1,20%	1,26%	1%	SBT	DISPARBUD
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	268	509	184	183	SBT	DISPARBUD
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	108,906	223,597	142,28	67,465	SBT	DISPARBUD
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPARBUD
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	NA	NA	NA	NA	TAD	DISPARBUD
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	NA	17	21	24	TTC	BPS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	11,09 km	11,09 km	11,09 km	11,09 km	TBC	BPKAD
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	12,34%	27,59%	65,35%	84,34%	TTC	DKUKMP

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	42,19% dan 27,243,429	43,79% dan 28,961,088	44,95% dan 29,878,276	NA	TTC	BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	6,53%	6,86%	11,97%	NA	SST	BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	NA	NA	NA	NA	TAD	BPS
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	6,21%	5,91%	1,88%	1,80%	TBC	DKUKMP
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	NA	NA	NA	NA	TAD	DKUKMP
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	0,01%	0,01%	0,01%	NA	TTC	BPKAD
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	16,23%	19,89%	23,25%	25,54%	TTC	DISKOMINFO
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	59,93%	64,03%	64,81%	65,12%	TTC	DISKOMINFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	39,69%	47,52%	55,92%	57,79%	TTC	DISKOMINFO
10.1.1*	Koefisien Gini.	NA	NA	NA	NA	TAD	BP4D
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,98%	3,05%	2,67%	2,70%	SST	BP4D
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	57	57	60	60	TTC	BP4D
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	3	3	0	0	TTC	BP4D
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	0	0	0	2	TTC	BP4D
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	NA	NA	NA	NA	TAD	BP4D
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	24%	28%	0	0	SST	BP4D
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	NA	NA	NA	NA	TAD	BPS
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	83,07	80,95	84,12	NA	TBC	BPS

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	0 (Tidak ada Kebijakan)	TTC	KESBANGPOL
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	73,97%	72,87%	73,90%	76,55%	TTC	DPMPPPTSPNAKERTRANS
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	86,60%	88,05%	89,39%	91,26%	SST	BP4D
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPERKIMHUB
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DPUPR
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	BPKAD
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISPARBUD
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3831	1524	128	176	SST	SATPOLPPPB
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	180,40 tinggi	180,40 tinggi	180 tinggi	NA	TBC	SATPOLPPPB
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0	0	0	SBT	SATPOLPPPB
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rp 48.965.880.000	Rp 5.600.000.000	0	0	SST	SATPOLPPPB
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	41,12%	40,40%	36,40%	37,72%	SBT	DLH
11.6.1.(b)	Jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	TTC	DLH
11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	99,180 m ²	99,180 m ²	99,180 m ²	99,180 m ²	SBT	DISPERKIMHUB
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	TBC	SATPOLPPPB
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).	80,312 Ton	54,137 Ton	92,668 Ton	34,358 Ton	TBC	DLH
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	5,47 ton/tahun	5,69 ton/tahun	12,78 ton/tahun	9,86 ton/tahun (januari-Juni)	SBT	DLH
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	NA	NA	NA	NA	TAD	DPMPPPTSPNAKERTRANS

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	NA	NA	NA	NA	TAD	DLH
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	NA	81,11%	85,38%	SST	SETDA
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	TBC	SATPOLPPPB
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3831	1524	128	176	SST	SATPOLPPPB
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	13,08%	13,01%	18,78%	18,79%	SST	DLH
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	70	177	127,42	SST	DLH
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0	0	0	TKD	SETDA
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0	2	2	TBC	DLH
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejadian pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	0	TTC	POLRES
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	TTC	POLRES
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	NA	NA	NA	37 kasus	TAD	POLRES
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100%	100%	100%	100%	SST	KESBANGPOL
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	NA	NA	NA	NA	TAD	DP2KBP3A
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,033% dan anak perempuan 0,046%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0% dan anak perempuan 0,034%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0% dan anak perempuan 0,090%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,032% dan anak perempuan 0,112%	SBT	DP2KBP3A
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	NA	0,02%	0,06%	0,07%	SBT	DP2KBP3A
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	NA	NA	NA	NA	TAD	BPS

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	85,16%	91,12%	91,60%	85,69%	SBT	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WDP	WDP	WTP	SST	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	8,63%	4,92%	0,84%	NA	SBT	BP4D
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	76%	82%	97,85%	100%	TTC	DISKOMINFO
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	60,65%	74,87%	45,24%	NA	SST	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	60,65%	74,87%	38,08%	NA	SBT	INSPEKTORAT
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8%	8%	16%	16%	TBC	SETWAN
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	6,90%	6,90%	6,90%	6,67%	TBC	BKPSDM
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	94,25%	96,60%	98,25%	98,85%	SST	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	30,94%	32,73%	39,17%	42,77%	SBT	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	82,01%	85,63%	90,66%	92,35%	SST	DISDUKCAPIL
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	TBC	DISKOMINFO
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	0	TTC	KESBANGPOL
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	0,59%	0,51%	0,48%	0,45%	SBT	BP2RD

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian				Status Ketercapaian	Sumber Data
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0,13%	0,20%	0,15%	0,15%	SBT	BP2RD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	8,91%	7,75%	6,93%	5,17%	TBC	BPKAD
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	6,67%	9,38%	12,50%	18,18%	TBC	DISKOMINFO
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	16,23%	18,89%	23,25%	25,54%	TBC	DISKOMINFO
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	39,69%	47,52%	55,92%	57,79%	TTC	DISKOMINFO
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKD	DISKOMINFO
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	TBC	SETDA
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	TBC	SETDA
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	90%	100%	100%	92,68%	TBC	BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	90%	86,67%	77,42%	90%	TTC	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	7	7	8	10	SST	BPS
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	90%	92,27%	91,36%	82,72%	TBC	BP4D
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	SST	DISDUKCAPIL
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	30%	35%	44,79%	44,93%	TTC	DISKOMINFO
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	90%	100%	100%	91,17%	TBC	BPS



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain. Namun, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal setempat di tengah derasnya arus globalisasi.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran serta dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambaran melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.



Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

a. Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, pelaksanaan perdagangan antar negara (ekspor dan impor) dan lainnya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia dengan munculnya pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Kebijakan pencegahan yang diambil guna mengurangi penyebaran Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *Lockdown* di beberapa negara juga sangat mempengaruhi kebijakan ekspor produk dari Indonesia yang juga sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuarter IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2020.



Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi *Upper Middle Income Country* pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen.

Deselerasi pertumbuhan ekonomi dipastikan terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan dipastikan terkena dampak langsung akibat pandemi Covid-19 ini. Penurunan kinerja sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan berdampak pada penurunan kinerja sektor perdagangan akibat penurunan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata juga merupakan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkena dampak cukup besarnya melalui kebijakan penutupan tempat wisata dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan diwajibkannya masyarakat untuk melakukan *social distancing*. Penurunan ekspor beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti logam timah, karet, serta lada juga turut memperburuk kondisi perekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2020 dengan adanya krisis pandemi Covid-19 ini terkontraksi sebesar -2,62 persen.

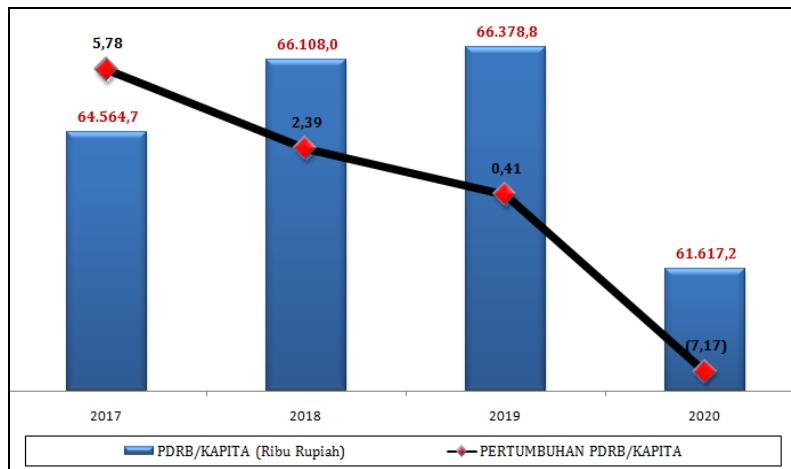
Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, yang pertumbuhan ekonominya negatif (resesi) sebesar 5,43 persen. hal tersebut terjadi karena sektor utama penggerak ekonomi di Kabupaten Bangka Barat adalah sektor industri pengolahan yaitu logam timah serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan khususnya sub sektor perkebunan tahunan sebagai bahan baku pada sektor industri pengolahan yang memiliki dampak sangat besar pengaruh oleh lingkungan eksternal akibat pandemi Covid-19 ini.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 hanya mampu mencapai 10,306 triliun rupiah, turun dibandingkan tahun 2019 yang mempu mencapai 10,897 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -5,43 persen, dimana capaian pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 ini merupakan yang terburuk semenjak Kabupaten Bangka Barat terbentuk. Hal ini menandakan masih tingginya ketergantungan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat terhadap Industri Pengolahan khususnya Logam Dasar.



b. PDRB perkapita

Untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran penduduk serta tingkat pembangunan di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita. Senada dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang tumbuh sebesar negatif 5,43 persen, PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 juga tumbuh sebesar negatif 7,17 persen.



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat, 2021 (diolah)

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

Sebelum tahun 2020, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat (ADHB) selalu mengalami peningkatan (2015 – 2019) dimana pada tahun 2015 Nilai PDRB per kapita sebesar 58,36 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 66,37 juta rupiah, walaupun jika dilihat dari tingkat laju pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Namun nominal terhadap PDRB perkapita di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif seperti terlihat pada gambar 3.1 diatas.

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional

Berkaca dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19, Produk Domestik Bruto Indonesia diharapkan akan kembali tumbuh di Tahun 2021 dan di Tahun 2022. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, khususnya penanganan pandemi Covid-19 yaitu rencana pelaksanaan vaksinasi ke seluruh masyarakat secara bertahap yang diharapkan mampu mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sedia kala serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang turut membaik.



Pulihnya perekonomian Indonesia beriring dengan kenaikan ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga yang sampai saat ini masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan stimulus belanja sosial yang digulirkan oleh pemerintah lewat program jaring pengaman sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Di dua tahun kedepan (tahun 2021 dan 2022), Pemerintah masih akan memfokuskan belanja yang berkaitan secara langsung dengan pemulihan ekonomi. Diharapkan pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 dapat melakukan *recovery* perekonomian yang terpuruk di Tahun 2020 sehingga pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022 mampu kembali normal, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil serta konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investor di sektor swasta. PDB rill diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada Tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta, serta PDB rill diproyeksikan tumbuh 6,0 persen pada Tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

Namun perlu dicermati pula, mengingat adanya kebutuhan pengeluaran dan pada saat yang sama pemerintah harus melandaikan ‘kurva utang’, kebijakan stimulus fiskal perlu secara bertahap dikurangi seiring dengan perlunya peningkatan penerimaan. Data Kementerian Keuangan terkait kebijakan *countercyclical*, Defisit APBN Tahun 2020 pada kisaran 6,34 persen PDB, dan Defisit APBN Tahun 2021 pada kisaran 5,70 persen PDB. Jika tidak terdapat reformasi dalam kebijakan peningkatan penerimaan, pada akhirnya biaya utang akan berdampak pada belanja prioritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021 dengan mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Penanganan Covid-19 perlu difokuskan pada upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui kerja sama antara berbagai pihak yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, meningkatkan jumlah testing dan tracing di seluruh daerah sehingga menurunkan positivity rate dan menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan.“Pemulihan ekonomi perlu difokuskan untuk melakukan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi, melakukan reformasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem kebencanaan, serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata selagi mendorong investasi padat karya.



Dilanjutkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 merupakan tahun kunci terkait pemulihan ekonomi Indonesia yang harus lebih cepat, khususnya dari investasi, eksport, serta industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi. Strategi penerapan Reformasi Struktural diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan gambaran kebutuhan investasi di tahun 2022 sebesar 5.891,4 - 5.931,8 Triliun Rupiah baik berasal dari Investasi Pemerintah, Investasi BUMD, serta Investasi Swasta.

Dalam penerapan tema pembangunan nasional di Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, ditetapkanlah 7 (tujuh) prioritas nasional antara lain :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta
- g. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Tahun 2021 dan 2022

Gambaran secara umum dalam melihat kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 dan 2022 akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkapinya. Dengan melihat perkembangan yang terjadi pada Tahun 2020 khususnya terkait permasalahan keterpurukan ekonomi dampak dari situasi pandemi Covid-19, menjadi suatu gambaran dalam menentukan dan menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam pemulihan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkaca pada data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa tahun terakhir yang trendnya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi (4,47 persen di Tahun 2017, 4,46 persen di Tahun 2018, dan 3,32 persen di Tahun 2019), serta melihat kondisi perekonomian dalam pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2020 hanya mampu tumbuh sebesar negatif -2,62 persen.



Dengan mempertimbangkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, khususnya terkait strategi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu tumbuh di angka 1,25 persen di Tahun 2021 dan 4,5 persen di Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2021 memfokuskan perencanaan pembangunan pada percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar dan dilanjutkan di Tahun 2022 dengan kembali memfokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat menuju sumber daya manusia yang unggul. Aspek ekonomi yang fokus dilaksanakan untuk percepatan pemulihan ekonomi adalah pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata serta pembangunan ekonomi masyarakat.

Prioritas pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat yang merupakan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Terkait target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Tahun 2021 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 5,50 persen dan di Tahun 2022 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 5,00 persen. Terkait target angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Tahun 2021 diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen yaitu menjadi 5,50 persen dan di Tahun 2022 ditargetkan mengalami penurunan sebesar 0,10 persen menjadi 5,40 persen.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tahun 2021 dan 2022

Terkait target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 di awal perencanaan (sebelum terjadinya pandemi Covid-19), ditargetkan mampu tumbuh sebesar 4,98 persen. Namun melihat kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Barat pasca pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh secara negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif besaran 5,43 persen. Kontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 didapat dari kontraksinya lapangan usaha industri pengolahan yang selama ini menopang perekonomian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 40 persen dan kontraksi pada jenis lapangan usaha lainnya yang berdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 ini.

Terkait dengan kebijakan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 serta perencanaan di Tahun 2021, khususnya terkait penanganan pemulihan ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat diharapkan pada tahun 2021



mampu tumbuh sebesar 7,40 – 9,36 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) sebesar 11.086.595,7 – 11.270.631,5 ribu rupiah serta proyeksi ekonomi di tahun 2022 tumbuh dengan rentang antara 8,90–12,33 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) antara 12.053.913,3 – 12.433.700,1 ribu rupiah. Namun untuk target ekonomi ini, sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi makro secara global dan juga kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini, khusus terkait kebijakan ekspor produk logam timah yang menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Bangka Barat.

Gambaran ekonomi Kabupaten Bangka Barat diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 mendatang, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi daerah terhadap kebijakan nasional, sedangkan pada lingkungan internal bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menjadi pemantik jalannya pembangunan baik melalui kebijakan tingkat daerah yang dikeluarkan serta melalui kelengkapan sarana prasarana pendukung perekonomian yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Besar harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Ular dapat berjalan dengan lancar dan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bangka Barat secara khusus. Berikut digambarkan proyeksi nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.



Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - Tahun 2022

KATEGORI	URAIAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI			
		2021 <i>Moderat Scenario</i>	2021 <i>Optimis Scenario</i>	2022 <i>Moderat Scenario</i>	2022 <i>Optimis Scenario</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.406.446,7	1.432.118,7	1.462.476,2	1.508.554,9
B	Pertambangan dan Penggalian	1.123.438,0	1.143.944,2	1.144.377,2	1.180.433,5
C	Industri Pengolahan	5.380.457,4	5.478.667,3	6.095.715,0	6.287.774,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.134,0	5.227,7	5.350,9	5.519,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	716,2	729,2	739,1	762,4
F	Konstruksi	612.237,4	623.412,6	671.272,9	692.422,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.282.641,7	1.306.053,9	1.373.895,4	1.417.183,2
H	Transportasi dan Pergudangan	95.120,3	96.856,5	95.620,4	98.633,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.543,9	119.689,4	123.680,2	127.577,0
J	Informasi dan Komunikasi	42.594,4	43.371,8	43.499,0	44.869,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	47.159,9	48.020,7	48.057,2	49.571,4
L	Real Estate	202.521,9	206.218,5	221.062,4	228.027,5
M,N	Jasa Perusahaan	14.387,2	14.649,8	14.412,2	14.866,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	443.610,3	451.707,6	452.692,8	466.956,0
P	Jasa Pendidikan	178.315,9	181.570,7	182.479,8	188.229,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83.903,6	85.435,1	85.691,9	88.391,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	32.367,0	32.957,8	32.890,7	33.927,0
PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT		11.068.595,7	11.270.631,5	12.053.913,3	12.433.700,1

Sumber : Bappelitbangda, 2021 (diolah)



Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2022 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:

- Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta berupaya meningkatkan laju investasi daerah;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib yang bersifat dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta belanja infrastruktur untuk penunjang perekonomian;
- Pengalokasian belanja terkait penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dan daerah dengan tujuan peningkatan indeks pembangunan manusia; serta
- Mendorong peningkatan secara signifikan kontribusi sektor tersier pada PDRB Kabupaten Bangka Barat.

Melalui sinergisitas pembangunan, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta dengan pihak swasta sebagai pelaku pembangunan diharapkan mampu memulihkan perkonomian, khususnya di Kabupaten Bangka Barat dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pijakan awal pelaksanaan agenda RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahap ke IV, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan antara lain transfer dari pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;



- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah; serta
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, dan penerimaan pinjaman daerah. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang dituangkan dalam Rancangan Akhir RKPD pada Tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp784.109.813.286,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua puluh delapan puluh enam rupiah) dengan rincian antara lain :

- a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp74.271.093.286,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Proyeksi Pendapatan Transfer sebesar Rp685.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar rupiah); serta
- c. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp24.838.720.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 diasumsikan mengalami penurunan dibanding proyeksi pendapatan pada tahun 2021, dikarenakan dalam penentuan proyeksi pendapatan di tahun 2022, belum memasukkan komponen Dana Transfer Khusus dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan dari pihak provinsi. Pendapatan daerah secara umum masih bergantung pada pendapatan transfer terutama pada pendapatan trasnsfer pemerintah pusat yaitu sebesar 87,36 persen.



Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 s.d. Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	78.486.881.529,45	69.765.373.034,63	67.746.468.419,01	51,908,135,042.09	74,134,746,118.00	74,271,093,286.00
1.1.1	Pajak Daerah	17.582.166.053,89	27.367.198.725,09	21.936.235.354,47	20,587,992,763.8	27,797,500,000.00	26,943,590,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.119.060.973,00	3.833.809.842,00	4.385.901.940,00	5,346,696,788.00	4,815,914,056.00	6,998,444,326.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.480.796.346,17	3.252.700.036,98	3.760.378.244,79	3,994,903,753.00	4,650,000,000.00	5,115,000,000.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.304.858.156,39	35.311.664.430,56	37.663.952.879,75	21,978,541,737. 51	36,871,332,062.00	35,214,058,960.00
1.2	Pendapatan Transfer	756,820,636,996.90	772,422,454,818.35	846,524,840,935.98	733,204,031,479.00	779,407,255,570.00	685,000,000,000.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	710,726,899,715.00	728,730,242,281.00	758,555,538,567.00	680,964,564,108.00	714,639,763,839.00	645,000,000,000.00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	615,426,059,715.00	655,801,168,744.00	702,774,160,567.00	599,326,297,108.00	623,484,839,839.00	555,000,000,000.00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.014.756.162	84.801.981.768	110,783,510,577.00	64,239,176,268.00	65,293,304,000.00	79,000,000,000.00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	438.389.939.000	445.168.706.000	466,440,075,000.00	425,158,892,000.00	419,899,512,000.00	443,000,000,000.00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	130.021.364.553	125.830.480.976	125,550,574,990.00	109,928,228,840.00	138,292,023,839.00	33,000,000,000.00
1.2.1.2	Dana Desa dan DID	95.300.840.000	72.929.073.537	55,781,378,000.00	81,638,267,000.00	91,154,924,000.00	90,000,000,000.00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	46,093,737,281.90	43,692,212,537.35	87,969,302,368.98	52,239,467,371.37	64,767,491,570.00	40,000,000,000.00
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Dari	41.604.177.281,90	33.788.811.537,35	52,419,427,528.98	36,879,667,371.37	54,767,491,570.00	40,000,000,000.00



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya						
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	4.489.560.000	9.903.401.000	35,549,874,840.00	15,359,800,000.00	10,000,000,000.00	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,900,000.00	24,659,942,322.00	-	24,838,720,000.00	24,838,720,000.00	24,838,720,000.00
1.3.1	Hibah	11,900,000.00	24,659,942,322.00	-	19,838,720,000.00	24,838,720,000.00	24,838,720,000.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	835,319,418,526.35	866,847,770,184.98	914,271,309,354.99	804, 950,886,521.46	878,380,721,527.00	784,109,813,286.00



Untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperkirakan akan stabil, baik itu yang bersumber dari PT BPD Sumsel Babel maupun BPR Syariah Babel. Terkait dana BLUD diprediksi tetap, dimana pada Tahun 2021 diasumsikan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan fasilitas BPJS dalam pelayanan kesehatan karena kebijakan terkait urusan kesehatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun perlu dicermati bahwa pendapatan yang ada pada lain-lain PAD yang sah seperti JKN dan BLUD harus dialokasikan dan dituangkan dalam belanja dengan sumber pendanaan tersebut.

Untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, masih dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang terkait dengan keuangan negara dan provinsi. Hal ini disebabkan besaran DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sangat tergantung dari pembagian pusat. Jumlah pendapatan ini merupakan perkiraan yang diharapkan tidak jauh bergeser dari proyeksi.

Daya serap belanja APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 diperkirakan mencapai 90 persen sampai dengan 95 persen, begitu juga dengan pelampauan target pendapatan, diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari prediksi, sehingga asumsi inilah yang dipakai dalam penentuan SiLPA Tahun 2021. Tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Ada beberapa kebijakan yang masih harus ditempuh pada Tahun 2022 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Terus melakukan intensifikasi/ektensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi;
3. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama untuk pendapatan-pendapatan yang mempunyai potensi seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB;
4. Mengoptimalkan penerimaan lain-lain PAD yang sah terutama dari lain-lain PAD yang sah lainnya, namun untuk kedepan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah masuk dalam komponen PAD;
5. Mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah.

Perhitungan target pendapatan daerah dengan asumsi tingkat elastisitas pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,65 artinya



setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dari pajak sebesar 1,65 persen. Untuk PAD lainnya diasumsikan tingkat elastisitasnya 1,33, dimana setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dan retribusi dan PAD lainnya sebesar 1,33 persen.

Target pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

A. PAD meliputi :

- Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp 26.943.590.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh rupiah);
- Retribusi, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp 6.998.444.326,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp 5.115.000.000,00 (lima miliar seratus lima belas juta rupiah);
- Lain-lain PAD yang sah, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp 35.214.058.960,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).

Rincian PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Target PAD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2022

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
HASIL PAJAK DAERAH		
1	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel	100.750.000,00
2	Pajak Restoran	2.200.000.000,00
3	Pajak Hiburan	35.700.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	350.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00
7	Pajak Parkir	7.140.000,00
8	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	5.000.000.000,00
11	Pajak BPHTB	1.500.000.000,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	26.943.590.000,00
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	150.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	300.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	70.000.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	322.000.000,00
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	200.000.000,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	6.120.000,00
9	Retribusi Terminal-Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus	30.600.000,00
10	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	95.524.326,00
11	Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI	6.120.000,00
12	IMB	250.000.000,00
13	Retribusi Izin Trayek	2.040.000,00
14	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.040.000,00
15	Retribusi Izin Tertentu	300.000.000,00
16	Retribusi Tera / Tera Ulang	8.000.000,00
17	Retribusi Izin Menetap Tenaga Kerja Asing	6.000.000,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	6.998.444.326,00
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL :	
1	BPD Sumsel Babel	4.455.000.000,00
2	BPR Syariah Bangka Belitung	660.000.000,00
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.115.000.000,00
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH :	
1	Jasa Giro (pada bank pemerintah/swasta)	1.500.000.000,00
2	Deposito	4.000.000.000,00
3	Pendapatan Denda	200.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.000.000.000,00
5	Penjualan Aset Daerah	200.000.000,00
6	Pendapatan Dana JKN	5.814.058.960,00
7	BLUD	21.500.000.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	35.214.058.960,00
	JUMLAH PAD	74.271.093.286,00



B. Pendapatan Transfer meliputi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi :
 - Dana Perimbangan sebesar Rp555.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar juta rupiah), antara lain :
 - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Bagi Hasil Pajak, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
 - DAU Tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp443.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar rupiah);
 - DAK Tahun 2022, ditargetkan sementara sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang difokuskan sementara untuk DAK non fisik urusan pendidikan;
 - Dana Dana sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - Dana Insentif Daerah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi :
 - Pendapatan Transfer dari dana bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) seiring pula dengan baiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga akan meningkatkan bagi hasil pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :

- Hibah Dana BOS diasumsikan sebesar Rp24.838.720.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan target pendapatan daerah Tahun 2022 adalah Rp784.109.813.286,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).



Upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparatur pendapatan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan koordinasi kegiatan pendapatan secara berkelanjutan;
- c. Memberikan motivasi kepada aparatur dalam pencapaian target pendapatan daerah;
- d. Peningkatan sosialisasi kepada penerima wajib pajak;
- e. Efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.4. Target Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH		
1	Pendapatan Asli Daerah	74.271.093.286,00
1.1	Hasil Pajak Daerah	26.943.590.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.998.444.326,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.115.000.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	35.214.058.960,00
2	Pendapatan Transfer	685.000.000.000,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.000.000.000,00
2.1.1	Dana perimbangan	555.000.000.000,00
2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.000.000.000,00
2.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	25.000.000.000,00
2.1.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	54.000.000.000,00
2.1.1.2	DAU	443.000.000.000,00
2.1.1.3	DAK	33.000.000.000,00
2.1.2	Dana Desa	90.000.000.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.000.000.000,00
2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00
2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.838.720.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	
3.2	Dana Darurat	
3.3	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	24.838.720.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	784.109.813.286,00



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja yang ditempuh pada tahun anggaran 2022 adalah mengimplementasikan RPJPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahap ke IV (masa transisi) mengingat dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2021-2026 belum disusun. Selain dengan mempedomani dokumen RPJPD Tahap ke IV, dalam menyusun arah kebijakan belanja daerah pada RKPD Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, juga :

- a. Mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak; serta
- b. Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

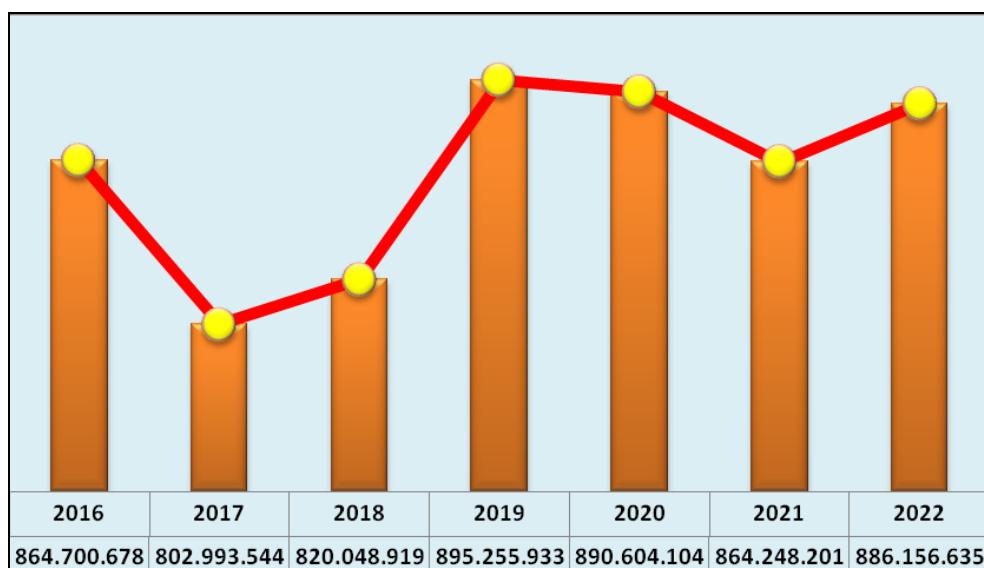
Uraian umum kebijakan belanja yang dituangkan dalam perencanaan Tahun 2022 adalah :

- a. Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai serta kebijakan terkait tunjangan kinerja;
- b. Menyiapkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan;
- d. Memprioritaskan pada belanja untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih khususnya terkait pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
- e. Memprioritaskan pada belanja infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat;
- f. Memprioritaskan alokasi dana hibah, khususnya kepada lembaga lembaga yang secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- g. Mempersiapkan alokasi anggaran khusus untuk usulan yang bersumber dari masyarakat secara langsung (*pendekatan bottom up*) melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan;



- h. Mempersiapkan alokasi anggaran khusus untuk pengadaan barang yang mendukung pelaksanaan kinerja perangkat daerah yang akan dibahas terlebih dahulu berdasarkan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Berikut disajikan data realisasi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 sampai dengan 2020 serta proyeksi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 serta 2022.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2021.

Gambar 3.2

Data Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022

Terkait rincian rencana belanja daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Rincian Rencana Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN 2	RENCANA ANGGARAN 3
		1
BELANJA DAERAH		
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rp496.807.774.286,52
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Rp87.786.490.521
3	Urusan Pilihan	Rp9.817.729.667,00



NO.	URAIAN	RENCANA ANGGARAN
1	2	3
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp152.264.042.760,00
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp89.879.189.619,00
6	Unsur Pengawasan	Rp8.417.000.000,00
7	Unsur Pemerintahan Umum	Rp3.964.270.000,00
8	Unsur Kewilayahan	Rp37.220.139.000,00
JUMLAH BELANJA		Rp886.156.635.853,52

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terkait penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada upaya penutupan defisit anggaran serta pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022 diprediksi sebesar Rp109.046.822.567,52 (seratus sembilan miliar empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2021 diprediksi sebesar Rp85.546.822.567,52 (delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen), Penerimaan Pinjaman Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur yang diprediksi sebesar Rp23.400.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan pagar RSUD dan lanjutan pembangunan *sport hall* serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dari SiLPA, perhitungannya didasarkan dengan asumsi bahwa daya serap belanja perangkat daerah pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 90 persen, sehingga dana yang tersisa dari APBD Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja pada Tahun 2022.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu penambahan



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

penyertaan modal pada PT. BPD Sumsel Babel, BPR Syari'ah Bangka Belitung dan PD Bangka Barat Sejahtera serta PDAM Sejiran Setason.

Secara keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 – 2022**

NO.	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN DAERAH					
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.721.283.064	86.864.125.424	103.046.051.213	1.867.479.648	109.046.822.567,52
1.1.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	41.420.288.319	86.520.133.359	102.879.501.075	1.767.479.648	85.546.822.567,52
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	23.400.000.000
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.300.994.745	343.992.065	192.300.138	100.000.000	100.000.000
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
NETTO PEMBIAYAAN DAERAH		39.721.283.064	83.864.125.424	100.046.051.213	-4.132.520.352	102.046.822.567,52



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat RKPD Tahun 2022 mengacu pada tahapan kebijakan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 dikarenakan belum terbitnya dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Barat Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan pasal 75 ayat (2) Permendagri 86 tahun 2017. Keterkaitan antara visi serta misi pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025

VISI : Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good governance</i>)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang (1) Partisipasi; (2) Ketaatan Hukum; (3) Transparansi dalam pemerintah; (4) Responsif; (5) Berorientasi pada kesepakatan; (6) Kesetaraan; (7) Efektif dan Efesien; (8) Akuntabilitas; dan (9) Visi Strategis.	1.Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas 2.Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien 3.Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>
Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi	Terwujudnya nilai tambah dari produk dan layanan yang berdaya saing tinggi di bidang yang beragam, terutama di sektor : (1) Pariwisata, (2) Perkebunan, (3) Perdagangan, (4) Industri Pengolahan hasil Alam, (5) Pertanian dan Perikanan, (6) Pertambangan.	1.Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan 2.Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah) 3.Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik serta pembangunan sumber daya energi 4.Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>); dan <i>profitable</i> (menguntungkan)
Mewujudkan masyarakat	Meningkatnya taraf kesehatan	1.Terbentuknya masyarakat yang beriman dan bertaqwa (imtaq), berakhlaq mulia, disiplin, dan



MISI	TUJUAN	SASARAN
yang berkualitas	dan pendidikan masyarakat yang diiringi penguatan akhlak dan rasa toleransi terhadap sesama.	amanah 2.Terwujudnya kualitas masyarakat yang cerdas (pendidikan), sehat (kesehatan), dan terampil 3.Terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan membuka lapangan kerja, hidup makmur, dan mampu bekerja sama
Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan	Terbentuknya pengelolaan alam dan lingkungan yang baik di setiap kegiatan ekonomi-sosial masyarakat	1.Terwujudnya lingkungan yang asri dan alami 2.Terbentuknya sikap peduli lingkungan serta berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan 3.Terwujudnya konsep green & sustainable economy (kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, visi pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yang diharapkan dapat mencapai 4 (empat) tujuan dengan 13 sasaran pembangunan. Indikasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa target indikator makro yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Target indikator makro Kabupaten Bangka Barat yang disandingkan dengan target indikator makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disandingkan dengan Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

No.	INDIKATOR MAKRO	Target 2022		
		Bangka Barat	Provinsi	Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,90 – 10,32	4,5	5,4 – 6,0
2.	Indeks Pembangunan Manusia	69,27 -69,62	71,70	73,44 –73,48
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,85 -3,12	5	8,5 - 9,0
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,57 – 3,64	5,40	5,5 - 6,2
5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah) ADHB	77,57 – 80,01	53,856	-

4.2 Tema Pembangunan Daerah

Perumusan tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 sudah memasuki tahun ke 4 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJPD. BAB X RPJMD 2016-2021 Tentang Pedoman Transisi dan Kaidah



Pelaksanaan, disebutkan bahwa Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan umum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi yaitu tahun pertama masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tema RKPD tahun 2022, belum ditetapkan pada RPJMD 2016-2021, sehingga perlu ditetapkan tema yang selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan dan perubahan kondisi/isu strategis yang berkembang ke dalam tema pembangunan tahunan dalam RKPD.

2. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah merupakan salah satu faktor yang mendasari penentuan tema pembangunan daerah. Upaya untuk memasukan faktor dinamika dan realita kondisi umum daerah dilakukan melalui analisa terhadap evaluasi kinerja tahun lalu dengan mereview RPJMD dan RKPD sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan (Tahun 2021).

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: 1. Industri, 2. Pariwisata, 3. Ketahanan Pangan, 4. UMKM, 5. Infrastruktur, 6. Transformasi Digital, 7. Pembangunan Rendah Karbon, 8. Reformasi Perlindungan Sosial, 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan 10. Reformasi Kesehatan.

Target indikator makro tahun 2022 adalah 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 - 5,52%; 3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378; 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48; 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1%; 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104; 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105; dan 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul". Adapun fokus RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah Penurunan angka *stunting* dan Pengembangan Pariwisata dan Industri melalui Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular.



Target capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2022 yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia 71,70, Tingkat Kemiskinan sebesar 5 persen, Tingkat Pengangguran sebesar 5,4 persen.

Dengan melihat dari berbagai aspek tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yaitu "**PENGUATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH**".

Keselarasan tema pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul	Penguatan Pembangunan Manusia Dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

5. Analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja dalam RPJMD tahun 2020.

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 disajikan dalam bentuk kinerja kegiatan (output) dan keuangan. Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah :

- Total anggaran belanja langsung Tahun 2020 adalah Rp517.135.137.869,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp423.544.686.525,79 atau 81,90 persen dengan kriteria Tinggi;
- Total rata-rata capaian kinerja RKPD Tahun 2020 sebesar 94,37 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 sebesar 86,28 persen dengan kriteria Tinggi;
- Total rata-rata capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 96,40 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 64,75 persen dengan kriteria Rendah;
- Pada laporan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Bappelitbangda sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan



program, kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat.

- Terdapat evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang target dan realisasi kinerja kegiatan yang belum terisi baik pada target renstra maupun realisasi sampai dengan tahun sebelumnya serta realisasi kinerja kegiatan pada tahun evaluasi, sehingga menyebabkan capaian kinerja Renja dan Renstra belum dapat dihitung dengan tepat.

Adapun capaian RKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 jika dikelompokan berdasarkan urusan, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 89,55 persen dan keuangan sebesar 81,73 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,22 persen dan keuangan sebesar 89,08 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,34 persen dan keuangan sebesar 88,02 persen. Capaian pada Urusan Pilihan merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan pencapaian pada Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang.

Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2019, maka rata-rata capaian di tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih rendah dan untuk rata-rata realisasi anggaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2019 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,51 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 82,80 persen. Sementara di tahun 2020, sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 94,37 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 86,28 persen.

Sedangkan capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2020 dari 10 sasaran dengan 15 indikator yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 terdapat 4 (empat) sasaran dengan kategori "Baik Sekali", 2 (dua) sasaran dengan kategori "Baik", 1 (satu) sasaran dengan kategori "Cukup", 1 (satu) sasaran dengan kategori "Kurang", 2 (dua) sasaran belum dapat dihitung. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebanyak 3 (tiga) indikator "Tercapai", 3 (tiga) indikator dengan kategori "Optimis Tercapai", dan 4 (empat) indikator dengan kategori "Perlu Upaya Lebih".

Sasaran dengan kategori "Tercapai" dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran di tahun 2020 tidak akan mengganggu kinerja sasaran tersebut di tahun-tahun berikutnya dimana penggunaan sumberdaya (tenaga dan pendanaan) hanya focus untuk tahun rencana, tidak disibukkan lagi dengan pencapaian tahun sebelumnya, ke- 5 sasaran yang telah mencapai target tersebut adalah "Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan", "Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik", dan "Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah".

Sasaran dengan kategori "Optimis" sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu Sasaran "Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah", Sasaran "Terwujudnya Birokrasi Pemerintah



Daerah yang Akuntabel”, dan Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan”.

Sasaran dengan kategori “Perlu Upaya Lebih” sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah”, Sasaran “Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif”, Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif” dan Sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat”.

6. Identifikasi permasalahan di tingkat daerah

Permasalahan-permasalahan baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional harus menjadi perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan suatu daerah. Permasalahan yang tidak berhasil ditangkap dan diatasi akan terus menjadi beban pembangunan ditahun-tahun mendatang. Permasalahan utama Pembangunan di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah daerah. Dari sisi masyarakat terdapat 2 (dua) permasalahan utama, yakni Masih Rendahnya Capaian Indeks Pembangunan Manusia dan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Belum 100 Persen. Dari sisi Pemerintah Daerah permasalahan utamanya adalah Masih Rendahnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil inventarisir permasalahan yang telah dilakukan pada Bab II beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang telah berhasil diinventarisir pada Bab II adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Lebih Rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;
2. Angka Partisipasi Kasar dan Murni untuk Tingkat SMP/MTs belum mencapai 100 persen dan nilai APK dan APM Kabupaten Bangka Barat terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menurunnya Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI Ke SMP/MTs.

b. Kesehatan

1. Meningkatnya kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi status gizi di Kabupaten Bangka Barat (tertinggi di kepulauan Bangka Belitung);



2. Kurangnya tenaga kesehatan (dokter), tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 3. Belum memadainya sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Meningkatnya persentase jalan berkondisi rusak;
 2. Belum seluruh area pertanian yang beririgasi teknis;
 3. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat;
 4. Masih rendahnya bangunan ber-IMB;
 5. Belum ditetapkannya dokumen RDTR.
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Belum terpenuhinya SPM terkait pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
- Belum terpenuhinya jumlah kebutuhan ideal Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Ketenagakerjaan
- Meningkatnya angka pengangguran terbuka.
- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- h. Pangan
- Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target Nasional.
- i. Lingkungan Hidup
1. Belum seluruh kecamatan melakukan pengolahan sampah;
 2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu belum mencapai target;
 3. Masih rendahnya lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat.
- j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Masih rendahnya persentasi penduduk yang tercatat memiliki akte kelahiran.



- k. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Turunnya Persentase peserta KB Aktif.
- l. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - Menurunnya persentase Koperasi Aktif.
- m. Penanaman Modal
 - Menurunnya Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat.
- n. Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Rendahnya Prestasi Olahraga;
 - 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga.
- o. Statistik
 - Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.
- p. Perpustakaan
 - Masih kurangnya Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media yaitu pada Tahun 2019 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Digital hanya sebanyak 124 Koleksi *E-Book*.
- q. Kearsipan
 - Belum seluruh perangkat daerah melakukan pengolahan karsipan secara baku.
- r. Perindustrian
 - Masih rendahnya pertumbuhan industri.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Pariwisata
 - Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Pertanian
 - 1. Menurunnya Produksi Padi dan Hortikultura;
 - 2. Menurunnya Produksi Lada;
 - 3. Menurunnya Produksi Ternak Ruminansia.
- c. Perindustrian
 - Masih rendahnya pertumbuhan industri.



C. Urusan Penunjang

- a. Masih rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Rendahnya Indeks Profesional ASN.

7. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Barat dijabarkan dalam empat misi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas, membangun perekonomian yang berbasis sumberdaya lokal dan berdaya saing tinggi, membangun masyarakat yang maju dan berkualitas, dan mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan daerah jika dibagi berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 sebesar 45,24 dengan kategori "C" atau predikat "Buruk". Jika dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat, nilai terendah adalah pada komponen pengungkit dengan nilai 15,29 atau sebesar 25,48 persen dari total bobot 60 persen.

Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan sasaran yang berkaitan dengan manajemen sumberdaya aparatur yang baik yang diukur melalui tingkat profesionalitas ASN. Melalui indikator ini akan diukur kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 hanya mencapai 64,17 poin.

Dari 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin., 2 (dua) dimensi masih belum baik hasilnya yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Permasalahan terkait pencapaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi antara lain :

- a. Masih banyaknya ASN di Kabupaten Bangka Barat yang jenjang pendidikannya dibawah Strata I, dan minimnya pengembangan sumberdaya ASN melalui peningkatan



jenjang pendidikan, baik dalam jenis izin belajar maupun tugas belajar. Pada Tahun 2020 ASN dengan jenjang pendidikan di bawah Strata I sebesar 41,21 persen.

- b. Masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat fungsional serta keikutsertaan diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus/ sejenisnya guna peningkatan sumberdaya ASN.

b. Bidang Ekonomi

Berdasarkan capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020, sasaran yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan masih sangat rendah dan perlu upaya lebih agar dapat dicapai sesuai dengan target. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu Rata-rata Pendapatan Bersih Petani Per Bulan, Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat, dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Capaian dari keempat indikator tersebut seluruhnya masih dibawah 80 persen.

Rendahnya capaian tersebut disebabkan antara lain masih rendahnya produksi hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan khususnya air tawar di Kabupaten Bangka Barat sehingga akhirnya berpengaruh dengan nilai produksi. Selain itu harga dari komoditas perkebunan yang tidak menentu pada beberapa tahun terakhir sangat berimbang terhadap nilai produksi.

Terkait dengan produksi hasil pertanian yang masih rendah khususnya padi sawah, juga berkaitan dengan prasarana pendukungnya yaitu irigasi yang belum memadai. Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis sampai dengan tahun 2019 juga masih rendah yaitu hanya mencapai 51,35 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 94,76 persen. Hal-hal yang terkait dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut harus terus dilakukan mengingatkan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, maka sangat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro serta industri kecil. Peningkatan skala usaha mikro pada Tahun 2020 hanya sebesar 0,04 persen, sehingga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu peningkatan 2,5 persen maka hanya tercapai 1,75 persen. Skala usaha UMi mengambarkan omset=nilai yang dijual dalam satuan waktu tertentu. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, Peningkatan Skala usaha UMi dihitung dari UMi yang modal/ omset usahanya meningkat lebih dari 25 persen dari tahun sebelumnya.

Begitu pula dengan capaian Kapasitas usaha industry kecil dan menengah unggulan dari



jenis Industri makanan olahan/ kuliner dan Industri kerajinan, pada Tahun 2020 sebesar 56,21 persen. Jika dilihat dari perkembangan capaian kedua indikator tersebut dari tahun 2016-2019 terjadi pertumbuhan yang positif atau terjadi peningkatan disetiap tahunnya kecuali pada Tahun 2020. Rendahnya capaian di Tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi masyarakat khususnya peningkatan skala usaha mikro dan kapasitas usaha industry kecil dan menengah yang juga turut mengalami penurunan.

c. Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia

Kualitas sumber daya manusia secara umum diukur dari tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan diupayakan melalui membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pendidikan masyarakat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten,. Kedua indikator ini merupakan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan pendidikan.

Meskipun capaian kedua indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 cukup baik dengan nilai yang meningkat setiap tahun, namun jika dibandingkan dengan angka HLS dan angka RLS di kabupaten/ kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat berada pada peringkat 5 (lima) dari 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang ada. Melihat kondisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan angka HLS dan angka RLS di Kabupaten Bangka Barat seperti meningkatkan pendidikan non formal, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah.

Terkait tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 diukur melalui indikator angka harapan hidup yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2020 sangat baik yaitu dengan angka harapan hidup sebesar 70,06 tahun. Meskipun capaian ini sangat baik, namun angka ini jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat 6 (enam) dan dibawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat yang juga merupakan indikator komponen IPM untuk bidang kesehatan.

Walaupun capaian kinerja sasaran RPJMD yang berkaitan dengan kesehatan pada Tahun 2020 telah tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu angka prevalensi stunting di Kabupaten Bangka Barat yaitu 12,38 persen berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM. Angka prevalensi stunting tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Teritip sebesar 27,38 persen, dimana menurut standar WHO, batas maksimal prevalensi stunting adalah 20 persen dari jumlah balita. Selain permasalahan stunting, permasalahan status Poskesdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yang tidak lagi menjadi bagian dari jaringan puskesmas yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdampak pada sulitnya koordinasi.

d. Lingkungan Hidup

Sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang masih menjadi permasalahan dalam pencapaian RPJMD antara lain adalah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan, Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu, Terwujudnya pemulihhan lahan kritis, Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang dan Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Jika dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2020, indikator yang masih rendah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu pada indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik yang hanya tercapai 23,42 persen. Sementara pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, ditargetkan sebesar 70 persen, sehingga capaian sampai dengan Tahun 2020 hanya mencapai 33,46 persen. Melihat hal ini perlu upaya lebih melalui usaha atau strategi yang lebih baik agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun permasalahan dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dikarenakan dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha masih menganggap sebagai beban bukan kewajiban, Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan beserta SDM nyadan fasilitas pengolahan limbah B3 yang masih terbatas khususnya di Kabupaten Bangka Barat.

Salah satu urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan yang terpadu yang sampai saat ini masih fokus pada Kecamatan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat dan sekaligus satu-satunya kecamatan yang memiliki TPA . Untuk penanganan persampahan yang dikelola secara baik belum menyentuh kecamatan lain dikarenakan keterbatasan kemampuan daerah baik berupa sarana dan prasarana serta personil yang ada. Pada Tahun 2020 persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, terealisasi sebesar 10,61 persen



dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 19 persen masih sangat jauh dari target akhir RPJMD.

Sementara untuk pemulihan lahan kritis sampai dengan tahun 2020 hanya dapat terealisasi sebesar 0,92 persen dari target akhir RPJMD sebesar 2 persen sehingga baru mencapai 46,10 persen. Sampai dengan tahun 2020, total kegiatan Reboisasi seluas 37 Ha berupa penanaman sebanyak 47.850 batang pohon, sementara luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat seluas 4.012,58 Ha (Data Spatial Lahan kritis BPDAS Baturusa Cerucuk 2018 SK 306).

Berdasarkan RPJMD, Sasaran “Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang” diukur melalui indikator Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang. Pada Tahun 2020, indikator ini hanya mencapai 44,00 persen, yaitu dari 36 pengajuan izin pemanfaatan ruang hanya 16 izin yang sesuai dengan tata ruang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 persen, maka indikator ini hanya mencapai 44,00 persen.

Untuk Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau, sampai dengan Tahun 2020 terealisasi sebesar 1,88 persen dari luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha, dengan RTH yang telah ditetapkan yaitu melalui Peraturan Bupati seluas 175,62 ha. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,90 persen luasan Ruang Terbuka Hijau, maka indikator ini baru mencapai 64,90 persen.

8. Identifikasi permasalahan /isu strategis di tingkat provinsi dan nasional

Permasalahan dan isu strategis di tingkat provinsi dan nasional merupakan salah satu masukan (sebagai bahan analisa) dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021. Karena pada saat penyusunan Ranwal RKPD ini Ranwal RKP dan Ranwam RKPD Provinsi belum dikeluarkan, maka permasalahan dan isu strategis yang digunakan diambil dari RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Tabel 4.4. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi dan Nasional

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
-Pencapaian target kesehatan belum optimal -Pencegahan covid 19 belum optimal -Faskes dan farmalkes belum siap -Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas	- Peningkatan kesempatan kerja yang masih rendah - Belum maksimalnya peran KUKM dalam



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
-Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien	<p>meningkatkan kesempatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih tingginya jumlah masyarakat miskin- Pelaksanaan jaring pengaman sosial yang belum merata- Kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah- Korban <i>pandemic virus corona</i> yang terus meningkat- Mutu layanan pendidikan dan kompetensi ASN yang masih rendah- Belum maksimalnya sarana prasarana produksi pertanian- Belum maksimalnya Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian- Belum maksimalnya produktivitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan- Belum maksimalnya sarana prasarana produksi perikanan- Belum maksimalnya infrastruktur sarana dan prasarana destinasi pariwisata- Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata

9. Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan dalam RKPD Tahun 2022, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2022. RKP Tahun 2022 hingga saat ini belum tersedia, arah kebijakan nasional diambil dari RPJMN Tahun 2020-2024. Perumusan isu strategis daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.5. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
A	Urusan Pendidikan		1. Masih rendahnya Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar Belum 100 persen 3. Masih Rendahnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Memantapkan sistem terpadu dalam pengelolaan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan daerah 2. Memperkuat pola komunikasi / pengaduan terbuka antara pemerintah dengan masyarakat 3. Penguatan sistem pelayanan online dan terpadu untuk perizinan, usaha, dan kependudukan 4. Penguatan kapasitas ASN dalam hal kompetensi dan profesionalitas 5. Peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Kabupaten Bangka Barat 6. Penguatan sistem merit-based dalam menilai kinerja dan performa dari ASN 7. Memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan 8. Meningkatkan kompetensi guru 9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan dan sekolah Pembina 10. Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs 11. Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara	1. Universal Health Coverage (UHC). 2. Kabupaten Bangka Barat Menjadi Tuan Rumah Porprov 2023 3. Keberlanjutan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Ular oleh Pemerintah Pusat (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 169 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpulan Lokal Tanjung Ular di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) 4. Pemulihan ekonomi masyarakat pada era New Normal 5. Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022
B	Urusan Kesehatan		4. Kerusakan lingkungan (lahan kritis) akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali 5. Belum Optimalnya Pelayanan persampahan 6. Rendahnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat		
C	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		7. Belum memiliki dokumen turunan RTRW yang dilegalkan 8. Ketergantungan bahan pangan yang masih tinggi		
	1.Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah 2.Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan 3.Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing				
	1.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan 2.Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 3.Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4.Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).				
	1.Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air 2.Tersedianya akses masyarakat				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	<p>terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman</p> <p>3.Terwujudnya konektivitas jalan</p> <p>4.Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang</p> <p>5.Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai</p> <p>6.Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi</p>			<p>pendidikan kesetaraan</p> <p>12. Mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam ketersediaan sekolah kejuruan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yaitu mendukung pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>13. Mengembangkan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga di tingkat kecamatan</p> <p>14. Menyelenggarakan event olahraga tahunan kabupaten</p> <p>15. Mempersiapkan sapras yang dibutuhkan untuk Kab Bangka Barat sbg tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi. Kep. Babel</p> <p>16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan</p> <p>17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan pedesaan dan kecamatan</p> <p>18. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat (terminal, rambu-rambu, trayek)</p> <p>19. Membangun sistem perizinan terpadu satu pintu berbasiskan dalam jaringan (daring/online)</p> <p>20. Membangun pusat informasi investasi berbasis dalam jaringan.</p> <p>21. Mengumpulkan serta mendata usaha melalui sistem dalam jaringan</p> <p>22. Meningkatkan secara signifikan kontribusi sektor tersier (jasa dan perdagangan) dalam struktur PDRB khususnya yang mendukung sektor pariwisata</p>	
D	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	<p>1.Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat</p> <p>2.Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang Ditangani</p> <p>3.Meningkatnya jumlah rumah layak huni</p> <p>4.Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>				
E	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	<p>1.Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar</p> <p>2.Meningkatnya manajemen bencana</p>				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana 3.Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar			23. Meningkatkan secara signifikan arus wisatawan nusantara dan asing melalui diversifikasi produk wisata 24. Mengupayakan alternatif energi melalui penerapan energi terbarukan 25. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses jalan, komunikasi, energi listrik dan air bersih untuk seluruh wilayah desa dan kecamatan 26. Mengupayakan program one village one product yang meliputi 50 persen perdesaan 27. Mewujudkan desa berorientasi wisata yang meliputi 50 persen desa-desa yang menjadi tujuan wisata 28. Mewujudkan BUMD yang mengkoordinasikan promosi potensi serta penjualan produk dan layanan wisata perdesaan 29. Mengupayakan moratorium pembukaan tambang baru 30. Melanjutkan upaya normalisasi sungai 31. Optimalisasi pelaksanaan rencana adaptasi dan mitigasi pengurangan tingkat pencemaran 32. Bekerjasama dengan pemerintah pusat/provinsi dalam melanjutkan upaya reboisasi pada lahan-lahan kritis 33. Mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan 34. Mengoptimalkan penerapan zonasi pemanfaatan wilayah perairan 35. Mengoptimalkan Implementasi RAD Green	
F	Urusan Sosial				
	1.Tersedianya Data Fakir Miskin 2.Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 3.Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial				
G	Urusan Tenaga Kerja				
	1.Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2.Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan 3.Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja 4.Meningkatnya kualitas pelindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja				
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	1.Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 2.Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak			Economy 36. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan sosial (termasuk fasilitas ibadah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat 37. Membangun call center untuk keamanan dan kondisi gawat darurat yang mencakup seluruh wilayah 38. Menyelenggarakan event-event lintas ras dan agama berupa pesta rakyat atau festival rakyat untuk membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat	
I	Urusan Pangan			39. Mengembangkan pendidikan berbasis vokasi (SMK atau Politeknik) yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah 40. Membangun dan mengembangkan fasilitas-fasilitas olahraga yang terintegrasi dengan fasilitas pendidikan yang ada.	
	1.Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2.Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional			41. Mengadakan program internet masuk sekolah guna meningkatkan wawasan murid sekolah 42. Meningkatkan intensitas dan frekuensi kompetisi pendidikan (olimpiade) pada tingkat daerah untuk meningkatkan daya saing di kancah regional dan nasional 43. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 44. Optimalisasi kinerja pemerintah desa 45. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Desa	
J	Urusan Pertanahan			46. Penyempurnaan pengelolaan PAD serta penyesuaian tarif pajak dan retribusi	
	1.Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah 2.Tersedianya tanah untuk kepentingan umum				
K	Urusan Lingkungan Hidup				
	1.Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2.Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan 3.Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota				
L	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	Adminduk			47. Meningkatkan ketersediaan dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, akurat dan aktual, termasuk data statistik, hasil studi/penelitian dan kerjasama pembangunan 48. Mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 49. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berkala 50. Mengembangkan sistem karir dan remunerasi SDM aparatur pemerintah daerah 51. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan 52. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah 53. Meningkatkan kesejahteraan ASN 54. Melakukan Penguatan Kelembagaan disesuaikan dengan tugas dan fungsi 55. Penguatan ketatalaksanaan lembaga 56. Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan 57. Pencapaian target SPM secara optimal 58. Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala 59. Meningkatkan kerjasama dengan media masa (lokal, nasional) dan lembaga lainnya 60. Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebarluasan informasi	
M	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien 2.Berkembangnya status pembangunan Desa 3.Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)			
N	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga 2.Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana			
O	Urusan Perhubungan	1.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan 2.Terwujudnya Konektivitas Nasional 3.Meningkatnya Keselamatan Transportasi			
P	Urusan Komunikasi dan Informatika	1.Tersedianya Infrastruktur Digital 2.Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital			



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	3.Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi 4.Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital 5.Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah			61. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SMS Center) 62. Monitoring system pelayanan publik secara berkala 63. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 64. Optimalisasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum Kecamatan 65. Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
Q	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
	1.Terwujudnya Koperasi yang Modern 2.Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global				
R	Urusan Penanaman Modal				
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal				
S	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
	1.Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 2.Meningkatnya pemuda yang berwirausaha 3.Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional				
T	Urusan Statistik				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				
U	Urusan Persandian				
	Menguatnya kemanan siber lingkungan Pemerintah Daerah				
V	Urusan Kebudayaan				
	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya				
W	Urusan Perpustakaan				
	1.Literasi masyarakat Meningkat 2.Tingkat kegemaran membaca masyarakat Bertambah				
X	Urusan Kearsipan				
	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal				
Y	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	1.Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut 2.Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing 3.Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan				



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	perikanan integratif				
Z	Urusan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional			
AA	Urusan Pertanian	Meningkatnya produktivitas Pertanian Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan			
AB	Urusan Kehutanan	1.Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air 2.Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat			
AC	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	1.Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik 2.Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan 3.Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik			
AD	Urusan Perdagangan	1.Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi			



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	<ul style="list-style-type: none">2.Terwujudnya iklim usaha yang kondusif3.Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen4.Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, wakTU, harga, mutu dan tempat5.Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah6.Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen7.Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat8.Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan				
AE	Urusan Perindustrian				
	<ul style="list-style-type: none">1.Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas2.Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB3.Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas4.Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2022	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD untuk Tahun 2022	Isu Strategis Daerah Tahun 2022
	5.Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				
AF	Urusan Transmigrasi				
	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi				



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

Dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan isu strategis daerah, permasalahan dan isu strategis ditingkat nasional dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 4.6. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Tema : Penguatan Pembangunan Manusia dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	-	-	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa	- Pengelolaan keuangan daerah belum optimal, khususnya terkait temuan - Masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal - Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah serta terdapat aturan pengelolaan keuangan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal. - penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) - aparatur yang kuat baik dari sisi kompetensi maupun mental dalam melayani. - Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal - Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa - Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat - Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia - Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi	1.Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Masih belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat- Tingginya biaya politik dan rendahnya akuntabilitas dan transparansi- Potensi Intervensi terhadap penyelenggara pemilu- Perlu penguatan peraturan perundangan bidang politik- Pendekatan komunikasi publik yang belum dinamis- Ketergantungan penyiaran terhadap rating- Miss informasi dan disinformasi konten digital- Ketimpangan masyarakat memahami konten media- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan- Kualitas pers dan jurnalistik- Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir- Indikator Penegakan Kontrak: Kemudahan Berusaha Peringkat 146 dari 190 Negara- Melampaui Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Overcrowding) Mencapai 202%- Tingginya Tindak Pidana Korupsi- Tingkat profesionalitas ASN sangat rendah (2019= 51,55)- Minimnya pengembangan sumber daya ASN- Minimnya pengembangan kompetensi ASN	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Manajerial birokrasi perlu didukung oleh aparatur yang kompeten- Belum optimalnya pelaksanaan dan penegakan peraturan Daerah- Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah;	
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	92,06	86,33	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan- Masih rendahnya kinerja pelayanan publik- Masih lemahnya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat- Tingkat profesionalitas ASN sangat rendah (2019= 51,55)- Minimnya pengembangan sumber daya ASN- Minimnya pengembangan kompetensi ASN- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah- Pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah akibat covid 19 mengakibatkan pendapatan negara menjadi berkurang sehingga menyebabkan transfer ke daerah menjadi berkurang	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	N/A	98,91		<ul style="list-style-type: none">- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Manajerial birokrasi perlu didukung oleh aparatur yang kompeten- Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum ada "quick win";- Belum terdapat pelaksanaan sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi;- Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapat pelatihan;- Koordinator Asessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi;- Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut;- Baru sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;- Upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> belum dilakukan secara formal;- Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;- Belum terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;- Belum terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai;- Belum ada standar kompetensi pejabat;	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai;- Belum ada pemberian sanksi dan reward kepada unit organisasi;- Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ;- Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi;- Belum terdapat Whistle Blowing Sistem;- Belum terdapat perencanaan Zona Integritas; dan- Permasalahan lainnya yang harus ditindaklanjuti guna penguatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.- Kondusivitas demokrasi belum stabil- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun- Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia- Masih belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat- Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah- Potensi Intervensi terhadap penyelenggara pemilu- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Pendekatan komunikasi publik yang belum dinamis- Misinformasi dan disinformasi konten digital- Ketimpangan masyarakat memahami konten media- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan- Kualitas pers dan jurnalistik- Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir- Tingginya Tindak Pidana Korupsi- Tingkat profesionalitas ASN sangat rendah (2019= 51,55)- Minimnya pengembangan sumber daya ASN- Minimnya pengembangan kompetensi ASN- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah, khususnya kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.- Statistik hayati kependudukan yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia- Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah- Masih rendahnya kinerja pelayanan publik- Masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	N/A	64,63	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Masih belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat- Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah- Pendekatan komunikasi publik yang belum dinamis- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan- Tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah- Masih rendahnya kinerja pelayanan publik- Masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal- Manajerial birokrasi perlu didukung oleh aparatur yang kompeten- Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum ada "quick win";- Belum terdapat pelaksanaan sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi;- Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapat pelatihan;- Koordinator Asessor belum melakukan review kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi;	1. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut;- Baru sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;- Upaya pembentukan Agent of Change belum dilakukan secara formal;- Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;- Belum terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;- Belum terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai;- Belum ada standar kompetensi pejabat;- Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai;- Belum ada pemberian sanksi dan reward kepada unit organisasi;- Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ;- Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi;- Belum terdapat Whistle Blowing System;- Belum terdapat perencanaan Zona Integritas; dan- Permasalahan lainnya yang harus ditindaklanjuti guna penguatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	105,84 97,57	105,53 95,27	2. Peningkatan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah- Belum optimalnya pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas- Masih belum optimalnya pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)- Pendekatan komunikasi publik yang belum dinamis- Masih rendahnya kinerja pelayanan publik- Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah mempengaruhi pola mobilitas- Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.- Tingkat pendidikan penduduk bekerja rendah- Tingkat IPM kabupaten Bangka Barat rendah (urutan ke-6 se-Bangka Belitung)- Pelayanan dasar dan pelayanan publik tidak dapat maksimal karena terdampak covid	4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan			4. Peningkatan produktivitas pertanian secara umum guna meningkatkan NTP	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya produksi hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan- Harga komoditas tidak menentu	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Prasarana pendukung seperti irigasi belum memadai.- Rendahnya komitmen serta kurang sinerginya perangkat daerah terkait- Pembangunan saluran sekunder tidak sejalan dengan saluran tersier- Kurang sinerginya pembangunan yang dilakukan perangkat daerah yang terkait- Ketergantungan daerah dengan dana perimbangan- Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi- Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2019 di bawah pertumbuhan Nasional dan Sumatera- Pertumbuhan Ekonomi yang rendah akibat dari Covid-19- Eksport Komoditas strategis yang rendah karena turunnya permintaan pasar global- Produksi dan nilai tambah komoditas unggulan belum optimal- Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah se-Indonesia- Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah capaian nasional- Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tertinggi se-Indonesia- Ketergantungan bahan pangan dari luar Kabupaten Bangka Barat yang masih tinggi;	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak Covid-19- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian- Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat- Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija- Kemandirian Pangan Rendah- Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal- Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.- Adanya kesulitan ditingkat petani untuk melakukan akses ke pasar atas komoditi yang dihasilkannya maupun untuk memperoleh pupuk dan pestisida- semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian- Tingginya biaya input produksi- Rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha- Kurangnya jiwa entrepreneur aparatur pemerintah dalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB- Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan- Rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja, kualitas penduduk yang bekerja- Jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi- Jumlah penduduk usia produktif semakin besar- Perubahan struktur umur penduduk yang cepat	
Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat				<ul style="list-style-type: none">- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah- Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan- Tingkat Investasi Rendah- Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah- Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah- Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk lokal daerah	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah- Kurangnya jiwa entrepreneur aparatur pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat- Masih rendahnya kesejahteraan petani- Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif- semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian- Tingginya biaya input produksi- Rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha- Sasaran yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan masih sangat rendah- Harga dari komoditas perkebunan tidak menentu pada beberapa tahun terakhir sehingga berimbang terhadap nilai produksi.- Irigasi prasarana pendukung produksi hasil pertanian yang belum memadai- Belum semua lahan persawahan memiliki jaringan irigasi;- Rendahnya nilai produksi komoditas pertanian dan perkebunan	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Meningkatnya nilai produksi perikanan			4. Peningkatan produktivitas pertanian secara umum guna meningkatkan NTP	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Masih rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan- Belum adanya penetapan zonasi laut- Masih marak terjadinya illegal, unregulated, unreported fishing di wilayah perairan- Belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing- Masih rendahnya produktifitas dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya- Tingginya biaya input produksi- Sarana prasarana kelautan dan perikanan belum memadai, seperti pelabuhan perikanan, sistem perbenihan dan induk, pertambakan garam, serta sarana prasarana pendukung lainnya- Perijinan yang belum efektif dan efisien- Rendahnya integrasi hulu hilir perikanan dan persoalan rantai nilai produk- Degradasi ekosistem dan pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan laut.- Menurunnya produksi perikanan tangkap;- Belum tercapainya target produksi budidaya perikanan	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Meningkatnya nilai produksi peternakan			4. Peningkatan produktivitas pertanian secara umum guna meningkatkan NTP	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya populasi dan produksi ternak- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Tingginya biaya input produksi- Rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha- Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif- Belum optimalnya populasi dan produksi ternak	
Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri			5. Pengembangan Agroindustri diarahkan pada sentra-sentrroduksi dengan pengembangan UMKM dan koperasi berbasis hasil pertanian secara umum	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah- Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk lokal daerah- Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.- Masih kurangnya bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UKM	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha- Belum optimalnya sarana pemasaran produk UKM- Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan- Kurangnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak- Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif- Belum optimalnya populasi dan produksi ternak- Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani- Rendahnya ekspor	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.- kualitas investasi rendah- Perlunya peningkatan cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.- Masih adanya kesenjangan antar wilayah- Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah- Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah	
Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah			5. Pengembangan Agroindustri diarahkan pada sentra-sentrarproduksi dengan pengembangan UMKM dan koperasi berbasis hasil pertanian secara umum	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat Investasi Rendah- kualitas investasi rendah- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah	3. Peningkattkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.- Masih kurangnya bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)- Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha- Belum optimalnya sarana pemasaran produk UKM- Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan- Kurangnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak- Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya eksport- Kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan eksport produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.- Covid semakin membuat minat investasi rendah- Perlunya peningkatan cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.	
Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri			5. Pengembangan Agroindustri diarahkan pada sentra-sentrarproduksi dengan pengembangan UMKM dan koperasi berbasis hasil pertanian secara umum	<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya daya saing dan akses pasar untuk produk daerah.	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing				<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)- Masih rendahnya upaya pengembangan skala usaha- Belum optimalnya sarana pemasaran produk UKM- Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan- Kurangnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM- Rendahnya tingkat ketersediaan data terkait peta potensi sumber daya dan peluang investasi- Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi- Belum optimalnya koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor/pengusaha besar- Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal- Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif- Belum optimalnya populasi dan produksi ternak- Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani- Rendahnya ekspor- Kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.- Kualitas investasi rendah- Ketergantungan bahan pangan dari luar Kabupaten Bangka Barat yang masih tinggi;- Rendahnya pertumbuhan Industri	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Perlunya peningkatan cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.- Covid berdampak pada lesunya tingkat pemasaran produk UKM- Covid berdampak pada berkurangnya omzet UMKM sehingga berdampak pada berkurangnya PAD yang diterima	
Berkembangnya destinasi wisata			6. Pengembangan budaya lokal dan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan- Tingkat Investasi Rendah- Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata- Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah- Masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur ekonomi termasuk konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat.	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Belum memadainya ketersediaan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, akses perumahan dan permukiman- Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur TIK- Perlu penataan ulang dalam meningkatkan destinasi wisata pasca Covid- Covid menyebabkan kunjungan wisata berkurang sehingga berkurangnya Pendapatan Asli Daerah	
Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata				<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan- Tingkat Investasi Rendah- Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata- Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.- Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa- Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas	
Meningkatnya konektivitas daerah			7. Pengembangan dan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi- Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas- Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas- Masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur ekonomi termasuk konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat.- Belum memadainya ketersediaan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, akses perumahan dan permukiman- Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur TIK- Belum optimalnya pengembangan transportasi	2. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<p>laut dan udara yang murah</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum optimanya penataan Transportasi darat- Masih sempitnya ruas jalan dan lingkar luar yang menghubungkan antar kabupaten-kota- Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka ketersolosian wilayah- Ketersediaan pelabuhan yang belum maksimal- Rendahnya jangkauan komunikasi dan informatika terutama di wilayah pedesaan- Masih terdapat infrastruktur jalan dengan kondisi yang rusak maupun rusak berat;	
Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian			1. Pengembangan dan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian- Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi- Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas- Belum tersedianya sistem jaringan pengairan lanjutan yang baik dan optimal	3. Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Meningkatnya kualitas pendidikan			8. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya penerapan rekomendasi kebijakan pendidikan yang berdasarkan hasil penelitian- Perlu gebrakan kebijakan yang mengikat dalam bentuk perbup atau lainnya- Meningkatkan pendidikan non formal, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Tingkat pendidikan SDM masih- Rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata Nasional- IPM Masih di bawah rata-rata Nasional- sasaran yang berkaitan dengan pendidikan masih sangat rendah- Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan- Peringkat dan nilai Rata-rata Ujian Nasional jenjang SMP yang masih rendah- Rendahnya kualitas layanan pendidikan (sarana prasarana pendidikan dan ketersediaan dan sebaran serta kualitas guru).- Kurangnya kuantitas dan kualitas pengembangan pendidikan kejuruan berbasis unggulan daerah- Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata- Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah mempengaruhi pola mobilitas- Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.- Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan- Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah- Kualitas pendidik masih rendah- Adanya kesenjangan mutu antar satuan pendidikan tinggi- Belum terwujudnya diferensiasi misi perguruan tinggi dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal- Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk.- Akses layanan internet menghambat pembelajaran daring- Diperlukan penyusunan panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh- Peningkatan kompetensi pendidik dalam tanggap darurat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran pada masa covid- Keterbatasan fasilitas pembelajaran daring di rumah- Peningkatan kualitas pembelajaran dalam menghadapi era digital 4.0	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan			8. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Kesehatan yang belum optimal dan Sumber daya kesehatan yang masih rendah- Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.- Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat- Rendahnya Angka Harapan Hidup- Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi- Masih tingginya penyakit menular khususnya HIV/AIDS, diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD).- Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal.- Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis- Respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan- Lembaga aktuaria yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik serta lembaga yang independen belum tersedia- Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik- Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk.- Kematian ibu dan bayi masih tinggi	4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal.- Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017).- Angka kelahiran (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi- Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.- Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk.- Tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bangka Barat- Belum optimalnya penurunan kasus stunting- permasalahan status poskesdes menjadi permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdampak pada sulitnya koordinasi- Belum tercapainya target SPM bidang kesehatan- Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebanyak 54,1 persen dengan akses terhadap air minum layak sebesar 87,8 persen, dan sanitasi layak sebesar 74,6 persen (BPS 2018, diolah Bappenas 2019).	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien.- Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper.- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi- Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan- Sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi- Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.- Peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar protokol kesehatan di tempat umum	
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			8. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none">- Masih belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak- Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan- Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas- Masih belum optimalnya pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)- Masih belum optimalnya penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial- Belum optimalnya pencapaian SPM bidang sosial- Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan- perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat- Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU- Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis- Kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)- Respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga				<ul style="list-style-type: none">- Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal- Rendahnya prestasi olahraga daerah;- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.	
Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan			9. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup serta pengendalian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten- Penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.- Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah- kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan- Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan beserta SDM nya dan fasilitas pengolahan limbah B3 masih terbatas- Makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.- Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup- Tingginya kerusakan lingkungan hidup akibat pelanggaran hukum bidang SDA dan lingkungan hidup.- Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah	1. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				- Tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa	
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu & berkelanjutan				- Pengelolaan persampahan baru menyentuh kecamatan Muntok dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan personil	
Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman				- Cakupan layanan sanitasi saat ini masih rendah - Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan - Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman - Belum memadainya ketersediaan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, akses perumahan dan permukiman - Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebanyak 54,1 persen dengan akses terhadap air minum layak sebesar 87,8 persen, dan sanitasi layak sebesar 74,6 persen (BPS 2018, diolah Bappenas 2019).	
Terkendalinya bencana banjir				- Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan - Permasalahan banjir - Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana masih rendah - Rawan bencana	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Kondisi kemampuan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam dan anomali cuaca- Tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi- Tingginya resiko bencana- Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah	
Terwujudnya konservasi sumber air				<ul style="list-style-type: none">- semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas- Ekstraksi air tanah yang tinggi- Pencemaran sumber air pada sebagian besar wilayah sungai- Peningkatan kebutuhan air yang signifikan pada 10 wilayah aglomerasi perkotaan	
Terwujudnya pemulihan lahan kritis				<ul style="list-style-type: none">- Pemulihan lahan kritis baru sebatas inventarisasi lahan kritis di Kecamatan Kelapa dan Tempilang- Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis- Semakin meningkatnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan.- belum dilakukan perubahan terhadap penetapan RTH, maka luasan RTH sampai dengan tahun 2019 belum dapat mencapai target	



Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang				<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam- Perlunya peningkatan harmonisasi tata ruang laut dan darat berupa penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT).- Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang- Tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembangunan.- Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten- Belum memiliki dokumen turunan RTRW yang dilegalkan	
Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan				<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten- Penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.- Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan	



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

Capaian RPJMD Tahun 2020 s.d. 2021			Prioritas dalam RPJMD 2016-2021	Permasalahan / Isu strategis (daerah dan nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2022
Sasaran	Capaian 2020 (%)	Capaian s.d. 2021 (%)			
				<ul style="list-style-type: none">- Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup- Tingginya kerusakan lingkungan hidup akibat pelanggaran hukum bidang SDA dan lingkungan hidup.	



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.7** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan;
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar.

Dari prioritas yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran pembangunan yang dimaksudkan agar implemantasinya lebih fokus dan lebih terarah serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* nya.

Tabel 4.7. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan dan Sasaran Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH
1.	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien
2.	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas
		Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas merit-based
3.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)
		Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat dasar, dan keterbukaan
		Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik
		Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)
4.	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas pendidikan

Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah tahun 2022 sesuai dengan tahapan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana dijabarkan dalam table berikut.



Tabel 4.8. Sasaran, Indikator serta Target Indikator Daerah Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82 persen
2	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	WTP
		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB
3	Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas merit-based	Perbaikan sistem remunerasi	YA
		Career Development sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	YA
4	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	8,90 – 12,33
		Laju pertumbuhan investasi	2 persen
		Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	22,50 persen
		Pertumbuhan wisatawan per tahun	50000
5	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (<i>one stop service</i>).	ADA
		Kesesuaian dengan tata ruang	100 persen
6	Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	77 persen
7	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33 persen
		Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	< 0,255
8	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100 persen
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,21 TAHUN
		Persentase Balita Gizi Buruk	0 persen
		Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	100 persen
		Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100 persen
		Angka melek huruf	100 persen

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan disusunlah strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system



manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan Tahun 2022 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.9. Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good governance)		
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Memantapkan sistem terpadu dalam pengelolaan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan daerah
		Penguatan system pelayanan online dan terpadu untuk perizinan, usaha, dan kependudukan
Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Penguatan pengawasan internal	Memperkuat pola komunikasi / pengaduan terbuka antara pemerintah dengan masyarakat
Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>	Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah	Penguatan kapasitas ASN dalam hal kompetensi dan profesionalitas
		Peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Kabupaten Bangka Barat
		Penguatan sistem <i>merit-based</i> dalam menilai kinerja dan performa dari ASN
MISI II: Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi		
Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Peningkatan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan secara signifikan kontribusi sektor tersier (jasa dan perdagangan) dalam struktur PDRB
	Peningkatan peran BUMD dalam peningkatan ekonomi masyarakat	Pemanfaatan sumber pendanaan diluar APBD dalam pemberian bantuan permodalan usaha
Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Peningkatan pelayanan yang terkait perizinan berusaha	Penguatan sistem pelayanan online dan terpadu untuk perizinan, usaha, dan kependudukan
Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Peningkatan penyebaran investasi dan pembangunan ke seluruh kecamatan	Mengupayakan program <i>one village one product</i>
		Melakukan kegiatan pembangunan melalui sistem padat karya
	Optimalisasi peran BLK dalam peningkatan kualitas sumber daya	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan dan kemitraan
	Pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19	Mengupayakan penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan / investasi baru
MISI III: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas		
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan Kualitas pelayanan SPM	Mengupayakan pemenuhan SPM
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat oleh Pemda	Meningkatkan sosialisasi terkait program BPJS kesehatan dan bantuan Pemda
	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat (Pelayanan Kelas III BPJS)
		Mengembangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang merata, terjangkau dan sesuai standar (rawat



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	inap/perawatan)
		Mengembangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar pada RSUD
		Mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Mengembangkan upaya preventif dan promotif pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan kompetensi guru
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan dan sekolah Pembina
MISI IV: Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan	Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs
		Penguatan infrastruktur yang dapat menguatkan konektivitas dengan pusat ekonomi nasional
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses jalan, komunikasi, energy listrik dan air bersih untuk seluruh wilayah desa dan kecamatan

Strategi dan arah kebijakan Tahun 2022 tersebut merupakan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 yang disesuaikan dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis serta pencapaian pembangunan yang telah dicapai serta kondisi saat penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022.

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Untuk menjamin keselarasan dan ketercapaian hasil-hasil pembangunan dari level Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyelarasan prioritas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga ada dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2022

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Kabupaten Bangka Barat
Memperkuat stabilitas Polhukham dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Kabupaten Bangka Barat
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pembangunan Agropolitan Pembangunan Bahari	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pembangunan Pariwisata	
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Prioritas yang sudah ditetapkan tersebut agar dapat dilaksanakan perlu diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan dengan indikator dan target sebagai bahan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan tersebut. Selanjutnya dalam rangka menjabarkan program pembangunan daerah yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam tabel 4.13.

4.4 Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pencapaian prioritas nasional maupun provinsi sangat ditentukan oleh dukungan prioritas Kabupaten yang dituangkan melalui program/kegiatan. Dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, dukungan program terhadap prioritas nasional maupun provinsi disajikan sebagaimana Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.

4.5 Penyelerasian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar tersebut ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Selanjutnya sesuai Pasal 298 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, maka prioritas



pembangunan daerah diarahkan untuk pemenuhan SPM. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial.

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerapan SPM. Penyelarasian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan SPM sebagaimana tergambar pada tabel 4.14.



Tabel 4.11 Penyelesaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	100%		- SD	104,15%
			Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100%		- SMP	80,25%
			Angka melek huruf	100%		- PAUD	80,15%
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Sertifikasi	42,25%
BIDANG KESEHATAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai Standar	100%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72 Tahun		Percentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60%
			Percentase Balita Gizi Buruk	0%		Percentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	47%
			Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase capaian SPM bidang kesehatan	100%
		Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	82		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12%
			Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik			Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78%
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	75%



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman	90%
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani	100%
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku	93%
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	15%
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	100%
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
					Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	100%
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	100%
BIDANG SOSIAL	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial	100%
						Persentase jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam upaya penyelenggaran kesejahteraan sosial	100%
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial	100%



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Percentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%
					Program Penanganan Bencana	Percentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%



4.6 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB terdiri dari 17 tujuan yang secara singkat yaitu : 1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan TPB ditingkat daerah disesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan TPB tersebut, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan TPB yang disajikan pada tabel 4.15. Berdasarkan kewenangan tersebut, terdapat 2 TPB yang tidak dipetakan dalam penyelarasan yaitu TPB Nomor 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau dan TPB Nomor 14 yaitu Ekosistem Lautan.



Tabel 4.12 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1	2		3
1.	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Nomor 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
2.	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Nomor 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan
3.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan atas <i>merit-based</i>	
		Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Nomor 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
		Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taatasas, dan keterbukaan	Nomor 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
			Nomor 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
			Nomor 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
		Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Nomor 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
			Nomor 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
		Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (<i>Pro-poor</i> dan <i>Pro-job</i>), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Nomor 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
			Nomor 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
			Nomor 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			Nomor 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1	2	3	
4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Nomor 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Nomor 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Nomor 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	

Tabel 4.13. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes yang berkembang	15 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Persentase peningkatan status desa Mandiri	60 persen		
				Persentase pengentasan desa tertinggal	100 persen		
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen e-KTP	98 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Cakupan Kepemilikan Dokumen KK	95 persen	
					Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA	50 persen	
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	97 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	100 persen	
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	100 persen	
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	100 persen	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	90 persen	Komunikasi Dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD, kelurahan, desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan	25 persen	Komunikasi Dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60 persen	Komunikasi Dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD memiliki keamanan informasi	100 persen	Komunikasi Dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	100 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	44 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas sesuai kewenangan	44 persen	Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100 persen	Perhubungan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	10.000 orang	Perpustakaan
					Persentase jumlah layanan bidang perpustakaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100 persen	
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian naskah kuno dan	100 persen	Perpustakaan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber sumber air yang di bangun	32 unit	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Persentase ketersediaan air baku pertanian	100 persen	
					Penurunan titik kawasan terkena dampak banjir	21 titik	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase rekomendasi IJUK	persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	60 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase lahan yang bisa dibebaskan untuk pembangunan	100 persen	Pertanahan
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data tanah kosong di Kabupaten Bangka barat	78,53 persen	Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas			Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten	33 persen	Pertanian
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90 persen	Pangan
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase POKTAN/GAPOKTAN/Petani yang Mendapat Penyuluhan	100 persen	Pertanian
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4 kegiatan	Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola	33,33 persen	Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	25 persen	Lingkungan Hidup
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase keikutsertaan sekolah yang menerapkan prinsip sekolah yang berbasis lingkungan	9 persen	Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	Kecamatan
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Urusan
					Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terlaksananya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 persen	Perencanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas merit-based	Perbaikan sistem remunerasi	YA	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi	2 peringkat	Perencanaan	
		YA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100 persen	Perencanaan	
		Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN daerah	70 persen	Kepegawaian		
				Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	80 persen		
				Persentase capaian penilaian kinerja ASN	85 persen		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	35 persen	Pendidikan dan Pelatihan		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	3 temuan	Keuangan		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah	2,5 persen	Keuangan		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	menurunnya temuan atas audit BPK atas LKD Pemda	6 temuan	Keuangan		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	100 persen	Pengawasan Urusan Pemerintahan		
			Persentase OPD LAKIP BB	40 persen			
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pemenuhan Infrastruktur IACM	2,5 level	Pengawasan Urusan Pemerintahan		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100 persen	Kecamatan		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Kecamatan		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	Kecamatan		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100 persen	Kecamatan		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara	0 kasus	Pemerintahan Umum		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase ketidakhadiran masyarakat dalam pemilu/pemilukada	15 persen	Pemerintahan Umum	
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks kinerja ormas	180 skor	Pemerintahan Umum	
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah angka kriminalitas menurun	150 kasus	Pemerintahan Umum	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial menurun	10 kasus	Pemerintahan Umum	
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,28 nilai	Pendukung Urusan Pemerintahan	
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Cakupan Raperda menjadi Perda	100 persen	Sekretariat DPRD	
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dan Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	75 persen	Kearsipan	
						Meningkatnya indeks Kearsipan	Baik status		
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip di depo arsip yang terpelihara dengan baik	30 persen	Kearsipan	
						Meningkatnya kualitas sistem adminitrasi arsip statis	100 persen		
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)		Pertumbuhan PDRB	8,90 – 12,33	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100 persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Laju pertumbuhan investasi	0,02	Program Pengembangan Ukmk	Terciptanya iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang kondusif	100 persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	0,225	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukmk)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	100 persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Pertumbuhan wisatawan per tahun	50.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sub Distributor/Agen/ Sub Agen Bapok yang terbina	12	Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (one stop service).	ADA	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu	6.600 Konsumen	Perdagangan
		Kesesuaian dengan tata ruang	1	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pameran yang Diikuti	100 persen	Perdagangan
	Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	0,77	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100 persen	Perdagangan
	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri) Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	0,0333	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Industri	100 persen	Perindustrian
		< 0,255	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	100 persen	Perindustrian	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya sistem informasi Industri	100 persen	Perindustrian
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	10 kebudayaan	Kebudayaan	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang Aktif melakukan Pengembangan Kesenian	10 persen	Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	1 kerjasama	Kebudayaan	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	11 CB	Kebudayaan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	10 DTW dan 3 desintasi	DTW dan destinasi	Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan	104.000 orang	Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya zona ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1 lokasi dan 1 usulan hak kekayaan intelektual		Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif	2 jenis ekonomi	Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Jalan	Percentase jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	82,4 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Pangan	2310 kkal/ 63 g/ 75 g	Pangan
					Tingkat Konsumsi Pangan	2100 kkal/ 57 g/ 68 g	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Skor Pola Pangan Harapan	88,9 skor		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	80 persen	Pangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 persen	Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 persen	Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	100 persen	Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertanggulangi	100 persen	Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya jumlah unit usaha pertanian yang memenuhi standar yang berlaku	3 perusahaan	Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20 persen	Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budaya	20 persen	Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Menurunnya Tindak Pidana Perikanan	100 persen	Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah	49 Kg/tahun	Kelautan dan Perikanan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19 persen	Lingkungan Hidup
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Taurua	16 persen	Lingkungan Hidup
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 persen	Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 persen	Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi dan Terselesaikan	100 persen	Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar				Jumlah pekerja yang diikutsertakan pada program jamsos tenaga tenaga kerja	50 persen		
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investasi yang berinvestasi	175 milyar	Penanaman Modal
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan	80 indeks	Penanaman Modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Kelengkapan Administrasi Investasi/ Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	3 level	Pendukung Urusan Pemerintahan
						Persentase capaian fisik dan keuangan pembangunan Daerah	80 persen	
						Penilaian Kinerja BUMD dan BLUD	61,5 nilai	
					Program Penataan Desa	Persentase penataan desa sesuai peraturan perundungan yang berlaku	100 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar desa yang terbentuk	42 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa dengan status minimal swakarya	60 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar			100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Pendidikan
						- SD	104,15 persen	
						- SMP	80,25 persen	
						- PAUD	80,15 persen	
						Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Percentase Guru Sertifikasi	42,25 persen
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar			70,21 TAHUN	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Percentase capaian SPM bidang kesehatan	100 persen	Kesehatan
						Percentase Balita Gizi Buruk	0%	
						Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000	
						Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	12 persen	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar			100%			78 persen	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai Standar	100 persen	Kesehatan
		Angka melek huruf	100%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	60 persen	Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang ber PHBS	47 persen	Kesehatan
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pengelolaan sistem gender dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial	100 persen	Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Sosial
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 persen	Sosial
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dukungan APBD dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG	30 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan terhadap perempuan dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemenuhan hak anak	80 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sejahtera tingkat II	91 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	75 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman	90 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku	93 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100 persen	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	15 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi	13 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	30 persen	Kepemudaan Dan Olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	35 persen	Kepemudaan Dan Olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	3 peringkat POPDA	Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 4.14. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 Mendukung Prioritas Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes yang berkembang	15 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
					Persentase peningkatan status desa Mandiri	60 persen			
					Persentase pengentasan desa tertinggal	100 persen			
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen e-KTP	98 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Cakupan Kepemilikan Dokumen KK	95 persen			
					Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA	50 persen			
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	97 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	100 persen			
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	100 persen			
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	100 persen			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	90 persen	Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
				Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD, kelurahan, desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan	25 persen	Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60 persen	Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD memiliki keamanan informasi	100 persen	Komunikasi Dan Informatika	Memperkuat Stabilitas Polihukumkan dan Transformasi Pelayanan Publik
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	100 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	44 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas sesuai kewenangan	44 persen	Perhubungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100 persen	Perhubungan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	10.000 orang	Perpustakaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
						Persentase jumlah layanan bidang perpustakaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100 persen		
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian naskah <i>kuno dan khasanah budaya</i>	100 persen	Perpustakaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber sumber air yang di bangun	32 unit	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
						Persentase ketersediaan air baku pertanian	100 persen		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penurunan titik kawasan terkena dampak banjir	21 titik			
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase rekomendasi IJUK	persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	60 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase lahan yang bisa dibebaskan untuk pembangunan	100 persen	Pertanahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data tanah kosong di Kabupaten Bangka barat	78,53 persen	Pertanahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten	33 persen	Pertanahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90 persen	Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase POKTAN/GAPOKTAN/ Petani yang Mendapat Penyuluhan	100 persen	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4 kegiatan	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola	33,33 persen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	25 persen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase keikutsertaan sekolah yang menerapkan prinsip sekolah yang berbasis lingkungan	9 persen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Peningkaltan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Urusan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 persen	Perencanaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas merit-based	Perbaikan sistem remunerasi	YA	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi	2 peringkat	Perencanaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			Career Development sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	YA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100 persen	Perencanaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN daerah	70 persen	Kepegawaian	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
					Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	80 persen				
					Persentase capaian penilaian kinerja ASN	85 persen				
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	35 persen	Pendidikan dan Pelatihan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	3 temuan	Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah	2,5 persen	Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	menurunnya temuan atas audit BPK atas LKD Pemda	6 temuan	Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	100 persen	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
					Persentase OPD LAKIP BB	40 persen				
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pemenuhan Infrastruktur IACM	2,5 level	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100 persen	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100 persen	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara	0 kasus	Pemerintahan Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase ketidakhadiran masyarakat dalam pemilu/pemilukada	15 persen	Pemerintahan Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks kinerja ormas	180 skor	Pemerintahan Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah angka kriminalitas menurun	150 kasus	Pemerintahan Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial menurun	10 kasus	Pemerintahan Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,28 nilai	Pendukung Urusan Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Cakupan Raperda menjadi Perda	100 persen	Sekretariat DPRD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dan Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	75 persen	Kearsipan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Meningkatnya indeks Kearsipan	Baik	status			
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip di depo arsip yang terpelihara dengan baik	30	persen	Kearsipan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
				Meningkatnya kualitas sistem administrasi arsip statis	100	persen			
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	8,90 – 12,33	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Laju pertumbuhan investasi	0,02	Program Pengembangan UMKM	Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	0,225	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Pertumbuhan wisatawan per tahun	50.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sub Distributor/Agen/Sub Agen Bapok yang terbina	12		Perdagangan
			Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	ADA	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu	6.600	Konsumen	Perdagangan
			Kesesuaian dengan tata ruang	1	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pameran yang Diikuti	100	persen	Perdagangan
			Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100	persen	Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri) Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	0,0333 < 0,255	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Industri	100 persen	Perindustrian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	100 persen	Perindustrian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya sistem informasi Industri	100 persen	Perindustrian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	10 kebudayaan	Kebudayaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang Aktif melakukan Pengembangan Kesenian	10 persen	Kebudayaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	1 kerjasama	Kebudayaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	11 CB	Kebudayaan	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	10 DTW dan 3 desintasi	Pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan	104.000 orang	Pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya zona ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1 lokasi dan 1 usulan hak kekayaan intelektual	Pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif	2 jenis ekonomi kreatif	Pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	82,4 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Pangan	2310 kkal/ 63 g/ 75 g	Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Tingkat Konsumsi Pangan	2100 kkal/ 57 g/ 68 g		
					Skor Pola Pangan Harapan	88,9 skor		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	80 persen	Pangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 persen	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	100 persen	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	100 persen	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertanggulangi	100 persen	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya jumlah unit usaha pertanian yang memenuhi standar yang berlaku	3 perusahaan	Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20 persen	Kelautan dan Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	20 persen	Kelautan dan Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Menurunnya Tindak Pidana Perikanan	100 persen	Kelautan dan Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah	49 Kg/tahun	Kelautan dan Perikanan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19 persen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Tahura	16 persen	Lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 persen	Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 persen	Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Program Hubungan Industrial	Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi dan Terselesaikan	100 persen	Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
					Jumlah pekerja yang dilikutsertakan pada program jamsos tenaga kerja	50 persen			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investasi yang berinvestasi	175 milyar	Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan	80 indeks	Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Kelengkapan Administrasi Investasi/ Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	3 level	Pendukung Urusan Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
							Persentase capaian fisik dan keuangan pembangunan Daerah	80 persen		
							Penilaian Kinerja BUMD dan BLUD	61,5 nilai		
						Program Penataan Desa	Persentase penataan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar desa yang terbentuk	42 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa dengan status minimal swakarya	60 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
						- SD	104,15 persen			
						- SMP	80,25 persen			
						- PAUD	80,15 persen			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,21 TAHUN	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Sertifikasi	42,25 persen	Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
		Persentase Balita Gizi Buruk	0%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 persen	Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
		Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12 persen			
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78 persen	Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
		Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100%		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai Standar	100 persen	Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
		Angka melek huruf	100%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	60 persen	Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang ber PHBS	47 persen	Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Persentase pengelolaan sistem gender dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial	100 persen	Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Program Rehabilitasi Sosial		Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 persen	Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dukungan APBD dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG	30 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan terhadap perempuan dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pemenuhan hak anak	80 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sejahtera tingkat II	91 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	75 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman	90 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku	93 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100 persen			
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	15 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi	13 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	30 persen	Kepemudaan Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	35 persen	Kepemudaan Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	3 peringkat POPDA	Kepemudaan Dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 4.15. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 Mendukung Prioritas Provinsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDes yang berkembang	15 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Persentase peningkatan status desa Mandiri	60 persen			
					Persentase pengentasan desa tertinggal	100 persen			
					Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen e-KTP	98 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
						Cakupan Kepemilikan Dokumen KK	95 persen		
						Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA	50 persen		
					Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	97 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
						Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	100 persen		
						Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	100 persen		
						Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	100 persen		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 persen	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	90 persen	Komunikasi Dan Informatika	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD, kelurahan, desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan	25 persen	Komunikasi Dan Informatika	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60 persen	Komunikasi Dan Informatika	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD memiliki keamanan informasi	100 persen	Komunikasi Dan Informatika	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	100 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	44 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas sesuai kewenangan	44 persen	Perhubungan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100 persen	Perhubungan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	10.000 orang	Perpustakaan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Persentase jumlah layanan bidang perpustakaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100 persen		
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian naskah <i>kuno dan beraroma budaya</i>	100 persen	Perpustakaan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang dibangun	32 unit	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Persentase ketersediaan air baku pertanian	100 persen		
					Penurunan titik kawasan terkena dampak banjir	21 titik		
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase rekomendasi IJUK	persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	60 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase lahan yang bisa di bebaskan untuk pembangunan	100 persen	Pertanahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data tanah kosong di Kabupaten Bangka barat	78,53 persen	Pertanahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten	33 persen	Pertanahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90 persen	Pangan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase POKTAN/GAPOKTAN/ Petani yang Mendapat Penyuluhan	100 persen	Pertanian	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4 kegiatan	Lingkungan Hidup	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola	33,33 persen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	25 persen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase keikutsertaan sekolah yang menerapkan prinsip sekolah yang berbasis lingkungan	9 persen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
2	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Urusan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 persen	Perencanaan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas merit-based	Perbaikan sistem remunerasi	YA	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi	2 peringkat	Perencanaan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
			Career Development sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	YA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100 persen	Perencanaan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN daerah	70 persen	Kepegawaian	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
						Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	80 persen		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
						Persentase capaian penilaian kinerja ASN	85 persen		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	35 persen	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	3 temuan	Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah	2,5 persen	Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	menurunnya temuan atas audit BPK atas LKD Pemda	6 temuan	Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	100 persen	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
						Persentase OPD LAKIP BB	40 persen		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pemenuhan Infrastruktur IACM	2,5 level	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100 persen	Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 persen	Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100 persen	Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara	0 kasus	Pemerintahan Umum	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase ketidakhadiran masyarakat dalam pemilu/pemilukada	15 persen	Pemerintahan Umum	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks kinerja ormas	180 skor	Pemerintahan Umum	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah angka kriminalitas menurun	150 kasus	Pemerintahan Umum	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial menurun	10 kasus	Pemerintahan Umum	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,28 nilai	Pendukung Urusan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Cakupan Raperda menjadi Perda	100 persen	Sekretariat DPRD	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD dan Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	75 persen	Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
					Meningkatnya indeks Kearsipan	Baik	status			
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip di depo arsip yang terpelihara dengan baik	30	persen	Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	
					Meningkatnya kualitas sistem administrasi arsip statis	100	persen			
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	8,90 – 12,33	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
			Laju pertumbuhan investasi	0,02	Program Pengembangan Ukm	Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
			Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	0,225	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	100	persen	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
			Pertumbuhan wisatawan per tahun	50.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sub Distributor/Agen/Sub Agen Bapok yang terbina	12		Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
		Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (one stop service).	ADA	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu	6.600	Konsumen	Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
			Kesesuaian dengan tata ruang	1	Program Pengembangan Eksport	Jumlah Pameran yang Diikuti	100	persen	Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
		Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	0,77	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100	persen	Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
		Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	0,0333	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Industri	100	persen	Perindustrian	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
			Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	< 0,255	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	100	persen	Perindustrian	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya sistem informasi Industri	100	persen	Perindustrian	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	10	kebudayaan	Kebudayaan	Pengembangan Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang Aktif melakukan Pengembangan Kesenian	10 persen	Kebudayaan	Pengembangan Pariwisata
				Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	1 kerjasama	Kebudayaan	Pengembangan Pariwisata
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	11 CB	Kebudayaan	Pengembangan Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	10 DTW dan 3 desintasi	Pariwisata	Pengembangan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan	104.000 orang	Pariwisata	Pengembangan Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya zona ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1 lokasi dan 1 usulan hak kekayaan intelektual	Pariwisata	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif	2 jenis ekonomi kreatif	Pariwisata	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	82,4 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Pangan	2310 kkal/ 63 g/ 75 g	Pangan	Pembangunan Agropolitan
					Tingkat Konsumsi Pangan	2100 kkal/ 57 g/ 68 g		
					Skor Pola Pangan Harapan	88,9 skor		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	80 persen	Pangan	Pembangunan Agropolitan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 persen	Pertanian	Pembangunan Agropolitan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 persen	Pertanian	Pembangunan Agropolitan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	100 persen	Pertanian	Pembangunan Agropolitan
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertanggulangi	100 persen	Pertanian	Pembangunan Agropolitan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya jumlah unit usaha pertanian yang memenuhi standar yang berlaku	3 perusahaan	Pertanian	Pembangunan Agropolitan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20 persen	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Bahari
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	20 persen	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Bahari
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Menurunnya Tindak Pidana Perikanan	100 persen	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Bahari
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah	49 Kg/tahun	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Bahari
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19 persen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Tahura	16 persen	Lingkungan Hidup	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 persen	Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 persen	Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Hubungan Industrial	Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi dan Terselesaikan	100 persen	Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Jumlah pekerja yang diikutsertakan pada program jamsos tenaga kerja	50 persen		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investasi yang berinvestasi	175 milyar	Penanaman Modal	Peningkatan Ekonomi Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan	80 indeks	Penanaman Modal	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Kelengkapan Administrasi Investasi/ Penanaman Modal	5 persen	Penanaman Modal	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	3 level	Pendukung Urusan Pemerintahan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
						Persentase capaian fisik dan keuangan pembangunan Daerah	80 persen		
					Program Penataan Desa	Penilaian Kinerja BUMD dan BLUD	61,5 nilai		
						Persentase penataan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar desa yang terbentuk	42 persen	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Pendidikan	Pembangunan Pendidikan
						- SD	104,15 persen		
						- SMP	80,25 persen		
						- PAUD	80,15 persen		
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,21 TAHUN	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Sertifikasi	42,25 persen	Pendidikan	Pembangunan Pendidikan
			Persentase Balita Gizi Buruk	0%		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 persen		
			Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12 persen		
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78 persen	Kesehatan	Pembangunan Kesehatan
			Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100%		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai Standar	100 persen		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		Angka melek huruf	100%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	60 persen	Kesehatan	Pembangunan Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang ber PHBS	47 persen	Kesehatan	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pengelolaan sistem gender dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembangunan Kesehatan
				Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial	100 persen	Sosial	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	Sosial	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Sosial	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 persen	Sosial	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dukungan APBD dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG	30 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembangunan Kesehatan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan terhadap perempuan dan anak	100 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembangunan Kesehatan
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pemenuhan hak anak	80 persen	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pembangunan Kesehatan
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	2,8 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pembangunan Kesehatan
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sejahtera tingkat II	91 persen	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pembangunan Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	TOLAK UKUR	TARGET	URUSAN	PRIORITAS PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	75 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman	90 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Kesehatan
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku	93 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Kesehatan
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	100 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Kesehatan
					Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU perumahan	100 persen		
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	15 persen	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Wilayah yang terlalui pengelolaan sampah secara terintegrasi	13 persen	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Kesehatan
				Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pembangunan Kesehatan
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	100 persen	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pembangunan Kesehatan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	30 persen	Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Pendidikan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	35 persen	Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Pendidikan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	3 peringkat POPDA	Kepemudaan Dan Olahraga	Pembangunan Pendidikan



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta isu strategis pembangunan yang ada. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan.

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan secara langsung dapat menyelesaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, dikelasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum serta unsur kewilayahan.

5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang



urusana pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD).

Namun ada beberapa kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperuntukkan khusus untuk pelaksanaan rutin pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) antara lain kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, layanan administrasi DPRD penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

5.1.2. Program Urusan Wajib

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan sub unit organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan dengan 4 (empat) program strategis yaitu:
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- b. Sub Unit Organisasi dalam hal ini RSUD Sejiran Setason dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat".
- c. Sub Unit Organisasi dalam hal ini Puskesmas Muntok, Puskesmas Simpangteritip, Puskesmas Kundi, Puskesmas Jebus, Puskesmas Puput, Puskesmas Sekar Biru, Puskesmas Kelapa, serta Puskesmas Tempilang memiliki 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat".



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 4 (empat) program strategis:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

b. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan dengan 4 (empat) program strategis:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 4) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Kawasan Permukiman;
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Penanggulangan Bencana;
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :



- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 4) Program Penanganan Bencana.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Program Hubungan Industrial.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 3 (tiga) program strategis yaitu:
- 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - 2) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
 - 3) Program Penatagunaan Tanah.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 7 (tujuh) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;



- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Pengelolaan Persampahan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :



- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2) Program Pengelolaan Pelayaran.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2) Program Aplikasi Informatika.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
 - 3) Program Pengembangan UMKM.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral".
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi".



22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis yaitu:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Kearsipan;
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

5.1.3. Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian;
- 6) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 3) Program Pengembangan Ekspor;
- 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustri

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

5.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.



2. Bidang Penelitian

Bidang Penelitian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Penelitian dan Pengembangan Daerah”.

3. Bidang Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”.

4. Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Kepegawaian Daerah”.

5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

5.1.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.



5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

5.1.7. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

5.1.8. Unsur Kewilayahian

Unsur Kewilayahian dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Paritipta serta Kecamatan Tempilang.

a. Kecamatan Muntok

Kecamatan Muntok melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

b. Kecamatan Simpangteritip

Kecamatan Simpangteritip melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



c. Kecamatan Jebus

Kecamatan Jebus melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

d. Kecamatan Kelapa

Kecamatan Kelapa melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

e. Kecamatan Tempilang

Kecamatan Tempilang melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

f. Kecamatan Parititga

Kecamatan Parittiga melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan sudah memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2022. Rincian pagu indikatif berdasarkan urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1 Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Tahun 2022

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp494.707.774.286,51
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp237,193,528,000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rp170,964,523,100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp37,850,357,875,52
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Rp24,250,000,000,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Rp7,672,255,511,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	Rp10,394,559,800,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp8,482,550,000,00
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		Rp87,786,490,521,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp5,690,689,500,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 398,919,761,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp12,901,651,290,00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp200,000,000,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	Rp15,236,834,000,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp6,153,503,382,00
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp4,657,495,000,00
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp5,069,689,598,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Rp1,760,000,000,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp7,192,792,000,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Rp5,631,850,000,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp887,645,000,00



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp10,322,365,000.00
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp239,840,000.00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp63,950,000.00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp6,013,460,000.00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp5,265,805,990.00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 100,000,000.00
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Rp9,817,729,667.00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp3,771,820,000.00
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp1,723,750,000.00
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp2,766,970,267.00
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup	Rp575,000,000.00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Rp480,189,400.00
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Rp500,000,000.00
D.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Rp89,879,189,619.00
32	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Rp36,736,020,821.00
33	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	Rp53,143,168,798.00
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rp152,264,042,760.00
34	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Rp9,107,607,619.00
35	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp124,885,104,311.00
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp9,126,432,700.00
36	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Rp7,231,672,500.00
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp 1,202,915,000.00
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Rp 710,310,630.00
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		Rp 8,417,000,000.00
39	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Daerah	Rp 8,417,000,000.00
G.	UNSUR KEWILAYAHAN		Rp 37,220,139,000.00
40	KEWILAYAHAN	Kecamatan Muntok	Rp 15,679,223,000.00
		Kecamatan Simpangteritip	Rp 3,909,480,000.00
		Kecamatan Jebus	Rp 3,723,815,000.00



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
		Kecamatan Parittiga	Rp 3,350,864,000.00
		Kecamatan Kelapa	Rp 6,869,460,000.00
		Kecamatan Tempilang	Rp 3,687,297,000.00
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		Rp3,964,270,000.00
41	PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp3,964,270,000.00
	TOTAL		Rp886,156,635,853.52

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran
1.	Sekretariat Daerah	Rp36,736,020,821.00
2.	Sekretariat DPRD	Rp53,143,168,798.00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Rp9,817,918,249.00
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp124,885,104,311.00
5.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp9,126,432,700.00
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp8,434,587,500.00
7.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp247,515,893,000.00
8.	Dinas Kesehatan	Rp170,964,523,100.00
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp38,050,357,875.52
10.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Rp33,682,255,511.00
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp13,140,045,000.00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp15,668,621,557.00
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp6,578,334,500.00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Rp6,612,039,400.00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp5,468,609,359.00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp7,737,210,000.00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp15,811,834,000.00
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp3,771,820,000.00
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp7,496,582,000.00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp5,365,805,990.00
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp6,153,503,382.00
22.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	Rp10,394,559,800.00
23.	Inspektorat Daerah	Rp8,417,000,000.00
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp3,964,270,000.00
25.	Kecamatan Muntok	Rp15,679,223,000.00
26.	Kecamatan Simpangteritip	Rp3,909,480,000.00
27.	Kecamatan Jebus	Rp3,723,815,000.00
28.	Kecamatan Parittiga	Rp3,350,864,000.00
29.	Kecamatan Kelapa	Rp6,869,460,000.00
30.	Kecamatan Tempilang	Rp3,687,297,000.00
	TOTAL	Rp886,156,635,853.52

TABEL 5.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								496.807.774.286,52	550.302.998.201,00				
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								237.193.528.000,00	225.574.990.221,00				
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				237.193.528.000,00	225.574.990.221,00				
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni untuk SD	100%									
				Angka Partisipasi Murni untuk SMP	100%									
				Angka melek huruf	100%									
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	171.753.045.000,00	171.753.045.000,00				
1 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
1 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tersusun	4 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00				
1 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tersusun	1 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00				
1 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00				
1 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00				
1 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00				
1 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	168.512.500.000,00	168.512.500.000,00				
1 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	168.500.000.000,00	168.500.000.000,00				
1 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00				
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00				
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan AnalisisJumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00				
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00				
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00				
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.013.815.000,00	1.013.815.000,00				
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya alat listrik untuk menunjang kerja kanto	6 jenis	23.000.000,00	23.000.000,00				
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	5 jenis	11.550.000,00	11.550.000,00				
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12 bulan	79.165.000,00	79.165.000,00				
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor dan cetak kartu NISN (5.000 kartu)	12 bulan	106.300.000,00	106.300.000,00				
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12 bulan	13.800.000,00	13.800.000,00				
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya alat tulis kantor	11 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00				
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	700.000.000,00	700.000.000,00				
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya gedung olahraga	100 Persen	1.789.730.000,00	1.789.730.000,00				
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	158.250.000,00	158.250.000,00				
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	504 ob	1.629.480.000,00	1.629.480.000,00				
1	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	377.000.000,00	377.000.000,00				
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	45.000.000,00	45.000.000,00				
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional lapangan	12 bulan	207.000.000,00	207.000.000,00				
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya gedung Kantor (penggecatan gedung kantor dan pengantian plafon rusak)	2 paket	125.000.000,00	125.000.000,00				
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Angka Partisipasi Kasar (APK)		65.415.483.000,00	53.796.945.221,00				
										- SD	104,15%						
										- SMP	80,25%						
										- PAUD	80,15%						
1	1	2	2.01	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94,75%	38.767.387.000,00	34.103.590.000,00				
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang kelas baru				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	1 ruang	300.000.000,00		Reses			
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Ruang Guru	5 Ruang	974.457.000,00		APBD (PIK)			
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Toilet siswa	2 Paket	3.115.136.000,00		APBD (PIK), Reses			
										Terlaksananya pembangunan Mushollah sekolah	1 ruang						
										Terbangunnya Sumur Bor Sekolah	4 unit						
										Terbangunnya Pagar Sekolah	20 Sekolah						
										Terlaksananya pembangunan Kelas Alam	1 unit						
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas	6 Ruang	331.854.000,00		APBD (PIK), Reses			
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	1 Ruang	110.000.000,00		APBD (PIK)			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet/jamban sekolah	1 Paket	45.000.000,00		APBD (PIK)			
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan mebel sekolah	290 Set	332.000.000,00		APBD (PIK)			
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan,	Tersedianya Pengadaan Raport SD	4200 buku	190.000.000,00	-	-			
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya drum band sekolah	1 paket	75.000.000,00		APBD (PIK)			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya ujian bagi peserta didik	139 sekolah	5.000.000,00	-	-			
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kompetisi Sains Nasional Tingkat SD	1 mata pelajaran	50.000.000,00		-			
										Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	12 cabang olahraga						
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumnya gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	15.000.000.000,00	15.934.650.000,00				
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan,	Pembayaran bantuan biaya Pendidikan Profesi Guru SD	25 orang	187.500.000,00	187.500.000,00				
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terakreditasinya Sekolah Dasar	20 sekolah	90.000.000,00	20.000.000,00				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumya dana BOS SD	134 SD	17.961.440.000,00	17.961.440.000,00				
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,85%	14.515.924.000,00	9.820.970.000,00					
1	1	2	2.02														
1	1	2	2.02														
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	277.000.000,00		APBD (PIK)			
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Toilet Sekolah	4 Pintu (SMP N 2 Simpang Teritip)	490.104.000,00		APBD (PIK)			
										Terlaksananya pemasangan conblok	SMPN 2 Muntok						
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Sekolah	5 Unit						
1	1	2	2.02							Terlaksananya pengadaan mebel sekolah	104 set	124.000.000,00		APBD (PIK)			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Raport SMP	2800 buku	199.725.000,00	129.725.000,00				
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu	200 orang	312.500.000,00	125.000.000,00				
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya buku dan alat tulis siswa kurang mampu SMP	62 siswa	15.000.000,00	15.000.000,00				
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan	34 sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00				
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Kompetisi sains siswa nasional	3 Mata Pelajaran	75.000.000,00	75.000.000,00				
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumya gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	6.000.000.000,00	2.443.650.000,00				
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumya bantuan pendidikan guru peserta PPG	16 orang	125.315.000,00	125.315.000,00				
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumya Dana BOS SMP	34 sekolah	6.877.280.000,00	6.877.280.000,00				
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama	34 sekolah	10.000.000,00	20.000.000,00				
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,25%	6.257.590.000,00	3.997.803.221,00				
1	1	2	2.03					Tersedianya Raport TK	1000 buku	50.000.000,00	50.000.000,00				
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	1000 siswa	142.590.000,00	142.590.000,00				
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji Bulanan GTT dan PTT TK	12 bulan	5.890.000.000,00	3.758.245.000,00				
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya tambahan penghasilan pendidik PAUD	12 bulan						
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya diklat dasar guru PAUD	30 orang	15.000.000,00	15.000.000,00				
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembinaan PAUD oleh Bunda PAUD	6 kecamatan	160.000.000,00	31.968.221,00				
								Terlaksananya akreditasi PAUD	25 lembaga						

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	1	2	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4,95%	5.874.582.000,00	5.874.582.000,00				
1	1	2	2.04	12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan UNPK	5 PKBM	5.000.000,00	5.000.000,00				
1	1	2	2.04	14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya insentif tutor Paket A, B dan C	40 orang	5.859.582.000,00	5.859.582.000,00				
								Tersedianya insentif ustad/ustazah	935 orang						
1	1	2	2.04	16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pendidikan keluarga di Satuan Pendidikan	120 orang	10.000.000,00	10.000.000,00				
								Tersedianya data pendidikan non formal	1 dokumen						
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Persentase Guru Sertifikasi	42,25%	25.000.000,00	25.000.000,00				
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	43,15%	25.000.000,00	25.000.000,00				
1	1	4	2.01	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFT	1 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00				
				DINAS KESEHATAN						170.964.523.100,00	280.847.024.480,00				
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peningkattan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%		170.964.523.100,00	280.847.024.480,00				
					Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan		Angka Usia Harapan Hidup	72 TAHUN							
							Persentase Balita Gizi Buruk	0%							
							Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai	1 : 2000							
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	73.271.661.000,00	69.467.310.280,00				
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	6.000.000,00	10.000.000,00				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00				
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00				
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00				
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	66.306.000.000,00	66.306.000.000,00				
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	66.300.000.000,00	66.300.000.000,00				
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00				
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00				
1	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00				
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	12.500.000,00	12.500.000,00				
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000,00	12.500.000,00				
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	634.111.000,00	986.072.080,00				
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	57.611.000	129.034.644				
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	1.500.000	6.524.760				
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	55.000.000	67.667.124				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	55.000.000	71.669.400				
1 02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	5.000.000	6.007.200				
1 02 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan/material	12 bulan	60.000.000	85.968.952				
1 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	400.000.000	619.200.000				
1 02 01 2,07	pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.400.000.000					
1 02 01 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit (pagar)	2.400.000.000					
1 02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.673.050.000,00	1.576.338.200,00				
1 02 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	139.800.000	153.780.000				
1 02 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	165 unit	59.350.000	65.276.200				
1 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	1440 orang/bulan	3.473.900.000	1.357.282.000				
1 02 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	240.000.000,00	576.400.000,00				
1 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	46.000.000,00	288.200.000				
1 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	7 unit	194.000.000	288.200.000				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100 Persen	51.829.686.500,00	42.957.120.380,00				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
										Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Sarana Prasarana dan Alat (SPA) Rumah Sakit sesuai standar	90%	1.679.286.500,00	9.934.050.000,00				
										Terpenuhinya fasilitas layanan kesehatan UKM dan UKP di Puskesmas	100%						
										Persentase FKTP dan FKTL milik pemerintah sesuai standart	84%						
1	02	02	2,01	09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan renovasi sarana pelayanan kesehatan	2 unit	315.000.000	1.728.000.000				
1	02	02	2,01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sarana Rumah Sakit	6 unit	362.940.000	650.000.000	APBD			
1	02	02	2,01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	8 puskesmas	701.346.500	330.000.000	APBD & APBD (PIK)			
1	02	02	2,01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase alat kesehatan memenuhi standar di setiap puskesmas	95 %	100.000.000	3.426.050.000				
1	02	02	2,01	16 Pengadaan Obat, Vaksin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100 %	200.000.000	3.800.000.000				
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	50.135.400.000,00	32.873.720.380,00				
										Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
										Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
										Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	20.000.000	64.761.000				
1	02	02	2,02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	20.000.000	219.353.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 02 02 2,02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	75.000.000	232.023.000				
1 02 02 2,02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	30.000.000	77.774.000				
1 02 02 2,02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	65.000.000	100.000.000				
1 02 02 2,02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	20.000.000	22.000.000				
1 02 02 2,02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	16.000.000	17.600.000				
1 02 02 2,02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	38.600.000	42.460.000				
1 02 02 2,02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	60.000.000	117.645.000				
1 02 02 2,02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	8 puskesmas	5.800.000	150.000.000				
1 02 02 2,02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase balita gizi buruk/stunting yg mendapatkan perawatan/pelayanan kesehatan	100 %	100.000.000	450.000.000				
1 02 02 2,02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasnyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Jumlah fasnyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Percentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar Percentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar	3 rumah sakit 8 puskesmas 68 % 100 %	10.000.000	150.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 02 02 2,02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata laksana penyakit menular. Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam, kasus AFP yang ditemukan 2 kasus, kasus campak ditemukan 24 kasus Percentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata laksana penyakit menular. Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam, kasus AFP yang ditemukan 2 kasus, kasus campak ditemukan 24 kasus	1 RSUD 8 puskesmas	10.000.000	74.250.000				
1 02 02 2,02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	20.000.000	27.500.000				
1 02 02 2,02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlayaninya kesehatan matra (kondisi khusus atau kondisional dan darurat)	100 %	20.000.000	187.000.000				
1 02 02 2,02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	API malaria Cakupan penemuan pneumonia balita Percentase 50% Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai dengan MTBS Percentase 80% Puskesmas melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar Percentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Percentase ibu hamil yang diperiksa hepatitis Percentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan Percentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Percentase Puskesmas yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Percentase	1 per mil 70 % 4 puskesmas 6 puskesmas 80 % 100 % 92 % 8.7 % 7 puskesmas 100 % 90 %	100.000.000	752.120.500				
1 02 02 2,02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat	103.616 peserta	49.500.000.000	15.422.619.920	APBD & APBD (PIK)			
1 02 02 2,02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Predikat puskesmas yang terakreditasi (7 utama, 1 paripurna) Terlaksananya survei akreditasi RSUD (akreditasi madya)	8 puskesmas 1 RSUD	20.000.000	350.000.000				
1 02 02 2,02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119	8 puskesmas	5.000.000	200.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	02	02	2,03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas secara Terintegrasi	88%	10.000.000,00	36.850.000,00				
1	02	02	2,03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, up dating dan analisis data serta penyusunan profil	2 jenis	5.000.000	24.200.000				
1	02	02	2,03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sistem Informasi Managemen Puskesmas	8 puskesmas	5.000.000	12.650.000				
1	02	02	2,04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Percentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	100%	5.000.000,00	112.500.000,00				
1	02	02	2,04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya koordinasi tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 rumah sakit	5.000.000	25.000.000				
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Percentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai Standar	100%	6.158.175.600,00	6.525.738.600,00				
1	02	03	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				Presentase perencanaan kebutuhan sesuai standar	100%	6.148.175.600,00	6.156.755.600,00				
1	02	03	2,02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar	100 %	6.148.175.600	6.156.755.600				
1	02	03	2,03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	95%	10.000.000,00	368.983.000,00				
1	02	03	2,03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	50 orang	10.000.000	368.983.000				
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Percentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	60%	15.000.000,00	107.000.000,00				
1	02	04	2,01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Percentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang memiliki izin	100%	5.000.000,00	32.000.000,00				
1	02	04	2,01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase pelaksanaan pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional sebesar	100 %	5.000.000	32.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 02 04 2,03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Persentasi Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan Izin Produksi	100%	5.000.000,00	25.000.000,00				
1 02 04 2,03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan pengawasan izin produksi dan sertifikat produksi pangan	100 %	5.000.000	25.000.000				
1 02 04 2,04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100%	5.000.000,00	50.000.000,00				
1 02 04 2,04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar	50 %	5.000.000	50.000.000				
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS	47%	60.000.000,00	408.957.500,00				
1 02 05 2,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	30%	50.000.000,00	270.000.000,00				
1 02 05 2,01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang ber-PHBS Presentase desa siaga aktif strata mandiri	66 desa/kelurahan 30 %	50.000.000	270.000.000				
1 02 05 2,02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS	17%	5.000.000,00	28.957.500,00				
1 02 05 2,02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan GERMAS	100 %	5.000.000	28.957.500				
1 02 05 2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	67,03%	5.000.000,00	110.000.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 02 05 2,03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu aktif	120 posyandu	5.000.000	110.000.000				
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						TERPENUHNYA KEBUTUHAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	100%	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00				
1 02 01 2,10	Peningkatan Pelayanan BLUD						Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	100%	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00				
1 02 01 2,10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan (BLUD)	1 RSUD	21.500.000.000	21.500.000.000				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	100%	5.200.000.000,00	19.650.000.000,00				
							Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12%						
							Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78%						
1 02 02 2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase sarana dan prasarana dan alat (SPA) Rumah Sakit sesuai standar	72%	200.000.000,00	650.000.000,00				
							Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP di setiap puskesmas	100%						
							Persentase FKTP milik pemerintah sesuai standar	84%						
1 02 02 2,01 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	I Gedung (graha rawat jalan)	100.000.000					
1 02 02 2,01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Sarana Rumah Sakit	1 RSUD	100.000.000	650.000.000	APBD			
1 02 02 2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Predikat strata akreditasi rumah sakit	Madya	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00				
							Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	79%						
1 02 02 2,02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan-bahan logistik Rumah Sakit	1 RSUD	5.000.000.000	19.000.000.000				
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muntok														
									2.050.000.000,00	14.104.413.960,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	2.050.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	2.050.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	2.050.000.000	14.104.413.960				
										1.640.000.000,00	14.104.413.960,00				
				Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus											
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	1.640.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	1.640.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.640.000.000	14.104.413.960				
										890.000.000,00	14.104.413.960,00				
				Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput											
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	890.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	890.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	890.000.000	14.104.413.960				
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa					2.280.000.000,00	14.104.413.960,00				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	2.280.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	2.280.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	2.280.000.000	14.104.413.960				
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang					1.900.000.000,00	14.104.413.960,00				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	1.900.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	1.900.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.900.000.000	14.104.413.960				
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip					1.820.000.000,00	14.104.413.960,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	1.820.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	1.820.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.820.000.000	14.104.413.960				
										1.470.000.000,00	14.104.413.960,00				
				Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru											
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	1.470.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	1.470.000.000,00	14.104.413.960,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.470.000.000	14.104.413.960				
										880.000.000,00	21.500.000.000,00				
				Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundu											
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%	880.000.000,00	21.500.000.000,00				
								Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	10%						
1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	880.000.000,00	21.500.000.000,00				
								Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	190						

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
								Eliminasi malaria	1 Kabupaten						
								Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	7%						
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	880.000.000	21.500.000.000			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						37.850.357.875,52	15.089.983.000,00			
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82			37.850.357.875,52	15.089.983.000,00			
					Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Kesesuaian dengan tata ruang	100%							
						Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik	Cakupan jalan berkondisi mantap	77%							
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.267.318.000,00	7.592.318.000,00			
1	03	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00			
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000			
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			
1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000			
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.500.000	8.500.000			
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.112.500.000	4.112.500.000			
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.100.000.000	4.100.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 03 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
1 03 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 03 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 03 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00				
1 03 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
1 03 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
1 03 01 2,04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	12 bulan	2.500.000	2.500.000				
1 03 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
1 03 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkappannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
1 03 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
1 03 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	629.000.000	629.000.000				
1 03 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
1 03 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	3.000.000	3.000.000				
1 03 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000	50.000.000				
1 03 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000	15.000.000				
1 03 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	6.000.000	6.000.000				
1 03 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Bahan/Material untuk kantor	12 bulan	40.000.000	40.000.000				
1 03 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	500.000.000	500.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 03 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	13 bulan	5.000.000	5.000.000				
4 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	800.000.000,00	-				
4 02 01 2,07 03	Pengadaan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat Besar	1 unit (PC mini)	500.000.000	0				
4 02 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	300.000.000					
1 03 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.818.640.000	1.818.640.000				
1 03 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
1 03 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	120.000.000	120.000.000				
1 03 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	20.000.000	20.000.000				
1 03 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	684 Ob	1.676.640.000	1.676.640.000				
1 03 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	832.178.000	957.178.000				
1 03 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	57.178.000	57.178.000				
1 03 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	300.000.000	300.000.000				
1 03 01 2,09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12 bulan	225.000.000	225.000.000				
1 03 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 UNIT	250.000.000	250.000.000				
1 03 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			125.000.000				
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber sumber air yang di bangun	32 Unit	3.787.984.000	3.482.400.000				
							Persentase ketersediaan air baku pertanian	46,39%						
							Penurunan titik kawasan terkena dampak banjir	21 Titik						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 03 02 2,01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.311.984.000	1.034.400.000				
1 03 02 2,01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kec. Muntok	Terlaksananya pembangunan Perkuatan Tebing		500.000.000					
	- talud kp. Kerangan							35 meter						
1 03 02 2,01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kec. Muntok	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		1.300.000.000					
	- Talud Pantai Batu Berani							100 meter						
1 03 02 2,01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kec. Muntok	Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengeringan sungai/kali	11.937 m3	261.984.000	684.400.000	APBD + APBD (PIK)			
	- Normalisasi Sungai Culong							8.187 m3						
	- Normalisasi Sungai Kabupaten Bangka Barat				Kab. Bangka Barat									
c	- Normalisasi Sungai Rt. 05 - rt. 10 Desa Air lintang				Desa Air lintang			3.750 m3			PIK			
1 03 02 2,01 59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				Kab. Bangka Barat, Paritiga, Kelabat	Kec. Paritiga	Terpeliharanya Bangunan Pengaman Pantai	250 meter	250.000.000	350.000.000	APBD			
	- Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai Belembang							250 meter						
1 03 02 2,02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	1.476.000.000	2.448.000.000				
1 03 02 2,02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kec. Simpang Teritip	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa	4 Dokumen	548.000.000	548.000.000				
	- SID Jaringan Irrigasi Air Nyatoh (230 HA)					Kec. Kelapa								
	- SID Jaringan irrigasi Dendang (120 Ha)					Kec. Simpang Teritip								
	-SID Jaringan irrigasi Bukit Terak (50 Ha)					Kec. Kelapa								
	- Fisibilities Study (FS) (5 Ha)					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Jaringan irrigasi permukaan	2 kegiatan	200.000.000	500.000.000				
	- Komisi Irrigasi T.A. 2022													
1 03 02 2,02 08	Peningkatan Jaringan Irrigasi Permukaan				Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung									
					Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
				- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Kacung					Desa Kacung								
				- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Simpang Yul					Desa Simpang Yul								
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung	Terpeliharaanya jaringan irigasi	3 kegiatan	300.000.000	500.000.000				
				- Rehabilitasi Bangunan Sadap D.I Kacung					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Air Bulin								
				- Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tebing Bulin					Kec. Kelapa								
				- Rehabilitasi Bangunan Saluran D.I Tebing Bulin					Kec. Kelapa								
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Peradong Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	9.375 m3	300.000.000	550.000.000				
				- Normalisasi Sungai D.I. Paradong					Kab. Bangka Barat, Tempilang, Buyan Kelumbi								
				- Normalisasi Sungai D.I. Buyan Kelumbi					Kec. Simpang Teritip								
				- Normalisasi Sungai D.I. Jebus					Kec. Tempilang								
1	03	02	2,02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				Kab. Bangka Barat, Jebus, Limbung	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	4.000 m3	128.000.000	350.000.000				
				-Normalisasi Sungai D.I.R Kebayan Limbung					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung								
				-Normalisasi Sungai D.I.R Mancung Belit					Kec. Jebus								
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Kec. Kelapa								
1	03	10	2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	82,40%	25.335.055.876	3.190.265.000				
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				Kab. Bangka Barat, Kelapa, Air Bulin	Jumlah dokumen tersusun	2 Dokumen	718.510.000	218.510.000				
				- DED Jalan Simpang Bulin - Petar					Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kelurahan								
				- Dokumen Lingkungan Jalan di Kecamatan Parittiga													
				- Dokumen Perencanaan Jln. Lingkar Air Nyatoh - Mayang													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 03 10 2,01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	1 Dokumen	134.255.000	109.255.000				
1 03 10 2,01 05	Pembangunan Jalan					Desa Air limau, Kecamatan Muntok	Panjang jalan terbangun	18.300 M	2.458.850.000,00		APBD (PIK), Reses			
	- Pembangunan jalan Tanjung Ular - Air Limau (Lanjutan)					Kecamatan Muntok		17.800 m						
	Pembangunan jalan Gang Duren, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru					Gang Duren, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru		500 m			Reses			
	Pembangunan Jalan dari Jl. Begadang RT 03 tembus ke Jl. Setapak RT 02, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa					dari Jl. Begadang RT 03 tembus ke Jl. Setapak RT 02, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		140 m			Reses			
1 03 10 2,01 08	Rekonstruksi Jalan							12.700 M	14.420.393.879,95		APBD (PIK), Reses			
	- Peningkatan jalan di Rt 07 dan Rt 06 Dusun III Desa Kundi					Desa Kundi		1500 M			PIK			
	- Pembangunan Siring Jalan Raya Depan Gereja RT 14 Dusun Cupat					Cupat		800 M			PIK			
	- Pembangunan siring Dusun Gudang Papan RT 02					Sekarbiru		300 M			PIK			
	- Pembangunan siring jalan Rt 01, Rt 07 s/d Rt 08, DAN RT 09 dan Rt 03 s/d Rt 10					Teluk Limau		1000 M			PIK			
	- Peningkatan jalan ke pantai siangau					Teluk Limau		1000 M			PIK			
	- Pembangunan siring jalan RT 05					Kacung		200 M			PIK			
	- Pembangunan siring jalan Air Majid RT 05					Kelapa		400 M			PIK			
	- Peningkatan jalan RT. 014 Dusun Nyikep, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak					Desa Penyampak		1000 M			PIK			
	Rehabilitasi siring jalan kampung sidorejo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Daeng					kampung sidorejo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Daeng		500 M			Reses			
	Pembangunan siring jalan RT 05 Gang Alfisuaimi, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut					RT 05 Gang Alfisuaimi, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut		250 M			Reses			
	Pembangunan siring jalan raya dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat					jalan raya dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat		200 M			Reses			
	Peningkatan jalan dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat					dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat		225 M			Reses			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Peningkatan jalan masuk gereja, Kab. Bangka Barat, Parittiqa, Sekar Biru					jalan masuk gereja, Kab. Bangka Barat, Parittiqa, Sekar Biru		80 M			Reses			
		Pembangunan talud jalan RT 10 dusun tayu, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap					RT 10 dusun tayu, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		184 M			Reses			
		Rehabilitasi siring jalan Air Pangkal RT 02 RW 01 Dusun Jebus, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus					Jalan Air Pangkal RT 02 RW 01 Dusun Jebus, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus		100 M			Reses			
		Peningkatan jalan kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru					kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru		300 M			Reses			
		Peningkatan jalan jalan air mas dusun 2, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau					jalan air mas dusun 2, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau		437 M			Reses			
		Pembangunan siring jalan kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru					kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru		150 M			Reses			
		Peningkatan jalan jalan gang cong sipen, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau					jalan gang cong sipen, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau		350 M			Reses			
		Peningkatan jalan gang binjai, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau					jalan gang binjai, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau		250 M			Reses			
		peningkatan jalan kantor desa kundi jalan AMD					desa kundi, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Kundi		350 M			Reses			
		Peningkatan jalan gg damai RT 03 menjelang, Kab. Bangka Barat, Tanjung					jalan gg damai RT 03 menjelang, Kab. Bangka Barat, Tanjung		175 M			Reses			
		Peningkatan jalan jl simpang 4 RT 06, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung					jl simpang 4 RT 06, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung		280 M			Reses			
		Pembangunan siring jalan dekat rumah Bapak Man, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus, Seluruh Kelurahan/Desa					dekat rumah Bapak Man, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus, Seluruh Kelurahan/Desa		375 M			Reses			
		Pembangunan siring jalan air kemang tembus persimpangan 3, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut					jalan air kemang tembus persimpangan 3, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut		375 M			Reses			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Pembangunan siring jalan Kampung Jawa Desa Cupat, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat					Kampung Jawa Desa Cupat, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat		1000 M			Reses			
		Peningkatan Jalan desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Air Menduyung					desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Air Menduyung		1684 M			Reses			
		Pembangunan siring jalan desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Air Menduyung					desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Air Menduyung		500 M			Reses			
		Peningkatan jalan dusun tegek desa benteng kota kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota					dusun tegek desa benteng kota kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota		561 M			Reses			
		Peningkatan jalan Gang Sanyot RT 05 Kelapa Timur, Kab. Bangka Barat, Kelapa					Jalan Gang Sanyot RT 05 Kelapa Timur, Kab. Bangka Barat, Kelapa		335 M			Reses			
		Peningkatan jalan dusun tegek desa benteng, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota					dusun tegek desa benteng, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota		100 M			Reses			
		peningkatan jalan gang 25 gang perumahan air keladi rt 11 /rw 05					kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		300 M			Reses			
		Peningkatan jalan rt 01 dan lingkar hutan larang lestari kelapa					kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		444 M			Reses			
		Rehabilitasi siring bandar di lokasi rt 15, kelapa, kec. Kelapa					kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa, Kelapa		200 M			Reses			
		peningkatan jalan raya kundi pelangas dan pemeliharaan siring yang kurang memadai					desa kundi kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Kundi		175 M			Reses			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Rehabilitasi siring jalan dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan paritiga, Kab. Bangka Barat, Paritiga, Sekar Biru					dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan paritiga, Kab. Bangka Barat, Paritiga, Sekar Biru		250 M			Reses			
		Peningkatan jalan desa dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa, Seluruh Kelurahan/Desa					desa dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa, Seluruh Kelurahan/Desa		200 M			Reses			
		Rehabilitasi siring jalan Desa Dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Dendang					Desa Dendang, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Dendang		300 M			Reses			
		Peningkatan jalan rambutan gang somad Bpk. Sugianto Desa Cupat, Kab. Bangka Barat, Paritiga, Cupat					jalan rambutan gang somad Bpk. Sugianto Desa Cupat, Kab. Bangka Barat, Paritiga, Cupat		222 M			Reses			
		Pembangunan siring jalan Desa Sekarbiru, Kec. Paritiga					Desa Sekarbiru		400 M			Reses			
		Peningkatan jalan Perumahan muntok permai (SMPN 4 Muntok)					Belo Laut		300 m			APBD			
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan					7.400 M	4.538.046.995,57		APBD (PIK) Reses		
		- Pemeliharaan Berkala Jalan gang taqwa Kp. Air Terjun RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungaidaeng					Kel. Sungai Daeng, Kec. Muntok		300 M			PIK			
		- Pemeliharaan berkala jalan dusun tayu - pantai ierangkat					Desa Ketap, Jebus		5000 M			PIK			
		- Pemeliharaan berkala jalan desa pusuk					Desa Pusuk		1000 M			PIK			
		Pemeliharaan berkala jalan Rumah Bapak Zulkifli ke Simpang Pebuar, Kab. Bangka Barat, Jebus, Sungai Buluh							1000			Reses			
		Pemeliharaan berkala jalan kadur dalam simpang RSUD/simpang kuburan cina sampai simpang parit Belo Laut, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut							3500			Reses			
		Pemeliharaan berkala jalan Desa Sinar Manik Gg. Seroja, Kab. Bangka Barat, Jebus, Sinar Manik							500			Reses			
		Pemeliharaan berkala jalan dari dusun unar ke pantai bembang, Kab. Bangka Barat, Jebus, Pebuar							957			Reses			
		Pemeliharaan berkala jalan TPU Air Belo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo							411			Reses			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 03 10 2,01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya jalan kabupaten seluruh Bangka Barat	6 kecamatan	2.065.000.000	2.000.000.000	APBD + Reses			
	- Pembangunan Siring Jl. Payak RT 01, Kab. Bangka Barat, Jebus, Sungai Buluh							87 m			Reses			
	- Rehabilitasi siring RT 01 RW 02 Dusun Kerang, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus							25 m			Reses			
	- Rehabilitasi siring RT 02 RW 03 Dusun Kampak, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus							50 m			Reses			
1 03 10 2,01 12	Pembangunan Jembatan								500.000.000		Reses			
	- Pembangunan jembatan dusun parit 4, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru							14 M						
1 03 10 2,01 18	Rehabilitasi Jembatan					Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kelurahan	Jumlah jembatan yang direhab	2 Unit	400.000.000	542.500.000	APBD + APBD (PIK)			
	- Rehabilitasi Jembatan Air Tenam					Kec. Parittiga								
	- Rehabilitasi jembatan kayu dusun sadar jaya					Desa Simpang Gong					PIK			
1 03 10 2,01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jembatan yang di pelihara	3 Unit	100.000.000	320.000.000				
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						Percentase rekomendasi IJUK	100%	150.000.000,00	400.000.000,00				
1 03 11 2,01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Tersedianya tenaga terampil bersertifikasi	40 Orang	150.000.000,00	300.000.000,00				
1 03 11 2,01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Tersedianya tenaga terampil bersertifikasi	40 Orang	150.000.000	300.000.000				
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						Percentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	60%	310.000.000	425.000.000				
1 03 12 2,01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						Percentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	28,57%	160.000.000	275.000.000				
1 03 12 2,01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	1 Dokumen (RDTR Muntok)	160.000.000	150.000.000				
1 03 12 2,04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000				
1 03 12 2,04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan TKPRD	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN								24.250.000.000	2.150.000.000				
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				24.250.000.000	2.150.000.000				
			Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82									
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	75%	1.000.000.000	100.000.000			
1	03	03	2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kab/Kota	15%	1.000.000.000	100.000.000			
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			22 Desa Pasca Pamsimas	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3 Desa	900.000.000				
1	03	03	2,01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM	22 Desa Pasca Pamsimas	100.000.000	100.000.000			
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Percentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman	90%	600.000.000	600.000.000			
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	3%	600.000.000	600.000.000			
1	03	05	2,01	6	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	31 unit	250.000.000	200.000.000	RESES		
1	03	05	2,01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			(Tanki Septik Individual) Desa bukit terak, Belo Laut, Tanjung Niur, Tugang , Peradong. (Ipal Komunal) Kec. Muntok	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	333 unit (310 tanki septik dan 23 ipal)	200.000.000	200.000.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	03	05	2,01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	48 ob	150.000.000	200.000.000			
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	100%	22.150.000.000	1.100.000.000			
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	22.150.000.000	1.100.000.000			
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Sport hall serta Penjaga 4 orang, pupuk, operasional mesin dll	22.150.000.000	1.100.000.000			
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Persentase Realisasi Perencanaan Bangunan dan Lingkungan yang terlaksana (kota pusaka)	44%	500.000.000	350.000.000			
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	100%	500.000.000	350.000.000			
1	03	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	500.000.000	350.000.000			
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						7.672.255.511	7.146.884.000			
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%		7.672.255.511	7.146.884.000			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.347.540.600	5.756.884.000			
1	04	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000			
1	04	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000			
1	04	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			
1	04	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 04 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
1 04 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
1 04 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.512.500.000	3.512.500.000				
1 04 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.500.000.000	3.500.000.000				
1 04 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
1 04 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 04 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 04 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
1 04 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
1 04 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
1 04 01 2,04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	12 Bulan	2.500.000	2.500.000				
1 04 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
1 04 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Tertentu Lainnya beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	12.500.000	12.500.000				
1 04 01 2,05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
1 04 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	662.908.500	671.800.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 04 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				
1 04 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5.000.000	5.000.000				
1 04 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	28.660.000	30.000.000				
1 04 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	164.948.500	170.000.000				
1 04 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.800.000	4.800.000				
1 04 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	62.500.000	65.000.000				
1 04 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	390.000.000	390.000.000				
1 04 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
1 04 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.784.038.100	1.184.490.000				
1 04 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				
1 04 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 Bulan	689.100.000	89.100.000				
1 04 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	10.048.100	10.500.000				
1 04 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	444 OB	1.082.890.000	1.082.890.000				
1 04 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	313.094.000	313.094.000				
1 04 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	2.310.000	2.310.000				
1 04 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	310.784.000	310.784.000				
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani	100%	165.000.000	180.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
1	04	02	2,01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100%	15.000.000	30.000.000				
1	04	02	2,01	03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1 dokumen	15.000.000	30.000.000				
1	04	02	2,03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100%	150.000.000	150.000.000				
1	04	02	2,03	01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	5 Rumah	150.000.000	150.000.000				
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku	93%	549.714.911	300.000.000				
1	04	03	2,03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	60%	549.714.911	300.000.000				
1	04	03	2,03	02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Kawasan Kumuh Kabupaten	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3 unit	60.000.000	300.000.000				
1	04	03	2,03	06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			Kawasan Kumuh Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2 paket	489.714.911	0				
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Persentase pengurangan kawasan kumuh	15%	260.000.000	560.000.000				
1	04	04	2,01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	15%	260.000.000	560.000.000				
1	04	04	2,01	01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	10 unit	200.000.000	500.000.000	APBD & APBD (PIK)			
1	04	04	2,01	02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perumahan Masyarakat (BOP BSPS)	5 kecamatan	60.000.000	60.000.000				
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	100%	350.000.000	350.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	6.000.000	8.500.000				
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000	8.500.000				
1 05 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	20.400.000,00	263.395.000,00				
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya pakaian khusus hari tertentu	25 stel	12.500.000	252.395.000				
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	7.900.000	11.000.000				
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500.519.000,00	617.800.000,00				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	2.450.000	5.000.000				
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	2.125.000	3.300.000				
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	39.675.000	44.000.000				
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	40.014.000	60.000.000				
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	5.000.000	5.500.000				
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan/material	12 bulan	42.610.000	55.000.000				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 bulan	364.945.000	440.000.000				
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	3.700.000	5.000.000				
1 05 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	533.710.000,00	706.099.000,00				
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran biaya telepon listrik dan internet	12 bulan	42.000.000	46.200.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	6.490.000	11.869.000				
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	192 OB	483.220.000	646.030.000				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	195.409.000,00	339.317.000,00				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangandinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	27.775.000	43.175.000				
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	154.584.000	236.445.000				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	10.000.000	55.000.000				
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	3.050.000	4.697.000				
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.668.462.000	5.298.540.500				
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	4.576.057.000	4.807.506.000				
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluran, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						terlaksananya pencegahan gangguan ketertiban dan ketertiban umum	24 kali 48 kali 96 kali	64.939.000	88.000.000				
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran perda	12 bulan	68.418.000	33.000.000				
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						terlaksananya sistem keamanan dan ketertiban desa	6 kecamatan	63.360.000	82.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah Anggota satpol PP, terlaksananya patroli pada pos-pos penjagaan, terciptanya penegakan disiplin anggota patroli pos Jumlah Anggota satpol PP, terlaksananya patroli pada pos-pos penjagaan, terciptanya penegakan disiplin anggota patroli pos	10 Pos 118 anggota	4.342.580.000	4.422.506.000				
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum	12 bulan	36.760.000	181.500.000				
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Percentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	92.405.000,00	491.034.500,00				
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						terlaksananya monitoring pelaksanaan terhadap perda dan perkada	6 kecamatan	21.970.000	212.734.500				
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						terlaksananya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	12 bulan	70.435.000	107.800.000				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						Terlaksananya Penanggulangan Bencana	100%	381.495.000	422.565.000				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Tersedianya informasi rawan bencana daerah	100%	150.000.000					
	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota					Tersusunnya dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	150.000.000					
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	209.495.000	290.213.000				
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana	1 kegiatan	3.440.000	30.965.000				
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota						tertangani pasca bencana kabupaten	90 persen	3.440.000	23.980.000				
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Tim Reaksi Cepat	84 OB	202.615.000	235.268.000				
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	22.000.000,00	132.352.000,00				
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	100 persen	22.000.000	132.352.000				
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	100%	249.989.800	462.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100%	246.445.000	362.000.000				
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						terselenggaranya pemadaman dan pengendalian kebakaran	10 kali	4.755.000	120.000.000				
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						pembayaran honorarium PHL Damkar terselenggaranya penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	84 OB 12 bulan	241.690.000	242.000.000				
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	3.544.800	100.000.000				
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Tersosialisasinya masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 kegiatan	3.544.800	100.000.000				
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Peningkattan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				8.482.550.000	7.521.900.000				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.124.750.000	5.194.800.000				
1 06 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000				
1 06 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
1 06 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
1 06 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
1 06 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
1 06 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
1 06 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.012.500.000	3.012.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 06 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.000.000.000	3.000.000.000				
1 06 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
1 06 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 06 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
1 06 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
1 06 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
1 06 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000	10.000.000				
1 06 01 2,05 03	Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
1 06 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	922.750.000	930.000.000				
1 06 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
1 06 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
1 06 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	35.000.000	40.000.000				
1 06 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000				
1 06 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	2.750.000	5.000.000				
1 06 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000	40.000.000				
1 06 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	800.000.000	800.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 06 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
1 06 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	994.500.000	1.029.800.000				
1 06 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	1.000.000	2.000.000				
1 06 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	45.000.000	76.800.000				
1 06 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	7.500.000	10.000.000				
1 06 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	384 OB	941.000.000	941.000.000				
1 06 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	135.000.000	162.500.000				
1 06 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	30.000.000	35.000.000				
1 06 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	80.000.000	100.000.000				
1 06 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	20.000.000	22.500.000				
1 06 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5.000.000	5.000.000				
1 06 02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL						Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial	100%	508.000.000	760.500.000				
							Persentase jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam upaya penyelenggaran kesejahteraan sosial	100%						
1 06 02 2,03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi	100%	508.000.000	760.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 06 02 2,03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Keterampilan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dalam Melaksanakan Peran, Tugas dan Fungsi Dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diwilayah desa/kelurahan	74 Orang	447.000.000	666.000.000				
1 06 02 2,03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas dan Peran Aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	6 Orang	36.000.000	79.500.000				
1 06 02 2,03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas dan Peran aktif SDM karang taruna dalam upaya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2 Karang Taruna	20.000.000					
1 06 02 2,03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas SDM LK3 dalam Pelayanan Masalah Sosial rehabilitasi sosial	100 Persen	5.000.000	15.000.000				
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial	100%	2.349.000.000	927.600.000				
1 06 04 2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	100%	2.334.000.000	867.600.000				
1 06 04 2,01 01	Penyediaan Permakanan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan Jumlah lansia terlantar yang memperoleh bantuan permakanan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh bantuan permakanan	342 Orang 580 Orang 168 Orang	2.132.000.000	665.600.000				
1 06 04 2,01 02	Penyediaan Sandang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang memperoleh sandang khusus	68 Orang	22.000.000	22.000.000				
1 06 04 2,01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Komda Lansia	1 Kegiatan	30.000.000	100.000.000				
1 06 04 2,01 12	Pemberian Layanan Rujukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya operasional/penguatan Rumah Perfindungan Sosial/ Rumah Singgah Terselenggaranya fasilitasi pembinaan Anak/Lansia/Disabilitas di Panti/Balai	1 Kegiatan 5 Orang	150.000.000	80.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
1 06 04 2,02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	100%	15.000.000	60.000.000				
1 06 04 2,02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Operasional Pendamping PKH	12 Orang	15.000.000	60.000.000					
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	260.000.000	413.200.000				
1 06 05 2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS	100%	260.000.000	413.200.000				
1 06 05 2,02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2 Dokumen	10.000.000	35.000.000					
1 06 05 2,02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran	1 Kegiatan	10.000.000	25.000.000					
1 06 05 2,02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bantuan Sosial Bangka Barat Sejahtera	286 KPM	200.000.000	353.200.000					
1 06 05 2,02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Produktifitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif	1 Kube, 4 UEP FM	40.000.000						
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	240.800.000	225.800.000				
1 06 06 2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%	40.800.000	60.800.000				
1 06 06 2,01 01	Penyediaan Makanan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kebutuhan Dasar Permakanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	40.800.000	60.800.000					
1 06 06 2,02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana	100%	200.000.000	165.000.000				
1 06 06 2,02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Peran Aktif Taruna Siaga Bencana dalam Penanganan Korban Bencana	47 Orang	200.000.000	165.000.000					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.786.490.521	69.039.442.799				
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								5.690.689.500	5.695.689.500				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	< 0,255				5.690.689.500	5.695.689.500				
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.177.980.000	5.182.980.000				
2 07 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	46.500.000				
2 07 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	15.000.000	20.000.000				
2 07 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 07 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 07 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dokumen	10.000.000	10.000.000				
2 07 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 07 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.712.500.000	3.712.500.000				
2 07 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.700.000.000	3.700.000.000				
2 07 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir perangkat daerah	1 dokumen	2.500.000	2.500.000				
2 07 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 07 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen laporran dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 07 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
2 07 01 2,04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek retribusi daerah	100 %	2.500.000	2.500.000				
2 07 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
2 07 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
2 07 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	12 bln	10.000.000	10.000.000				
2 07 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	465.040.000	465.040.000				
2 07 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	5.000.000	5.000.000				
2 07 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan rumah tangga	15 jenis/bln	2.500.000	2.500.000				
2 07 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan	12 bln	35.000.000	35.000.000				
2 07 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	30.000.000	30.000.000				
2 07 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bln	5.040.000	5.040.000				
2 07 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Material	12 bln	40.000.000	40.000.000				
2 07 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	342.500.000	342.500.000				
2 07 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat Daerah	12 bln	5.000.000	5.000.000				
2 07 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	828.750.000	828.750.000				
2 07 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bln	2.000.000	2.000.000				
2 07 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya telpon, Listrik dan internet	12 bln	86.400.000	86.400.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 07 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa pelayanan Umum kantor	300 OB	740.350.000	740.350.000				
2 07 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	105.190.000	105.190.000				
2 07 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit mobil	38.250.000	38.250.000				
2 07 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit motor 2 unit mobil	36.940.000	36.940.000				
2 07 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit gedung	30.000.000	30.000.000				
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	422.407.500	422.407.500				
2 07 03 2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4 jenis pelatihan	422.407.500	422.407.500				
2 07 03 2,01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Otomotif, Listik, Las, dan service AC Split	60 org/ 4 jenis pelatihan	422.407.500	422.407.500				
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50%	14.727.000	14.727.000				
2 07 04 2,03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Tersedianya Pengelolaan Informati Pasar Kerja	5 jenis/20 perusahaan	14.727.000	14.727.000				
2 07 04 2,03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersediaanya data informasi Bursa Kerja di Kabupaten Bangka Barat	5 jenis	7.877.000	7.877.000				
2 07 04 2,03 03	Job Fair/Bursa Kerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan Kerja	20 perusahaan	6.850.000	6.850.000				
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi dan Terselesaikan	100%	75.575.000	75.575.000				
							Jumlah pekerja yang diikutsertakan pada program jamsos tenaga kerja	50%						
2 07 05 2,02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						Terselesainya kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Bangka Barat	5 kasus	75.575.000	75.575.000				
2 07 05 2,02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berita Acara Survey Perizinan	1 dokumen	9.910.000	9.910.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya serikat pekerja yang ada di perusahaan - perusahaan	1 dokumen	4.835.000	4.835.000			
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselesaikannya masalah ketenaga kerjaan di Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	50.000.000	50.000.000			
2	07	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya kepesertaan jaminan sosial di perusahaan	1 dokumen	10.830.000	10.830.000			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72 TAHUN				398.919.761	343.243.384				
					Persentase Balita Gizi Buruk	0%				398.919.761	343.243.384				
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					Percentase dukungan APBD dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG	30%	143.599.490	153.173.240			
2	08	02	2,01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					Penerapan PUG di lembaga pemerintah daerah	100%	10.000.000	19.573.750			
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan	40 peserta	10.000.000	19.573.750			
2	08	02	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya KIE dan advokasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1 tahun	133.599.490	133.599.490			
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya KIE tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta Terlaksananya advokasi dan sosialisasi kompetensi SDM Perempuan korban kekerasan dalam meningkatkan ketahanan keluarga	1 GOW dan DWP	133.599.490	133.599.490			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Layanan terhadap perempuan dan anak	100%	180.098.961	106.856.724			
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	100%	150.000.000	76.757.763			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 08 04 2,01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya	15 Kasus	150.000.000	76.757.763				
2 08 04 2,03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	30.098.961	30.098.961				
2 08 04 2,03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya operasional UPTD PPA dan rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan	1 Rumah aman/UPTD PPA	30.098.961	30.098.961				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						Persentasei pengelolaan sistem gender dan anak	100%	10.000.000					
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota						Cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100%	10.000.000					
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota						Tersedianya profil gender	1 dokumen	10.000.000					
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						Pemenuhan hak anak	80%	65.221.310	83.213.420				
2 08 06 2,02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Tersedianya penguatan kualitas hidup anak	100%	65.221.310	65.221.310				
2 08 06 2,02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak melalui Forum anak	100 anak	65.221.310	65.221.310				
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								12.901.651.290	13.668.870.000				
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				12.901.651.290	13.668.870.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
					Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%							
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	12.597.126.290	13.300.370.000			
2	09	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	27.871.600	39.000.000			
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	9.271.600	10.000.000		
2	09	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.300.000	5.000.000		
2	09	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.300.000	4.000.000		
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	7.950.000	10.000.000		
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.050.000	10.000.000		
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.110.800.000	9.115.000.000			
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	9.100.000.000	9.100.000.000		
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.300.000	5.000.000		
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.250.000	5.000.000		
2	09	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.250.000	5.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 09 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	6.350.000	10.000.000				
2 09 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.350.000	10.000.000				
2 09 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	20.450.000	22.500.000				
2 09 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
2 09 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	7.950.000	10.000.000				
2 09 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	881.750.290	1.327.500.000				
2 09 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	15.000.000	15.000.000				
2 09 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk 8 kantor	12 bulan	15.133.140	40.000.000				
2 09 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk 8 kantor	12 bulan	83.386.900	85.000.000				
2 09 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	39.052.250	40.000.000				
2 09 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	5.028.000	15.000.000				
2 09 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material untuk 8 kantor	12 bulan	70.000.000	75.000.000				
2 09 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta koordinasi dalam rangka meniolok dana APBN	12 bulan	650.000.000	1.000.000.000				
2 09 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	4.150.000	7.500.000				
2 09 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.297.066.500	2.326.370.000				
2 09 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman surat/paket kantor	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
2 09 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet untuk 8 kantor	12 bulan	98.523.800	120.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 09 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	27.172.700	35.000.000				
2 09 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor (51 PHL) dan Termasuk Gaji PPL sebanyak 22 orang	1 tahun	2.169.370.000	2.169.370.000				
2 09 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	252.837.900	460.000.000				
2 09 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (R4 4unit, R3 1unit; R2 2 unit (79 unit utk hvr Paiak)	12 bulan	238.820.400	250.000.000				
2 09 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	14.017.500	210.000.000				
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						Tingkat Ketersediaan Pangan	2310 kkal/ 63 g/ 75 g	92.100.000	123.500.000				
							Tingkat Konsumsi Pangan	2100 kkal/ 57 g/ 68 g						
							Skor Pola Pangan Harapan	88,9						
2 09 03 2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	90%	80.300.000	43.500.000				
2 09 03 2,01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan analisis kondisi ketersediaan pangan kabupaten melalui Neraca Bahan Makanan	5 Laporan	15.300.000	20.000.000				
	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi pembelian produk petani terdampak harga anjlok (cabai) dan penyaluran bantuan pangan	1 kegiatan	20.000.000					
2 09 03 2,01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan pemantauan serta analisis pasokan dan harga pangan di Kab. Bangka Barat	5 Laporan	25.000.000	23.500.000				
	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi kerjasama kemitraan pemasaran hasil TPH (ubi cassesa) dan pengawasan pelaksanaannya	1 kegiatan	20.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 09 03 2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90%	11.800.000	80.000.000				
2 09 03 2,04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan analisis pola konsumsi pangan penduduk dan skor PPH	5 Laporan	11.800.000	15.000.000				
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	80%	135.000.000	160.000.000				
2 09 04 2,01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						Tersedianya informasi kerentanan dan ketahanan pangan	100%	65.000.000	75.000.000				
2 09 04 2,01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) Kabupaten	16 Laporan	65.000.000	75.000.000				
2 09 04 2,02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kab. Babar	80%	70.000.000	85.000.000				
2 09 04 2,02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan analisis situasi pangan dan gizi kabupaten sebagai deteksi dini kerawanan pangan	5 Laporan	30.000.000	40.000.000				
2 09 04 2,02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Babar	15 Ton	40.000.000	45.000.000				
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90%	77.425.000	85.000.000				
2 09 05 2,01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90%	77.425.000	85.000.000				
2 09 05 2,01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan lintas sektoral di Kab. Babar	1 kegiatan	25.000.000	25.000.000				
2 09 05 2,01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap sampel PSAT	25 Sampel	52.425.000	60.000.000				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								200.000.000,00	375.000.000,00				
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				200.000.000,00	375.000.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Percentase lahan yang bisa di bebaskan untuk pembangunan	100%	50.000.000,00	175.000.000,00				
2	10	05	2,01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Terfasilitasinya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000,00	175.000.000,00				
2	10	05	2,01	01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya keg. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000.000	175.000.000				
2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				Percentase ketersediaan data tanah kosong di Kabupaten Bangka barat	78,53%	100.000.000	150.000.000				
2	10	08	2,02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				Terlaksanya kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000				
2	10	08	2,02	01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan inventarisasi tanah aset pemda	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000				
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Percentase ketersediaan data penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten	33,33%	50.000.000	50.000.000				
2	10	10	2,01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya kegiatan pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000				
2	10	10	2,01	02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya Dok. Nilai Tanah	1 Dokumen	50.000.000	0				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP						15.236.834.000	6.673.933.600				
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82			15.236.834.000	6.673.933.600				
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.565.711.000	4.749.532.100				
2	11	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
2 11 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 11 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 11 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
2 11 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 11 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.612.500.000	2.612.500.000				
2 11 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000	2.600.000.000				
2 11 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
2 11 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 11 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 11 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
2 11 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 11 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 01 2,04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	12 Bulan	2.500.000	2.500.000				
2 11 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
2 11 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	12.500.000	12.500.000				
2 11 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
2 11 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	405.811.000	445.892.100				
2 11 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor	12 Bulan	7.815.000	8.596.500				
2 11 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	2.450.000	2.695.000				
2 11 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	30.086.000	33.094.600				
2 11 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	44.000.000				
2 11 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang_Undangan	12 Bulan	5.460.000	6.006.000				
2 11 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000	44.000.000				
2 11 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	275.000.000	302.500.000				
2 11 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
2 11 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.312.300.000	1.443.530.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	5.620.000	6.182.000				
2 11 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	201.960.000	222.156.000				
2 11 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	13.200.000	14.520.000				
2 11 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	432 OB	1.091.520.000	1.200.672.000				
2 11 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	160.100.000	172.610.000				
2 11 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	160.100.000	137.610.000				
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	300.000.000	180.000.000				
2 11 02 2,01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	0				
2 11 02 2,01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	0				
2 11 02 2,02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	180.000.000				
2 11 02 2,02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen KLHS RDTR	1 Dokumen	150.000.000	180.000.000				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						jumlah capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4 kegiatan	432.203.000	684.250.500				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 03 2,01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	388.843.000	636.554.500				
2 11 03 2,01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen RPPMA Kabupaten/Kota, Data Indeks Kualitas Air, dan Data Indeks Kualitas Udara	1 dokumen 65 Poin 89 Poin	150.000.000	165.000.000				
2 11 03 2,01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Emisi GRK	1 Dokumen	19.595.000	21.554.500				
2 11 03 2,01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan-bahan operasional laboratorium Dokumen Akreditasi KAN Jumlah alat yang dikalibrasi Tersedianya alat Laboratorium	6 Paket 1 Dokumen Akreditasi 21 Alat 1 Alat	219.248.000	450.000.000				
2 11 03 2,02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	43.360.000	47.696.000				
2 11 03 2,02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen IKPLHD dan IKLH	2 Dokumen	43.360.000	47.696.000				
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						Percentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	33,33%	25.000.000	25.000.000				
2 11 04 2,01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bangka Barat	100%	25.000.000	25.000.000				
2 11 04 2,01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelembagaan yang dibina	4 Lembaga	25.000.000	25.000.000				
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						Percentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	25%	30.000.000	30.000.000				
2 11 05 2,01	Penyimpanan Sementara Limbah B3						Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100%	30.000.000	30.000.000				
2 11 05 2,01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terverifikasinya usaha yang memenuhi syarat administrasi dan teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	15 Pelaku Usaha	30.000.000	30.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWSAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						Percentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19%	100.000.000	230.000.000				
2 11 06 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100.000.000	230.000.000				
2 11 06 2,01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya data-data ketaatan terhadap izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarmasin	63 Perusahaan	100.000.000	110.000.000				
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						Percentase keikutsertaan sekolah yang menerapkan prinsip sekolah yang berbasis lingkungan	9%	42.310.000	46.541.000				
2 11 09 2,01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	42.310.000	46.541.000				
2 11 09 2,01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	19 Sekolah	42.310.000	46.541.000				
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						Percentase Cakupan Wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi	13%	9.741.610.000	728.610.000				
2 11 11 2,01	Pengelolaan Sampah						Terlaksananya Pengelolaan sampah	100%	9.741.610.000	728.610.000				
	01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah	4 dokumen (SID, DED, AMDAL, dokumen tata batas terkait peningkatan TPA)	3.500.000.000					
2 11 11 2,01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran honorarium PHL operasional kebersihan dan persampahan	1800 OB 12 Bulan	5.513.000.000	5.513.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 11 11 2,01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran honorarium PHL operasional TPA (UPTD TPA)	84 OB 12 Bulan	728.610.000	728.610.000				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								6.153.503.382,00	5.468.377.027,00				
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				6.153.503.382,00	5.468.377.027,00				
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.777.021.572,00	4.873.010.070,00				
2 12 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	45.650.000,00				
2 12 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	16.500.000				
2 12 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	4.400.000				
2 12 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	4.400.000				
2 12 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	11.000.000				
2 12 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	2.000.000	9.350.000				
2 23 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.106.000.000,00	2.113.750.000,00				
2 23 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.100.000.000	2.100.000.000				
2 23 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000	2.750.000				
2 23 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	5.500.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	5.500.000				
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	9.350.000				
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	2.000.000	9.350.000				
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	11.999.990,00	24.750.000,00				
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	20 stell	9.999.990	13.750.000				
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000	11.000.000				
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	978.304.652,00	616.472.148,00				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.489.680	14.312.320,00				
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis (6 printer KTP, 6 Scanner)	550.000.000	50.000.000				
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	4.525.200	15.943.158,00				
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	19.232.500	45.694.000,00				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	43.784.952	62.436.000,00				
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	1.320.000	5.500.000,00				
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	153.652.320	169.586.670,00				
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terseleggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000	247.500.000,00				
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	300.000	5.500.000,00				
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.621.688.700,00	1.889.376.885,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.200.000				
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	70.467.800	77.712.800				
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	30.210.900	139.015.085				
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	636 ob	1.519.010.000	1.670.449.000				
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.047.028.230,00	173.661.037,00				
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	15.821.850	42.310.939				
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	19.981.380	56.951.598				
2 12 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7 unit	3.775.000	34.501.500				
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	1.007.450.000	39.897.000				
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						Cakupan Kepemilikan Dokumen e-KTP	98%	297.500.000	296.220.276				
							Cakupan Kepemilikan Dokumen KK	95%						
							Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA	50%						
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara optimal	100%	206.750.000	189.927.958				
2 12 02 2.01 01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan penduduk pendatang (Penduduk Non Permanen)	66 desa/kelurahan	6.750.000	20.382.318				
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan Dokumen kependudukan dan perekaman (KK,KTP)	25000 dokumen	200.000.000	169.545.640				
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						Tersedianya Blangko dan Formulir terkait kependudukan	100%	90.750.000,00	106.292.318,00				
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbitnya Kartu Identitas Anak	15000 kartu	90.750.000	106.292.318				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	97%	33.862.200,00	205.579.110,00				
							Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	100%						
							Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	100%						
							Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	100%						
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara optimal	100%	14.630.000,00	115.819.880,00				
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penatausahaan dokumen pencatatan sipil secara digital	5000 berkas	500.000	37.485.800				
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kepemilikan akta-akta Pencatatan Sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dsb) penduduk	5000 dokumen	14.130.000	78.334.080				
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	19.232.200,00	62.909.770,00				
2 12 03 2.02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam administrasi pencatatan sipil	2 jenis laporan	19.232.200	39.250.420				
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100%	20.430.400,00	56.811.940,00				
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						Data terkumpul dan tersaji dengan akurat	100%	7.217.500,00	25.432.440,00				
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data kependudukan yang diolah dan disajikan dalam setahun	50000 data	3.002.200	12.965.480				
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terjalinya Kerjasama dalam pemanfaatan data	5 OPD	2.213.200	4.456.320				
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya data untuk pembangunan daerah	12 bulan	2.002.100	8.010.640				
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terselenggarap dengan baik	100%	7.172.900	10.510.190				
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya data yang dapat dimanfaatkan OPD, Desa/Kelurahan, 11 OPD	66 Desa/Kelurahan	1.941.400	9.285.540				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data kependudukan yang terkonsolidasi dan terupdate secara manual	3000 data	5.231.500	1.224.650			
2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100%	6.040.000	20.869.310				
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Penggunaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Jarkomdat Dinas dan UPT	2 laporan	5.990.000	6.941.000			
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	50.000	13.928.310			
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	24.689.210	36.755.631				
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				Profil Kependudukan tersusun dengan sempurna	100%	24.689.210	36.755.631				
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kependudukan	12 bulan	2.523.400	5.346.990			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Buku Profil	1 dokumen	22.165.810	31.408.641			
				DINAS SOSIAL DAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT							4.657.495.000	2.100.000.000			
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA	Peningkattkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar daerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%			4.657.495.000	2.100.000.000			
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA							50.000.000	100.000.000			
2	13	02	2,01	Penyelenggaraan Penataan Desa							50.000.000	100.000.000			
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penataan Wilayah dalam Desa	60 Desa	30.000.000	60.000.000			
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penataan Kewenangan Desa	60 Desa	20.000.000	40.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						Persentase kerjasama antar desa yang terbentuk	42%	90.000.000	160.000.000				
2 13 03 2,01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa						Jumlah kerjsama yang terbentuk antar desa	7 kerjsama	90.000.000	160.000.000				
2 13 03 2,01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/ Kota	1 Kecamatan	20.000.000	30.000.000				
2 13 03 2,01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Desa	30.000.000	50.000.000				
2 13 03 2,01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan Pedesaan	40.000.000	80.000.000				
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						Persentase pemerintahan desa dengan status minimal swakarya	60%	3.330.895.000	510.000.000				
2 13 04 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 desa	3.330.895.000	510.000.000				
2 13 04 2,01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	60 Desa	15.000.000	30.000.000				
2 13 04 2,01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pemerintahan Desa	60 Desa	25.000.000	50.000.000				
2 13 04 2,01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Desa	25.000.000	50.000.000				
2 13 04 2,01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya pelaksanaan Evaluasi penggunaan Dana Desa serta Dana Transfer lainnya	60 Desa	15.000.000	30.000.000				
2 13 04 2,01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	60 BUMDesa	120.000.000	80.000.000	APBD & APBD (PIK)			
2 13 04 2,01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	55 Desa	3.027.895.000	0				
2 13 04 2,01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terasilitasinya pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55 Desa	10.000.000	20.000.000				
2 13 04 2,01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa	60 Desa	10.000.000	20.000.000				
2 13 04 2,01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Inventarisasi Aset Desa	60 Desa	10.000.000	20.000.000				
2 13 04 2,01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan bagi BPD	13 Desa	25.000.000	50.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan Pelaporan Kepala Desa	55 Desa	10.000.000	20.000.000			
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Event	38.000.000	100.000.000	APBD & APBD (PIK)		
2	13	05			PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase BUMDes yang berkembang	15%	1.186.600.000	1.330.000.000				
								Persentase peningkatan status desa Mandiri	60%						
								Persentase pengentasan desa tertinggal	100%						
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50%	1.186.600.000	1.330.000.000				
								Lembaga adat desa yang aktif	13 lembaga adat						
								Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	2 alat						
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat	60 Desa	25.000.000	150.000.000			
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	3 Lembaga, 27 KPM	125.000.000	100.000.000	APBD & APBD (PIK)		
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, serta Terlaksanannya Bimtek Bumdes	4 Laporan 30 Bumdes	379.000.000	400.000.000	APBD & APBD (PIK)		
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Posyantek Terfasilitasnya ALat Teknologi Tepat Guna Unqgulan	5 Posyantek 8 Alat	127.600.000	80.000.000	APBD & APBD (PIK)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 14 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	345.762.000	345.762.000				
2 14 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	14.842.000	14.842.000				
2 14 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.000.000	4.000.000				
2 14 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan	40.000.000	40.000.000				
2 14 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	40.000.000	40.000.000				
2 14 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	4.920.000	4.920.000				
2 14 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	40.000.000	40.000.000				
2 14 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	200.000.000	200.000.000				
2 14 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	943.180.000	943.180.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 14 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
2 14 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	67.500.000	67.500.000				
2 14 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	4.500.000	4.500.000				
2 14 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	492 ob	869.180.000	869.180.000				
2 14 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	251.778.000	251.778.000				
2 14 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	1 unit	40.000.000	40.000.000				
2 14 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	176.778.000	176.778.000				
2 14 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	1 unit	30.000.000	30.000.000				
2 14 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	5.000.000	5.000.000				
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,80%	45.995.660	45.995.660				
2 14 02 2,02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya dokumen profil kependudukan	1 dokumen	45.995.660	45.995.660				
2 14 02 2,02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen pemutakhiran data keluarga Dokumen pemutakhiran data keluarga	1 dokumen 66 peserta	45.995.660	45.995.660				
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						Percentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	2,80%	522.939.924	522.939.924				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	14	03	2,01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				Cakupan promosi dan KIE	1 tahun	49.999.750	49.999.750				
2	14	03	2,01	04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung	10 surat kabar 12 Radio 20 Media Luar Ruang	49.999.750	49.999.750				
2	14	03	2,02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Cakupan PLKB yang berdaya guna	100%	393.376.000	393.376.000				
2	14	03	2,02	03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PLKB	13 orang	393.376.000	393.376.000				
2	14	03	2,03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya pelayanan KB di lini lapangan	6 Kecamatan	79.564.174	79.564.174				
2	14	03	2,03	01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan KB di setiap Kecamatan	6 Kecamatan	79.564.174	79.564.174				
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Cakupan keluarga sejahtera tingkat II	91%	240.034.014	248.034.014				
2	14	04	2,01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan	6 Kecamatan	240.034.014	192.124.899				
2	14	04	2,01	04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dukungan kegiatan Bina Keluarga dan dukungan kegiatan UPPKS dan mitra kerja Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Poktan	76.787.364	30.878.249				
2	14	04	2,01	05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelola dan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Mendapatkan Dukungan Biaya Operasional	108 Poktan	161.246.650	161.246.650				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)						Koordinasi pencegahan dan penanganan stunting	100%	2.000.000					
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN										1.760.000.000			
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				1.760.000.000	1.410.000.000				
2 15 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas sesuai kewenangan	44%	1.660.000.000	1.310.000.000				
2 15 02	2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten	20%	1.230.000.000	850.000.000				
2 15 02	2,02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Air Belo, Kec Muntok serta Misbak dan Sinar Manik Kec Jebus, Kab. Babar	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	118 unit	1.030.000.000		APBD (PIK) + RESES			
2 15 02	2,02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	12 Bulan	200.000.000	850.000.000				
2 15 02	2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20%	50.000.000	50.000.000				
2 15 02	2,05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Teregistrasinya / Kalibrasi alat - alat uji Kendaraan Bermotor	8 unit	50.000.000	50.000.000				
2 15 02	2,06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	15%	80.000.000	110.000.000				
2 15 02	2,06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	30.000.000	50.000.000				
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	50.000.000					
2 15 02	2,08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan						Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	20%	250.000.000	300.000.000				
2 15 02	2,08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 kegiatan	250.000.000	250.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Terlaksananya penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan	82%	50.000.000	0				
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen (update)	50.000.000					
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100%	100.000.000	100.000.000				
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal						Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	25%	100.000.000	100.000.000				
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal						Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000				
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								7.192.792.000	8.025.072.000				
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				7.192.792.000	8.025.072.000				
2 16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.887.890.000	4.274.890.000				
2 16 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000				
2 16 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	15.000.000	15.000.000				
2 16 01 2,01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 16 01 2,01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 16 01 2,01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	10.000.000	10.000.000				
2 16 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 16 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.612.500.000	2.612.500.000				
2 16 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000	2.600.000.000				
2 16 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.500.000	2.500.000				
2 16 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan/bulanan/triwulan/n/semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 16 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 16 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
2 16 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 16 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	135.000.000				
2 16 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	125.000.000				
2 16 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
2 16 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	632.880.000	624.880.000				
2 16 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	7.900.000	7.900.000				
2 16 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	2.000.000				
2 16 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	40.000.000	40.000.000				
2 16 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30.000.000	30.000.000				
2 16 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	4.980.000	4.980.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	35.000.000	35.000.000			
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	12 bulan	500.000.000	500.000.000			
2	16	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	5.000.000	5.000.000			
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	689.710.000	689.710.000			
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000			
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	94.500.000	94.500.000			
2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	62.000.000	62.000.000			
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	204 OB	531.210.000	531.210.000			
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	170.300.000	162.800.000			
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	100.000.000	100.000.000			
2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	57.500.000	50.000.000			
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16 unit	12.800.000	12.800.000			
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	710.000.000				
				08	Pengadaan aset tak berwujud				Tersedianya aset tak berwujud	1 unit (firewall)	10.000.000				
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit (penangkal petir)	50.000.000				
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis (perangkat jaringan, storage, genseit)	650.000.000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	90%	944.902.000	1.575.182.000				
2	16	02	2,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	90%	944.902.000	1.575.182.000				
2	16	02	2,01	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumentasi audiovisual kabupaten bangka barat jumlah dokumentasi audiovisual kabupaten bangka barat	12 audiovisual 100 dokumentasi	57.255.000	57.255.000				
2	16	02	2,01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berita yang diupload pada website dan media sosial Diskominfo Kabupaten bangka barat	100 berita	36.270.000	36.270.000				
2	16	02	2,01	06 Pelayanan Informasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen data informasi jumlah media informasi yang diproduksi dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah jumlah peliputan kegiatan pemerintahan daerah	1 dokumen 9 jenis 120 liputan	221.632.000	388.632.000				
2	16	02	2,01	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik	1 bimtek 1 lomba 1 pembinaan 12 kali	129.745.000	152.645.000				
2	16	02	2,01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kerjasama dengan media massa dan media elektronik jumlah kerjasama dengan media massa dan media elektronik Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan	4 media cetak 12 media elektronik 1 Kali	500.000.000	940.380.000				
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Percentase OPD, kelurahan, desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan	25%	1.360.000.000	2.175.000.000				
2	16	03	2,01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya pengelolaan nama domain OPD, desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Barat	1 domain dan 28 sub domain	315.000.000	350.000.000				
2	16	03	2,01	02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	1 tahun	45.000.000	50.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jaringan LAN fiber optik di OPD, Desa dan kelurahan	28 titik	270.000.000	300.000.000			
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan E-Government yang diterapkan di Pemkab Bangka Barat	8 Layanan E-Government	1.045.000.000	1.825.000.000			
2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pengelolaan ruang server	1 ruang server	50.000.000	65.000.000			
2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya layanan internet dan fasilitas video conference untuk OPD	1 aplikasi 150 Mbps	850.000.000	800.000.000			
2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya sistem kemanan informasi	1 sistem	65.000.000	75.000.000			
2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya aplikasi layanan publik dan pemerintahan	5 aplikasi	50.000.000	750.000.000			
2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya monitoring dan evaluasi mandiri SPBE	1 dokumen	30.000.000	40.000.000			
					DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN						5.631.850.000	6.166.036.000			
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 – 5,34			5.631.850.000	6.166.036.000			
	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	22,50%							
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.854.585.000	4.904.585.000			
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.000.000	8.000.000			
									Jumlah Dokumen perencanaan PD	3 Dokumen	2.000.000	2.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 09 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000					
2 09 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000					
2 17 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DALEV,LKPJ,LAKIP dan LPPD	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
2 17 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen tersusun	7 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 17 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.906.000.000	2.906.000.000				
2 17 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.900.000.000	2.900.000.000				
2 17 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
2 17 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen tersusun	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
2 17 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
2 09 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	0				
2 09 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	2.000.000					
2 09 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	14.500.000	0				
2 09 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000					
2 09 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000					
2 17 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	691.389.000	761.889.000				
2 17 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 17 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12 bulan	8.000.000	28.500.000				
2 17 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya makanan dan minum rapat dan kegiatan Kantor	12 bulan	48.839.000	48.839.000				
2 17 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan kantor dan Operasional UPT	12 bulan	72.120.000	72.120.000				
2 17 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	4.860.000	4.860.000				
2 17 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya alat tulis Kantor dan Operasional UPT Pasar	12 bulan	47.570.000	47.570.000				
2 17 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya perjalanan Dinas luar dan dalam daerah.	12 bulan	505.000.000	505.000.000				
2 17 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.062.096.000	1.062.096.000				
2 17 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Honorarium PHL dan Peningkatan administrasi Perkantoran	48 OB	128.480.000	128.480.000				
2 17 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan Internet	12 bulan	119.776.000	119.776.000				
2 17 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Pelayanan Kantor	12 bulan	813.840.000	813.840.000				
2 17 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	166.600.000	166.600.000				
2 17 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional	12 bulan	48.360.000	48.360.000				
2 17 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional	12 bulan	68.240.000	68.240.000				
2 17 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan Pasar	4 unit	50.000.000	50.000.000				
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	558.665.000	579.465.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	17	03	2,01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2 Kegiatan	558.665.000	579.465.000				
2	17	03	2,01	01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Tenaga Peunyuluh Koperasi	15 orang	500.000.000	520.800.000			
2	17	03	2,01	02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi dan RAT Koperasi	6 Kecamatan	58.665.000	58.665.000			
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	100%	8.600.000	8.600.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	17	07	2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	1 Kegiatan	8.600.000	8.600.000				
2	17	07	2,01	01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Updating Usaha Mikro	1 Dokumen	8.600.000	8.600.000				
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	100%	210.000.000	588.386.000				
2	17	08	2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Peningkatan Unit Skala Usaha UMI	1 Kegiatan	210.000.000	588.386.000				
2	17	08	2,01	01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Usaha Mikro	210 UMI	210.000.000	588.386.000				
				DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						887.645.000	1.337.021.250				
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan	Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan investasi	3,18 – 5,34 2%			887.645.000	1.337.021.250			
						Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat dasar, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (one stop service).	ADA							
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Jumlah Kebijakan Penanaman Modal	5%	209.325.000	67.701.250				
2	18	02	2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Peraturan yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1 Peraturan	9.325.000	9.325.000				
2	18	02	2,01	01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Raperbub tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	9.325.000	9.325.000				
2	18	02	2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Jumlah Pemetaan potensi dan Peluang Investasi	1 Peta Potensi Daerah	200.000.000	58.376.250				
2	18	02	2,02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah	1 apl.peta digital 1 dokumen	200.000.000	58.376.250				
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Jumlah Investasi yang berinvestasi	175 M	506.755.000	1.131.755.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	18	03	2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah sarana Promosi Potensi Penanaman Modal	3 Sarana promosi	506.755.000	1.131.755.000				
2	18	03	2,01	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Pameran Investasi Bangka Barat dan ikut serta pameran luar daerah (Apkasi dan Trade Expo)	3 kali	506.755.000	1.131.755.000				
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Indeks Kepuasan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan	80	151.565.000	117.565.000				
2	18	04	2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat	1000 izin	151.565.000	117.565.000				
2	18	04	2,01	01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Perizinan	1 dokumen	81.565.000	117.565.000				
2	18	04	2,01	02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berita Acara Survey Perizinan	150 dokumen	70.000.000	0				
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Kelengkapan Administrasi Investasi/Penanaman Modal	5%	20.000.000	20.000.000				
2	18	05	2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Kontribusi Investasi dalam negeri/PMDN	20%	20.000.000	20.000.000				
2	18	05	2,01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah	4 laporan	10.500.000	10.500.000				
2	18	05	2,01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah sesuai peraturan perundang-undangan	4 laporan	9.500.000	9.500.000				
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10.322.365.000,00	1.247.365.000,00				
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72 TAHUN		10.322.365.000,00	1.247.365.000,00				

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
									Program/Kegiatan/Subkegiatan							
									Tolok Ukur	Target						
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	30%	747.365.000,00	747.365.000,00				
2	19	2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi	3 orang	747.365.000,00	747.365.000,00				
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	100 orang	747.365.000,00	747.365.000,00				
2	19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					Peningkatan prestasi olahraga	POPDA peringkat 3	9.075.000.000,00	500.000.000,00				
2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	4.075.000.000,00	500.000.000,00				
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Daerah (POPDA) Pelajar	8 cabang	4.075.000.000,00	500.000.000,00				
									Terlaksananya Kompetisi liga sepakbola pelajar	2 jenjang						
									Terlaksananya Operasional Panitia Besar PORPROV	12 bulan						
									terlaksananya Pemenuhan Sarpras Porporv 2023	1 kegiatan						
2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga					Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	50%	5.000.000.000,00					
2	19	3	2.04	2	Pengembangan organisasi keolahragaan				Tersedianya dana hibah KONI	1 Kegiatan	5.000.000.000,00					
2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERMUKAAN					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	35%	500.000.000,00					
2	19	4	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	80 gugus depan	500.000.000,00					
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan				Tersedianya dana hibah kwartir cabang	1 Kegiatan	500.000.000,00					
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						239.840.000	259.110.000				
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				239.840.000	259.110.000				
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60%	239.840.000	259.110.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	20	02	2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Terselenggaranya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bangka Barat	90%	239.840.000	259.110.000				
2	20	02	2,01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya buku analisis dan diseminasi data statistik sektorl	5 buku	44.110.000	50.000.000				
2	20	02	2,01	03 Membangun Metadata Statistik Sektoral			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya dokumen metadata statistik sektorl	1 dokumen	87.810.000	60.000.000				
2	20	02	2,01	04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya operator data OPD dan Desa se Kabupaten Bangka Barat	35 operator	44.110.000	44.110.000				
2	20	02	2,01	05 Pengembangan Infrastruktur			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya upgrade dan maintenance website data kite	1 kegiatan	20.000.000	60.000.000				
2	20	02	2,01	06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselenggaranya implementasi peraturan dan SOP otorisasi statistik di Kabupaten Bangka Barat	1 kegiatan	43.810.000	45.000.000				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						63.950.000	70.000.000				
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82			63.950.000	70.000.000			
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					Persentase OPD memiliki keamanan informasi	100%	63.950.000	70.000.000			
2	21	02	2,01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Assesment Persandian dan Keamanan Cyber	100%	31.975.000	35.000.000			
2	21	02	2,01	03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pengelolaan dan perlindungan konten informasi milik pemerintah daerah	1 konten	31.975.000	35.000.000				
2	21	02	2,02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah berita sandi yang disampaikan melalui kamar sandi Kabupaten Bangka Barat	12 bulan	31.975.000	35.000.000				
2	21	02	2,02	01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pelaksanaan dukungan kegiatan penting pada pemerintah daerah dan sterilisasi objek vital	1 kegiatan	31.975.000	35.000.000				
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						6.013.460.000	7.918.915.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan wisatawan per tahun	300.000				6.013.460.000	7.918.915.000				
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.849.045.000	5.241.720.000				
2 22 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000				
2 22 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
2 22 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 22 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
2 22 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
2 22 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 22 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.112.500.000	3.112.500.000				
2 22 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.100.000.000	3.100.000.000				
2 22 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
2 22 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
2 22 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 22 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
2 22 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
2 22 01 2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
2 22 01 2,04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	12 Bulan	2.500.000	2.500.000				
2 22 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
2 22 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	12.500.000	12.500.000				
2 22 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
2 22 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	532.625.000	612.800.000				
2 22 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
2 22 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	73.500.000	73.500.000				
2 22 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.000.000	50.000.000				
2 22 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000				
2 22 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan/material	12 Bulan	91.125.000	71.300.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 22 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000	400.000.000				
2 22 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
2 22 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	866.420.000	866.420.000				
2 22 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				
2 22 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	250.800.000	250.800.000				
2 22 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	252 OB	613.620.000	613.620.000				
2 22 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	262.500.000	575.000.000				
2 22 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	45.000.000	275.000.000				
2 22 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 unit	205.000.000	275.000.000				
2 22 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	7.500.000	15.000.000				
2 22 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	5.000.000	10.000.000				
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	10	530.000.000	2.120.000.000				
2 22 02 2,01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fasilitasi acara Adat dan Kesenian	10 Fasilitasi	350.000.000	1.870.000.000				
2 22 02 2,01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah acara adat yang diselenggarakan	10 Event	350.000.000	1.870.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
2 22 02 2,02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Fasilitasi penyambutan tamu	18 Fasilitasi	80.000.000	100.000.000				
2 22 02 2,02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi penyambutan tamu	18 Ceremoni	80.000.000	100.000.000				
2 22 02 2,03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	1 Lembaga Adat	100.000.000	150.000.000				
2 22 02 2,03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya program kerja lembaga adat	1 Dokumen	100.000.000	150.000.000				
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						Percentase Pelaku Seni yang Aktif melakukan Pengembangan Kesenian	10%	150.000.000	200.000.000				
2 22 03 2,01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Fasilitasi seni	1 Fasilitasi	150.000.000	200.000.000				
2 22 03 2,01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi dewan kesenian	1 Dokumen	150.000.000	200.000.000				
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	1	162.675.000	62.675.000				
2 22 04 2,01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Rangkaian pelestarian nilai sejarah yang dilakukan	6 rangkaian kegiatan & 1 laporan	162.675.000	62.675.000				
	01	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota					Terlaksananya rangkaian kegiatan pelestarian nilai sejarah	2 kegiatan	100.000.000					
							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lawatan sejarah kota tua Muntok	100 peserta						
2 22 04 2,01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan	1 Buku 1 Laporan	62.675.000	62.675.000				
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	11 CB	321.740.000	294.520.000				
2 22 05 2,02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	11 CB	321.740.000	294.520.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cagar budaya/situs sejarah yang direhabilitasi/ dipelihara Jumlah cagar budaya/situs sejarah yang ditingkatkan informasinya Terbayarnya honorarium PHL juru pelihara cagar budaya	11 CB 7 CB 84 OB	321.740.000	294.520.000			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82		5.265.805.990,00	4.950.485.440,00				
2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.265.805.990,00	4.950.485.440,00				
2	23	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.988.475.531,00	4.549.154.981,00			
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	8.000.000	8.000.000			
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	teritip laporan capain kinerja dan dokumen perencanaan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000			
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAKIP, LKPJ DAN TAPKIN	4 Dokumen	2.000.000	4.000.000,00			
2	23	01	2.02	Administiras Keuangan Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administiras Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.706.000.000,00	2.706.000.000,00			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.700.000.000	2.700.000.000			
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	2.000.000	2.000.000			
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAKIP, LKPJ DAN TAPKIN	4 dok	2.000.000	2.000.000			
2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Prognosis	2 dok	2.000.000	2.000.000			
23	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	41.636.350,00	41.636.350,00			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atributnya, pakaian batik dan olahraga serta seragam pelayanan perpustakaan daerah	3 jenis	41.636.350,00	41.636.350,00				
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	451.300.431,00	451.300.431,00				
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00				
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat-rapat dinas sesuai dengan tugas dan fungsi	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00				
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan karsipan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00				
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan karsipan	12 bulan	1.299.996,00	1.299.996,00				
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan karsipan	12 bulan	119.999.435,00	119.999.435,00				
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi lain dan instansi pembina di dalam dan di luar daerah	376 kali	225.001.000,00	225.001.000,00				
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	361.332.200,00	-				
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	19 Jenis	243.334.300					
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 Jenis	117.997.900,00					
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.178.930.000,00	1.178.930.000,00				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya pembayaran biaya paket pengiriman	10 paket	500.000	500.000				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhi pembayaran jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	250.000.000	250.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya pembayaran gaji phl pembelian bahan pembersih, pembelaian materai, biaya pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	928.430.000	928.430.000				
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	235.276.550,00	155.288.200,00				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya pembayaran gaji PHL,pembelian bbm dan suku cadang, pembayaran pajak kendaraan dinas, dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit	42.625.960	42.625.960				
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya pembayaran gaji phl pembelian bbm dan suku cadang,pembayaran pajak kendaraan dinas dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit	89.361.240	89.361.240				
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung	3 ac	23.301.000	23.301.000				
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung	3 gedung	79.988.350	79.988.350				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	10.000 orang	272.330.459,00	296.330.459,00				
								Persentase jumlah layanan bidang perpustakaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100%						
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan tingkat daerah	Sangat baik	70.000.000,00	94.000.000,00				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pengadaan bahan pustaka baru dan pengelolahan bahan pustaka baru,pelestari bahan pustaka, alih media dan translasi bahan pustaka	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00				
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pemenuhan kebutuhan informasi profil perpustakaan desa dan sekolah	9 profil	10.000.000,00	10.000.000,00				
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Terselenggaranya perpustakaan keliling, dan lomba minat baca dan gemilang	80 titik perpusling, 2 kegiatan	202.330.459,00	202.330.459,00				
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya minat baca masyarakat	4 Kegiatan	144.330.459,00	144.330.459,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ketersediaan pondok baca di instansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan dasar/umu	1 pojok baca	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksanannya workshop transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	4 workshop	28.000.000,00	28.000.000,00			
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselenggaranya pemilihan duta baca tingkat kabupaten untuk umum	15 peserta	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				Meningkatnya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian naskah kuno dan khazanah budaya bangsa	100%	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				Tersedianya naskah kuno/konten siap baca	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya informasi Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno melalui peran serta masyarakat	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB			100.000.000,00	100.000.000,00			
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					Percentase OPD dan Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	75	20.000.000,00	20.000.000,00			
									Meningkatnya indeks Kearsipan	Baik					
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengelolaan arsip secara baku	Baik	20.000.000,00	20.000.000,00			
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	20.000.000,00	20.000.000,00			
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					Percentase arsip di depo arsip yang terpelihara dengan baik	30%	80.000.000,00	80.000.000,00			
2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					Meningkatnya kualitas sistem administrasi arsip statis	100%					
									Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui JRA	100 box arsip/20 ml	40.000.000,00	40.000.000,00			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pelaksanaan penyusutan arsip di depo arsip yang tidak teratur	1500 arsip inaktif	20.000.000	20.000.000			
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pelaksanaan pemusnahan arsip	1500 arsip inaktif	20.000.000	20.000.000			
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Ailih Media Kabupaten/Kota				Terselenggaranya DPA Arsip Statis Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00			
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselebgganya FGD tentang penetapan dan autentisitas arsip terbentuknya kabupaten bangka barat	50 orang	20.000.000	20.000.000			
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Ailih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	alih media arsip statis terbentuknya kabupaten bangka barat	75 arsip statis	10.000.000	10.000.000			
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				Terselenggaranya FGD dengan elemen presidium pembentukan Bangka Barat	1 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pembuatan daftar pencarian arsip statis	1 dokumen	10.000.000	10.000.000			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.817.729.667	12.693.122.400			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.771.820.000	5.737.963.000			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkattan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 – 5,34			3.771.820.000	5.737.963.000		
						Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%							
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.106.820.000	3.517.940.000			
3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	8.000.000	6.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 25 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	2.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	4.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.706.000.000	1.706.000.000				
3 25 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.700.000.000	1.700.000.000				
3 25 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	2.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	2.000.000	2.000.000				
3 25 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	12.500.000	50.000.000				
3 25 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas PNS dan PHL yang tersedia Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	25 stel	12.500.000	50.000.000				
3 25 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	424.980.000	770.000.000				
3 25 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
3 25 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.000.000	30.000.000				
3 25 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	39.980.000	40.000.000				
3 25 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000	50.000.000				
3 25 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
3 25 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	35.000.000	40.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 25 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	300.000.000	600.000.000				
3 25 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	746.920.000	775.940.000				
3 25 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran honorarium PHL	24 ob	55.940.000	55.940.000				
3 25 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Listrik dan instalasi air yang tersedia Pembayaran jasa telepon, air dan listrik	1 gedung 12 bulan	111.400.000	120.000.000				
3 25 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran honorarium PHL	240 ob	579.580.000	600.000.000				
3 25 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	208.420.000	210.000.000				
3 25 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang terbayarkan Pembayaran honorarium PHL	14 unit 21 unit 12 ob	148.420.000	150.000.000				
3 25 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 gedung 1 gedung	50.000.000	50.000.000				
3 25 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
3 25 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20%	320.000.000	1.313.023.000				
3 25 03 2,01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20%	200.000.000	1.128.023.000				
3 25 03 2,01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen (Rencana Induk Pengembangan Kelautan dan Perikanan)	200.000.000	40.000.000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
3	25	03	2,02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya Data, Informasi dan Potensi Perikanan melalui aplikasi/website (PEDA IKAN)	12 bulan						
			02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						Pembinaan Kelembagaan nelayan kecil	10 kelompok	50.000.000					
3	25	03	2,02	03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terjalinnya kemitraan dengan lembaga Keuangan dan perusahaan swasta dengan sistem bapak angkat	5 kemitraan	50.000.000	40.000.000				
3	25	03	2,03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%	20.000.000	100.000.000				
3	25	03	2,03	01 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	20.000.000	100.000.000				
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	20%	120.000.000	712.000.000				
3	25	04	2,02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						persentase jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	100%	50.000.000	260.000.000				
3	25	04	2,02	04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bimbingan dan Pelatihan terhadap Pelaku usaha Perikanan Budidaya	6 kecamatan	50.000.000	200.000.000				
3	25	04	2,04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya(%)	20%	70.000.000	452.000.000				
3	25	04	2,04	01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data, Informasi dan Potensi Perikanan melalui aplikasi/website (PEDA IKAN)	12 bulan	20.000.000	40.000.000				
3	25	04	2,04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rehabilitasi BBI	1 Paket	50.000.000	300.000.000	APBD			
										Tersedianya Pakan Ikan di BBI	12 bulan						
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						Menurunnya Tindak Pidana Perikanan	100%	100.000.000	80.000.000				
3	25	05	2,01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diolah dalam Kabupaten/Kota						Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum	100%	100.000.000	80.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 25 05 2,01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pengawas Terpadu terhadap pelanggaran Sumber Daya Perikanan Budidaya	12 bulan	100.000.000	40.000.000				
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah	49 Kg/tahun	125.000.000	115.000.000				
3 25 06 2,01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	20%	65.000.000	65.000.000				
3 25 06 2,01 01	Penyedian Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12 bulan	65.000.000	65.000.000				
3 25 06 2,02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10%	60.000.000	50.000.000				
3 25 06 2,02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bimbingan dan Pelatihan terhadap Pelaku usaha Pengolahan	6 kecamatan	60.000.000	50.000.000	APBD			
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									1.723.750.000	3.483.750.000				
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan wisatawan per tahun	300.000				1.723.750.000	3.483.750.000				
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	10 DTW dan 3 Destinasi	1.221.250.000	1.201.250.000				
3 26 02 2,01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						Jumlah Daya Tarik wisata yang dikembangkan	10 DTW	66.290.000	56.290.000				
3 26 02 2,01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata	10 Fasilitasi	56.290.000	56.290.000				
	04	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota					Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	1 Dokumen	10.000.000					
3 26 02 2,03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah Destinasi yang dikelola	3 Destinasi	1.144.960.000	1.144.960.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 26 02 2,03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung di kawasan pariwisata	3 Objek	250.000.000	250.000.000				
3 26 02 2,03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa petugas kawasan wisata	384 OB	894.960.000	894.960.000				
	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota						Pengelolaan data pelaku usaha pariwisata daerah	1 Data	10.000.000					
	04 Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata						Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	1 laporan	10.000.000					
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						Kunjungan Wisatawan	104000 org	482.500.000	2.282.500.000				
3 26 03 2,01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah paket wisata yang dipasarkan	20 Paket	482.500.000	2.282.500.000				
3 26 03 2,01 01	Penggunaan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan informasi promosi wisata Bahan informasi promosi wisata	4 Media 4000 Eksemplar	105.000.000	105.000.000				
3 26 03 2,01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi event wisata masyarakat / komunitas Penyelenggaraan pemilihan duta wisata	10 Fasilitasi 2 Event	350.000.000	2.150.000.000				
3 26 03 2,01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemutakhiran data kepariwisataan	1 Dokumen	17.500.000	17.500.000				
3 26 03 2,01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kerjasama antara pemkab barat dengan stakeholders lainnya di sektor kepariwisataan	1 Kerjasama	10.000.000	10.000.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						Tersedianya zona ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1 lokasi dan 1 usulan hak kekayaan intelektual	10.000.000					
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang melakukan ekspresi, promosi dan interaksi kreatif	10 pelaku Ekraf	10.000.000					
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						Jumlah fasilitasi sarana/prasarana zona ekonomi kreatif	10 fasilitasi, 1 pengusulan Hak Kekayaan Intelektual	10.000.000					

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif	2 jenis ekonomi kreatif	10.000.000					
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Jumlah pelaku SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	2 pelaku	10.000.000					
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						Terfasilitasinya Ekonomi Kreatif	2 fasilitasi	10.000.000					
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								2.766.970.267	1.730.000.000				
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 – 5,34				2.766.970.267	1.730.000.000				
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					Percentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100%	423.250.000	595.000.000				
3	27	02	2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pertanian	100%	130.000.000	250.000.000				
27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi bantuan alat mesin pertanian yang telah dihibahkan ke kelompok tani/UPJA	20 kelompok	50.000.000					
								Inventarisasi kondisi dan kebutuhan alat dan mesin pertanian guna persiapan dukungan kegiatan food estate dan intensifikasi lahan komoditas	1 data						
								Fasilitasi pendampingan penyaluran KUR alsintaun ke kelompok tani/UPJA/petani	6 kecamatan						
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi penyusunan erdkk dan aplikasi kartu tani guna mendapatkan data kebutuhan pupuk bersubsidi yang valid dan kesesuaian penyaluran pupuk di	6 kecamatan	80.000.000	250.000.000				
								Peningkatan kemandirian kelompok tani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk dan pestisida dengan pengolahan pupuk dan pestisida organik di tingkat kelompok	6 kecamatan						

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
								Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida yang beredar di Kabupaten Bangka Barat	1 tahun						
3	27	02	2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100%	187.250.000	195.000.000				
3	27	02	2,02	01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah varietas unggul lokal yang akan didaftarkan	5 varietas unggul lokal buah-buahan	105.000.000	100.000.000			
3	27	02	2,02	02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Jumlah penangkar benih/bibit yang dibina	7 penangkar benih perkebunan					
3	27	02	2,02	03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					Jumlah penangkar benih/bibit tanaman yang dibina dalam usaha penangkaran benih tanaman lokal	2 penangkar benih pangan (padi) dan 2 penangkar benih horti					
3	27	02	2,06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	Jumlah tanaman karet entres yg terpelihara	1 ha	15.000.000	20.000.000			
3	27	02	2,06	02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya Nitrogen Cair untuk mendukung peningkatan kualitas genetik ternak	3 POS IB	67.250.000	75.000.000			
									jumlah sarpras untuk mendukung peningkatan kualitas genetik ternak	2 jenis					
3	27	02	2,06	03 Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100%	106.000.000	150.000.000			
3	27	02	2,06	02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	tersedianya HPT bagi ternak sapi dan tersedianya pakan tambahan ternak sapi dan sarpras di UPT Kelapa	1 Ha dan 1 tahun (operasional UPT)	106.000.000	50.000.000			
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100%	1.771.490.267	365.000.000			
3	27	03	2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian					berkembangnya sarpras pertanian	100%	731.000.000	350.000.000			
			01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LCP2B					Pengelolaan Jalan Pertanian	1 dok	686.000.000				
									Pengelolaan Irigasi Tersier	1 dok					
									Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1 dok					
									Dukungan Manajemen	1 tahun					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 27 03 2,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan informasi Update potensi perkebunan jumlah laporan bulanan data pertanian dalam 1 tahun jumlah laporan bulanan updating data peternakan dalam 1 tahun	6 Buku 12 Bulan	45.000.000	100.000.000				
3 27 03 2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian						Terkoneksinya Akses Jalan Pertanian	100%	1.025.490.267	0				
3 27 03 2,02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					Kab. Bangka Barat	Akses Prasarana kawasan pertanian	15 Km	1.025.490.267		APBD (PIK) + Reses			
3 27 03 2,03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	100%	15.000.000	15.000.000				
3 27 03 2,03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan bulanan data peternakan dalam 1 tahun	12 Bulan	15.000.000	15.000.000				
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	100%	182.230.000	220.000.000				
3 27 04 2,01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terjaminnya kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten	100%	152.230.000	160.000.000				
3 27 04 2,01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah obat-obatan ternak tersedianya alat penunjang pelayanan kesehatan hewan	26 jenis 8 jenis	102.230.000	90.000.000				
3 27 04 2,01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan medik veteriner	5 jenis peralatan dan 5 jenis perlengkapan medic veteriner	50.000.000	70.000.000				
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Medic Veteriner	100%	30.000.000					
	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan					Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha	1 kegiatan	30.000.000					
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						Persentase Bencana Pertanian yang Tertanggulangi	100%	300.000.000	300.000.000				
3 27 05 2,01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	300.000.000	300.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 27 05 2,01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luasan pengendalian OPT tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah luasan pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	200 Ha 100 Ha	300.000.000	300.000.000				
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						Meningkatnya jumlah unit usaha pertanian yang memenuhi standar yang berlaku	3 perusahaan	30.000.000					
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 tahun	30.000.000					
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perusahaan perkebunan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha perkebunan	2 kali	30.000.000					
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						Persentase POKTAN/GAPOKTAN/ Petani yang Mendapat Penyuluhan	100%	60.000.000	250.000.000				
3 27 07 2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						Terlaksanannya pelaksanaan penyuluhan	2 kelembagaan	60.000.000	250.000.000				
3 27 07 2,01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah percontohan di BPP	2 unit	50.000.000	180.000.000				
3 27 07 2,01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KEP yang tumbuh	1 unit	10.000.000	70.000.000				
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								575.000.000	670.560.000				
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Peningkattan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Kesesuaian dengan tata ruang	100%				575.000.000	670.560.000				
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						Persentase Implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Tahuha	16%	575.000.000	670.560.000				
3 28 04 2,01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	100%	575.000.000	670.560.000				
3 28 04 2,01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit yang tersedia untuk penanaman di Lahan Rehabilitasi TAHURA (tanaman kehutanan dan MPTS)	4 Ha	200.000.000	100.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
3 28 04 2,01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terjaganya Keutuhan kawasan Tahura	1 Kawasan	150.000.000	80.000.000				
3 28 04 2,01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Desa Penyanga Tahura	5	25.000.000	25.000.000				
3 28 04 2,01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Desain Tapak Tahura	1 Dokumen	200.000.000	265.560.000				
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN								480.189.400	430.189.400				
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	22,50%				480.189.400	430.189.400				
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						Jumlah Sub Distributor/Agen/Sub Agen Bapok yang terbina	12	11.990.000	11.990.000				
3 30 03 2,02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						Akses Distribusi perdagangan yang tertib dan kondusif	1 Kegiatan	11.990.000	11.990.000				
3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya para pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok yang upgrade informasi dan perizinan yang harus dipenuhi serta tertib administrasi terkait distribusi barang kebutuhan pokok	12 Sub distributor	11.990.000	11.990.000				
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu	6600	119.110.000	69.110.000				
3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan barang penting di pasar wilayah Kabupaten Bangka Barat.	3 kegiatan	85.500.000	35.500.000				
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok masyarakat	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000				
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Updating, publikasi dan aksesibilitas data harga barang kebutuhan pokok	1 Pasar	17.500.000	17.500.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya paket pasar murah berupa sembako murah dan subsidi daging sapi	6600 paket sembako	50.000.000	0			
3	30	04	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pengawasan pupuk dan pestisida di Kab.Bangka Barat	6 kecamatan	33.610.000	33.610.000			
3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terciptanya penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tertib ukur	6 Kecamatan	33.610.000	33.610.000			
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Jumlah Pameran yang Diikuti	100 persen	188.750.000	188.750.000			
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Pameran yang Diikuti	2 kegiatan	188.750.000	188.750.000			
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya produk unggulan daerah Kab.Bangka Barat yang dikenal Investor dan Masyarakat sehingga semakin besar peluang investor masuk.	2 Pameran	123.000.000	123.000.000			
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya produk unggulan daerah Kab.Bangka Barat yang dikenal Investor dan Masyarakat sehingga semakin besar peluang investor masuk.	1 Pameran	65.750.000	65.750.000			
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100 Persen	160.339.400	160.339.400			
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	160.339.400	160.339.400			
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya sidang tera di pasar dan objek timbang	100 Persen	87.626.200	87.626.200			
3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksana Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal	100 Persen	72.713.200	72.713.200			
					DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN						500.000.000	500.000.000			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 – 5,34		500.000.000	500.000.000			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Industri	100%	350.000.000	350.000.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
3	31	02	2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Industri	3 Kegiatan	350.000.000	350.000.000				
3	31	02	2,01	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kesesuaian dokumen rencana dengan Program dan kegiatan yang dilakukan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000				
3	31	02	2,01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	meningkatnya penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000				
3	31	02	2,01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pembinaan dan Pemberdayaan IKM kegiatan Potensial	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000				
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	100%	100.000.000	100.000.000				
3	31	03	2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	2 Kegiatan	100.000.000	100.000.000				
3	31	03	2,01	01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendampingan Legalitas Usaha Industri	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000				
3	31	03	2,01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tercapainya sistem Informasi Industri	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000				
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Tersedianya sistem informasi Industri	100%	50.000.000	50.000.000				
3	31	04	2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Ketersediaan Sistem Informasi Industri	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000				
3	31	04	2,01	02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya data dan Informasi IKM yang dimutakhirkan	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000				
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB		89.879.189.619,00	102.534.857.828,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
		Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan	Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan investasi	3,18 – 5,34 2%										
4	01	SEKRETARIAT DAERAH								36.736.020.821,00	39.968.967.169,00				
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	28.517.129.539,00	31.797.880.294,00				
4	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.491.200,00	43.565.760,00				
4	01	01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	14.999.300	15.749.265				
4	01	01	2,01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.200.000				
4	01	01	2,01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.200.000				
4	01	01	2,01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	9.995.000	10.494.750				
4	01	01	2,01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.496.900	8.921.745				
4	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.012.500.000,00	9.013.125.000,00				
4	01	01	2,02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	9.000.000.000	9.000.000.000				
4	01	01	2,02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat	1 Dokumen	2.500.000	2.625.000				
4	01	01	2,02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.250.000				
4	01	01	2,02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Bulanan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.250.000				
4	01	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.925.000,00				
4	01	01	2,03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.925.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
4	01	01	2,05	01	Administrazione Kepergawaiann Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrazione Kepergawaiann Perangkat Daerah	100 Persen	51.700.000,00	54.285.000,00		
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekda Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	4 Stel 52 Stel	41.700.000	43.785.000			
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawaiann			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepergawaiann Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	10.500.000			
4	01	01	2,06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.985.236.000,00	7.400.152.830,00			
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	65.000.000	68.250.000			
			02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 infocus, 8 laptop, Mic konfrens 3 paket, printer fotocopy 1, penghancur kertas 1, scanner F4, printer laserjet 5, lemari arsip 1	575.500.000				
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	132.000.000	138.600.000			
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	1.200.000.000	1.607.656.050			
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	175.000.000	490.722.750			
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	107.736.000	197.477.280			
4	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	225.000.000	279.798.750			
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	12 Bulan	1.500.000.000	4.612.398.000			
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	5.000.000	5.250.000			
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.555.320.000,00	6.401.529.099,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.100.000				
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 Bulan	900.000.000	1.392.300.000				
4 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 unit	270.000.000	373.432.500				
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	1728 Orang/Bulan	4.383.320.000	4.633.696.599				
4 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	530.000.000,00	472.500.000,00				
	05 Pengadaan Mebel						Tersedianya mebel kantor	5 unit meja dan 5 unit kursi	10.000.000,00					
4 02 01 2,07 09	Penyadaan gedung kantor atau bangunan lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit (pendopo)	510.000.000	472.500.000				
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit AC	10.000.000					
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.744.293.239,00	5.296.931.850,00				
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	1.000.000.000	1.973.160.000				
4 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 unit	1.100.000.000	1.629.127.500				
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	3.444.293.239	1.438.500.000				
4 01 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas	198 unit	200.000.000	256.144.350				
4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Terpenuhinya adminstrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae	100%	812.760.000,00	923.398.000,00				
4 01 01 2,11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	1 Tahun	200.000.000	250.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 01 01 2,11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KDH dan WKDH	20 Stel	77.660.000	81.543.000				
4 01 01 2,11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya MedicalCheck Up KDH dan WKDH beserta Keluarga Tersedianya Suplemen Kesehatan KDH dan WKDH beserta Keluarga	8 Orang 12 Bulan	135.100.000	141.855.000				
4 01 01 2,11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dana operasional KDH dan WKDH	12 bulan	400.000.000	450.000.000				
4 01 01 2,12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah						Terfasilitasinya Kerumah tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	247.010.000,00	226.250.850,00				
4 01 01 2,12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati	7 Paket	89.670.000	97.793.850				
4 01 01 2,12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati Wakil Bupati	6 Paket	94.670.000	64.228.500				
4 01 01 2,12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	6 Paket	62.670.000	64.228.500				
4 01 01 2,13	Penataan Organisasi						Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan	3 kebijakan	667.769.100,00	805.055.055,00				
4 01 01 2,13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten	4 Dokumen	268.740.100	302.956.605				
4 01 01 2,13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	140.157.800	167.945.190				
4 01 01 2,13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi Kabupaten	1 Dokumen	108.985.500	155.993.775				
4 01 01 2,13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	82.498.600	107.403.030				
4 01 01 2,13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	67.387.100	70.756.455				
4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan	100%	1.860.550.000,00	1.624.661.850,00				
4 01 01 2,14 01	Fasilitasi Keprotokolan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penataan Acara Pimpinan Daerah di dalam Daerah dan luar Daerah	12 Bulan	95.550.000	100.327.500				
4 01 01 2,14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi KDH/WKDH dengan Ormas/Pelajar/Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	1.730.000.000	1.485.237.600				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 01 01 2,14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terdokumentasinya kegiatan Pimpinan Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	35.000.000	39.096.750				
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,28	7.698.085.282,00	7.624.240.575,00				
							Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%						
							Terlaksananya fasilitasi siswa/mahasiswa miskin yang mengajukan bantuan pendidikan	100%						
							Persentase pengajuan bantuan rumah ibadah yang ditindaklanjuti	100%						
4 01 02 2,01	Administrasi Tata Pemerintahan						Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan	6 kebijakan	337.986.382,00	849.975.000,00				
4 01 02 2,01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi bidang administrasi pemerintahan Tersusunnya laporan Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Kali 2 Laporan	184.933.440	288.750.000				
4 01 02 2,01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya pembinaan kewilayahan Tersedianya data kewilayahan Tersusunnya data/ dokumen SHP (shapefile) Peta Rupa bumi	6 Kecamatan 6 Kali 1 Database 1 Dokumen	79.500.232	261.975.000				
4 01 02 2,01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Cakupan penerapan SPM di Kabupaten Bangka Barat Terfasilitasinya Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Terfasilitasinya penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pemerintah Daerah	100 Persen 2 Kali 3 Kali 2 Dokumen	73.552.710	299.250.000				
4 01 02 2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan	3 kebijakan	6.632.832.500,00	4.889.674.125,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Da'i yang melakukan pembinaan di desa Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang diberangkatkan Haji Terlaksananya safari ramadhan Tersedianya operasional PHBI serta i'tikaf ramadhan, insentif marbot masjid serta fasilitasi perjalanan rohani	65 Orang 250 Orang 17 Desa 7 Hari Besar, 1 kegiatan, 20 masjid, 24 orang	2.033.172.500	2.029.831.125				
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah proposal hibah/bansos yang di survey dan dimonitoring Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	56 Proposal 1 Laporan	4.584.675.000	2.844.108.750	APBD & APBD (PIK), Reses			
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi , monitoring dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat, sekolah, perangkat desa, lembaga keagamaan	1 Dokumen	14.985.000	15.734.250				
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	3 kebijakan	638.666.500	1.748.091.450				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	134.365.500	164.772.300				
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Bantuan Hukum untuk orang miskin/dinas perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Terbinanya Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten (KADARKUM) Terlaksananya Bantuan/ Pendampingan Hukum Bagi Pejabat Pemkab Bangka Barat Jumlah raperda dan raperup yang tersusun Tersusunnya Laporan Aksi HAM Kabupaten Bangka Barat	5 Kasus 1 Kelompok 2 Kasus 2 Laporan	142.040.000	176.749.650				
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Perda / Perbup Terupdatenya Produk Hukum Melalui Website JDIH	6 judul Produk Hukum 50 Produk Hukum	362.261.000	1.406.569.500				
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah			Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan	1 kebijakan	88.599.900	136.500.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan dengan Pihak ketiga	10 Kerjasama	45.429.900	89.250.000				
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi hasil kerjasama dalam negeri Tersusunnya dan terpublikasinya hasil pelaksanaan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen 2 Jenis	43.170.000	47.250.000				
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	520.806.000,00	546.846.300,00				
								Persentase capaian fisik dan keuangan pembangunan Daerah	80%						
								Penilaian Kinerja BUMD dan BLUD	61,50						
4	01	03	2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian yang dikeluarkan	2 kebijakan	198.466.000,00	208.389.300,00				
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	64.457.000	67.679.850				
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya laporan pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Dokumen	80.634.000	84.665.700				
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	4 Dokumen	53.375.000	56.043.750				
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	122.100.000	128.205.000				
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	122.100.000	128.205.000				
4	01	03	2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	3 kebijakan	200.240.000	210.252.000				
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan yang ditindaklanjuti	100 Persen	77.985.000	81.884.250				
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 Bulan	76.430.000	80.251.500				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 01 03 2,03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pelaku Pengadaan di Pemerintah Desa Terlaksananya Pembinaan terhadap Pelaku Pengadaan/Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	60 Desa 60 Orang	45.825.000	48.116.250				
4 02	SEKRETARIAT DPRD								53.143.168.798,00	62.565.890.659,00				
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	24.354.658.058,00	25.201.058.461,00				
4 02 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
4 02 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
4 02 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
4 02 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
4 02 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
4 02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
4 02 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.012.500.000,00	3.012.500.000,00				
4 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.000.000.000	3.000.000.000				
4 02 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	2.500.000				
4 02 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
4 02 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 02 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00				
4 02 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000					
4 02 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000,00	23.125.000,00					
4 02 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	12.500.000	13.125.000					
4 02 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000					
4 02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.338.486.955,00	1.603.428.803,00					
4 02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	107.834.780	111.494.019					
4 02 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	47.002.420	49.352.541					
4 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	412.823.990	433.465.190					
4 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	277.399.320	291.269.286					
4 02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	67.200.000	70.560.000					
4 02 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	221.226.445	232.287.767					
4 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	200.000.000	200.000.000					
4 02 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000					
4 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.000.000.000,00	1.186.500.000,00					
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit (komisi)	500.000.000						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250 meter (pagar)	500.000.000					
4	02	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.123.462.000,00	2.229.535.100,00				
4	02	01	2,08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				
4	02	01	2,08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	368.364.000	386.782.200				
4	02	01	2,08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	720 OB	1.753.098.000	1.840.752.900				
4	02	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.360.181.900,00	3.536.065.995,00				
4	02	01	2,09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	177.990.000	186.889.500				
4	02	01	2,09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	202.980.000	221.004.000				
4	02	01	2,09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	2.390.000.000	2.509.500.000				
4	02	01	2,09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248 Unit	589.211.900	618.672.495				
4	02	01	2,15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	11.993.097.500,00	12.032.752.375,00				
4	02	01	2,15	01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	11.200.000.000	11.200.000.000				
4	02	01	2,15	02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	150 Stel	318.538.500	334.465.425				
4	02	01	2,15	03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Medical Check up untuk anggota DPRD dan keluarga	25 Orang	474.559.000	498.286.950				
4	02	01	2,16	Layanan Administrasi DPRD						Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%	1.454.429.703,00	1.527.151.188,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
4 02 01 2,16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi hearing, dialog dan monitoring adanya masukan/aspirasi dan masyarakat Fasilitasi pelantikan/peresmian PAW Fasilitasi rapat-rapat Badan Musyawarah Fasilitasi rapat-rapat komisi Fasilitasi rapat-rapat paripurna	4 Kegiatan 2 Kali 24 Kegiatan 12 Kegiatan 40 Paripurna	698.429.720	733.351.206				
4 02 01 2,16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12 bulan	755.999.983	793.799.982				
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						Cakupan Raperda menjadi Perda	100%	28.788.510.740,00	37.364.832.198,00				
4 02 02 2,01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100%	591.257.870,00	620.820.764,00				
4 02 02 2,01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi pembahasan Raperda Fasilitasi penyusunan Rancangan Perda Inisiatif	100 % 100 %	514.418.950	540.139.898				
4 02 02 2,01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi rapat-rapat Badan Legislasi	4 Kegiatan	76.838.920	80.680.866				
4 02 02 2,02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	188.627.320,00	198.058.686,00				
4 02 02 2,02 03	Pembahasan APBD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran	4 Kegiatan	188.627.320	198.058.686				
4 02 02 2,04	Peningkatan Kapasitas DPRD						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	6.893.166.760,00	7.237.825.098,00				
4 02 02 2,04 02	Bimbingan Teknis DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi pendalaman tugas yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD	6 Kali	5.871.778.000	6.165.366.900				
4 02 02 2,04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	441.000.000	463.050.000				
4 02 02 2,04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi jasa konsultasi dan bantuan hukum bagi pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	167.233.500	175.595.175				
4 02 02 2,04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga ahli yang tersedia pertahun	60 OB	270.000.000	283.500.000				
4 02 02 2,04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi forum komunikasi DPRD dan Masyarakat	12 Kegiatan	143.155.260	150.313.023				
4 02 02 2,05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	648.155.000,00	680.562.750,00				
4 02 02 2,05 03	Pelaksanaan Reses					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah Dapil masing-masing	3 Reses	648.155.000	680.562.750				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
4	02	02	2,08	Fasilitasi Tugas DPRD				Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	20.467.303.790,00	28.627.564.900,00				
4	02	02	2,08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan DPRD Dalam rangka konsultasi atau koordinasi	12 Bulan 12 Bulan	20.467.303.790	28.627.564.900				
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	WTP BB		152.264.042.760,00	159.328.878.765,00				
5	01			PERENCANAAN						9.107.607.619,00	10.220.750.000,00				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH						9.107.607.619,00	10.220.750.000,00				
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.002.100.000,00	6.168.310.000,00				
5	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41.500.000,00	41.500.000,00				
5	01	01	2,01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
5	01	01	2,01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
5	01	01	2,01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
5	01	01	2,01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
5	01	01	2,01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.612.500.000,00	3.612.500.000,00				
5 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.600.000.000	3.600.000.000				
5 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
5 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
5 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
5 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00				
5 01 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
5 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000,00	122.500.000,00				
5 01 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stell	12.500.000	12.500.000				
5 01 01 2,05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaiian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
5 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	867.898.000,00	954.187.800,00				
5 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	11.000.000				
5 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	27.900.000	30.690.000				
5 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	40.000.000	44.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	44.000.000				
5 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.998.000	5.497.800				
5 01 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000	44.000.000				
5 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	700.000.000	770.000.000				
5 01 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
4 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	130.000.000,00	-				
4 02 01 2,07 05	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair Kantor	1 paket	50.000.000					
4 02 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	80.000.000					
5 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	967.672.000	1.064.439.200				
5 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.200.000				
5 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	102.000.000	112.200.000				
5 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44 Unit	65.360.000	71.896.000				
5 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	324 OB	798.312.000	878.143.200				
5 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	351.530.000,00	364.683.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	46.960.000	51.656.000				
5 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	73.870.000	81.257.000				
	Pemeliharaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Mebel kantor	50 unit (sarung kursi)	20.000.000					
5 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000	220.000.000				
5 01 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	10.700.000	11.770.000				
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi	2	786.547.619,00	1.023.000.000,00				
5 01 02 2,01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai Tata Cara berdasarkan peraturan perundungan	100%	466.875.820,00	500.500.000,00				
5 01 02 2,01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kegiatan	20.743.820	27.500.000				
5 01 02 2,01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	126.448.950	143.000.000				
5 01 02 2,01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	50.000.000					
5 01 02 2,01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen Perencanaan	269.683.050	330.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
5	01	02	2,02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Terlaksananya Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	100%	152.230.263,00	220.000.000,00				
5	01	02	2,02	01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan SIM Perencanaan	12 Bulan	82.917.226	110.000.000			
5	01	02	2,02	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Updating E-Data SIPD	4 Triwulan	69.313.037	110.000.000			
5	01	02	2,03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100%	167.441.536,00	302.500.000,00				
5	01	02	2,03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersusunnya dokumen pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	84.004.396	165.000.000			
5	01	02	2,03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah	2 Dokumen	83.437.140	137.500.000			
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Terlaksananya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	2.318.960.000,00	3.029.440.000,00				
5	01	03	2,01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Persentase Penjabaran program RPJMD dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	900.000.000,00	1.000.000.000,00				
5	01	03	2,01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	115.000.000	100.000.000			
5	01	03	2,01	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Kegiatan	75.000.000	100.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 01 03 2,01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Bulan	80.000.000	100.000.000				
5 01 03 2,01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan	12 Bulan	125.000.000	200.000.000				
5 01 03 2,01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	120.000.000	100.000.000				
5 01 03 2,01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Kegiatan	85.000.000	100.000.000				
5 01 03 2,01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Bulan	100.000.000	100.000.000				
5 01 03 2,01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	12 Bulan	200.000.000	200.000.000				
5 01 03 2,02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Percentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	704.480.000,00	979.440.000,00				
5 01 03 2,02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada OPD mitra Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	79.700.000	83.685.000				
5 01 03 2,02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	2 Kegiatan	77.600.000	81.480.000				
5 01 03 2,02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	12 Bulan	75.500.000	79.275.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 01 03 2,02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	12 Bulan	119.440.000	210.000.000				
5 01 03 2,02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada OPD mitra Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	79.700.000	105.000.000				
5 01 03 2,02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	2 Kegiatan	77.600.000	105.000.000				
5 01 03 2,02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	12 Bulan	75.500.000	105.000.000				
5 01 03 2,02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	12 Bulan	119.440.000	210.000.000				
5 01 03 2,03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	100%	714.480.000,00	1.050.000.000,00				
5 01 03 2,03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	89.700.000	105.000.000				
5 01 03 2,03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Kegiatan	77.600.000	105.000.000				
5 01 03 2,03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 Bulan	75.500.000	105.000.000				
5 01 03 2,03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12 Bulan	119.440.000	210.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	79.700.000	105.000.000			
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	2 Kegiatan	77.600.000	105.000.000			
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	12 Bulan	75.500.000	105.000.000			
5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	12 Bulan	119.440.000	210.000.000			
5	02				KEUANGAN						134.011.537.011	139.582.243.911			
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						124.885.104.311	128.854.684.311			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.774.678.000	5.474.678.000			
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000	41.500.000			
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000			
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000			
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000			
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000			
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.512.500.000	3.512.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.500.000.000	3.500.000.000				
5 02 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
5 02 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
5 02 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
5 02 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
5 02 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
5 02 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000	22.500.000				
5 02 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
5 02 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
5 02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	723.800.000	623.800.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	9.000.000	9.000.000				
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	100.000.000					
5 02 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
5 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	75.000.000	75.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	40.000.000				
5 02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.800.000	4.800.000				
5 02 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	60.000.000	60.000.000				
5 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	425.000.000	425.000.000				
5 02 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
4 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	50.000.000,00	472.500.000,00				
4 02 01 2,07 05	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Tersedianya Mebel kantor	1 paket	50.000.000	472.500.000				
5 02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.045.988.000	1.045.988.000				
5 02 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	110.000.000	110.000.000				
5 02 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	14.588.000	14.588.000				
5 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor, PHL sebanyak 30 orang (S2 1, SI 13, D3 2, SMA 14)	360 OB	919.400.000	919.400.000				
5 02 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	369.890.000	219.890.000				
5 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	39.750.000	39.750.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4 mobil, 12 unit motor)	16 unit	150.140.000	150.140.000				
5 02 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung,1 ruang dan koridor	165.000.000	15.000.000				
5 02 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15.000.000	15.000.000				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						Menurunnya temuan atas Audit BPK terhadap LKD Pemda	6 temuan	118.408.146.011	122.677.726.011				
5 02 02 2,01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Terlaksananya penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai peraturan perundang-undangan	100%	1.399.550.000	1.399.550.000				
5 02 02 2,01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA / PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	2 Dokumen	153.300.000	153.300.000				
5 02 02 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA / PPAS APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	2 Dokumen	157.500.000	157.500.000				
5 02 02 2,01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA SKPD yang tersusun	30 Dokumen	50.000.000	50.000.000				
5 02 02 2,01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang tersusun	30 Dokumen	50.000.000	50.000.000				
5 02 02 2,01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	30 Dokumen	50.750.000	50.750.000				
5 02 02 2,01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang tersusun	30 Dokumen	57.500.000	57.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 02 2,01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Jumlah Peraturan KDH Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Perda 1 Perbup	300.000.000	300.000.000				
5 02 02 2,01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Jumlah Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Perda 1 Perbup	300.000.000	300.000.000				
5 02 02 2,01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Jumlah Peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Dokumen 5 Regulasi	164.250.000	164.250.000				
5 02 02 2,01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan anggaran Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Terselenggaranya Pendampingan Implementasi Program Aplikasi SIPD	12 Kali 3 Kali	116.250.000	116.250.000				
5 02 02 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	524.960.000	524.960.000				
5 02 02 2,02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Dokumen	43.300.000	43.300.000				
5 02 02 2,02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang tersusun	4 Dokumen	28.856.000	28.856.000				
5 02 02 2,02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer Pusat yang tersusun	1 Dokumen	46.030.000	46.030.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 02 2,02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tersusun	1 Dokumen	26.879.000	26.879.000				
5 02 02 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Gaji PNS/CPNS pada seluruh OPD	12 Bulan	108.376.000	108.376.000				
5 02 02 2,02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Uang Daerah	4 Dokumen	43.440.000	43.440.000				
5 02 02 2,02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan SKPKD Kabupaten Bangka Barat	12 Bulan	199.215.000	199.215.000				
5 02 02 2,02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan Pembinaan Penatausahaan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	28.864.000	28.864.000				
5 02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	378.130.000	378.110.000				
5 02 02 2,03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Rekonsiliasi yang tersusun	12 Laporan	46.556.000	46.556.000				
5 02 02 2,03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD yang tersusun	12 Laporan	53.395.000	53.395.000				
5 02 02 2,03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan	97.005.000	97.005.000				
5 02 02 2,03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	2 Laporan	79.050.000	79.050.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 02 2,03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelesaian Kasus Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2 Laporan	102.124.000	102.104.000				
5 02 02 2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Terlaksananya Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan	100%	116.105.506.011	120.375.106.011				
5 02 02 2,04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kajian Investasi Daerah	4 Dokumen	300.000.000	300.000.000				
5 02 02 2,04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	60 Desa	112.200.000.000	116.886.465.001				
5 02 02 2,04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya alokasi untuk belanja tak terduga	100%	1.000.000.000	1.000.000.000				
5 02 02 2,04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa	60 Desa	2.605.506.011	2.188.641.010				
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						Menurunnya temuan atas Audit BPK terkait aset / BMD Pemda	3 temuan	702.280.300	702.280.300				
5 02 03 2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	702.280.300	702.280.300				
5 02 03 2,01 01	Penyusunan Standar Harga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Standar Kabupaten Bangka Barat	41 Buku	54.865.000	54.865.000				
5 02 03 2,01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan RKBMD dan RKPBM D Kabupaten Bangka Barat	2 Dokumen	47.329.870	47.329.870				
5 02 03 2,01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penatausahaan aset daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi BMD Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	6 Buku 1 Aplikasi 1 Perbup	183.553.700	183.553.700				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 03 2,01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Pengadaan tanda identitas dan plang pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1 Dokumen 5 Jenis	73.353.020	73.353.020				
5 02 03 2,01 08	Penilaian Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	75.440.580	75.440.580				
5 02 03 2,01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil penelitian usulan penghapusan barang milik daerah (SK Penghapusan BMD) Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan penilaian dan laporan penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	235.591.370	235.591.370				
5 02 03 2,01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.267.160	5.267.160				
5 02 03 2,01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 OPD	26.879.600	26.879.600				
	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH								9.126.432.700,00	10.727.559.600,00				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.126.231.500,00	8.191.750.000,00				
5 02 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00				
5 02 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	2.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.706.000.000,00	5.706.000.000,00				
5 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5.700.000.000	5.700.000.000				
5 02 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/sementara n perangkat daerah	2 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen laporan dan analisis anggaran perangkat daerah	2 dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	100 Persen	12.500.000	12.500.000				
5 02 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
5 02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	697.000.000	721.920.000				
5 02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000.000	20.000.000				
5 02 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Adanya peralatan rumah tangga untuk kebersihan kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
5 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya makan minum kantor	12 bulan	64.000.000	70.000.000				
5 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	52.600.000				
5 02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya ilmu dan wawasan staf	12 bulan	3.000.000	4.320.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	140.000.000	145.000.000				
5 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan konsultasi pendapat, pengawasan, perencanaan dan keuangan diklat, seminar dan bimtek	12 bulan	425.000.000	425.000.000				
5 02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.465.901.500	1.489.500.000				
5 02 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya jasa pengiriman surat	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
5 02 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12 bulan	333.301.500	356.900.000				
5 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanannya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.130.600.000	1.130.600.000				
5 02 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	232.830.000	249.830.000				
5 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	45.490.000	47.490.000				
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 unit	126.340.000	141.340.000				
5 02 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	7.500.000	7.500.000				
5 02 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	38 unit	53.500.000	53.500.000				
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah	2,50%	1.000.201.200	2.535.809.600				
5 02 04 2,01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						Tercapaiannya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah	2,50%	1.000.201.200	2.535.809.600				
							Terpenuhinya pelayanan pemeriksaan dan keberatan pajak daerah	100%						
							Terlaksananya pengolahan data dan evaluasi PAD	100%						
5 02 04 2,01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen pemutakhiran zona nilai tanah (ZNT) PBB P2 untuk 64 Desa/Kelurahan	1 Dokumen dan Peta	19.000.000	472.497.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 04 2,01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data 9 pajak daerah teraplikasi dengan baik Data BPHTB teraplikasi dengan baik Data PBB P2 teraplikasi dengan baik	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	100.000.000	168.000.000				
5 02 04 2,01 03	Penuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyebarluasan kebijakan pajak daerah Tersedianya produk hukum terkait pengelolaan pajak	10 buah 2 produk hukum	78.055.700	95.600.000				
5 02 04 2,01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	10.000.000	10.000.000				
5 02 04 2,01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya wajib pajak dan objek pajak daerah	2100 OP	100.000.000	181.380.000				
5 02 04 2,01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya administrasi pengelolaan pendataan, penilaian dan ketetapan pajak daerah	12 Laporan	100.000.000	274.558.000				
5 02 04 2,01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai objek pajak PBB P2 yang akurat dan terverifikasinya pajak BPHTB	4465 SPPT	62.140.000	181.380.000				
5 02 04 02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Adanya ketetapan pajak daerah	7500 ketetapan	59.560.000	173.697.000				
5 02 04 2,01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
5 02 04 2,01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersampaikannya SPPT PBB P2 Kabupaten Bangka Barat Tersusunnya administrasi hasil verifikasi data pelaporan pajak daerah	48000 SPPT 12 laporan	100.000.000	378.120.100				
5 02 04 2,01 11	Penagihan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah Tersusunnya administrasi penagihan pajak daerah	7500 WP 1 dokumen	100.000.000	304.837.000				
5 02 04 2,01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyelesaian keberatan dan piutang pajak daerah Tersusunnya data penghapusan piutang pajak daerah	235 OP 1 dokumen	100.000.000	117.968.500				
5 02 04 2,01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah Tersusunnya laporan pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah	12 bulan 1 laporan	100.000.000	103.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 02 04 2,01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rekonsiliasi PAD sehingga meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	4 kali	61.445.500	64.772.000				
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH														
5 03	KEPEGAWAIAN								7.231.672.500,00	7.393.180.500,00				
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.729.630.000,00	5.739.290.000,00				
5 03 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
5 03 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000				
5 03 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
5 03 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000				
5 03 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja PD yang Tersusun	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000				
5 03 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				
5 03 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.412.500.000,00	3.407.500.000,00				
5 03 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.400.000.000	3.400.000.000				
5 03 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang Tersusun	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000				
5 03 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran PD yang Tersusun	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000				
5 03 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang Tersusun	2 Dokumen	5.000.000	0				
5 03 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00				
5 03 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.500.000	8.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 03 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	71.500.000,00	71.500.000,00				
5 03 01 2,05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin/Kartu Absensi	30 Unit	15.000.000	15.000.000				
5 03 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Lainnya	25 Stel	12.500.000	12.500.000				
5 03 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	10.000.000				
5 03 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	45 Orang	20.000.000	20.000.000				
5 03 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimtek	30 Orang	14.000.000	14.000.000				
5 03 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	765.940.000,00	780.600.000,00				
5 03 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen-komponen Listrik	12 Bulan	35.000.000	35.000.000				
5 03 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga	34 Unit	75.340.000	90.000.000				
5 03 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	50.000.000	50.000.000				
5 03 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	46.500.000	46.500.000				
5 03 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan surat kabar dan Majalah	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
5 03 01 2,06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/Bahan Pembersihan	12 Bulan	86.600.000	86.600.000				
5 03 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	462.500.000	462.500.000				
5 03 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Arsip Dinamis PD	12 Bulan	5.000.000	5.000.000				
5 03 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.067.190.000,00	1.067.190.000,00				
5 03 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000	2.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Tagihan Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	300.400.000	300.400.000			
5	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	52.000.000	52.000.000			
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	204 OB	712.790.000	712.790.000			
									Tersedianya Jasa Kebersihan (outsourcing)	1 Tahun					
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.500.000,00	362.500.000,00			
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dan Kepala Badan	1 unit	43.000.000	43.000.000			
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	13 unit	75.500.000	75.500.000			
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	150.000.000	150.000.000			
5	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207 unit	94.000.000	94.000.000			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN daerah	70%	1.502.042.500,00	1.653.890.500,00			
									TERwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	80%					
									Persentase capaian penilaian kinerja ASN	85%					
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawai ASN				Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20%	374.987.000,00	526.835.000,00			
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pengadaan ASN	1 Dokumen	36.949.000	40.000.000			
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CPNS dan CP3K lulus Seleksi Pengadaan ASN	400 Orang	4.000.000	234.069.000			
5	03	02	2,01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dokumen	4.000.000	10.728.000			
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian	100 Orang	25.916.000	25.916.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 03 02 2,01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	19.122.000	19.122.000				
5 03 02 2,01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	100.000.000	12.000.000				
5 03 02 2,01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	1 SAPK	30.000.000	30.000.000				
5 03 02 2,01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Data Kepegawaian	1 Aplikasi	155.000.000	155.000.000				
5 03 02 2,02	Mutasi dan Promosi ASN						Percentase pengisian JPT, administrator dan pengawas secara terbuka kompetitif	70%	381.432.500,00	381.432.500,00				
5 03 02 2,02 01	Pengelolaan Mutasi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Mutasi ASN	3 Kali	20.840.000	20.840.000				
5 03 02 2,02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Kenaikan Pangkat ASB	2 Periode	32.696.000	32.696.000				
5 03 02 2,02 03	Pengelolaan Promosi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Promosi ASN	4 Kali	327.896.500	327.896.500				
5 03 02 2,03	Pengembangan Kompetensi ASN						Percentase peningkatan kompetensi ASN	15%	442.570.000,00	442.570.000,00				
5 03 02 2,03 02	Pengelolaan Assessment Center					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Assessment Center/Talent Poll	50 orang	185.100.000	185.100.000				
5 03 02 2,03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya pendidikan lanjutan bagi ASN	36 orang	140.984.000	140.984.000				
5 03 02 2,03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN	2 kali	48.483.000	48.483.000				
5 03 02 2,03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32 OPD	24.659.000	24.659.000				
5 03 02 2,03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pengembangan Jabatan Fungsional melalui uiikom/inpasing	25 orang	21.600.000	21.600.000				
5 03 02 2,03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	21.744.000	21.744.000				
5 03 02 2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Terlaksananya penilaian kinerja ASN yang objektif dan terukur	75%	303.053.000,00	303.053.000,00				
5 03 02 2,04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 OPD	90.000.000	90.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 03 02 2,04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Karya Satya Lancana	50 Orang	10.500.000	10.500.000				
5 03 02 2,04 07	Pembinaan Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring	32 OPD	42.500.000	42.500.000				
5 03 02 2,04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	8 kasus	90.566.000	90.566.000				
5 03 02 2,04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10 orang	47.731.000	47.731.000				
5 03 02 2,04 10	Evaluasi Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Disiplin ASN	1 Dokumen	21.756.000	21.756.000				
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1.202.915.000,00	1.353.362.661,00				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH								1.202.915.000,00	1.353.362.661,00				
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	35%	1.202.915.000,00	1.353.362.661,00				
5 04 02 2,01	Pengembangan Kompetensi Teknis						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis formal	10%	229.479.000,00	229.479.000,00				
5 04 02 2,01 01	Penyusunan Kebijakan Teknik dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat ASN	4 Dokumen	51.715.000	51.715.000				
5 04 02 2,01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Biaya Diklat ASN	25 orang	166.950.000	166.950.000				
5 04 02 2,01 04	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring	32 OPD	10.814.000	10.814.000				
5 04 02 2,02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial dan fungsional	15%	973.436.000,00	1.123.883.661,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
5	04	02	2,02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta jabatan Fungsional			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional ASN	1 Dokumen	13.700.000	13.700.000			
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PIM IV, Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional	345 orang	919.599.000	1.070.046.661			
5	04	02	2,02	08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang dimonitoring	32 OPD	40.137.000	40.137.000			
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						710.310.630,00	779.341.693,00			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100%	710.310.630,00	779.341.693,00			
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Tersusunnya hasil kajian/penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	156.868.900,00	159.355.790,00			
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Kelitbang Kabupaten Bangka Barat	4 Dokumen	156.868.900	159.355.790			
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				Meningkatkan rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	83.614.930,00	73.324.623,00			
5	05	02	2,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya rekomendasi bidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	83.614.930	73.324.623			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
5 05 02 2,03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Meningkatkan rekomendasi dan strategi dalam perencanaan dan Pengambilan Kebijakan di Bid. Ekonomi dan Pembangunan	100%	363.404.900,00	373.345.390,00				
5 05 02 2,03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya rekomendasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	187.000.000	192.500.000				
5 05 02 2,03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya rekomendasi bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	176.404.900	180.845.390				
5 05 02 2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Meningkatnya kualitas dan memaksimalkan hasil kajian/penelitian serta menciptakan sistem informasi Inovasi Teknologi	100%	106.421.900,00	173.315.890,00				
5 05 02 2,04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terciptanya inovasi di semua sektor dari pelaku usaha, organisasi, dan pemerintahan	1 Dokumen	106.421.900	103.864.090				
5 05 02 2,04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalumya informasi dan pengetahuan mengenai sistem dan aplikasi inovasi kepada masyarakat			69.451.800				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Opini BPK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	WTP BB				8.417.000.000,00	8.277.126.000,00				
6 01	INSPEKTORAT DAERAH								8.417.000.000,00	8.277.126.000,00				
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.252.726.000,00	5.252.726.000,00				
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	15.000.000	15.000.000				
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	10.000.000	10.000.000			
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000	8.500.000			
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.712.500.000,00	3.712.500.000,00			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.700.000.000	3.700.000.000			
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	2.500.000	2.500.000			
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000			
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000			
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000			
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	8.500.000	8.500.000			
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	12.500.000,00	12.500.000,00			
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapan	25 stel	12.500.000	12.500.000			
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	672.506.000,00	672.506.000,00			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	6.789.000	6.789.000			
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	12 bulan	5.432.000	5.432.000			
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000	50.000.000			
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	60.485.000	60.485.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.800.000	4.800.000				
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	115.000.000	115.000.000				
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	425.000.000	425.000.000				
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	300.000,00	300.000,00				
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	300.000	300.000				
6 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	554.420.000,00	554.420.000,00				
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	67.200.000	67.200.000				
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	192 ob	480.220.000	480.220.000				
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	250.500.000,00	250.500.000,00				
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	47.490.000	47.490.000				
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (3 Unit mobil dan 4 Unit motor)	7 unit	190.510.000	190.510.000				
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	7.500.000	7.500.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5.000.000	5.000.000				
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	100%	2.705.224.000	2.565.350.000				
								Percentase OPD LAKIP BB	40%						
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Terlaksannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	2.565.350.000	2.565.350.000				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LAKIP OPD yang di evaluasi (30 objek evaluasi) Jumlah SPIP OPD yang di evaluasi (30) Evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender (1 laporan) evaluasi pelayanan publik (1 laporan)	62 Laporan	223.400.000	223.400.000				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencapaian program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (45 objek audit) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hibah atau bantuan (1 Laporan)	46 Laporan	367.260.000	367.260.000				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya reviu LAKIP Daerah, Jumlah dokumen perencanaan yang di reviu, Jumlah Pelaporan penyerapan anggaran, Jumlah pelaporan penyerapan pengadaan Barang Jasa (PBJ)	86 Laporan	578.150.000	578.150.000				
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan reviu keuangan Pemerintah Daerah (31 laporan) Terkелolanya SIM hasil pemeriksaan (12 bulan)	31 laporan	113.750.000	113.750.000				
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 Laporan	555.890.000	555.890.000				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	100 %	726.900.000	726.900.000				
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	139.874.000	139.874.000				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus tertangani	1 Kasus	1.874.000	1.874.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus tertangani	10 Kasus	138.000.000	138.000.000			
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Pemenuhan Infrastruktur IACM	2,5	459.050.000	459.050.000				
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi				Tersedianya pendampingan dan asistensi	100%	459.050.000	459.050.000				
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya gelar pengawasan (1 kegiatan), Tersedianya LAPOR SP4N, Jumlah Aksi Pencegahan Korupsi	7 Laporan	23.450.000	23.450.000			
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan LHKASN (1 laporan) Persentase jumlah wajib lapor (WL) LHKPBN yang melapor (100%) Jumlah OPD yang membuat buku register resiko (15 OPD) Jumlah OPD yang melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi	100 %	29.900.000	29.900.000			
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan Saber Pungli (12 bln) Persentase Tindak Lanjut atas laporan pengaduan melalui Whistle Blower System (WBS) (100%) Persentase laporan gratifikasi penyelenggaraan Negara dan ASN ke KPK (100%) Jumlah dokumen laporan RAD PPK (1 laporan)	100 %	375.800.000	375.800.000			
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tindak Lanjut atas laporan benturan kepentingan (100%) jumlah unit kerja Zona Integritas (2 laporan)	100 %	29.900.000	29.900.000			
7				UNSUR KEWILAYAHAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82			37.220.139.000,00	38.156.874.000,00			
					Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB							
7	01			KECAMATAN							15.679.223.000,00	15.663.790.000,00			
				KECAMATAN MUNTOK							15.679.223.000,00	15.663.790.000,00			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.907.863.000,00	7.576.813.000,00				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	15.000.000	15.000.000				
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	10.000.000	10.000.000				
7	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.312.500.000,00	4.312.500.000,00				
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.300.000.000	4.300.000.000				
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	2.500.000	2.500.000				
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/sementara n perangkat daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
7	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000,00	22.500.000,00				
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	363.563.000,00	898.713.000,00				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.260.000	18.260.000				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	7.102.000	28.852.000				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	200.145.000	310.145.000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetak da penggandaan	12 bulan	22.377.000	88.677.000				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	5.792.000	15.792.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan/material	12 bulan	37.487.000	209.987.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	80.400.000	222.000.000				
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.068.700.000,00	2.187.500.000,00				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersediannya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	88.800.000	193.200.000				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	39 unit	12.900.000	27.300.000				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	816 ob	1.965.000.000	1.965.000.000				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	90.600.000,00	105.600.000,00				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 unit	46.620.000	46.620.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	18.980.000	18.980.000				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	15.000.000	30.000.000				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	10.000.000	10.000.000				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	88.000.000	88.000.000				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	27.000.000	27.000.000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000	23.000.000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya data profil dan informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	61.000.000	61.000.000				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan pemutakhiran data pelayanan dan penatausahaan administrasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 kegiatan	11.000.000	11.000.000				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	50.000.000	50.000.000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	130.750.000	7.798.830.000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	23.750.000	23.750.000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM Terlaksananya lomba desa	1 kali 1 kali	23.750.000	23.750.000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	62.000.000	7.775.080.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan	5 kelurahan	50.000.000	50.000.000				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	0	3.360.000.000				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kalino, dan LPM	100%	0	4.353.080.000				
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan	5 kelurahan	12.000.000	12.000.000				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	45.000.000	45.000.000				
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan kemasyarakatan di Kecamatan	12 bulan	45.000.000	45.000.000				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	230.000.000	30.000.000				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	230.000.000,00	30.000.000,00				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan dan Satgas Covid Kecamatan	215.000.000	15.000.000				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	15.000.000	15.000.000				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	107.400.000,00	107.400.000,00				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	107.400.000,00	107.400.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000	75.000.000			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat Kecamatan	12 bulan	32.400.000	32.400.000			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	62.747.800,00	62.747.000,00				
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	62.747.800,00	62.747.000,00				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	12 bulan	18.800.000	18.800.000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	26.000.000	26.000.000			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Desa	26 dokumen	10.947.800	10.947.000			
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemilihan Kepala Desa serentak	2 desa	7.000.000	7.000.000			
				Sub Unit Organisasi : Kelurahan Tanjung							1.808.116.440,00	213.010.000,00			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	154.470.000,00	213.010.000,00				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.710.000,00	127.710.000,00				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.350.000	4.350.000			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	22.000.000	22.000.000			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.260.000	13.260.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000			
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	34.500.000	34.500.000			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	49.000.000	49.000.000			
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23.760.000,00	55.300.000,00			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	20.880.000	28.000.000			
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2.880.000	27.300.000			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.000.000,00	30.000.000,00			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.000.000	30.000.000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.653.646.440	0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.653.646.440	0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	656.040.000				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kalino dan I PM	100%	997.606.440				
					Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Baru						1.683.316.440,00	213.010.000,00			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	154.470.000,00	213.010.000,00			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.710.000,00	127.710.000,00			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.350.000	4.350.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	22.000.000	22.000.000				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.260.000	13.260.000				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	34.500.000	34.500.000				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	49.000.000	49.000.000				
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23.760.000,00	55.300.000,00				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	20.880.000	28.000.000				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2.880.000	27.300.000				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.000.000,00	30.000.000,00				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.000.000	30.000.000				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.528.846.440	0				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.528.846.440	0				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	656.040.000					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Keling dan LPM	100%	872.806.440					
					Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Daeng					1.738.876.440,00	213.010.000,00				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	154.470.000,00	213.010.000,00				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.710.000,00	127.710.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.350.000	4.350.000				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	22.000.000	22.000.000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.260.000	13.260.000				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	34.500.000	34.500.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	49.000.000	49.000.000				
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23.760.000,00	55.300.000,00				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	20.880.000	28.000.000				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2.880.000	27.300.000				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.000.000,00	30.000.000,00				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.000.000	30.000.000				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.584.406.440	0				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.584.406.440	0				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	656.040.000					
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Keling dan I.P.M	100%	928.366.440					
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Kerangan								1.474.996.440,00	213.010.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	154.470.000,00	213.010.000,00				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.710.000,00	127.710.000,00				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.350.000	4.350.000				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	22.000.000	22.000.000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.260.000	13.260.000				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	34.500.000	34.500.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	49.000.000	49.000.000				
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23.760.000,00	55.300.000,00				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	20.880.000	28.000.000				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2.880.000	27.300.000				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.000.000,00	30.000.000,00				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.000.000	30.000.000				
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.320.526.440	0				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.320.526.440	0				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	656.040.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kalino, dan I PM	100%	664.486.440					
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Menjelang													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.447.156.440,00	213.010.000,00				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	154.470.000,00	213.010.000,00				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.350.000	4.350.000				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	22.000.000	22.000.000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13.260.000	13.260.000				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	34.500.000	34.500.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	49.000.000	49.000.000				
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23.760.000,00	55.300.000,00				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	20.880.000	28.000.000				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2.880.000	27.300.000				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.000.000,00	30.000.000,00				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.000.000	30.000.000				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.292.686.440	0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.292.686.440	0				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	656.040.000					
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kalino, dan LPM	100%	636.646.440					
7 01	KECAMATAN								3.909.480.000,00	4.137.092.000,00				
	KECAMATAN SIMPANGTERITIP								3.909.480.000,00	4.137.092.000,00				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.691.220.000,00	3.808.092.000,00				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	48.000.000,00				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	16.000.000				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	5.000.000				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	5.000.000				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	12.000.000				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	2.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.906.000.000,00	2.915.000.000,00				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.900.000.000	2.900.000.000				
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000	3.000.000				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	6.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	6.000.000			
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	10.000.000			
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	2.000.000	10.000.000			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	14.500.000,00	24.000.000,00			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Dinas dan Pakaian Khusus Hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	13.000.000			
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.000.000	11.000.000			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	179.320.000,00	222.992.000,00			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	5.000.000	5.500.000			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000	4.000.000			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	30.000.000	33.000.000			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	16.500.000			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	4.320.000	4.992.000			
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	30.000.000	33.000.000			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	90.000.000	120.000.000			
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 bulan	2.000.000	6.000.000			
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	479.600.000,00	483.100.000,00			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.200.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	25.200.000	28.000.000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	180 ob	452.400.000	452.900.000			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	99.800.000,00	105.000.000,00			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.200.000	32.500.000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	42.600.000	43.500.000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	15.000.000	17.000.000			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	5.000.000	6.000.000			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	5.000.000	6.000.000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	27.860.000	38.000.000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	23.200.000	30.000.000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	20.000.000	25.000.000			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	3.200.000	5.000.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	4.660.000	8.000.000				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	4.660.000	8.000.000				
7	01	03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	40.000.000	80.000.000				
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	15.000.000	40.000.000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan	1 kali	15.000.000	40.000.000				
					Terlaksananya Lomba Desa	1 kali									
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	25.000.000	40.000.000				
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kecamatan	12 bulan	25.000.000	40.000.000				
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.000.000	30.000.000				
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	15.000.000,00	30.000.000,00				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan	10.000.000	15.000.000				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	5.000.000	15.000.000				
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	80.000.000,00	103.000.000,00				
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	80.000.000,00	103.000.000,00				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	60.000.000	75.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 bulan	20.000.000	28.000.000			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	55.400.000,00	78.000.000,00				
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	55.400.000,00	78.000.000,00				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 bulan	20.000.000	40.000.000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	20.000.000	28.000.000			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	7.400.000	10.000.000			
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	12 desa	8.000.000	0			
7	01			KECAMATAN							3.723.815.000,00	3.986.275.000,00			
7	01			KECAMATAN JEBUS							3.723.815.000,00	3.986.275.000,00			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.348.930.000,00	3.486.275.000,00				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00	41.500.000,00				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	15.000.000			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	4.000.000			
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	4.000.000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	10.000.000			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	2.000.000	8.500.000			
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.406.000.000,00	2.412.500.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.400.000.000	2.400.000.000				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JJumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000	2.500.000				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	5.000.000				
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	2.000.000	5.000.000				
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	8.500.000				
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	2.000.000	8.500.000				
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
7	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	12 bulan	2.500.000	2.500.000				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	100 Persen	14.500.000,00	22.500.000,00				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaiian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000	10.000.000				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	218.000.000,00	336.500.000,00				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.500.000	5.500.000				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 jenis/bulan	15.000.000	15.000.000				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	30.000.000	30.000.000				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000	15.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	35.000.000	35.000.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	110.000.000	200.000.000				
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000	5.000.000				
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	510.520.000,00	414.865.000,00				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	300.000	2.000.000				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	29.100.000	29.100.000				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	192 ob	481.120.000	383.765.000				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	185.410.000,00	249.910.000,00				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.200.000	32.200.000				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	134.130.000	134.130.000				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	7.500.000	72.000.000				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit	11.580.000	11.580.000				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	198.295.800	218.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	14.000.000	26.000.000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	10.000.000	22.000.000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya data profil dan informasi tentang kecamatan	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	179.295.800	180.000.000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran honorarium PHL Tersedianya peralatan kebersihan pasar	72 ob 12 bulan	179.295.800	180.000.000				
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	5.000.000	12.000.000				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	5.000.000	12.000.000				
7	01	03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	56.389.200	80.000.000				
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	21.389.200	35.000.000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa	1 kali 1 kali	21.389.200	35.000.000				
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	35.000.000	45.000.000				
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan	12 bulan	35.000.000	45.000.000				
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000	30.000.000				
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000,00	30.000.000,00				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan	5.000.000	15.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	5.000.000	15.000.000				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	80.000.000,00	115.000.000,00				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	80.000.000,00	115.000.000,00				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000	80.000.000				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 bulan	5.000.000	35.000.000				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Percentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	30.200.000,00	57.000.000,00				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	30.200.000,00	57.000.000,00				
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 bulan	15.200.000	35.000.000				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	5.000.000	12.000.000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	5.000.000	5.000.000				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	11 desa	5.000.000	5.000.000				
7 01	KECAMATAN								3.350.864.000,00	3.716.577.000,00				
	KECAMATAN PARITIGA								3.350.864.000,00	3.716.577.000,00				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.802.845.000,00	2.960.873.000,00				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.440.000,00	45.650.000,00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	2.151.000	16.500.000				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	2.016.000	4.400.000				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	2.016.000	4.400.000				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	2.151.000	11.000.000				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun	3 Dokumen	2.106.000	9.350.000				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.906.138.000,00	1.913.750.000,00				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.900.000.000	1.900.000.000				
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.016.000	2.750.000				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.061.000	5.500.000				
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.061.000	5.500.000				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.106.000	9.350.000				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 Dokumen	2.106.000	9.350.000				
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.016.000	2.750.000				
7 01 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retrebusi Daerah	12 bulan	2.016.000	2.750.000				
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.151.000,00	24.750.000,00				
7 01 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.151.000	11.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	Administrazione Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrazione Umum Perangkat Daerah	100 Persen	203.598.000,00	221.437.000,00				
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 Bulan	4.500.000	5.000.000				
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	2.000.000	2.500.000				
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 Bulan	30.000.000	33.000.000				
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.000.000	16.500.000				
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan	4.992.000	4.992.000				
7	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	30.000.000	33.000.000				
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	115.000.000	120.945.000				
7	01	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	2.106.000	5.500.000				
7	01	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	553.360.000,00	610.566.000,00				
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	300.000	2.200.000				
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 Bulan	35.500.000	39.050.000				
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	216 OB	517.560.000	569.316.000				
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	123.036.000,00	135.370.000,00				
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	31.700.000	34.870.000				
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	66.336.000	73.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	15.000.000	16.500.000			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5.000.000	5.000.000			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	5.000.000	6.000.000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	351.170.000	427.204.000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	13.825.000	27.060.000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya musrenbang kecamatan	1 kali	11.825.000	23.210.000			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000	3.850.000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	334.700.000	396.044.000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penbayaran Honorarium PHL dan Tersedianya Peralatan Kebersihan Pasar	144 OB	334.700.000	396.044.000			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	2.645.000	4.100.000			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Administrasi Terpadu Kecamatan	12 Bulan	2.645.000	4.100.000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	55.414.000	80.000.000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	20.414.000	30.000.000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan dan Terlaksananya Lomba Desa	1 Kali	20.414.000	30.000.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	35.000.000	50.000.000				
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kecamatan	12 Bulan	35.000.000	50.000.000				
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	22.108.000	30.000.000				
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	22.108.000,00	30.000.000,00				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	11.054.000	15.000.000				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terciptanya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	11.054.000	15.000.000				
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	79.375.000,00	110.000.000,00				
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	79.375.000,00	110.000.000,00				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	59.375.000	75.000.000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 Bulan	20.000.000	35.000.000				
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	39.952.000,00	108.500.000,00				
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	39.952.000,00	108.500.000,00				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	16.895.000	30.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	12 Bulan	9.900.000	15.500.000				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya LKPJ dan LPPD dengan baik dan benar	20 Dokumen	3.817.000	7.500.000				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	9 Desa	9.340.000	55.000.000				
7 01	KECAMATAN								6.869.460.000,00	6.467.840.000,00				
	KECAMATAN KELAPA								6.869.460.000,00	6.467.840.000,00				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.626.680.000,00	4.836.680.000,00				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41.500.000,00	41.500.000,00				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	15.000.000	15.000.000				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	4.000.000	4.000.000				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi anggaran yang tersusun	4 dokumen	10.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.612.500.000,00	3.612.500.000,00				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.600.000.000	3.600.000.000				
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	2.500.000	2.500.000				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/sementara n perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 dokumen	5.000.000	5.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000	8.500.000				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	8.500.000	8.500.000				
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.500.000	2.500.000				
7 01 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 bulan	2.500.000	2.500.000				
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22.500.000,00	22.500.000,00				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	12.500.000				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terkelolanya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	212.700.000,00	422.700.000,00				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersediannya komponen instalasi/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	30.000.000	240.000.000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000	15.000.000				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	2.700.000	2.700.000				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bahan/material	12 bulan	30.000.000	30.000.000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	110.000.000	110.000.000				
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	5.000.000	5.000.000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
7	01	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	656.480.000,00	656.480.000,00				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	62.400.000	62.400.000				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	20.000.000	20.000.000				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	228 ob	572.080.000	572.080.000				
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	70.000.000,00	70.000.000,00					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 unit	25.000.000	25.000.000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 unit	35.000.000	35.000.000				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksannya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	10.000.000	10.000.000				
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	394.620.000	38.000.000					
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	28.000.000	28.000.000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksanya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000	23.000.000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersusunnya data profil dan informasi tentang kecamatan	1 dokumen	5.000.000	5.000.000				
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	356.620.000	356.620.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Honorarium PHL Tersedianya Peralatan Kebersihan Persampahan	132 ob 12 bulan	356.620.000	356.620.000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	10.000.000	10.000.000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersediannya jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	10.000.000	10.000.000				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	70.000.000	1.355.000.000				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	25.000.000	25.000.000				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pelaksanaan BBGRM dan terlaksananya lomba desa	2 kali	25.000.000	25.000.000				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	0	1.330.000.000				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya musyawarah kelurahan kelapa	1 kelurahan	0	5.000.000				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	0	720.000.000				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya ketertiban lembaga dan masyarakat secara langsung dan Peningkatan kualitas RT/RW dan LPM	100% dan Satgas Covid Kelurahan	0	600.000.000				
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya lomba desa	1 kelurahan	0	5.000.000				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	45.000.000	45.000.000				
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlasannya penyelenggaraan kelembagaan kemasyarakatan di kecamatan (PKK)	12 bulan	45.000.000	45.000.000				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	230.000.000	30.000.000				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	230.000.000,00	30.000.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal terkait	12 bulan dan Satgas Covid Kecamatan	215.000.000	15.000.000				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 bulan	15.000.000	15.000.000				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	101.360.000,00	101.360.000,00				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	101.360.000,00	101.360.000,00				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000	75.000.000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan	12 bulan	26.360.000	26.360.000				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Percentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	106.800.000,00	106.800.000,00				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	106.800.000,00	106.800.000,00				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	12 bulan	11.900.000	11.900.000				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	45.000.000	45.000.000				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	16.900.000	16.900.000				
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12 desa	33.000.000	33.000.000				
					Sub Unit Organisasi : Kelurahan Kelapa					1.340.000.000,00	27.000.000,00				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	210.000.000,00	22.000.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	Administrazione Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrazione Umum Perangkat Daerah	100 Persen	210.000.000,00	22.000.000,00				
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	210.000.000	22.000.000				
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	1.130.000.000	5.000.000				
7	01	03	2.02	Gegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.130.000.000	5.000.000				
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya musyawarah kelurahan kelapa	1 kelurahan	5.000.000	5.000.000				
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	400.000.000					
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kalino, dan LPM	100%	720.000.000					
7	01	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya lomba desa	1 kelurahan	5.000.000	5.000.000				
				KECAMATAN						3.687.297.000,00	4.185.300.000,00				
				KECAMATAN TEMPILANG						3.687.297.000,00	4.185.300.000,00				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.409.357.000,00	3.839.030.000,00				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.193.000,00	48.000.000,00				
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	3.151.000	16.000.000				
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.016.000	5.000.000				
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.016.000	5.000.000				
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	2.904.000	12.000.000				
7	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	3 dokumen	2.106.000	10.000.000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
										Program/Kegiatan/Subkegiatan							
										Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.606.138.000,00	2.613.000.000,00				
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000	2.600.000.000				
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.016.000	3.000.000				
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 dokumen	2.061.000	5.000.000				
7	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 dokumen	2.061.000	5.000.000				
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.106.000	8.500.000				
7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2.106.000	8.500.000				
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	14.651.000,00	58.300.000,00				
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu la beserta atribut kelengkapannya	25 stel	12.500.000	48.300.000				
7	01	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.151.000	10.000.000				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	210.889.000,00	408.150.000,00				
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000				
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.733.000	6.000.000				
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	31.050.000	41.050.000				
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	15.000.000	20.000.000				
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	5.000.000	6.000.000				
7	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	32.000.000	40.000.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	115.000.000	220.000.000			
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.106.000	5.000.000			
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	455.100.000,00	455.100.000,00			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bulan	2.000.000	2.000.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	33.600.000	33.600.000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	168 Orang/bulan	419.500.000	419.500.000			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	108.280.000,00	140.980.000,00			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.700.000	32.700.000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas	7 unit	50.580.000	83.280.000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	15.000.000	15.000.000			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit	5.000.000	5.000.000			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4 unit	5.000.000	5.000.000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	32.700.000	34.200.000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	26.700.000	26.700.000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	23.000.000	23.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	3.700.000	3.700.000				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	6.000.000	7.500.000				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	6.000.000	7.500.000				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100%	59.520.000	65.200.000				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	25.200.000	25.200.000				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Tempilang	1 kali	25.200.000	25.200.000				
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	34.320.000	40.000.000				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan kemasyarakatan di kecamatan	12 bulan	34.320.000	40.000.000				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.550.000	30.000.000				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.550.000,00	30.000.000,00				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	11.300.000	15.000.000				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	9.250.000	15.000.000				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	95.500.000,00	136.000.000,00				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	95.500.000,00	136.000.000,00				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kegiatan	75.000.000	100.000.000			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya koordinasi forum pimpinan tingkat Kecamatan	12 bulan	20.500.000	36.000.000			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu	100%	69.670.000,00	80.870.000,00				
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	69.670.000,00	80.870.000,00				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen RAPERDES yang baik dan benar	12 bulan	20.600.000	27.770.000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa	12 bulan	16.560.000	36.000.000			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	18 dokumen	17.100.000	17.100.000			
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	9 desa	15.410.000	0			
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB			3.964.270.000,00	4.773.507.000,00			
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3.964.270.000,00	4.773.507.000,00			
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100 Persen	1.976.350.000,00	2.283.835.000,00			
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100 Persen	10.000.000,00	11.000.000,00			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tersusun	4 Dokumen	2.000.000	2.200.000			
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.206.000.000,00	1.206.600.000,00				
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.200.000.000	1.200.000.000				
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	23.000.000,00	255.200.000,00				
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	21.000.000	23.100.000				
8 01 01 2.05 03	Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	258.000.000,00	283.500.000,00				
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	2.000.000	2.200.000				
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis/ Bulan	1.300.000	1.430.000				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Jenis/ Bulan	15.000.000	16.500.000			
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12.000.000	13.200.000			
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	2.700.000	2.970.000			
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	23.000.000	25.000.000			
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	200.000.000	220.000.000			
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000	2.200.000			
8	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	402.000.000,00	442.200.000,00			
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000	2.200.000			
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	35.000.000	38.500.000			
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	5.000.000	5.500.000			
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor + JKJ/JKN	144 OB	360.000.000	396.000.000			
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	75.350.000,00	83.135.000,00			
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.250.000	42.075.000			
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit Mobil 7 Unit Motor	25.600.000	28.160.000			
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	7.500.000	8.500.000			

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
								Program/Kegiatan/Subkegiatan							
								Tolok Ukur	Target						
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	4.000.000	4.400.000			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara	0 kasus	649.949.592	738.500.000			
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Terlaksananya penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya penyantunan Keluarga Pejuang Terfasilitasinya kegiatan FPK Kab bangka Barat	6 Kegiatan 26 Orang 1 Tahun	649.949.592	738.500.000			
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab. Bangka Barat	Terlaksananya penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya penyantunan Keluarga Pejuang Terfasilitasinya kegiatan FPK Kab bangka Barat	6 Kegiatan 26 Orang 1 Tahun	645.949.592				
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kab. Bangka Barat		4.000.000	38.500.000			
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Terlaksananya Monitoring dan Penguatan untuk seluruh OPD Gerakan Revolusi Mental	2 Dokumen					
					PERSENTASE KETIDAKHADIRAN MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILUKADA				Percentase ketidakhadiran masyarakat dalam pemilu/pemilukada	15%	821.370.408	915.772.000			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	100%	821.370.408	915.772.000			
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyaluran Hibah kepada Partai Politik	10 Partai Politik	754.370.408	880.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Berkas Parpol yang terverifikasi	10 Partai Politik	34.000.000	17.072.000				
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya laporan Perkembangan Politik daerah	4 Laporan	33.000.000	18.700.000				
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						Indeks kinerja ormas	180 skor	73.300.000	71.500.000				
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	73.300.000	71.500.000				
8 01 04 2.,01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Ormas Tingkat Kab. Bangka Barat	100 Persen	41.000.000	55.000.000				
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Verifikasi Pendaftaran, Pendataan dan Pemantauan Ormas/LSM Kab. Bangka Barat	100 Persen	32.300.000	16.500.000				
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						Jumlah angka kriminalitas menurun	150 kasus	150.000.000	332.000.000				
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	150.000.000	332.000.000				
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyaluran hibah kepada FKUB	1 Tahun	100.000.000	166.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran			
							Program/Kegiatan/Subkegiatan							
							Tolok Ukur	Target						
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Tim P4GN Kabupaten Bangka Barat	1 kegiatan	50.000.000	166.000.000				
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						Jumlah konflik sosial menurun	10 kasus	293.300.000	431.900.000				
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	293.300.000	431.900.000				
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di daerah Terfasilitasinya kegiatan FKDM Kab. Bangka Barat	2 Dokumen 6 Kecamatan	46.900.000	46.900.000				
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdapatnya laporan penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	65.600.000	220.000.000				
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pendataan keberadaan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	2 Dokumen	48.800.000	165.000.000				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	12 Kali	132.000.000					
							TOTAL ANGGARAN		886.156.635.853,52	945.106.806.993,00				



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dengan menetapkan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai IKK dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa fokus perbidang urusan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan IKK dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang disajikan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021. Penetapan Target IKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Pertumbuhan PDRB	Persentase	8,90 – 10,32	Pemerintah Daerah
1.2	PDRB per kapita ADHB	Juta rupiah	77,57 – 80,01	Pemerintah Daerah
1.3	Penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase	96,88 - 97,15	Pemerintah Daerah
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27 - 69,62	Pemerintah Daerah
1.5	Angka melek huruf	Persentase	100	Dindikpora
1.6	Angka rata-rata lama sekolah	Persentase	7,30	Dindikpora
1.7	Angka usia harapan hidup	Persentase	70,21	Dinkes
1.8	Balita gizi buruk	Persentase	0,09	Dinkes
1.9	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	Dinkes
1.10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase	67,50 - 67,55	DPMNakertrans
1.11	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,57 – 3,64	DPMNakertrans
1.12	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	96,35 – 96,42	DPMNakertrans
1.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	SETDA
1.14	PAD terhadap pendapatan	Persentase	9	BPPRD
1.15	Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
1.16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	DISTANGAN
1.17	Penguatan cadangan pangan	Persentase	15	DISTANGAN
1.22	Penanganan daerah rawan pangan	Persentase	100	DISTANGAN
1.30	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13,9	DKUP



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
1.31	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase	45,92	DKUP
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (ADHB)	Rupiah	37.820.000	Pemerintah Daerah
2.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persentase	49,41	Pemerintah Daerah
2.3	Produktivitas total daerah	Produktivitas	148,89	Pemerintah Daerah
2.4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	19,74	Pemerintah Daerah
2.5	Angka kriminalitas yang tertangani	Persentase	10,30	Pemerintah Daerah
2.6	Rasio Ketergantungan	Rasio	51,75	Pemerintah Daerah
3.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan			
1.1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase	89,9	DINDIKPORA
1.2	Angka Putus Sekolah			
1.2.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0,3	DINDIKPORA
1.2.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase	1,5	DINDIKPORA
1.3	Angka Kelulusan			
1.3.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase	100	DINDIKPORA
1.3.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase	100	DINDIKPORA
1.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	93,95	DINDIKPORA
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	80,75	DINDIKPORA
2.	Kesehatan			
2.1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase	100	DINKES
2.2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase	100	DINKES
2.3	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>	Persentase	100	DINKES
2.4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase	100	DINKES
2.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persentase	100	DINKES
2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase	100	DINKES



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase	100	DINKES
2.8	Cakupan kunjungan bayi	Persentase	100	DINKES
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persentase	57	DPUPR
3.3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	59,98	DPUPR
3.4	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persentase	2,9	DLH
3.5	Rasio rumah ber- IMB	Rasio	36,24	DPMNakertrans
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Rumah tinggal bersanitasi	Persentase	95	DISPERKIMHUB
4.2	Rumah tangga pengguna air bersih	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.3	Lingkungan pemukiman kumuh	Persentase	0,025	DISPERKIMHUB
4.4	Rumah layak huni	Persentase	93,00	DISPERKIMHUB
5.	Ketentraman, KetertibanUmum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Rasio (per 10.000 penduduk)	1,6	SATPOLPP
6.	Sosial			
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	1	DINSOSPEMDES
6.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase	40	DINSOSPEMDES
3.2	 Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1.	Tenaga Kerja			
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase	50	DPMNakertrans
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase	4,8	DPPKBPPA
2.2	Penurunan kasus perempuan dan anak	Persentase	86	DPPKBPPA
3	Pangan			
3.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	Ada	DISTANGAN
4	Pertanahan			
4.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase	100	DPUPR
4.2	Penyelesaian izin lokasi	Persentase	100	DPUPR
5.	Lingkungan Hidup			
5.1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	91	DLH
5.2	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	Rasio	50	DLH
5.3	Penanganan Sampah	Persentase	13,55	DLH
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
6.1	Pengurusan KTP (terekam e-KTP/penduduk wajib ber-KTP)	Persentase	99	DISDUKCAPIL
6.2	Kepemilikan KTP	Persentase	99	DISDUKCAPIL
6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	sudah	DISDUKCAPIL
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	PKK aktif	Persentase	100	DPPKBPPA
7.2	Posyandu aktif	Persentase	100	DPPKBPPA
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	2,08	DPPKBPPA
8.2	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase	1,98	DPPKBPPA
8.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	9,91	DPPKBPPA
8.4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	82	DPPKBPPA
8.5	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase	70	DPPKBPPA
8.6	Persentase petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persentase	100	DPPKBPPA
8.7	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	70	DPPKBPPA
8.8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persentase	65	DPPKBPPA
8.9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persentase	66	DPPKBPPA
8.10	Angka kelahiran total per WUS 15-49 tahun	TFR/1.000	2,52	DPPKBPPA
9.	Perhubungan			
9.1	Layanan Angkutan darat	Persentase	57,14	DISPERKIMHUB
10.	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	ada	DISKOMINFO
10.2	Pameran/expo	Jumlah	1	DPMNakertrans
11.	Koperasi dan UKM			
11.1	Koperasi aktif	Persentase	92,67	DKUP
11.2	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi, standarisasi dan sertifikasi produk	Persentase	1,9	DKUP
12.	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	Rupiah	100 miliar	DPMNakertrans
13.	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Gelanggang / balai remaja (selain milik	Per 1.000	0,04	DINDIKPORA



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
	swasta)	penduduk		
13.2	Lapangan olahraga	Per 1.000 penduduk	0,97	DINDIKPORA
14.	Statistik			
14.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/Tidak	ada	DISKOMINFO
14.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	ada	DISKOMINFO
15.	Persandian			
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase	100	DISKOMINFO
16.	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	1	DISPARBUD
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	24	DISPARBUD
16.3	Group Kesenian	Jumlah	5	DISPARBUD
16.4	Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah	1	DISPARBUD
16.5	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	6	DISPARBUD
17.	Perpustakaan			
17.1	Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	10.000	DPK
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persentase	41	DPK
18.	Kearsipan			
18.1	Pengelolaan arsip secara baku	Persentase	78,30	DPK
18.2	Peningkatan SDM pengelola karsipan	Kegiatan	1	DPK
3.3	Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata			
1.1	Kunjungan wisata	Pengunjung	104.000	DISPARBUD
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	2,43	DISPARBUD
2.	Pertanian			
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase	10,11 – 10,51	DISTANGAN
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (tanaman pangan)	Persentase	0,39 – 0,42	DISTANGAN
2.3	Produksi sektor pertanian	Per komoditas/ton	Padi = 11.000 ton	DISTANGAN
2.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase	7,63 – 7,93	DISTANGAN
2.5	Produksi sektor perkebunan	Per komoditas/ton	Lada = 6.340 ton Karet = 24.250 ton	DISTANGAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
			Sawit = 282.373 ton	
3.	Perdagangan			
3.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13,90 – 14,01	DKUP
3.2	Eksport Bersih Perdagangan (ADHB)	Rupiah	3.500.000.000.000	DKUP
4.	Perindustrian			
4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	44,19 – 45,93	DKUP
4.3	Pertumbuhan Industri	Persentase	7,5	DKUP
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1	Produksi perikanan	Per komoditas/ton	Tawar = 1.564 ton Laut = 319 ton Tangkap = 24.872 ton	DKP
5.2	Konsumsi ikan	per orang/Kg/Tahun	47 Kg/tahun	DKP
Urusan Penunjang				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	BP4D
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	BP4D
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada	BP4D
1.4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	100	BP4D
2.	Keuangan			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	BPKAD
2.2	SiLPA	Persentase	8	BPKAD
2.3	Persentase belanja pendidikan	Persentase	20	BPKAD
2.4	Persentase belanja kesehatan	Persentase	10	BPKAD
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu/tidak	Tepat Waktu	BPKAD
3.	Pengawasan			
3.1	Tindaklanjut temuan	Persentase	100	INSPEKTORAT
4.	Sekretariat Dewan			
4.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak	Ada	SETWAN
4.2	Tersusun dan terintegrasi Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan	Ada/tidak	Ada	SETWAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
	Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan			
4.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	SETWAN

Terkait pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui IKU, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran stategis Daerah. Target IKU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	
	Satuan	Nilai
Pertumbuhan Ekonomi	%	8,90 – 12,33
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,77 - 70,33
Angka Kemiskinan	%	2,85 - 3,12
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,57 – 3,64
PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	77,57 – 80,01
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,01
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,60
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	80
Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	miliar rupiah	100
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	miliar rupiah	1.277 - 1.317
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29



BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bangka Barat yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan masa transisi menuju Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan Tahap IV RPJPD yang disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD disusun menggunakan nomenklatur perencanaan pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan;
4. RKPD yang telah ditetapkan akan menjadi langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah;



7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bangka Barat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berikutnya serta penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berjalan.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, diharapkan perencanaan pembangunan daerah akan lebih sinergis serta lebih fokus dalam pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara regional dan nasional.

